

**Asep Nurjaman**

# **SISTEM KEPARTAIAN INDONESIA**



**Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang**

# SISTEM KEPARTAIAN INDONESIA

---

Hak Cipta © Asep Nurjaman, 2018

Hak Terbit pada UMMPress

---

Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang

Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 65144

Telepon: 0877 0166 6388, (0341) 464318 Psw. 140

Fax. (0341) 460435

E-mail: [ummpress@gmail.com](mailto:ummpress@gmail.com)

<http://ummpress.umm.ac.id>

Anggota APPTI (Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia)

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia)

---

Cetakan Pertama, Oktober 2018

---

ISBN : 978-979-796-355-2

xiv; 246 hlm.; 16 x 23 cm

---

Setting & Layout : Septian R.

Design Cover : A.H. Riyantono

---

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit. Pengutipan harap menyebutkan sumbernya.

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014  
tentang Hak Cipta**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

(Halaman ini sengaja dikosongkan)



## PRAKATA

Buku ini ditulis dalam rangka memenuhi kebutuhan literatur untuk mata kuliah “partai dan pemilu di Indonesia” khususnya terkait dengan praktek pemilu di tingkat lokal. Buku ini diberi judul “SISTEM KEPARTAIAN INDONESIA”. Pada saat ini literatur yang terkait dengan teori dan praktek pemilu masih sangat sedikit. Umum buku-buku yang di tulis lebih banyak mengula praktek pemilu di tingkat nasional, dan data yang disuguhkan lebih banyak merupakan data agregat yang berupa data sekunder, bukan merupakan hasil penelitian lapangan. Buku ini merupakan kajian hasil penelitian lapangan penulis yang meliputi tiga kali pemilu yaitu pemilu 1999, 2004, dan 2009 di tiga Daerah, Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.

Khalayak pengguna buku ini diutamakan untuk mahasiswa yang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya program studi Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan baik S1 maupun S2. Namun demikian karena buku ini sarat dengan data dan analisa yang berguna terkait dengan perilaku politik, maka buku ini bisa juga dimanfaatkan oleh kalangan peneliti, politisi, maupun masyarakat umum yang *concern* dengan kehidupan demokrasi di Indonesia.

Struktur buku ini terdiri dari 6 (enam) bab. Bab *pertama* membahas teori Demokrasi, partai dan sistem kepartaian, dan perilaku pemilih. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman teoritik bagi pembaca agar dapat lebih jelas memahami substansi pembahasana. Bab *kedua*, membahas tentang sistem kepartaian dan pemilu. Dalam bab ini dijelaskan tetang perkembangan partai politik di Indonesia, dari

mulai awal kemerdekaan sampai masa reformasi. Di samping itu juga dijelaskan tentang sistem kepartaian yang terbentuk di tingkat lokal, khususnya di Malang Raya. Pada bab *ketiga*, menjelaskan tentang pola politik yang selama ini berkembang di Indonesia, khususnya di Jawa Timur yang sangat kental dengan politik aliran. Pada saat ini politik aliran tengah mengalami kekaburan dalam menjalankan perilaku pemilih. Banyak partai-partai yang punya ikatan baik historis maupun sosiologis dengan kelompok masyarakat Santri maupun Abangan mengalami penurunan suara pada saat pemilu.

Bagian selanjut, bab *keempat*, membahas tentang pola hubungan partai dan pemilih. Pada bab ini dijelaskan mengenai proses terjadinya ikatan antara pemilih dan partai, serta kenapa pemilih memutuskan ikatannya dengan partai. Guna melengkapi penjelasan, bab ini juga disuguhkan beberapa kasus terkait dengan alasan kenapa pemilih tidak lagi memilih partai tertentu. Pada bab *kelima*, membahas tentang pragmatisme politik sebagai respon terhadap kondisi *electoral*. Pada bab ini penulis lebih banyak memfokuskan pada upaya partai politik dalam rangka meraih kembali suara mereka yang hilang. Sangat jamak bahwa partai politik berusaha meraih suara dengan jalan instan yaitu dengan membuat program karikatif jangka pendek dan tidak dengan membangun kaderisasi dan penguatan ideologi. Pragmatisme menjadi kunci dalam strategi partai guna meraih simpati pemilih pada saat pemilu. Dampak dari pragmatisme politik ini, pemilu menjadi semakin mahal dan partai terdorong untuk mencari dana sebanyak banyaknya dari negara (*cartelisasi*).

Padabagian, bab *keenam*, penulis merekapitulasi seluruh pembahasan dalam bab sebelumnya. Pada bab ini beberapa konklusi dikemukakan, seperti, terjadinya perubahan partai politik dominan, sistem kepartaian semakin terpolarisasi, figur menjadi simbolisasi ideologi partai, berkembangnya partai *catchall*, dan pragmatisme politik.

Perjalanan dalam menyelesaikan buku ajar ini cukup menguras energi, baik fisik maupun non fisik. Sejak mulai dari penelitian sampai finalisasi, banyak tantangan dan rintangan yang tak mudah untuk diatasi. Namun karena keyakinan dan keinginan besar untuk menyelesaikan buku ajar ini, membuat semua tantangan dan rintangan tidak menjadikan kami putus asa. Oleh karena itu, kami patut bersyukur kepada Allah Yang Maha Kuasa, karena atas ijin-Nya-lah buku ajar ini dapat diselesaikan.

Kami sangat menyadari, bahwa dalam penyelesaian buku ajar ini tidak lepas dari adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah kami berterima kasih kepada orang-orang yang telah banyak memberikan kontribusi yang tidak ternilai dalam menyelesaikan disertasi ini. Kepada rekan-rekan sejawat yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan rekan-rekan di Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang, kami mengucapkan terima kasih atas toleransinya yang besar kepada kami.

Ucapan terima kasih juga harus kami sampaikan kepada semua fungsionaris partai dan Anggota Dewan di Malang Raya yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, yang telah sudi untuk diwawancarai dan memberi data serta informasi yang tak ternilai harganya. Kepada semua yang telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian disertasi ini, dengan segala kerendahan hati, sekali lagi kami mengucapkan terimakasih, semoga Allah membalas segala amal kebaikan yang telah diberikan. Amiin...

**Penulis**

(Halaman ini sengaja dikosongkan)





# DAFTAR ISI

<b>Prakata</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>ix</b>
<b>Daftar Tabel</b>	<b>xi</b>
<b>Daftar Gambar</b>	<b>xiii</b>
<b>Tujuan Intruksional Bab 1</b>	<b>1</b>
<b>Bab 1 Demokrasi, Partai, dan Pemilih: Sebuah Kajian Teoritis</b>	<b>3</b>
A. Demokrasi dan Representasi	3
B. Partai dan Sistem Kepartaian	6
C. Partai Politik dan Perubahan <i>Electoral</i>	13
D. Perilaku Pemilih	21
<b>Tujuan Intruksional Bab 2</b>	<b>45</b>
<b>Bab 2 Sistem Kepartaian dan Pemilu</b>	<b>47</b>
A. Sistem Kepartaian	47
B. Perubahan Sistem Pemilu	66
C. Ringkasan	72
<b>Tujuan Intruksional Bab 3</b>	<b>75</b>
<b>Bab 3 Politik Aliran dan Pemilu Lokal</b>	<b>77</b>
A. <i>Swing Votes</i> : Sebuah Gejala <i>Electoral Volatility</i>	79

B. <i>Electoral Volatility</i> dan Konsistensi Politik Aliran	84
C. Dinamika Politik Aliran dalam Pemilu Pasca Reformasi	88
D. Ringkasan	105
<b>Tujuan Intruksional Bab 4</b>	<b>107</b>
<b>Bab 4 Pola Hubungan Partai dan Pemilih</b>	<b>109</b>
A. Proses Identifikasi Politik Pemilih	110
B. Dukungan Kelompok Keagamaan	130
C. Menurunnya Image Partai	138
D. Ringkasan	156
<b>Tujuan Intruksional Bab 5</b>	<b>159</b>
<b>Bab 5 Pragmatisme Politik: Respon Partai Terhadap Kondisi <i>Electoral</i></b>	<b>161</b>
A. Kebijakan Organisasi Partai	162
B. Pendekatan pada Pemilih	170
C. Strategi Berhadapan dengan Partai Lain	180
D. Ringkasan	199
<b>Tujuan Intruksional Bab 6</b>	<b>203</b>
<b>Bab 6 Politik Kepartaian</b>	<b>205</b>
A. Pemilu 2009: Perubahan Partai Politik Dominan	206
B. Sistem Kepartaian Semakin Terpolarisasi	209
C. Figur Kharismatis Menjadi Simbolalisasi Ideologis Partai	210
D. Berkembangnya Partai <i>Catch-All</i>	212
E. Pragmatisme Politik	218
<b>Daftar Pustaka</b>	<b>221</b>
<b>Glossarium</b>	<b>237</b>
<b>Indeks</b>	<b>241</b>
<b>Biografi Penulis</b>	<b>245</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Karakteristik Tipologi Partai Politik	9
Tabel 1.2. Karakteristik Sistem Kepartaian	10
Tabel 2.1. Perolehan Kursi DPRD Kota dan Kabupaten Malang Tahun 1999	58
Tabel 2.2. Koalisi Partai di DPRD dalam Mengusung Bupati dan Wali Kota di Malang Raya	64
Tabel 3.1. Perolehan Suara Nasional Pemilu 1999 dan 2004	80
Tabel 3.2. <i>Swing Votes</i> dari Pemilu 1999 ke 2004 di Kabupaten dan Kota Malang	82
Tabel 3.3. Perolehan Suara Tujuh Partai pada Pemilu 1999, 2004, dan 2009 di Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu	84
Tabel 3.4. Pergeseran Politik Antar Kluster di Malang Raya	85
Tabel 3.5. Perbandingan Perolehan Suara Partai pada Pemilu 1955 dan 1999	91
Tabel 3.6. Hasil Perolehan Kursi Pemilihan Legislatif DPRD Malang Raya Tahun 1999 dan 2004	95
Tabel 3.7. Perubahan Perolehan Suara Partai Politik dari Mulai Pemilu 1999, 2004, 2009 di Kota dan Kab. Malang	101
Tabel 3.8. Perolehan Suara Pemilu 2009 Partai Politik yang Lulus <i>Parliament Threshold</i> di Kabupaten Malang	104
Tabel 4.1. Perolehan Suara PKB pada Pemilu 1999 dan 2004 di Malang Raya	120

Tabel 5.1. Kriteria Penentuan Caleg di Daerah Pemilihan (Dapil) pada Pemilu 2009	169
Tabel 5.2. Tujuh Partai Politik Pemilu 1999 yang Memperoleh Suara Cukup Signifikan di Kabupaten dan Kota Malang	177



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Model Terbentuknya Partai Politik	7
Gambar 1.2. Sistem Kepartaian Versi Giovanni Sartori	11
Gambar 1.3. Marginal <i>Turnover</i> dalam Sistem Multipartai yang Ekstrim	12
Gambar 1.4. Proses Identifikasi Kepartaian	30
Gambar 1.5. Proses Memudarnya Identifikasi Kepartaian	32
Gambar 1.6. Varian Keagamaan di Kalangan Orang Jawa	37
Gambar 4.1. Model Pola Pembentukan Loyalitas Pemilih Santri Tradisional	119
Gambar 5.1. Rangkaian Kesatuan Motivasi Partai Politik	187

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

## **Tujuan Intruksional Bab 1**

Dalam bab ini penulis membahas beberapa teori yang dibutuhkan oleh mahasiswa seperti teori demokrasi, partai dan sistem kepartaian, dan perilaku pemilih. Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan dapat memiliki kompetensi sebagai berikut:

1. Mahasiswa dapat memahami dan mengerti tentang teori demokrasi, partai dan sistem kepartaian, serta perilaku pemilih.
2. Mahasiswa dapat mendefinisikan fakta, gejala yang terjadi terkait dengan peristiwa-peristiwa politik.
3. Mahasiswa dapat menginterpretasikan pandangan, pemahaman, serta tindakan politik yang dilakukan oleh masyarakat.
4. Mahasiswa dapat mengidentifikasi masalah berdasarkan teori yang sudah dipahami.
5. Mahasiswa mampu melakukan generalisasi terhadap fakta, gejala yang terjadi terkait dengan peristiwa-peristiwa politik yang ditemui di lapangan.





# 1

## DEMOKRASI, PARTAI, DAN PEMILIH: SEBUAH KAJIAN TEORITIS

### A. Demokrasi dan Representasi

#### 1. Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari dua akar kata Yunani: *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos* yang berarti kewenangan/kekuasaan.<sup>1</sup> Kata tersebut dipergunakan oleh bangsa Athena untuk mengartikan pemerintahan yang dikelola oleh banyak orang, yang dilawankan dengan pemerintahan yang dijalankan oleh sekelompok orang (*oligarchy*) atau oleh satu orang (*autocracy*). Ketika itu demokrasi hanya diartikan sebagai *direct or pure democracy* yang dipergunakan di beberapa negara kota (*city-states*) Yunani, atau mungkin bisa kita lihat dalam pembuatan peraturan di kota Inggris, dimana semua warga negara ikut bagian dalam pembuatan undang-undang. Namun sekarang ini, demokrasi lebih diartikan sebagai *a representative demoracy*—atau istilah Plato, *republik*—dimana rakyat tidak secara nyata membuat aturan hukum atau mengatur mereka akan tetapi memilih seseorang yang bisa melakukannya.<sup>2</sup>

Sebenarnya, aspek utama dari demokrasi adalah pandangan bahwa seluruh rakyat diperlakukan sama. Seperti apa yang dikemukakan oleh

---

1 Asal mula kata demokrasi bisa ditelusuri dari Yunani kuno. Sepertihalnya kata lain yang berakhiran dengan '*cracy*' (seperti, *autocracy*, *aristocracy*, dan *bureaucracy*), demokrasi berasal dari kata Yunani '*kratos*', yang berarti *power*, atau *rule*. Demokrasi berarti '*rule by the demos*' (demos merujuk pada '*the people*', walaupun orang-orang Yunani mempergunakan kata ini untuk mengartikan '*the poor*' atau '*the many*'). Andrew Heywood, *Politics* (second edition), New York: PALGRAVE, 2002. hal. 68.

2 James Mc Gregor Burn, *et.al.*, *Government by The People*, New Jersey: Prentice Hall, Engliwood Cliffs, 1989. hal. 3-4.

Dahl (1989). *"all the members of the association are adequality qualified to participate on an equal voting with the others in the process of governing the association"*.<sup>3</sup> Kekuasaan rakyat itu sendiri bisa dengan berbagai bentuk, bisa kekuasaan langsung atau kekuasaan tidak langsung. Hal yang paling penting adalah bentuk dari kekuasaan harus tetap berdasar pada kontrol rakyat dan kesamaan politik baik demokrasi langsung maupun tidak langsung. Namun paling tidak menurut Burns *et al.*, ada empat hal fundamental yang harus ada dalam proses demokrasi, yaitu *pertama*, semua warga negara harus punya hak pilih yang sama; *kedua*, pemilih harus punya akses terhadap fakta, kritik, kompetisi gagasan, dan pandangan semua kandidat; *ketiga*, warga negara harus bebas mengorganisasikan diri untuk tujuan politik; *keempat*, kemenangan pemilu ditentukan oleh suara terbanyak (atau paling tidak pluralis).<sup>4</sup>

## 2. Representasi

Menurut Mark M. Amastutz (1982), ada dua fungsi dari legislatif, yaitu: *pertama*, *making laws*. Fungsi ini merupakan fungsi utama dari legislatif. *Kedua*, *repsentation*. Fungsi kedua dari legislatif ini merupakan manifestasi dari kepentingan masyarakat.<sup>5</sup> Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa Perwakilan berbeda dengan demokrasi, dimana representasi dipahami sebagai pembeda antara pemerintah dan yang diperintah, sementara demokrasi dipahami sebagai sebuah keinginan untuk menghilangkan perbedaan ini dengan membangun pemerintahan rakyat. Demokrasi perwakilan paling tidak merupakan bentuk tidak langsung dari demokrasi, respresentasi menghubungkan pemerintah dengan yang diperintah dimana berbagai pandangan masyarakat dapat dijalankan secara efektif, atau kepentingan mereka dapat terjamin.<sup>6</sup>

Menurut Gilbert Abcarian, ada empat tipe mengenai hubungan antara sang wakil dengan yang diwakilinya, yaitu: 1). sang wakil bertindak sebagai wali (*trusstee*). Dalam hal ini sang wali bebas mengambil keputusan atau bertindak berdasarkan pertimbangannya sendiri tanpa harus berkonsultasi dengan yang diwakilinya. 2). sang

---

3 Robert Dahl, *A Preface to Democracy Theory*. Chicago: University of Chicago Press, 1956.

4 James Mc Gregor Burn, *et.al.*, p. 7-8.

5 Mark R. Amstutz, *An Intorduction to Political Science, The Management of Conflict*. USA: Foreman and Company, 1982. p. 141.

6 Lihat Heywood, *Representation, Elctions and Voting*, p. 224, dalam Andrew Heywood, *Politics*, Second Edition, New York: Palgrave, 1997.

wakil bertindak sebagai utusan (*delegate*). Maksudnya adalah bahwa sang wakil bertindak sebagai utusan atau duta dari yang diwakilinya, artinya sang wakil senantiasa selalu mengikuti perintah atau instruksi serta petunjuk dari yang diwakilinya dalam melaksanakan tugasnya. 3). sang wakil bertindak sebagai "*politico*". Artinya bahwa sang wakil dalam hal ini kadang-kadang bertindak sebagai wali (*trustee*), dan ada kalanya juga bertindak sebagai utusan (*delegate*). Tugasnya ini tergantung pada materi (*issue*) yang akan dibicarakan. 4). sang wakil bertindak sebagai "*partisan*". Dalam hal ini sang wakil bertindak sesuai dengan kehendak atau program dari organisasi (*partai*) sang wakil. Setelah sang wakil dipilih oleh pemilihnya atau yang diwakilinya, maka lepaslah hubungannya dengan pemilih tersebut selanjutnya mulailah hubungannya dengan organisasi (*partai*) yang mencalonkan dalam pemilihan tersebut.<sup>7</sup>

Bagaimana pun menurut Heywood (1997) tidak ada satu kesepakatan mengenai teori representasi. Paling tidak istilah representasi mempunyai empat implikasi: *Pertama*, mewakili berarti sebuah kepercayaan, seseorang yang ditetapkan tanggung jawab formal bagi kepentingan orang lain. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Edmund Burke (1729-1797), yang berpendapat bahwa perwakilan melayani konstituen mereka dengan cara memikirkan diri mereka dengan mempergunakan pertimbangan matang sendiri. *Kedua*, representasi merupakan delegasi, yaitu seseorang yang dipilih untuk bertindak mewakili orang lain atas dasar arahan yang jelas. Delegasi merupakan penyambung tidakan atau pandangan orang lain tanpa di masuki atau dipengaruhi pendapat pribadi. *Ketiga*, wakil adalah orang yang membawa mandat, yang telah dijanjikan dalam sebuah pemilu. Dalam teori ini lebih menunjuk pada partai politik dari pada politisi secara individu yang merupakan agen dasar dalam perwakilan. *Keempat*, mewakili mirip seperti sebuah kelompok atau orang yang menyatakan diri sebagai wakil, yang umumnya datang dari kelompok mereka sendiri. Pandangan ini diwujudkan dalam ide mengenai "*representative cross-section*", dan secara tidak langsung bahwa sebuah pemerintahan atau parlemen yang mewakili merupakan miniatur dari masyarakat yang lebih luas, yang berisikan anggota-anggota yang menggambarkan dari semua kelompok

7 Gilbert Abcarian, dalam Max Boboy, S.H., *DPR RI Dalam Perspektif Sejarah dan Tata Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994. hal. 22-24.

atau bagian dari masyarakat, dan dalam segi jumlah mewakili secara proporsional berdasarkan besarnya kelompok dalam masyarakat secara keseluruhan.<sup>8</sup>

Perwakilan dipandang secara luas sebagai bentuk nyata dari demokrasi dalam dunia modern. Kepentingan dalam hal ini berkembang sejalan dengan meluasnya penggunaan pemilihan umum sebagai prinsip dasar dalam rekrutmen politik. Kegunaan dari perwakilan adalah tersedianya mekanisme bagi pergantian para politisi yang tidak populer atau pemerintahan yang tidak baik. Dengan demikian, perwakilan akan menjamin pemerintahan dipegang oleh orang-orang yang mempunyai pendidikan lebih baik, mempunyai keahlian dan pengalaman yang luas.

## **B. Partai dan Sistem Kepartaian**

### **1. Partai Politik**

Konsep partai politik dipergunakan untuk pertama kalinya pada abad sembilan belasan dalam sistem politik yang kompetitif.<sup>9</sup> Konsep tersebut ditujukan kepada kelompok politik yang berkompetisi untuk menggapai kekuasaan dalam sebuah kompetisi terbuka.<sup>10</sup> Dengan demikian, partai politik hanya akan ada dalam sebuah kehidupan politik yang kompetitif. Selanjutnya istilah partai dipergunakan secara kaku yaitu hanya untuk menunjukkan organisasi politik yang menghubungkan orang-orang dengan pemerintahan, masyarakat dengan negara.<sup>11</sup>

Ada banyak ragam definisi dari partai politik, misalnya “partai politik merupakan organisasi politik independen yang bertujuan untuk dapat memobilisasi dukungan guna mengontrol pemerintahan”;<sup>12</sup> “sekelompok orang yang diorganisir untuk tujuan mendapatkan kekuasaan pemerintahan, dengan melalui pemilihan atau dengan cara

---

8 Edmund Burke, dalam Andrew Heywood, *Politics*, Second Edition, New York: Palgrave, 1997. P. 225.

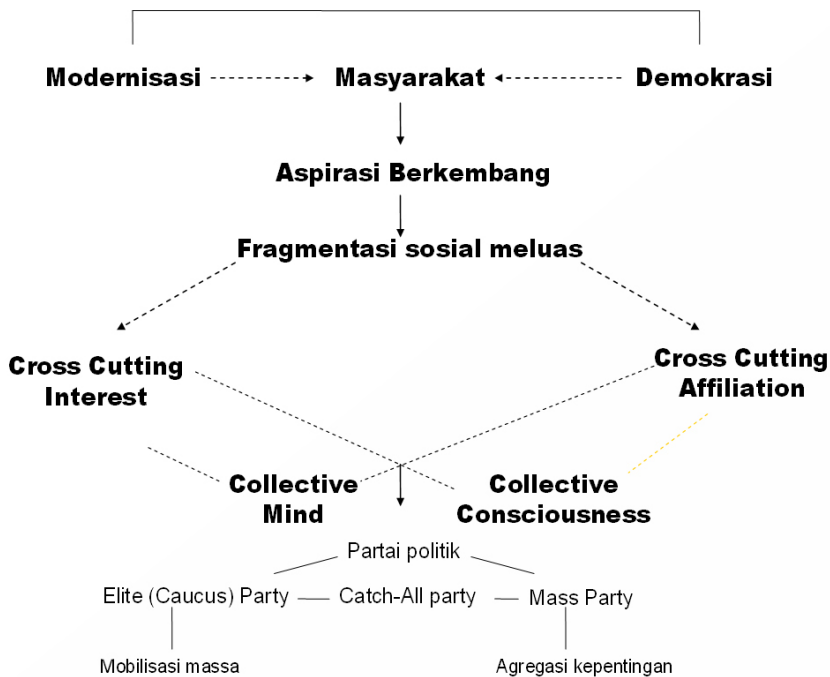
9 Mark R. Amstutz, *An Intorduction to Political Science, The Management of Conflict*. USA: Foreman and Company, 1982. p. 222.

10 Mark R. Amstutz, p. 222.

11 Sigmund Neumann, *Toward a Comparative Study of Political Parties*, dalam *Modern Political Parties*, ed. S. Neumann, Chicago: University of Chicago Press, 1956, dalam Mark R. Amstutz, *An Intorduction to Political Science, The Management of Conflict*. USA: Foreman and Company, 1982. p. 222.

12 Mark R. Amstutz,, p. 222.

lain”;<sup>13</sup> “any political group identified by a given label that present at election, and is capable of placing through elections candidates for public office”;<sup>14</sup> “permanent organizations which contest elections, usually because they seek to occupy the decisive decisions of authority within the state”.<sup>15</sup> Sementara dalam UU No. 31/2002 partai politik didefinisikan sebagai “Organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum”.



**Gambar 1.1. Model Terbentuknya Partai Politik**

Sumber: Riswanda Imawan, Bahan Kuliah Partai Dan Pemilu, Program Studi Ilmu Politik UGM, 2004.

Setelah dikemukakan mengenai definisi partai politik, perlu juga dikemukakan mengenai fungsi dari partai politik. Berkenaan dengan

13 Andrew Heywood, *Politics*, Second Edition, New York: Palgrave, 1997, p. 248.

14 Giovanni Sartori, *Parties and Party System, A Framework for Analysis*. New York: Cambridge University Press, 1959

15 Mark N. Hagopian, *Regimes, Movements, and Ideologies, A Comparative Introduction To Political Science*, New York and London, Logman Inc., 1978.

fungsi partai politik ini, John F. Bibby (1992) menyebutkan ada enam fungsi dari partai politik. Fungsi-fungsi tersebut antara lain: *Pertama, serving as intermediaries*, yaitu sebagai penghubung atau mekanisme penghubung antara warga Negara dengan pemerintah; *kedua, nominating candidates*, yaitu penentu orang-orang yang akan dipilih dalam pemilihan umum; *ketiga, contesting elections and channelling*, yaitu mendorong pemilih untuk ikut dan menyalurkan suara dalam pemilu; *keempat, organizing the government*, yaitu mengorganisasikan pemerintahan seperti parlemen atas dasar dukungan; *kelima, providing public accountability*, yaitu mengontrol jalannya pemerintahan; *keenam, managing conflict*, yaitu mendamaikan konflik akibat dari adanya persaingan di antara berbagai tuntutan kelompok.<sup>16</sup>

## 2. Sistem Kepartaian

Tipologi partai politik dan sistem kepartaian banyak ragamnya. Namun paling tidak, secara umum tipologi partai politik menurut Roy C. Macridis (1968) dapat di golongan ke dalam: otoriter dan demokratis; integratif dan representatif (perwakilan); ideologis dan pragmatis; agamis (religius) dan sekuler; demokratis dan revolusioner; massa dan elit; demokratis dan oligarki. Sementara tipologi sistem kepartaian dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah partai; sifatnya yang tertutup atau kompetitif; agregatif dan ideologis; pluralis atau monopolitis; berorientasi pada isu (*issue-oriented*) berlawanan dengan orientasi pada pengikut (*clientele-oriented*); integratif dan representatif.<sup>17</sup>

Dalam sistem kepartaian yang kompetitif, tipologi partai dapat digolongkan ke dalam lima tipe, yaitu: Proto partai, partai kader, partai massa, partai diktator, dan partai *catch-all*. Masing-masing tipe partai mempunyai karakteristik serta ciri masing-masing yang merupakan pembeda antara tipe satu dengan tipe lainnya. Karakteristik tersebut bisa dilihat dari kadar ideologi, basis massa, jumlah keanggotaan, kecenderungan arah, serta kepemimpinan sebagai mana bisa dilihat dalam tabel 1.1.

Sartori membagi keempat sistem kepartaian tersebut berdasarkan ideologi yang dianut masing-masing partai serta banyaknya partai yang diakui dan ikut dalam setiap pemilihan umum. Dalam pembahasannya,

---

<sup>17</sup> Roy C. Macridis, dalam Ichlasul Amal, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1988

Giopanni Sartori (1959)<sup>18</sup> mengklasifikasikan sistem kepartaian yang memberi ruang bagi tumbuhnya demokrasi menjadi 4 macam, yaitu Sistem 2 (dua) Partai, Pluralisme Moderat, Pluralisme Terpolarisasi dan Sistem Partai Berkuasa. Sistem dua partai ditandai oleh adanya 2 partai yang terus bersaing di dalam setiap pemilu serta paling memiliki pendukung luas.<sup>19</sup>

**Tabel 1.1. Karakteristik Tipologi Partai Politik**

	Proto-Parties	Cadre Parties	Mass Parties	Dictatorial Parties	Catchall Parties
Social appeal	Upper Class and Aristocracy	Upper Classes and middle classes	Lower classes: workers and peasants	Diverse: Worker in communism	Nearly all social and group
Level of Ideology	Very low	Very low	High	Very high	Low
Ratio of Member to Voters	Low	Low	High	Medium to high	Medium to high
Articulation	Weak	Weak	Strong	Very strong	Moderate
Centralization	Low	Low	High	Very high	Medium
Membership	Tiny	Small	Large	medium	Medium to large
Leadership	Aristocrat and notables	notables	New men and upper-class trailor to their class	New men and upper-class trailor to their class	Middle class and lower middle class

Sumber: Mark N. Hagopian, *Regimes, Movements, and Ideologies, A Comparative Introduction To Political Science*, New York and London, Logman Inc., 1978.

18 Geopanni Sartori nampaknya ingin meninggalkan kajian klasik mengenai partai politik yang berdasarkan pada jumlah (*numerical*) partai politik, satu, dua, tiga partai atau lebih. Menurutnya pendekatan dalam mengkaji partai politik berdasarkan numerical sudah tidak memadai lagi. Menurut Sartori, hal yang perlu diketahui bukanlah jumlah partai politik, namun bagaimana kekuatan partai terkait dengan jumlahnya tersebut. Kekuatan partai terkait dengan electoral strength, suara ditranslasikan ke dalam sejumlah kursi dan jumlah kursi partai akan menunjukkan kekuatan partai di Parlement. Dari sinilah akan dapat diteliti partai-partai yang punya potensi untuk memerintah, hal ini terkait dengan potensi berkoalisi dari masing-masing partai. Untuk lebih jelasnya lihat Mark N. Hagovian, *Regimes, Movements, and Ideologies, A Comparative Introduction To Political Science*, New York and London, Logman Inc., 1978.

19 Kedua partai tersebut dapat saja memiliki ideologi yang berbeda ataupun isu-isu politik yang kontras. Contohnya di Amerika Serikat di mana Partai Republik dan Partai Demokrat yang bersaing. Partai Republik membawakan kepentingan pengusaha, kalangan militer, dan golongan konservatif. Partai Demokrat, kerap dicitrakan sebagai lebih dekat ke kalangan pekerja, gerakan sosial bernuansa hak asasi manusia, dan kesejahteraan sosial.

Multi Partai Moderat adalah sistem kepartaian suatu negara di mana partai-partai politik yang ada di dalamnya memiliki ideologi yang berbeda-beda. Namun, perbedaan ideologi tersebut tidak begitu tajam sehingga dapat saja para pemilih suatu partai “berpindah” dari partai yang satu ke partai lainnya. Demikian pula, di tingkatan parlemen, partai-partai yang memiliki perbedaan ideologi tetap dapat menjalin koalisi jika memang diperlukan guna “menggolkan” suatu kebijakan. Pluralisme Terpolarisasi adalah sistem kepartaian suatu negara di mana partai-partai politik yang ada di dalamnya memiliki ideologi yang berbeda-beda. Perbedaan ideologi tersebut terkadang cukup fundamental sehingga sulit bagi pemilih partai yang satu untuk berpindah ke partai lainnya. Demikian pula, di tingkatan parlemen, perbedaan ideologi tersebut membuat sulitnya tercipta koalisi akibat perbedaan ideologi yang cukup tajam tersebut.

**Tabel 1.2. Karakteristik Sistem Kepartaian**

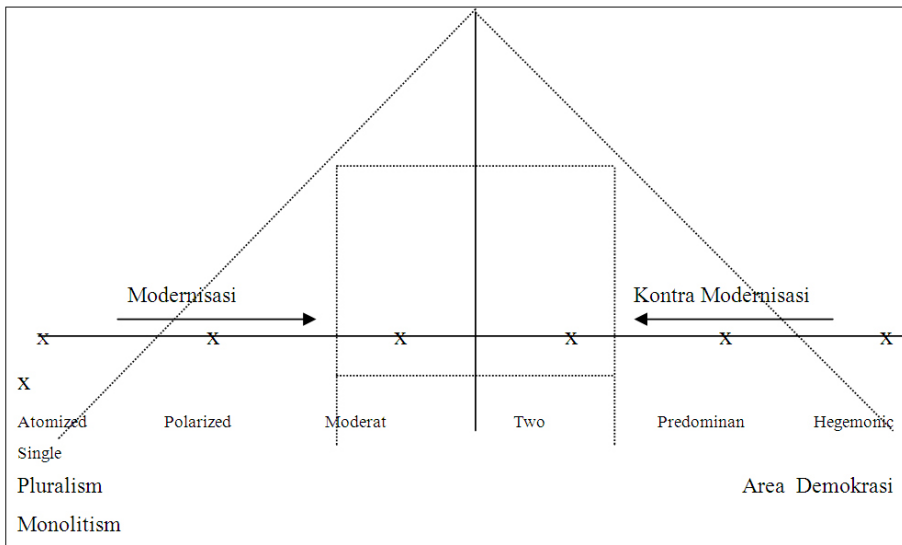
	Kutub	Jarak Ideologi	Pergerakan	Tipe Pemerintahan
Sistem Dua Partai	2	Sangat Kecil	Ke Pusat	Pemerintahan alternatif
Sistem Multipartai Moderat	3-5	Kecil	Ke Pusat	Koalisi alternatif
Sistem Multipartai Ekstrim	6- lebih	Besar	Ke Kutub (ekstrim kanan atau Kiri)	Marginal turnover

Sumber: Sartori dalam Mark N. Hagopian, *Regimes, Movements, and Ideologies, A Comparative Introduction To Political Science*, New York and London, Logman Inc., 1978.

Sistem dua partai merupakan sistem yang paling terkenal karena sistem kepartaian ini merupakan sistem kepartaian yang paling sederhana. Dalam sistem ini selalu ada dua partai yang saling bergantian untuk memimpin pemerintahan, sementara partai lain tidak bisa mempengaruhi atau mencegah. Kondisi demikian oleh Sartori disebut sebagai *predominant party* yaitu sistem kepartaian di mana di suatu negara terdapat sejumlah partai, tetapi ada sebuah partai yang selalu memenangkan pemilihan umum dari satu periode ke periode lain. Partai yang selalu menang tersebut menjadi dominan di antara partai-partai lainnya, dilihat dari sisi basis massa, dukungan pemerintah, maupun kemenangan kursi mereka di setiap pemilihan umum.<sup>20</sup>



Dengan mendasarkan pada sistem kepartaian yang dikembangkan Giovanni Sartori, Riswanda (2004), membuat gambaran mengenai dikotomi antara kedua kutub ideologis yaitu, partai yang pluralis dan monolitik. Partai yang tergolong pluralis adalah model partai atomis, polaris, dan moderat, sementara yang tergolong monolitik adalah model partai single, hegemonik, dan predominant. Menurut Giovanni Sartori, perbedaan penting secara politik adalah antara system dua partai, sistem multipartai moderat di satu sisi, dan sistem multipartai ekstrim di sisi lain. Walaupun Sartori memasukan empat partai sebagai bagian dari sistem yang kompetitif. Keempat sistem partai tersebut merupakan kutub dalam sistem kepartaian, jarak ideology dalam kepartaian, kecenderungan pergerakan ideology (*centrist* atau *extremist*), dan hubungan antara pemerintah dan oposisi.



**Gambar 1.2. Sistem Kepartaian Versi Giovanni Sartori**

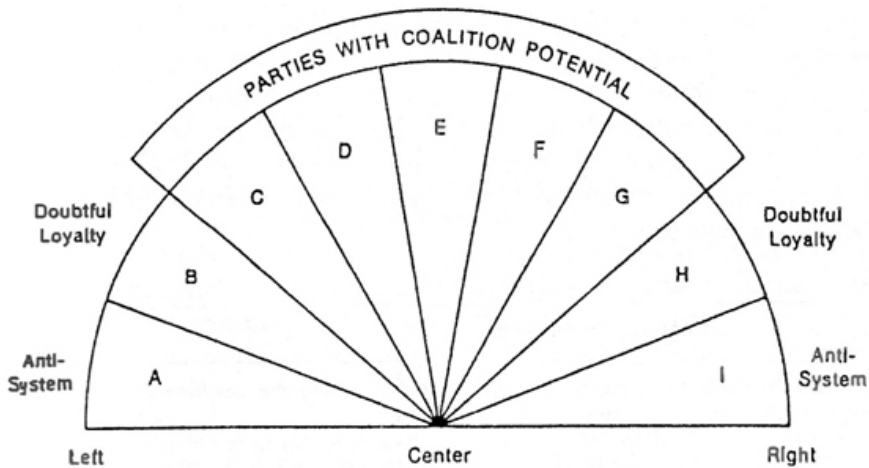
Sumber: Giovanni Sartori, *Party and Party Systems, A Framework for analysis*, New York: Cambridge University Press, 1959, dalam Riswanda Imawan 2004.

Pola sistem kepartaian dengan corak high pluralism atau plurarisme ekstrim dimana jumlah partai politik lebih dari enam punya dampak pada sulitnya membangun koalisi akibat spectrum ideologis yang tinggi. Dengan meminjam penjelasannya Gunar Sjoblon, Sartori

20 Giovanni Sartori, *Parties and Party System, A Framework for Analysis*. New York: Cambridge University Press, 1959. p. 186.

(1976) melukiskan rumitnya interaksi yang dilakukan dalam bangunan system kepartaian dengan fondasi multipartai yang terpolarisasi.<sup>21</sup>

Apa bila ada dua partai dalam sebuah negara, maka interaksi yang terjadi hanya satu yang bersifat resiprokal; kalau ada tiga partai, maka interaksi yang terjadi ada tiga arah yang membentuk segitiga; ada empat partai akan ada enam arah interksi; ada lima partai akan ada 10 interaksi; kalau ada enam partai akan ada 15 arah interkasi; ada 7 partai akan ada 21 interkasi dan seterusnya.<sup>22</sup>



**Gambar 1.3. Marginal Turnover dalam Sistem Multipartai yang Ekstrim**

Sumber: Mark N. Hagopian, *Regimes, Movements, and Ideologies, A Comparative Introduction To Political Science*, New York and London, Logman Inc., 1978

Di samping itu tipologi partai politik dan sistem kepartaian dapat juga dilihat dari karakteristik: sumber dukungan partai; organisasi internal; fungsi yang dilakukan serta cara-cara tindakannya (*mode of action*). Didasarkan pada sumber dukungan partai politik dapat dilacak dari apakah partai politik tersebut dukungannya bersifat komprehensif atau sektarian? Suatu partai politik dapat dikatakan komprehensif apabila partai politik tersebut berorientasi pada pengikut (*clientele-oriented*), yaitu suatu partai politik yang berusaha mendapatkan suara

21 Lihat Giovanni Sartori, *Parties and Party System, A Framework for Analysis*. New York: Cambridge University Press, 1959.

22 Giovanni Sartori, *The Numerical Criterion*, p. 119-130. in Giovanni Sartori, *Parties and Party System, A Framework for Analysis*. New York: Cambridge University Press, 1959.

sebanyak mungkin dari setiap warga negara. Sedangkan partai politik dapat dikategorikan sebagai partai sektarian apabila kelas, daerah, atau ideologi dipakai sebagai daya tariknya, yang termasuk dalam kategori partai sektarian adalah partai sosialis dan partai agama.<sup>23</sup> (Ichlasul Amal, 1988).

Realitas kepartaian Indonesia di era multipartai, baik dari sisi tipologi maupun sistem kepartaian, maka dapat kita kategorikan sebagai berikut: dilihat dari sistem kepartaian, partai politik Indonesia baik pada pemilu 1999 maupun 2004 dengan jumlah partai politik lebih dari enam, maka sistem kepartaiannya tergolong sistem multipartai ekstrim; secara tipologis, partai-partai yang berkembang baik pemilu 1999 maupun 2004 kalau dilihat dari sisi sumber dukungannya, maka umumnya partai didukung oleh pemilih dengan basis ideologi, dimana agama, khususnya Islam, menjadi menjadi basis material dalam pembentukan partai. Oleh karena itu, partai-partai di era multipartai dapat dikatakan tergolong ke dalam tipe atau jenis partai sektarian.

### C. Partai Politik dan Perubahan *Electoral*

Peter Mair *et al.*, menyebutkan bahwa akhir-akhir ini banyak penelitian yang memfokuskan pada penurunan loyalitas pemilih pada partai politik dan fluktuasi perolehan suara partai.<sup>24</sup> Namun agak sedikit penelitian yang berusaha untuk mengkaji bagaimana partai melakukan respon terhadap penurunan tersebut. Terjadinya perubahan tidak hanya disebabkan karena terjadi perubahan dalam *electoral market*, akan tetapi bisa juga diakibatkan oleh perubahan tekologi, yang memungkinkan terjadinya perubahan dalam mode komunikasi; perubahan institusi seperti perubahan aturan pemilu dan struktur parlemen dan lain sebagainya.

Berkenaan dengan perubahan electoral, Evan dan Norris (1999), membagi pemilu ke dalam tiga tipe yaitu *maintaining*, *dealigning*, dan

---

23 Lihat Ichlasul Amal, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1988.

24 Menurut Peter Mair *et al.*, beberapa penelitian yang terkait dengan perubahan sistem kepartai telah banyak diteliti, contoh, Daalder dan Mair 1983; Mair dan Smith 1990; Penning dan Lane 1998; Broughton dan Donovan 1999; Web *et al.* 2002. Penelitian yang memfokuskan pada perubahan pengorganisasian partai dilakukan oleh Katz dan Mair 1992, 1994, 2002; Dalton dan Wattenberg 2000. Selanjutnya ada penelitian yang mengkaji kepentingan baru dari fungsi partai, seperti Dalton dan Wattenberd 2000; Webb *et al.* 2002. dan strategi pemilu dan kampanye diteliti oleh Bowler dan Farrell 1992; Butler dan Ranney 1992; Seanson dan Macini 1996; Noris 2000; Plaser 2002. Lihat Peter Mair, Wolfgang C. Muller, dan Printz Plasser, *Political Party and Electoral Change*, London: SAGE Publications Ltd. 2004. hal.2.

*realigning*.<sup>25</sup> *Maintaining election* merujuk pada *status quo*: tidak ada isu yang kuat, dan tidak ada perubahan besar dalam kebijakan partai. Dalam kondisi *dealigning* terjadi kehilangan ikatan psikologis antara konstituen dengan partai. Kondisi *dealigning* dibagi ke dalam dua tipe: pertama, *deviating elections*; kedua, *secular dealignment*.

*In deviating election particular personalities, issues or events produce a temporary sharp reversal in the 'normal' share of the vote for major parties. Deviating contests are characterized by negative protests against the government, which cause dissatisfied voters to defect temporarily to minor parties, only to return home in subsequent contest..... While deviating election represent a short, sharp shock, a closely related type of contest involve secular dealignment, meaning a long-term, incremental and cumulative progressive weakening in party-voter bond.*<sup>26</sup>

Sementara terkait dengan *realignment*,<sup>27</sup> dimana Evan dan Norris membaginya ke dalam *secular realignment* dan *critical realignment*.<sup>28</sup> *Secular realignment* adalah pemilu yang dicirikan dengan adanya evolusi dan akumulasi penguatan dukungan dalam serangkaian pemilu. Di sisi lain *critical election* didefinisikan sebagai "*as those exceptional contests which produce abrupt, significant and durable realignments in the electorate with major consequences for the long-term party order*".<sup>29</sup> Terkait dengan fenomena *realignment*, Bibby (1992) menyebutkan bahwa sejarah kepartaian di Amerika menunjukkan terjadinya *realignment* secara periodik dengan interval waktu yang sama.<sup>30</sup> Bagi Mair *et al.*, *critical realignment*, bisa dicirikan dengan tiga hal yang saling berkaitan.

- a. *Realignment in the ideological basis of party competition.*
- b. *Realignment in the social basis of party support.*
- c. *Realignment in the partisan loyalties of voters.*

25 Lebih lengkapnya lihat Geoferey Evans dan Pippa Norris, *Critical Elections, British Parties And Voters In Long-Term Perspective*, London: Sage Publication, 1999.

26 Geoferey Evans dan Pippa Norris, hal. xxviii-xxix.

27 Menurut Ladd *et al.*, bagi beberapa peneliti, aspek kunci dari komposisi baru partai bukan *realignment* akan tetapi *decomposition*. Everett Ladd, Jr., Charles Hadley, and Lauriston King, *A New Political Realignment*, dalam Edward C. Dreyer, *Political Opinion and Behavior, Essay and Studies, Third Edition*, Florida: Duxbury Press, 1976. p. 136-150.

28 Teori tentang *critical election* awalnya berasal dari V.O.Key (1955), sementara periodisasi waktu sistem kepartaian dan perhitungan mengenai *realignment*, khususnya di Amerika, dibahas oleh Campbell *et al.*, 1966.

29 Geoferey Evans dan Pippa Norris, hal xxx-xxxi.

30 John F. Bibby, *Politics, Parties, and Elections in America*, USA: Nelson-Hall Inc., 1992. p. 43.

Pembagian yang hampir sama disampaikan oleh Hugh A. Bone dan Austin Ranney (1963)<sup>31</sup> untuk tipe pemilu di Amerika, yaitu *maintaining election*, *deviating election*, dan *realigning election*.<sup>32</sup> Berkenaan dengan ketiga tipe pemilu Amerika ini, Bone dan Ranney mendefinisikannya sebagai berikut:

*A maintaining election is one in which the long standing dominant party wins. The state affair, the issues, and the quality of the candidates may help the dominant party, or at worst they are not sufficiently unfavorable to induce enough defections of the faithful to bring defeat.*

*A deviating election is one in which the short-run forces produce enough defections among the adherents of the longstanding dominant party to give victory to the second party. Most of these defectors, however, retain their previous party identification and may be expected to "return home" when the issues or candidates of the moment have passed.*

*A realigning election is one in which not only does the second party win but the basic distribution of party identification shifts sufficiently to make it the new majority party. Such a shift, of course, takes place over period of time longer than one election campaign. Yet in each such "realigning era" there is a particular election which marks the turn of the tide.*<sup>33</sup>

Menurut Mair *et. al.*, perubahan dalam *electoral* mempunyai beragam bentuk dan melibatkan sejumlah parameter yang berbeda. Perubahan *electoral market* ini bisa dilihat dari beberapa hal seperti perubahan *struktur social*, *structural dealignment*, penurunan dalam identifikasi kepartaian, perubahan dalam orientasi nilai, kompetisi isu, dan krisis partai. Di sisi lain cara partai melakukan respon terhadap perubahan tersebut bisa dilihat dari: *pertama* respon organisasi yang terkait dengan pengorganisasian partai, kandidat; *kedua* respon strategis terhadap pemilih; *ketiga* respon strategis terhadap partai lain yang meliputi respon program, ideology, dan orientasi kebijakan, serta respon institusional.<sup>34</sup>

---

31 Hugh A. Bone and Austin Ranney, *Politics And Voters*, USA: McGraw-Hill, Inc. 1963.

32 Hugh A. Bone and Austin Ranney, hal. 45.

33 Hugh A. Bone and Austin Ranney, hal 45.

34 Peter Mair *et al.*, p. 1-19.

## 1. Perubahan dalam *Electoral Market*

### a. Perubahan Struktur Sosial

Perubahan *electoral* paling nyata datang dari adanya perubahan dalam struktur sosial masyarakat.<sup>35</sup> Perspektif ini berawal dari loyalitas tradisional di antara kelompok sosial tertentu, seperti *blue-collar worker* atau petani dengan partai sosialis. Perkembangan ekonomi telah menyebabkan petani mengalami perubahan secara kuantitas sehingga mengurangi banyak pemilih dari kelompok petani. Di sisi lain perkerja kerah putih baik di sektor privat maupun publik bertambah secara dramatis. Kondisi ini mendorong lahirnya kelas menengah baru, yang memungkinkan jadi pendukung salah satu partai. Lebih jauh partai lama akan banyak ditinggalkan oleh pemilih yang telah banyak mengalami perkembangan, hal ini disebabkan oleh semakin sempitnya ruang ideologis yang diperlukan untuk memperjuangkan kepentingan dari kelompok sosial baru.

### b. *Structural Dealignment*

Kalau perubahan struktur sosial bersandar pada asumsi mengenai kohesifitas kelompok sosial dan loyalitas kelompok pada partai politik tertentu, sementara *sturctural dealignment* terkait dengan hilangnya kohesifitas dari kelompok sosial tertentu. Sebagai contoh, Katolik tidak lagi memilih partai Demokrasi Kristen, dan pekerja kerah biru tidak lagi menunjukkan dukungannya lagi pada Sosial Demokrat atau Partai Komunis.<sup>36</sup> Oleh karena itu, ada kemungkinan mereka memilih partai lama yang pernah mereka dukung atau partai baru seperti Green Party atau Neo-Populis Party. Kalau kita analogkan dengan kasus di Indonesia, bisa terjadi kelompok Santri tidak lagi mendukung partai Islam, begitupun kelompok Abangan tidak lagi mengidentifikasi dirinya dengan partai Nasionalis. Terkait dengan kondisi *electoral*, kasus tersebut bisa dikatakan sebagai berikut: *If these new pattern of support were to become stabilized, we could speak of realignment; were they to remain relatively unpredictable would to speak, we would to speak of dealignment.*<sup>37</sup>

---

35 Peter Mair *et al.*, p. 3.

36 Peter Mair *et al.*, hal 3-4.

37 Russell J. Dalton, Scott C. Flanagan, and Paul Alan Beck, *Electoral Change in Advance Industrial Democracies, Realignment or Dealignment?* Prencinton, NJ: Prencinton University Press, 1984. Peter Mair *et al.* Hal 4.

### c. Menurunnya Identifikasi Partai

Identifikasi partai merujuk pada ikatan pemilih pada level individu dari pada kelompok. Konsep identifikasi ini awalnya dikembangkan dalam kajian di Amerika yang berusaha mengukur keterikatan secara psikologis pada partai tertentu. Terbangunnya identifikasi partai berawal dari masa kecil yang terus berlanjut seumur hidup.<sup>38</sup> Terjadinya perubahan identifikasi kepartaian sangat erat kaitannya dengan perubahan lingkungan sosial, yang memaksa orang untuk menyesuaikan nilai-nilai politik dari lingkungan baru.<sup>39</sup> Oleh karena itu, menurut Campbell *et al.* bisa dikatakan .... *The stronger the party identification, the more likely it was that the individual would remain a loyal partisan voter.*<sup>40</sup> Kasus yang terjadi di Indonesia, mereka yang punya tingkat kesantrian yang kuat akan cenderung mengidentifikasikan dirinya dengan partai Islam, dan sebaliknya mereka yang punya tingkat kesantriannya rendah akan mengidentifikasikan dirinya dengan partai Nasionalis.<sup>41</sup>

### d. Perubahan Orientasi Isu

Sejak tahun 1970-an, sejumlah literatur membahas mengenai orientasi nilai warga negara, dengan bertambahnya nilai post-materialisme (atau lebih kini, post modern). Dengan adanya perubahan orientasi nilai mungkin akan lebih menyulitkan bagi pemerintah, dalam menentukan pilihan umum kebijakan, jika dibandingkan dengan partai politik yang hanya bergerak pada saat pemilu. Di satu sisi pemerintah harus bekerja dalam mayoritas agar pemerintahannya dapat *survive* dan bekerja dengan efektif, sementara parpol harus dapat memuaskan konstituennya dengan memenangkan koalisi seminimal mungkin. Dengan semakin heterogennya nilai yang ada dalam masyarakat, pekerjaan pemerintah semakin sulit, karena harus mengurangi bobot masing-masing kelompok minoritas. Di samping itu juga, partai harus memperhatikan kelompok minoritas baru, dan ini artinya mereka harus hati-hati dari pada sebelumnya dalam menentukan target kelompok

---

38 Philip E. Converse, *Of Time and Partisan Stability*, *Comparative Political Studies* 2: 1969, 139-71. Peter Mair *et al.*, 4

39 Angus Campbell, Phillip E. Converse, Warren E. Miller and Donald E. Stokes, *The American Voter*. New York: Wiley, 1960.

40 Campbell *et al.*, hal. 120-8

41 Lihat Afan Gaffar, *Javanese Voters, A Case Study of Election Under Party a Hegemonic Party System*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.

mereka untuk pemilu berikutnya, atau dalam pembentukan koalisi di parlemen.<sup>42</sup>

#### e. Kompetisi Isu

Partai politik tidak bisa hanya bergantung pada perubahan alamiah terkait dengan pemilu, mereka harus menentukan perubahan itu sendiri. Syaratnya adalah mereka harus mengidentifikasi sesuatu yang baru dan memenangkan isu, lantas mempopulerkan isu tersebut. Keharusan partai dalam membangun isu baru untuk memenuhi harapan konstituen, telah menempatkan partai dalam kondisi di bawah tekanan, karena isu baru belum tentu bisa diterima. Oleh karena itu, tidak jarang, partai politik harus mempertahankan atau mengusung isu lama sambil memperhatikan perkembangan dan kemungkinan munculnya isu baru yang lebih relevan. Berkenaan dengan hal ini Mair *et al.*, mengemukakan, "*in order to avoid future defeat, these parties have to defend the importance of their old issues as well as to monitor development that may bring new issues on to the agenda.*"<sup>43</sup>

#### f. Fluktuasi antara Partai Pemerintah dan Oposisi

Perubahan dukungan pemilih partai juga bisa dijelaskan dari apakah statusnya sebagai *incumbent* atau oposisi. Alasannya adalah partai pemerintah dapat berbuat lebih baik karena punya kesempatan untuk memanipulasi ekonomi, akses mereka kepada media, (dan di lain negara, dapat menentukan tanggal pemilihan umum).<sup>44</sup> Partai berkuasa juga punya keuntungan terkait akses untuk patronase. Walaupun demikian, pandangan sebaliknya, yang menyebutkan bahwa partai berkuasa akan mendapat kritikan dari kebijakan jangka pendek dan kebijakan yang tidak populer.<sup>45</sup>

#### g. Krisis Partai

Krisis partai merupakan sumber penyebab utama terjadinya perubahan *electoral market*. Fungsi partai sebagai penghubung antara

42 Lihat Peter Mair, Wolfgang C. Muller, dan Printz Plasser, *Political Party and Electoral Change*, London: SAGE Publications Ltd. 2004

43 Peter Mair *et al.*, hal 7.

44 Kaare Strom and Swindel, Stephen M. Strategic Parliamentary Dissolution, *American Political Science Review* 96, 2002. Peter Mair *et al*, hal. 7.

45 Richard Rose and Thomas T. Mackie, *Incumbency in Government: Assert or Liability?* In Hans Daalder and Peter Mair (eds), *Western European Party System: Continuity and Change*, London: Sage. Dalam Peter Mair *et al.*, hal. 11.



warga negara dengan institusi politik dan proses pengambilan kebijakan.<sup>46</sup> Jika warga negara merasa tidak bisa memilih partai yang dapat melayani kepentingan mereka dan mempengaruhi keputusan, hal ini akan menyebabkan “krisis partai”.<sup>47</sup> Persoalan ini akan diikuti dengan tantangan besar, salah satunya adalah rendahnya partisipasi pemilih. Kekacauan *electoral* dan pengikisan afiliasi politik juga merupakan petunjuk dari krisis partai.

## 2. Respon Partai

Banyak cara dari partai dalam merespon berbagai perubahan *electoral*. Untuk memahami bagaimana respon partai terhadap perubahan *electoral*, kita harus memahami terlebih dahulu pandangan partai tersebut atas perubahan yang terjadi. Apabila partai tidak menganggap perubahan tersebut atau partai tidak sadar akan perubahan tersebut, maka partai tidak akan melakukan respon apapun. Namun sebaliknya apabila partai menganggap perubahan itu signifikan, maka partai akan melakukan respon.<sup>48</sup>

### a. Respon Organisasi

- Pengorganisasian Partai

Ketika partai menganggap perlu untuk melakukan respon pada perubahan *electoral*, hal pertama dilakukan adalah dengan cara mereformasi internal organisasi. *Pertama* dengan mengganti staf amatir (yang berasal dari partai) dan digantikan dengan yang profesional (yang bekerja berdasarkan keahlian). *Kedua* respon organisasi dengan cara melakukan desentralisasi (keputusan yang bersifat *bottom-up* atau dari pemilih), atau dengan cara sentralisasi (keputusan partai didasarkan pada orang-orang ahli).<sup>49</sup> Di samping itu, partai dapat juga merespon dengan melakukan distribusi kekuasaan. Hal ini terkait dengan metode dalam melakukan seleksi kandidat dengan cara seleksi yang lebih terbuka.

---

46 John F. Bibby, *Politics, Parties, and Elections in America*, Chicago: Nelson-Hall Publishers, 1992.

47 Kay Lawson and Peter H. Merkel (eds), *When Party Fail*, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1988.

48 Lihat Peter Mair, Wolfgang C. Muller, dan Printz Plasser, *Political Party and Electoral Change*, London: SAGE Publications Ltd. 2004.

49 Paolo Mancini, *New Frontiers in Political Professionalism, Political Communication*, 16. 1999. dalam Peter Mair *et al.* hal. 11.

- Calon/Candidat

Respon partai terhadap perubahan *electoral* dilakukan dengan cara merekrut berbagai tipe kandidat, sebagai contoh mengambil calon yang banyak terekspos oleh media ketimbang calon dari partai sendiri. Bisa juga partai mengambil calon dari kelompok yang anti partai untuk menunjukkan keterbukaan pada masyarakat, dengan harapan dapat mengikatkan diri dengan kelompok baru.<sup>50</sup>

**b. Respon Strategis pada Pemilih**

Partai politik juga bisa merespon ketidakjelasan *electoral* dengan melakukan perubahan target kelompok mereka. Hal ini dilakukan dengan cara menarik kelompok pemilih baru. Tujuannya bisa untuk merubah target keklompok lama dengan yang baru, atau hanya sekedar melakukan intensifikasi pada target kelompok tradisional mereka. Lebih jauh dengan cara mengambil target yang lebih spesifik seperti anak-anak muda, kelas menengah perkotaan baru, dan lain sebagainya.<sup>51</sup>

**c. Respon Strategis pada Eksternal Partai**

Dalam rangka memenangkan kompetisi dengan partai lain, partai harus mampu menentukan target kelompok pemilih termasuk juga target partai yang akan dijadikan koalisi. Kebijakan partai apakah memfokuskan diri pada salah satu kelompok kepentingan atau banyak kelompok kepentingan. Banyak kelompok kepentingan yang menjadi target menjadi penentu apakah partai tersebut *catch-all party* atau bukan. Target kelompok kepentingan apakah spesifik atau herogen bisa dilihat dari program, ideologi, dan orientasi kebijakan partai. Sementara keterkaitan dengan partai lain dalam hal membangun koalisi, khususnya dengan partai penguasa merupakan petunjuk apakah partai tersebut masuk dalam kategori *cartel party* atau bukan.

- Respon Program, Ideologi, dan Orientasi Kebijakan

Perubahan posisi kebijakan diambil oleh partai sebagai wujud dari respon pada perubahan dalam *electoral market*. Partai menentukan target kelompok pemilih dengan cara merubah antara pendekatan yang lebih spesifik dan sektoral atau pendekatan *catch-all*. Apabila partai memutuskan untuk melakukan pendekatan spesifik, maka

---

50 Lihat Peter Mair, Wolfgang C. Muller, dan Printz Plasser, *Political Party and Electoral Change*, London: SAGE Publications Ltd. 2004. hal. 11.

51 Peter Mair *et al.* hal. 11-12.

ini berarti partai melakukan hubungan dengan *interest group* tertentu, sementara *catch-all* partai harus membangun hubungan dengan berbagai tipe *interest group*.<sup>52</sup> Dalam hal ini Kirchheimer<sup>53</sup> berpendapat bahwa *the catch-all transformation affected party ideology, organization and external relation*. Secara khusus, terkait hubungan eksternal model *catch-all* ini akan melemahkan hubungan eksklusif dengan kelompok sosial tertentu agar dapat menjangkau pemilih yang lebih luas.

Respon eksternal partai tidak hanya berkaitan dengan pemilih (*catch-all*), namun juga dengan organisasi atau partai pemerintah (*cartel*). Kalau *catch-all party* bertujuan untuk perluasan basis pemilih, sementara *cartel party* bertujuan untuk melakukan konsfisasi untuk mendapatkan *resources* dari negara dan menekan partai lain agar tidak punya akses pada kekuasaan. Berkenaan dengan *cartel party* ini Katz dan Mair (1995), menyebutkan .... *parties with access to state resources and power have a clear advantage in maintaining their own position and denying such power to others*.<sup>54</sup>

#### d. Respon Institusi

Respon partai pada perubahan electoral dilakukan juga dengan cara mengajukan reformasi institusi,<sup>55</sup> hal ini diawali dengan cara berupaya merubah aturan pemilu.<sup>56</sup> Salah satu hal yang paling gampang untuk mencapai tujuan tertentu lewat perubahan adalah dengan merubah sistem pemilu.

## D. Perilaku Pemilih

### 1. Model Umum Perilaku Pemilih

Pertanyaan yang sering muncul dalam mengkaji perilaku pemilih adalah apakah tindakan dalam *voting* itu hanya merupakan penegasan

---

52 Peter Mair *et al.* hal. 12-13.

53 Dalam Peter Mair, hal. 42.

54 Peter Mair *et al.* hal. 16.

55 Wolfgang C. Muller, *Party and the Institutional Framework*, in Kurt Richard Luther and Ferdinan Muller-Rommel (eds), *Political Party in the New Europe*, Oxford University Press. Dalam Peter Mair *et al.* hal. 13.

56 Lihat Giovanni Sartori, *Political Development and Political Engineering*, 1968, in John Montgomery and Albert O. Hirschman (eds) *Public Policy XVII*. Cambridge, MA: MIT Press. Dalam Peter Mair *et al.*, 13. Dalam Peter Mair, hal. 40.

(*affirmation*) atau pilihan (*choice*)? Pertanyaan dasar ini telah melahirkan perdebatan yang sepertinya tidak ada akhir mengenai *model voting*, yaitu antara model identifikasi partai<sup>57</sup> dan model sosiologis.

Konsep identifikasi partai bersumber dari psikologi sosial. Konsep ini sering disebut sebagai '*model Michigan*', karena konsep ini dikembangkan di Universitas Michigan pada tahun 1950an. Pada kesempatan lain juga, identifikasi partai di jelaskan sebagai '*socialisation model*', karena menekankan pada dampak keluarga terhadap partisipasi.<sup>58</sup> Sementara di lingkungan ilmuwan sosial AS, model sosiologis disebut sebagai Mazhab Columbia (*The Columbia School of Electoral Behavior*), sementara model indentifikasi partai disebut Mazhab Michigan (*The Michigan Survey Research Center*).<sup>59</sup> Mazhab pertama lebih menekankan peranan faktor-faktor sosiologis dalam membentuk perilaku politik seseorang, sementara mazhab kedua lebih mendasarkan faktor psikologis seseorang dalam menentukan perilaku politiknya.<sup>60</sup>

Sementara di sisi lain pendekatan Pilihan Rasional melihat adanya analogi analogi antara pasar (ekonomi) dengan perilaku pemilih (politik).<sup>61</sup> Apabila secara ekonomi anggota masyarakat dapat bertindak secara rasional, yaitu menekan ongkos sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, maka dengan perilaku politik pun anggota masyarakat akan dapat bertindak secara rasional pula, yakni memberikan suara ke partai politik yang dianggap mendatangkan keuntungan atau kemaslahatan yang sebesar-besarnya dan menekan kerugian atau kemudharatan yang sedikit mungkin. Secara demikian, perilaku pemilih berdasarkan pertimbangan rasional tidak hanya berupa alternatif yang paling menguntungkan (*maximum gained*) atau yang mendatangkan kerugian yang sedikit, tetapi juga dalam arti

---

57 Dalam model identifikasi partai, tindakan voting dilihat sebagai ungkapan perasaan bukan sekedar instrumen. Ini merupakan cara untuk menunjukkan dalamnya loyalitas pada partai. Sementara disisi lain, model sosiologis menekankan pengaruh struktur sosial pada partai politik. Konsep ini mengabaikan peran individu pemilih dan menekankan pada orang secara umum. Disamping itu, model sosiologis ini menekankan pada dasar sosial dari nilai-nilai dan kepentingan daripada bagaimana mekanisme orang-orang menterjemahkan ke dalam perilaku voting.

58 Lihat Herbert H. Hyman, *Political Socialization*, Yogyakarta: Collier Mcamillan Canada, Ltd., 1969.

59 Martin Harrop and William L. Miller, *Elections and Voters, A Coparative Introduction*, Hongkong: The Mac Millan Press Ltd., 1987. Hlm. 130

60 Afan Gaffar, *Javanese Voters, A Case Study of Election Under Party a Hegemonic Party System*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992. Hlm 4-9

61 Martin Harrop and William L. Miller p. 145-153.

memilih alternatif yang menimbulkan resiko yang paling kecil (*least risk*).<sup>62</sup> Dengan begitu, diasumsikan bahwa para pemilih mempunyai kemampuan untuk menilai isu-isu politik yang diajukan maupun calon (kandidat) yang ditampilkan. Penilaian rasional terhadap kandidat ini bisa didasarkan pada jabatan, informasi, pribadi yang populer karena prestasi masing-masing di bidang seni, olah raga, film, organisasi, politik dan semacamnya.

#### a. Pendekatan Sosiologis

Menurut pendekatan sosiologis, perilaku pemilih akan lebih sesuai apabila dikaji berdasarkan pada basis kelompok (*group basis of voting*). Bagi pendekatan sosiologis, pilihan politik berbagai kelompok yang berbeda akan memilih partai tertentu yang juga berbeda. Dengan demikian pemahaman tentang pola voting kelompok dapat dipahami berdasar posisi kelompok dalam masyarakat, sementara hubungan kelompok dengan partai politik sejalan dengan perkembangan partai politik itu sendiri bukan anggota masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa fokus dari pendekatan sosiologi bukan pada individu pemilih, melainkan pada kelompok dan partai.

Dengan demikian pada dasarnya pendekatan sosiologis<sup>63</sup> menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial seperti umur (tua-muda), jenis kelamin (laki-perempuan), agama dan semacamnya, dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk perilaku pemilih. Berkenaan dengan pendekatan sosiologis ini, lebih jelas Harrop dan Miller menyatakan sebagai berikut:

*...The sociological approach emphasizes the impact of social structure on political parties. It tends to by-pass the individual elector altogether and, to the extent that it does focus on people, it emphasizes the social base of values and interest rather than mechanisms by which they translate into voting behavior. Compared to other models, this*

---

62 Martin Harrop and William L. Miller. P. 145.

63 Para ahli sosiologis menekankan pada basis kelompok voting. Pemilihan dalam pandangan sosiologi adalah mengenai tingkat perbedaan pilihan kelompok untuk partai tertentu. Interpretasi mengenai pola voting kelompok ditemukan dalam posisi kelompok dalam masyarakat, dan bagaimana hubungannya sudah berkembang dengan partai politik, bukan merupakan kajian dari kelompok ini. Dengan demikian unit dari sosiologi pemilihan adalah kelompok dan partai, bukan individu pemilih. Lihat Martin Harrop and William L. Miller, *Elections and Voters, A Coparative Introduction*, Hongkong: The Mac Millan Press Ltd., 1987.

*approach provides questions rather than answers; hence we call it an approach rather than a model.*<sup>64</sup>

Dean Jaros<sup>65</sup> ketika mencoba menghubungkan antara keanggotaan dalam suatu kelompok dan perilaku politik seseorang meyederhanakan pengelompokan sosial itu kedalam tiga kelompok, yaitu kelompok primer, kelompok sekunder dan kelompok kategori.

- Kelompok Kategorik

Perbedaan tingkah laku politik pada kelompok kategorik bergantung kepada tiga hal, yaitu peristiwa politik, pengalaman politik, dan kultur sosial. Kelompok kategorik ini bisa diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pendidikan.

Dilihat dari jenis kelamin, laki-laki lebih aktif dalam politik ketimbang perempuan. Perbandingan antara laki-laki dan perempuan di USA yang ikut pemilu adalah 52:48, artinya 10% perempuan lebih sedikit dibanding dengan laki-laki. Walaupun menurut Bone dan Runey,<sup>66</sup> baik laki-laki maupun perempuan tidak ada perbedaan *preferensi* yang berarti. Rendahnya aktifitas perempuan dalam politik tidak lepas dari pandangan umum yang berkembang dalam masyarakat bahwa urusan perempuan lebih banyak pada merawat suami, rumah, dan anak sehingga harus meninggalkan urusan kasar seperti kegiatan bisnis, dan politik.

Dari sisi usia, hasil survey terhadap pemilih Amerika menunjukkan bahwa sejak tahun 1950-an penambahan proporsi pemilih secara ekstrim terjadi pada usia di bawah 20 tahun dan di atas 50 tahun, di sisi lain terjadi juga pengurangan pemilih yang berusia 20-34 tahun. Hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa semakin longgar waktu dan semakin terlibat lama dalam politik, maka akan semakin besar kemungkinan datang ke pemilihan umum. Sementara dari segi pendidikan menunjukkan bahwa pemilih Republik umumnya lebih terdidik, dan sebaliknya pemilih Demokrat umumnya kurang

64 Martin Harrop and William L. Miller, *Elections and Voters, A Coparative Introduction*, Hongkong: The Mac Millan Press Ltd., 1987. Hlm. 130

65 Uraian yang lebih lengkap mengenai hubungan antar variabel tersebut dapat dilihat dalam sub bab, Dean Jaros, *et.al.*, *Explaining the Political Behavior of Individual: Group or Social Factors*, Dean jaros *et. al.*, *Political Behavior, Choices and Perspective*, New York: St Martin's Press, 1974.

66 Hugh A. Bone and Austin Ranney, *Politics and Voters*, London: McGraw-Hill, Inc., 1963. hal. 26.

terdidik. Akan tetapi, sisi pendidikan ini tidak punya dampak pada apakah dia seorang Republik atau seorang Demokrat.

- **Kelompok Sekunder**

Secara umum kelompok sekunder lebih banyak berpengaruh pada perilaku politik dari pada kelompok kategorik. Kelompok sekunder yang paling banyak berpengaruh pada kehidupan politik adalah pekerjaan, status sosial ekonomi, dan kelas, serta kelompok etnik.

Hasil kajian menunjukkan bahwa orang-orang yang punya status pekerjaan yang tinggi cenderung jadi lebih Republikan dan lebih aktif dari pada mereka yang dengan status pekerjaan rendah, begitu juga mereka yang punya status sosial ekonomi ... "*the higher, the socio economi status....the more Republikan the vote*"... sementara kelompok etnik yang terdiri dari ras, agama, keturunan, dan penduduk asli atau bukan, hal ini merupakan sumber konflik permanen yang menghiasi politik hampir disetiap negara.<sup>67</sup> Hasil kajian perilaku memilih menunjukkan bahwa pola umum dari "WASPs" (*white-Anglo-Saxon-Protestan*) dengan status tinggi umumnya Republikan, sementara mereka yang mempunyai status rendah dan kelompok minoritas (umumnya Katolik, Yahudi, dan kulit hitam, dan Italia) umumnya memilih Demokrat.

Lebih jauh lagi, Gerald Pomper memerinci pengaruh pengelompokan sosial-ekonomi dalam kajian *voting behavior* kedalam dua variabel, yaitu variabel predisposisi sosial ekonomi pemilih. Menurutnya, predisposisi sosial-ekonomi keluarga pemilih mempunyai hubungan yang signifikan dengan perilaku pemilih. Preferensi-preferensi politik keluarga. Apakah preferensi politik ayah atau preferensi politik ibu akan berpengaruh pada preferensi politik anak. Predisposisi sosial-ekonomi ini bisa berupa agama yang dianut, tempat tinggal, kelas sosial, karakteristik demografis dan semacamnya.<sup>68</sup>

- **Kelompok Primer**

Kelompok sosial yang paling besar dan langsung pengaruhnya pada perilaku voting adalah kelompok primer, seperti keluarga dan pertemanan. Dari semua kelompok sosial yang secara politik paling

---

67 Hugh A. Bone and Austin Ranney, *Politics and Voters*, London: McGraw-Hill, Inc., 1963, p. 31.

68 Gerald Pomper, *Voter's Choice: Varieties of American Electoral Behavior*, New York: Dodd, Med Company, 1975, hlm. 195-208.

homogen adalah pasangan suami istri. Hasil studi<sup>69</sup> menunjukkan bahwa 90-95 persen pasangan suami istri mempunyai preferensi yang sama. Dan bukanlah hal yang tidak biasa apabila seorang suami aktif dalam politik, namun sebaliknya istrinya apatis secara politik, dan kebanyakan pilih politik perempuan mengikuti kehendak dari suaminya.<sup>70</sup>

Sementara dari sisi teman sejawat dan teman kerja hampir menunjukkan tidak adanya kesamaan atau homogenitas sebagaimana halnya kesamaan politik dalam keluarga. Sebagaimana hasil dari kelompok reserch Barelson,<sup>71</sup> sebagai contoh, ditanyakan kepada responden untuk mengetahui preferensi partai dari tiga teman baik mereka dan tiga teman kerja. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya satu dari lima responden Republikan menyatakan terdapat satu orang Demokrat dalam kelompoknya, dan hanya dua dalam lima responden Demokrat menyatakan sebagai Republikan.

#### **b. Pendekatan Psikologis**

Pendekatan psikologis menggunakan dan mengembangkan konsep dari psikologi, terutama konsep sikap dan sosialisasi, untuk menjelaskan perilaku pemilih. Menurut pendekatan ini para pemilih di Amerika menentukan pilihan karena pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagai produk dari proses sosialisasi. Mereka menjelaskan bahwa sikap seseorang, sebagai refleksi dari kepribadian seseorang merupakan variabel yang menentukan dalam mempengaruhi perilaku politiknya.<sup>72</sup>

Sikap menjadi variabel sentral dalam menjelaskan perilaku politik disebabkan oleh fungsi sikap itu sendiri. Menurut Greenstein (1969) fungsi sikap ada tiga, yaitu: *Pertama*, sikap merupakan fungsi kepentingan. Artinya, penilaian terhadap suatu obyek diberikan berdasarkan motivasi, minat dan kepentingan orang tersebut. *Kedua*, sikap merupakan fungsi penyesuaian diri. Artinya, seseorang bersikap tertentu sesuai dengan keinginan orang itu untuk sama atau tidak sama dengan tokoh yang disegani atau kelompok panutan. *Ketiga*,

---

69 Angus Campbel *et al.*, *The Voter Decide*, New York: Harper & Row, Publisher, Incorporated. Hal. 203.

70 Angus Campbel *et al.*, hal, 109.

71 Bernard R Barelson *et al.*, *Voting*. Chicago: The University of Chicago Press, 1954. hal, 55-56.

72 Herbert H. Hyman, *Political Socialization*, Canada: Collier Mcamillan, Ltd., 1969.



sikap merupakan fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri. Artinya, sikap seseorang itu merupakan upaya untuk mengatasi konflik batin atau tekanan psikis, yang mungkin berujud mekanisme pertahanan (*defence mechanism*) dan eksternalisasi diri seperti proyeksi, idealisasi, rasionalisasi dan identifikasi.<sup>73</sup>

Walaupun demikian, sikap bukanlah sesuatu yang bersifat begitu saja jadi, tetapi terbentuk melalui proses yang panjang, dari mulai lahir sampai dewasa.<sup>74</sup> Pada tahap *pertama*, informasi pembentukan sikap berkembang pada masa anak-anak yang sudah mulai mempersonifikasikan politik. Fase ini merupakan proses belajar keluarga, dimana anak-anak belajar dari orang tua tentang bagaimana perasaan orang tua mereka terhadap pemimpin-pemimpin politik; bagaimana orang tua mereka menganggap isu-isu politik, dan sebagainya. Tahap *kedua* adalah bagaimana sikap politik dibentuk pada saat dewasa ketika menghadapi situasi diluar keluarga, seperti di sekolah, antara kelompok-kelompok sebaya, dan sebagainya. Tahap *ketiga*, bagaimana sikap politik dibentuk oleh kelompok-kelompok acuan seperti pekerjaan, gereja, partai politik, dan asosiasi-asosiasi lain.

Melalui proses sosialisasi ini kemudian berkembang ikatan psikologis yang kuat antara seseorang dengan organisasi kemasyarakatan atau partai politik, yang berupa simpati terhadap partai politik.<sup>75</sup> Ikatan psikologis ini yang kemudian dikenal sebagai identifikasi partai. Konsep identifikasi partai dijadikan variabel sentral dalam menjelaskan perilaku memilih oleh penganut pendekatan psikologis. "Sebagai mana diakui oleh Czudnowski (1976), ... '*party identification*' has been found to be the single most important variable determining voting preferences."<sup>76</sup>

Walaupun demikian, patut dipahami bahwa identifikasi partai di sini berbeda dengan voting. Sebab identifikasi partai lebih menunjuk pengertian psikologis, yang ada dalam konstruksi pikiran manusia dan tidak dapat diobservasi secara langsung, sementara *voting* merupakan tindakan yang jelas dan dapat diobservasi secara langsung.

---

73 Fred J. Greenstein, *Personality and Politics*, Chicago: Markham Publishing, 1969.

74 Herbert H. Hyman, 1969.

75 Moshe M. Czudnowski, *Comparing Political Behavior*, London: Sage Publication Inc, New York, 1976

76 Moshe, M. Czudnowski, 1976.

- Identifikasi kepartaian

Model identifikasi partai berawal dari karya Angus Campbell dkk. tahun 1960 an.<sup>77</sup> Dalam *The American Voter*, Campbell dkk. menunjukkan adanya perbedaan perilaku memilih berdasarkan usia, *pertama*, sejumlah pemilih mengklaim tidak mengidentifikasi diri dengan partai tertentu di Amerika Serikat. *Kedua*, sejumlah pemilih mengklaim punya identifikasi yang kuat dengan salah satu dari dua partai di Amerika Serikat. Campbell dkk. menginterpretasikan perbedaan tersebut sebagai petunjuk adanya perkembangan tingkat partisan sejalan dengan pertambahan usia pemilih. Lebih tepatnya, mereka berpendapat kuatnya partisan bertambah seiring dengan semakin lamanya pemilih mengidentifikasi diri dengan partai, dan orang yang lebih tua umumnya telah mengidentifikasi dengan partai lebih lama dibanding dengan orang muda. Berkenaan dengan ini Campbell dkk. Memberikan sebuah bukti bahwa ketika mengamati untuk waktu yang cukup lama, antara mereka yang muda dan yang tua ketika pertama di teliti punya perbedaan tingkat identifikasi, namun semakin lama mereka tidak ada perbedaan.<sup>78</sup>

Dalam karya terbaru Converse melakukan pengembangan atas teori ini, dan berpendapat bahwa usia sendiri hanya memiliki dampak sedikit pada kuatnya partisipasi.<sup>79</sup> Walaupun pemilih baru tidak stabil, dan sedikit banyak responsif terhadap peristiwa-peristiwa baru dibanding dengan pemilih yang lebih tua,<sup>80</sup> hal ini terkait dengan lamanya menjadi bagian secara psikologis, bukan berubah karena proses dari siklus kehidupan semata. Berdasar pada dua asumsi tersebut Converse membangun sebuah model mengenai *strength of attachment*. Asumsi *pertama* adalah bertambah lamanya keterikatan

---

77 Angus Campbell, Phillip E. Converse, Warren E. Miller and Donald E. Stokes, *The American Voter*. New York: Wiley, 1960.

78 Hasil itu mungkin bukan sebuah kesimpulan yang dikarenakan dua alasan; *pertama*, sangat sedikit orang tua yang benar-benar mempunyai keterikatan dengan partai untuk waktu yang pendek. *Kedua*, secara konseptual seseorang dapat berpendapat bahwa lemahnya loyalitas partai disebabkan oleh sebetulnya keterikatan partai. C.F. Paul R. Abramson, 'Generational Change and the Decline of Party Identification in America': 1952-1974', *American Political Science Review*, 70 (1976), 469-78. Dalam James R. Tilley, Party Identification in Britain: Does Length of Time in the Electorate Affect Strength of Partisanship?, *Journal of Political Science*, Vol. 33 part 2, April 2003.

79 Phillip E. Converse, Of Time and Partisan Stability, *Comparative Political Studies*, 2 (1969), 139-72.

80 Phillip E. Converse, Of Time and Partisan Stability, p. 143.

pada partai akan memperkuat kerikatan itu sendiri. Pengulangan perilaku, seperti halnya voting untuk partai, memperkuat loyalitas seseorang kepada partai tersebut. Asumsi *kedua*, adanya penyaluran antar generasi menyangkut kuatnya partisan. Orang tua dengan identifikasi partisan yang kuat mewariskan kuatnya identifikasi ini kepada anak-anak mereka. Converse mempergunakan proses tersebut untuk menjelaskan keberadaan pengaruh generasi di beberapa negara (seperti Jerman), dan juga untuk menjelaskan penemuan pola usia secara umum dalam membangun demokrasi seperti di Amerika Serikat dan Inggris.

Berkenaan dengan identifikasi partai, Harrop mengemukakan sebagai berikut: *"The concept of party identification denotes the long-term feelings of attachment which many electors develop to a particular political party"*.<sup>81</sup> Dan secara umum, Campbell mendefinisikan identifikasi partai sebagai *"sense of individual attachment to a party,"* and *"this tie is a psychological identification which can persist without a consistent record of party support"*.<sup>82</sup> Identifikasi kepartaian diyakini awalnya diperoleh dari orang tua, dalam banyak kasus, hal ini diyakini menjadi tetap berlangsung sepanjang hidup, walaupun suatu waktu mengalami peningkatan maupun penurunan selama periode dewasa.<sup>83</sup>

*Identifikasi kepartaian akan mempengaruhi pilihan partai politik orang-orang menurut Campbell dan teman-temannya, "the strength and direction of party identification are in fact of central importance in accounting for attitude and behavior"*.<sup>84</sup> Dalam beberapa kasus dimana berbagai isu dan kandidat tidak begitu menonjol, peran identifikasi kepartaian mungkin menurun atau menjadi kurang signifikan dalam menjelaskan perilaku voting. Namun sebaliknya, dalam situasi dimana individu tidak punya pemahaman terhadap berbagai isu, catatan partai politik, atau kandidat, peran dari identifikasi kepartaian akan menjadi sangat kuat.

---

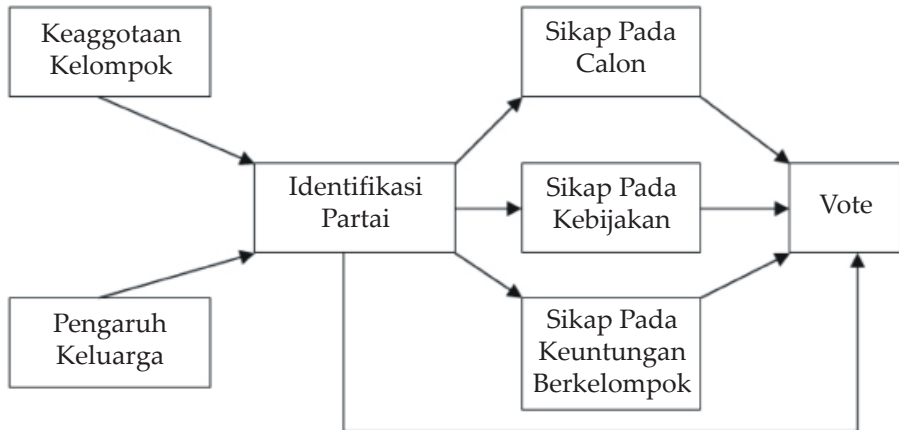
81 Martin Harrop and William L. Miller, *Elections and Voters, A Coparative Introduction*, Hongkong: The Mac Millan Press Ltd., 1987. Hlm. 131.

82 Angus Campbell, Phillip E. Converse, Warren E. Miller and Donald E. Stokes, *The American Voter*, New York: Wiley, 1960. P. 121.

83 Phillip E. Converse, *Of Time and Partisan Stability*, 1972.

84 Angus Campbell, Phillip E. Converse, Warren E. Miller and Donald E. Stokes, *The American Voter*, New York: John Wiley and Sons, 1960. Hlm. 121.

Dari argument tersebut, orang dapat melihat bahwa identifikasi kepartaian punya dampak yang sangat besar terhadap prilaku dengan cara mempengaruhi berbagai sikap. Secara umum proses identifikasi kepartaian ini dapat dilihat dalam Gambar 1.4.



**Gambar 1.4. Proses Identifikasi Kepartaian**

Sumber: Martin Harrop and William L. Miller, *Elections and Voters, A Coparative Introduction* (Hongkong: The Mac Millan Press Ltd., 1987).

Sebagaimana dikemukakan di atas identifikasi kepartaian cenderung diperoleh ketika usia dini. Kajian terhadap anak usia sekolah menunjukkan bahwa ketika mereka menginjak tingkat empat banyak pelajar yang sudah mempunyai pilihan bagi keberpihakan politik. Perasaan keberpihakan ini umumnya sama sekali tanpa penjelasan yang mendalam, yaitu, anak-anak muda tahu sedikit tentang calon-calon dan isu-isu berbeda diantara partai.<sup>85</sup>

Perasaan keberpihakan ini sering diperoleh dari keluarga mereka; mereka cenderung meng-imitasi tingkah laku orangtua mereka dan ketika dewasa orang tua mereka tidak aktif untuk berupaya membujuk anak-anaknya agar mengadopsi pandangan-pandangannya.<sup>86</sup> Sebagaimana yang dikemukakan oleh Herbert Asher, *"one reason why the family as so crucial that other agents of*

85 Lihat Fred I Greenstein, *Children and Politics*, New Haven, Conn: Yale University Press, 1965. Hlm. 71. Dalam John F. Bibby, *Politics, Parties, and Elections in America*, Chicago: Nelson-Hall Publishers, 1992. Hlm. 265.

86 Hal ini menunjukan bahwa identifikasi kepartaian bukan merupakan aktivitas yang sadar dilakukan, ini merupakan proses yang terjadi dalam keluarga secara tidak formal.

*political learning, such as teachers and school curricula, studiously avoid getting enmeshed in partisan questions.*"<sup>87</sup>

- Memudarnya Identifikasi Partai

Dalam negara-negara maju, voting tidak menunjukkan dinamika yang tinggi dari pemilu ke pemilu, khususnya yang terkait dengan pergeseran politik pemilih. Bahkan hasil kajian voting di Amerika, seperti yang dikemukakan Campbell, bahwa voting hanyalah sebuah aksi penegasan saja dari pada tindakan memilih.<sup>88</sup> Walaupun demikian, proses perubahan dalam partisan choice bisa saja terjadi walaupun jangka waktunya cukup lama. Proses ini terjadi akibat adanya pemudaran ikatan terhadap partai politik tertentu (*dealignment*) dan berganti kepada partai politik lain.

Harrop mendefinisikan *dealignment* sebagai "*the weakening of party loyalties*" dan ini merupakan trend yang paling penting dalam kajian pemilu dua puluh tahun terakhir ini.<sup>89</sup> Selanjutnya di menjelaskan bahwa *dealignment* terjadi karena adanya perubahan dalam struktur sosial:

*Pertama, the decline of class and religious loyalties reduces the traditional social base of many parties. Kedua, the expansion of education encourages the growth of middle-class radicalism and also give more voters the skills needed to analyse politics in a less partisan fashion. Ketiga, the emergence of television reduce the functional significance of parties as channels of political communication and replaces a partisan medium (the press) with a self-consciously neutral or 'independent' news medium.*"<sup>90</sup>

Memudarnya dukungan terhadap partai akan berarti hilangnya sebagian suara partai yang bersangkutan. Di dalam negara-negara demokrasi liberal, termasuk Indonesia, penomena memudarnya dukungan atau menurunnya identifikasi partai akan menyebabkan berpindahnya pemilih ke partai lain atau/dan terbentuknya partai baru sebagai wadah baru untuk menyampaikan aspirasinya. (lihat

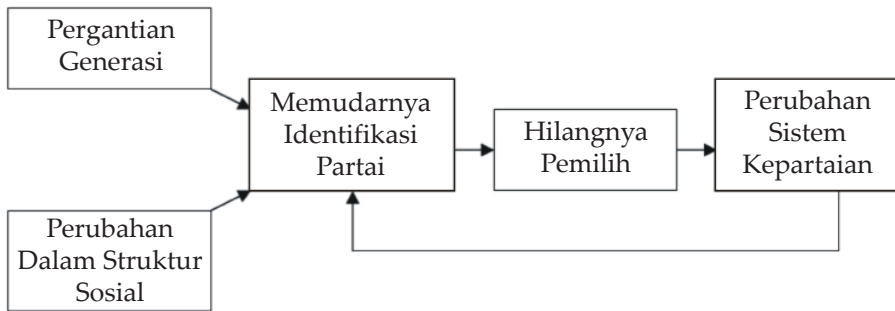
87 Herbert B. Asher, *Presidential Elections and American Politics*, 4th ed., Homewood, Ill.: Dorsey Press, 1988. Hlm. 71.

88 Angus Campbell, Phillip E. Converse, Warren E. Miller and Donald E. Stokes, *The American Voter*, New York: John Wiley and Sons, 1960

89 Martin Harrop and William L. Miller, p. 139.

90 Martin Harrop and William L. Miller, *Elections and Voters, A Coparative Introduction*, Hongkong: The Mac Millan Press Ltd., 1987. Hlm. 140.

gambar 1.5) Seperti yang dikemukakan Harrop, “*Partisan dealignment can lead to electoral volatility which may in turn produce changes in the party system. These may take the form of new parties emerging (such as the Greens), or old ones declining (such as the French Communists).*”<sup>91</sup>



**Gambar 1.5. Proses Memudarnya Identifikasi Kepartaian**

Sumber: Martin Harrop and William L. Miller, *Elections and Voters, A Coparative Introduction* (Hongkong: The Mac Millan Press Ltd., 1987).

Memudarnya dukungan terhadap partai akan berarti hilangnya suara partai yang bersangkutan. Di dalam negara-negara demokrasi liberal, penomena memudarnya dukungan atau menurunnya identifikasi partai akan menyebabkan berpindahnya pemilih ke partai lain atau/dan terbentuknya partai baru sebagai wadah baru untuk menyampaikan aspirasinya. Oleh karena itu, menurut Harrop dan Miller (1987) pemudaran ikatan partisan ini akan berakibat pada terjadinya perubahan dalam sistem kepartaian, karena ada kemungkinan partai lama tenggelam, sementara partai baru muncul. Perubahan *electoral* ini akan berlangsung terus sampai pada akhirnya menemukan keseimbangan baru (*maintaining*).

### c. Pendekatan Pilihan Rasional

Penggunaan pendekatan rasional dalam menjelaskan pemilih oleh ilmuwan politik sebenarnya diadaptasi dari ilmu ekonomi. Mereka melihat adanya analogi analogi antara pasar (ekonomi) dengan perilaku pemilih (politik). Apabila secara ekonomi anggota masyarakat dapat bertindak secara rasional, yaitu menekan ongkos sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, maka dengan perilaku politik pun anggota masyarakat akan dapat bertindak secara

91 *Ibid.*

rasional pula, yakni memberikan suara ke Partai Politik yang dianggap mendatangkan keuntungan atau kemaslahatan yang sebesar-besarnya dan menekan kerugian atau kemudharatan yang sedikit mungkin. Sebagaimana Eulau dan Heinz (1984) kemukakan: “*the theory assumes that the voter recognises his own self-interest, evaluates alternatives candidates on the basis of which will be best serve this self interest, and casts his vote for candidate most favorably evaluated*”.<sup>92</sup>

Secara demikian, perilaku pemilih berdasarkan pertimbangan rasional tidak hanya berupa alternatif yang paling menguntungkan (*maximum gained*) atau yang mendatangkan kerugian yang sedikit, tetapi juga dalam arti memilih alternatif yang menimbulkan resiko yang paling kecil (*least risk*), yang penting mendahulukan selamat. Dengan begitu, diasumsikan bahwa para pemilih mempunyai kemampuan untuk menilai isu-isu politik yang diajukan maupun calon (kandidat) yang ditampilkan. Penilaian rasional terhadap kandidat ini bisa didasarkan pada jabatan, informasi, pribadi yang populer karena prestasi masing-masing di bidang seni, olah raga, film, organisasi, politik dan semacamnya.

Dalam pendekatan rasional ini ada tiga poin penting yang bisa diambil, yang mana hal ini dapat membedakan secara jelas dengan pendekatan indentifikasi partai, yaitu: *pertama*, *voting* dianggap sebagai sebuah instrumen, dalam arti untuk pencapaian tujuan selanjutnya; *kedua*, pendekatan pilihan rasional umumnya memfokuskan pada *voter's political goals*; dan *ketiga*, pendekatan pilihan rasional mengasumsikan para pemilih (*voters*) sebagai jembatan dalam pendekatan mereka terhadap informasi politik yang nota bene sebagai suara (*vote*) itu sendiri.<sup>93</sup>

## 2. Perilaku Pemilih Indonesia

### a. Cleavage Aliran

Jika partai politik menginginkan dirinya relevan secara sosial, dan secara demikian bisa membangun basis sosialnya, maka partai harus mengaitkan dirinya dengan *cleavages* yang ada. Secara umum *cleavages* bisa bersumber dari agama, etnik, bahasa, budaya, maupun geografis. Di Indonesia, tidak seperti di negara Barat, dimana *cleavage* berdasar

92 Eulau dan Heinz, *The Behavior Persuation in Politics*, New York: Random House, New York, 1965.

93 Martin Harrop and William L. Miller, p. 146.

kelas tidak begitu berpengaruh, justru cleavage agamalah yang paling dominan dibanding dengan cleavages yang lain.<sup>94</sup> Pengaruh kelas terhadap perilaku politik tidak signifikan karena di Indonesia tidak mengenal stratifikasi kelas berdasarkan pada status sosial ekonomi, dan persepsi kelas secara subjektif tidak dikenal dalam masyarakat desa, khususnya dalam istilah Marxis. Jika dipahami, konteks kelas dalam masyarakat Jawa, mungkin dapat dijelaskan dalam kerangka birokrasi, bukan dalam konteks Marxis.<sup>95</sup> Orang-orang hanya mengenal dua pembeda mengenai individu dalam masyarakat yaitu *wong cilik* (orang kecil) dan *wong gedhe* (orang besar), yaitu orang-orang yang berkerja di birokrasi atau priyayi. Oleh karena itu, istilah seperti “kiri”, “liberal”, tidak dipahami dalam istilah tata bahasa di Indonesia.<sup>96</sup>

Indonesia merupakan bangsa yang plural, dimana agama, etnik, bahasa, budaya, maupun geografis menjadi sekat-sekat sosial (*social cleavages*) dalam masyarakat. Sekat-sekat sosial ini membawa implikasi pada kehidupan yang lebih luas seperti ekonomi, sosial dan politik. Pembelahan masyarakat ini oleh Liddle (1992) disebut sebagai Sungai Budaya. Sungai Budaya ini merupakan formulasi dinamis dalam sebuah

---

94 Kajian mengenai hubungan anatra cleavage dan partai politik banyak dilakukan oleh para ilmuwan politik, seperti Seymour Lipset dan Stein Rokkan, Bartolini, dan Sartori. Seymour Lipset dan Stein Rokkan meyakini bahwa partai politik memainkan peran signifikan dalam terbentuknya political cleavages. Karena mereka menganggap bahwa perbedaan struktur sosial tidak serta merta ditranslasi menjadi perbedaan politik yang signifikan. Mobilisasi oleh partai-partai politik justru merupakan bagian yang amat penting dalam transformasi struktur sosial yang berbeda menjadi mengeras dan mendorong terbentuknya political cleavages. Studi Bartolini yang lebih kontemporer, misalnya, menunjukkan bahwa ketika sebuah cleavage (kelas, agama, atau etnik misalnya) menjadi terorganisasi, maka cleavage ini akan menjelma menjadi kekuatan politik yang otonom dan berpengaruh. Studi klasik Sartori juga menunjukkan bahwa partai politik (kiri) bukanlah ‘akibat’ dari eksistensi kelas ekonomi. Sebaliknya, partai politik lah yang mengeraskan perbedaan kelas, melalui proses sosialisasi politik yang membentuk kesadaran kelas.

95 Lihat Afan Gaffar, *Javanese Voters, A Case Study of Election Under s Hegemonic Party System*, Jogjakarta: Gadjah Mada University Press, 1992. Hlm. 9.

96 Hilangnya istilah kiri bisa ditelusuri kebelakang ketika massa Soekarno dan Soeharto. Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai partai ‘kiri’ hilang di Indonesia setelah dihapuskannya pada tahun 1965. Juga dengan ditekannya Partai Sosialis Indonesia (PSI) oleh Sukarno dan juga Suharto. Dampak dari hilangnya elemen kiri ini, partai dengan ideologi yang programatik menjadi tidak ada. Karena itu, attachment agama atau attachment yang bersifat primordial lain menjadi lebih dominan. Literatur mengenai sistem politik yang mapan, terutama di Eropa, selalu menampilkan spektrum ideologis partai-partai politik yang konsisten: kiri-tengah-kanan. ‘Kiri’ berarti mendukung peran negara yang dominan dalam ekonomi dan kesejahteraan (bersifat sosialis, belum tentu sinonim dengan komunis), ‘tengah’ adalah moderat, dan ‘kanan’ adalah kelompok liberal yang berusaha mengeliminir peran negara (singkatnya tidak setuju subsidi dan pajak yang tinggi misalnya) dan berusaha mengembalikan kapital lewat aktifitas masyarakat (pasar).



percakapan dramatis dari masyarakat yang bergumul dalam budaya itu. Oleh karena itu, interpretasi mengenai pembelahan masyarakat Indonesia bergerak secara dinamis dari waktu ke waktu yang tidak pernah berhenti, terus bergerak, deras dan lambat. Di dalam aliran itu, banyak aliran yang mengalir terpisah tetapi suatu saat mereka bertemu dan berpisah kembali.

Kenyataan akan adanya pluralitas sosial masyarakat ini, mendorong banyak para ahli melakukan penelitian untuk mencari kategorisasi agar dapat menjadi rujukan dalam memahami fenomena masyarakat tersebut. Kategorisasi masyarakat Indonesia yang umum menjadi rujukan adalah kategorisasi yang dikemukakan oleh C. Poensen (1886), Snouck Hurgronje (1899-1906), Clifford Geertz (1960), Allan A. Samson (1973 dan 1978), Karl D. Jackson, Donald K. Emmerson (1978), Syafii Ma'arif (1985) dan Endang Saefuddin Anshari (1981), dan terakhir, Liddle dan Saiful Mujani (2004).

C. Poensen (1886) dan Snouck Hurgronje (1899-1906), telah memopulerkan istilah Abangan dan putihan yang menjadi dasar sarjana Barat dalam melihat polarisasi masyarakat Jawa. Melalui pendekatan Budaya, Clifford Geertz (1960) dalam penelitiannya di Mojokuto Jawa Timur, menyusun kategorisasi masyarakat kedalam trikotomi yaitu Santri, Priyayi, dan Abangan. Penelitian jenis antropologi yang dilakukan Geertz di Mojokuto mulai Mei 1953 sampai September 1954<sup>97</sup>

97 Pengamatan Geertz tentang Mojokuto terkait profesi penduduk setempat, penggolongan penduduk menurut pandangan masyarakat Mojokuto berdasarkan kepercayaan, preferensi etnis dan pandangan politik, dan ditemukannya tiga inti struktur sosial yakni desa, pasar dan birokrasi pemerintah yang mencerminkan tiga tipe kebudayaan: Abangan, Santri dan Priyayi. Struktur sosial desa biasanya diasosiasikan kepada para petani, pengrajin dan buruh kecil-- yang penuh dengan tradisi animisme seperti upacara slametan, kepercayaan terhadap makhluk halus, tradisi pengobatan, sihir dan magis menunjuk kepada seluruh tradisi keagamaan Abangan. Sementara pasar terlepas dari penguasaan etnis Cina yang tidak menjadi pengamatan Geertz-- diasosiasikan kepada petani kaya dan pedagang besar dari kelompok Islam berdasarkan kondisi historis dan sosial di mana agama Timur Tengah berkembang melalui perdagangan, dan kenyataan yang menguasai ekonomi Mojokuto. Mereka itulah yang memunculkan subvarian keagamaan Santri. Terakhir adalah subvarian Priyayi. Varian ini menunjuk pada elemen Hinduisme lanjutan dari tradisi Keraton Hindu-Jawa. Sebagaimana halnya Keraton (simbol pemerintahan birokratis), maka Priyayi lebih menekankan pada kekuatan sopan santun yang halus, seni tinggi, dan mistisisme intuitif dan potensi sosialnya yang memenuhi kebutuhan kolonial Belanda untuk mengisi birokrasi pemerintahannya. Metode kerja yang dipakai Geertz dalam pengumpulan data-data selama penelitiannya di Mojokuto, kota kecil di Jawa Timur, adalah penguasaan bahasa lokal, pemanfaatan banyak informan local, pembagian tugas dengan tim peneliti lain, pendalaman topik-topik tertentu yang membutuhkan detail, dan pengumpulan data-data statistik. Dan bagian terbesarnya digunakan untuk kegiatan observasi-partisipatif. Prinsip kerjanya

ini menghasilkan konstruksi nalar Jawa yang sangat berpengaruh bagi perkembangan sosial, politik, dan budaya di Indonesia. Trikotomi Agama Jawa itulah yang sampai sekarang terus disebut-sebut dalam wacana sosial, politik, dan budaya di Indonesia dan menjadikannya referensi induk atas upaya ilmuwan sosial di belakangnya yang membedah tentang Jawa. Kekuatan utama Geertz mengungkap fenomena Agama Jawa adalah kemampuan mendeskripsikan secara detail ketiga varian tersebut dan menyusun ulang dalam konklusi hubungan konflik dan integrasi yang logis dan utuh atas ketiga varian tersebut.

Hasil perenungan Geertz sampai pada kesimpulan bahwa Santri adalah kelompok Muslim yang taat dalam menjalankan perintah agama. Bagi Santri pada tahun 1950-an, taat terhadap agama berarti mengupayakan agar Islam menjadi landasan atau asas bagi pengelompokan politik, seperti parpol dan negara. Karena itu, mereka mendirikan parpol berbasis Islam, dan pada tahun 1950-an mereka juga mengupayakan agar Indonesia berasaskan Islam. Sebaliknya, Abangan adalah kelompok Muslim yang tidak taat menjalankan kewajiban agama Islam, apalagi memperjuangkan agar negara berasaskan Islam. Bagi Kelompok Abangan, Islam tidak penting dalam kehidupan sosial-politik. Dengan demikian tidak heran apabila kemudian kelompok Abangan lebih terbuka terhadap ideologi politik lain yang dominan di dunia pada waktu itu, yakni komunisme. Sementara Priyayi adalah kelompok Muslim yang secara kultural dekat dengan Abangan, namun yang membedakan mereka adalah dari cara berperilaku yang lebih halus dan datang dari pegawai pemerintah.

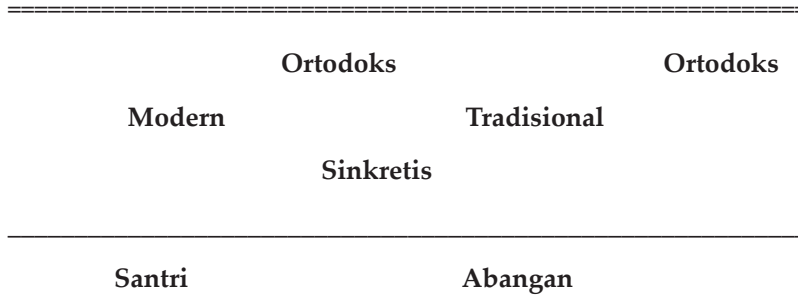
Dikotomi yang terjadi antara Santri (tradisional) dan Abangan, dalam prakteknya keseharian tidaklah ekstrim, karena ada titik temu diantara kedua kutub tersebut. Baik Santri maupun Abangan, keduanya adalah Islam, sehingga dalam kehidupan praktis keagamaan ada momen dan aktivitas yang mempersatukan mereka terutama pada kelompok Santri Islam Tradisional (warga Nahdliyin).<sup>98</sup>

---

berdasarkan proposisi bahwa ahli etnografi itu mampu mencari jalan keluar dari datanya, untuk membuat dirinya sendiri jelas agar para pembaca dapat melihat sendiri bagaimana tampaknya fakta-fakta itu, dan dengan demikian bisa menilai kesimpulan dan generalisasi ahli etnografi itu sesuai dengan persepsi aktualnya sendiri (hal. 9). Meskipun Jawa adalah Jawa yang stereotip penunjukannya jelas, namun perhatian Geertz mengungkap adanya varian agama Jawa lebih kepada adanya kompleksitas masyarakat Jawa.

98 Peneliti melakukan observasi kedalam masyarakat yang merepresentasikan dari kelompok Abangan dan Santri. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa baik mereka yang Abangan

Lebih Jauh Karl D. Jacktion (1978) menempatkan varian Santri ke dalam dikotomi Modernis dan Tradisionalis ortodoks, dan varian lainnya ditempatkan sebagai sinkretis. Dalam hal ini kelompok Modernis secara politik direpresentasikan oleh Masyumi, PMI (Partai Muslimin Indonesia), dan Muhammadiyah, sementara Tradisionalis ortodoks direpresentasikan oleh Nahdatul Ulama.<sup>99</sup>



**Gambar 1.6. Varian Keagamaan di Kalangan Orang Jawa**

Sumber: Karl D. Jackson, *Kewibawaan Tradisional, Islam, Dan Pemberontakan, Kasus Darul Islam Jawa Barat*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990.

Dikotomi yang sama dengan Jackson, dilakukan Allan A. Syamson (1978) yang membelah masing-masing kelompok kedalam tiga belahan. Kelompok Modernis terbelah oleh perbedaan strategi dalam bersikap terhadap penguasa, yaitu sebagai Fundamentalis, reformis, dan akomodasionis, dan kelompok Tradisional terbelah oleh perbedaan kepentingan individual yaitu kyai, politisi, dan birokrat.<sup>100</sup> Sementara

maupun yang Santri pada acara ritual keagamaan seperti acara tahlilan, yasinan, kajatan, acara kematian mereka bersatu. Apalagi dalam acara kematian, baik yang Abangan maupun yang Santri melakukan kerja sama dan sebenarnya masyarakat Abangan secara tidak langsung dalam acara-acara seperti kematian dan perkawinan mau tidak mau harus bekerja sama dengan yang Santri untuk mengurus upacaranya. Yang membedakan mereka adalah pada pelaksanaan ajaran Islam seperti shalat, puasa atau naik haji. Bagi yang Abangan, umumnya mereka tidak menjalankan shalat dan puasa dalam bulan Ramadhan, apalagi melakukan ibadah Haji. NU mampu menciptakan mekanisme inklusi sosial yang smooth. Orang Abangan masuk dalam komunitas Santri secara halus tanpa harus melepas identitasnya semula. Sebab pada praktiknya di desa-desa, mereka hampir tidak pernah mempermasalahkan secara vulgar apakah sholat lima waktu atau tidak; puasa penuh di bulan ramadhan atau tidak. Meski hampir selalu ada ceramah agama di dalam forum tahlilan, namun tidak dalam seruan yang keras.

<sup>99</sup> Karl D. Jackson, *Kewibawaan Tradisional, Islam, Dan Pemberontakan, Kasus Darul Islam Jawa Barat*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990.

<sup>100</sup> Menurut Allan A. Syamson, Fundamentalis merupakan kelompok Modernis Islam yang dicirikan sebagai kaku, puristic dalam menginterpretasikan Islam, berlawanan dengan pemikiran sekuler dan pengaruh Barat begitu juga dengan sinkretisme dari keyakinan para

Endang Saifudin Anshari menempatkan polarisasi masyarakat kedalam dikotomi Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler.<sup>101</sup> Demikian juga Ahmad Syafi'i Ma'arif (1985).<sup>102</sup> Di sisi lain Donald K. Emmerson (1978) membaginya kedalam Priyayi Abangan dan Santri akomodasionis.<sup>103</sup> Yang terbaru, datang dari Saeful Mujani dan Liddle (2004) yang membelah masyarakat kedalam non Muslim, Abangan Muslim, Tradisionalis, dan Liberal Modernis Muslim vs. Konservatif modern Muslim.

Di sisi lain, Umat Islam sebagai konsep merupakan suatu kesatuan sosial, budaya, dan politik. Namun dalam kehidupan sosial, konsep tersebut mengalami distorsi dan sulit diketemukan secara objektif.<sup>104</sup> Berbagai kategori umat Islam yang dikemukakan oleh para ahli mulai dari Clifford Geertz dengan Santri, Abangan, dan Priyayi; Foreman dengan kyai, awam, dan elit birokrat; Saifuddin Anshari dengan Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler. Berbagai kategori tersebut tidak dikenal dalam budaya Islam, yang dikenal dalam Islam dalam mengkategorikan masyarakat didasarkan pada tingkat pemahamannya mengenai Islam serta tingkat ketaatannya dalam menjalankan ajaran Islam. Namun dalam diskursus akademik, justru hasil rujukan para ahli itulah yang paling banyak dipakai sebagai rujukan atau patokan dalam menganalisis masyarakat Islam di Indonesia, terutama tipologi Abangan, Santri dan Priyayi yang dikemukakan Geertz.

## b. Kekuasaan Tradisional

Karl D. Jackson (1973;1980) melakukan analisis mengenai keterlibatan orang desa di masyarakat Sunda Jawa Barat dalam pemberontakan Darul Islam tahun 1948-1962. Analisisnya didasarkan pada konsep kekuasaan tradisional yang ada di Indonesia. Sejumlah sarjana lain, seperti Selosumarjan (1963), dan Sartono Kartodirjo (1984) juga mencoba

---

Tradisionalis, dan menekankan pada keutamaan agama di atas politik. Reformis secara teoritik menekankan pada keutamaan agama di atas politik, tapi ada kelonggaran untuk melakukan kerja sama dengan kelompok sekuler. Sementara kelompok akomodasionis menilai kerangka persatuan disediakan oleh Islam, karena menyusun kepentingan social dan ekonomi harus menjadi prioritas dari organisasi Islam. Untuk bacaan lebih lanjut, lihat Allan A. Syamson, *Conceptions of Politics, Power, and Ideology in Contemporary Indonesian Islam*, dalam Karl D. Jackson, *Power and Communication in Indonesia*, London, University of California Press, 1978. p. 196-226.

101 Endang Saepudin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, Jakarta: Rajawali, 1981.

102 Ahmad SYafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta:LP3ES, 1985.

103 Donald K. Emmerson, *Indonesia's Elite*, Ithaca and London: Cornell University Press, 1976.

104 Abdul Mulkan Mulkan, *Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Ummat Islam, Dalam Prespektif Sosiologis*, Jakarta: CV. Rajawali, 1988.

memakai konsep ini dalam menganalisis struktur kekuasaan di Indonesia. Apa yang mereka temukan adalah bahwa pola paternalisme merupakan fenomena umum dalam masyarakat Jawa.<sup>105</sup>

Melalui analisisnya, Jackson mempergunakan konsep di atas (kekuasaan tradisional), yang dia definisikan sebagai “*the exercise of personalistic power accumulated through the past and the present role of the influences as provider, protector, educator, source of values, and status superior of those who have established a dependency relationship with him*”.<sup>106</sup> Tipe kekuasaan ini menurut dia dinamakan tradisional karena pola kekuasaan ini sudah dipraktekkan sejak lama dan sudah menyatu dari generasi ke generasi. Jackson lantas menjelaskan bahwa kekuasaan tradisional merupakan bagian dari model hubungan patron-client dalam masyarakat yang vertikal, statis, dan asimetris.

Namun menurut Gaffar kelemahan utama dari konsep Jackson adalah tidak secara nyata mendefinisikan konsep kepemimpinan masyarakat desa Jawa diantara para pemimpinnya sebagai “yang berpengaruh, pelindung, pendidik, sumber nilai-nilai,” dan semacamnya. Jackson secara membingungkan menggabungkan apa yang dinamakan “bapakisme” atau paternalisme dengan penghargaan terhadap orang yang lebih tua sebagai tifikal Indonesia yang dalam kenyataannya merupakan konsep yang sangat berbeda. Lebih jauh, Jackson tidak sampai pada satu pertanyaan mengenai dasar kepemimpinan politik di masyarakat Jawa. Sebagai contoh, apa yang menjadi dasar umum dari hubungan antara pemimpin dan bawahan? Apakah ini mempunyai satu dasar kepentingan material yang sama seperti dalam hubungan patron-client, atau apakah punya banyak bentuk kepentingan dalam konsep umum budaya politik antara pemimpin dan massa? Dengan kata lain, apa nama umum dari konsep kekuasaan tradisional, oleh karena itu, nampaknya sangat mendua, dan menyisakan banyak pertanyaan yang belum terjawab.

Seorang analis politik Indonesia, Harry Tjan Silalahi, lebih memberikan gambaran yang kongkrit ketika dia mendiskusikan

---

105 Masalah kekuasaan tradisional Jawa secara teoritis dibahas oleh Benedict R. O’G. Anderson, *The Idea of Power in Javanese Power*, dalam Benedict R. O’G. Anderson *Culture and Politics in Indonesia*, Ithaca and London: Cornell University Press, 1990. Lihat juga Benedict R. O’G. Anderson, *Language and Power, Exploring Political Cultures in Indonesia*, Ithaca and London: Cornell University Press, 1990.

106 Jackson dalam Afan Gaffar, *Javanese Voters, A Case Study of Election Under s Hegemonic Party System*, Jogjakarta: Gadjah Mada University Press, 1992. Hlm. 13.

hasil dari pemilu 1977. Dia berpendapat bahwa faktor utama yang memberikan penjelasan kepada sikap pemilih di Indonesia utamanya dari peran kekuasaan tradisional yang ditunjukkan dalam bentuk paternalism "bapakism" (1977). Seperti halnya Jackson, Silalahi juga menganggap bahwa pola hubungan antara pemimpin dan pengikut menempatkannya dalam konteks hubungan *patron-client*.<sup>107</sup> "Dalam hal ini Silalahi mengatakan "Kenyataannya hubungan ini terkait dengan timbal balik antara hak dan kewajiban sangat jelas terlihat ketika kita memahami bahwa ini merupakan pertukaran untuk perhatian dan perlindungan yang diharapkan anak terhadap Bapak, dan imbalannya dengan memberikan rasa hormat dan kepatuhan". Lantas dia membedakan tiga tipe kepemimpinan di dalam masyarakat desa yang memainkan peran signifikan dalam pemilihan umum, yaitu pemimpin formal, pemimpin tradisional, dan pemimpin agama.<sup>108</sup>

Silalahi selangkah lebih maju dari pada Jackson dengan menjelaskan penamaan umum bagi hubungan antara pemimpin dan pengikut. Bagaimanapun, memahami hubungan antara pemimpin dan pengikut dalam bentuk *clientilistic* merupakan hal yang terlalu menyederhanakan karena hubungan timbal balik dalam bentuk rasional tidak selalu nyata dalam masyarakat Indonesia di pedesaan. Lebih jauh, pengklasifikasian pemimpin tidak jelas karena pemimpin formal dapat juga sebagai pemimpin agama sekaligus.

### c. Pola Kepemimpinan

Masyarakat Jawa umumnya memahami masyarakat dalam dua pembilahan, yaitu *wong gedhe* orang berpengaruh dan *wong cilik* orang

---

107 Hubungan sosial "Bapakisme" lebih halus (*sophisticated*) dari pada hubungan *patron-client* yang banyak terdapat di beberapa Negara Asia lainnya dan Amerika Latin yang sangat menitik beratkan aspek material. Sebab dalam sistem bapakisme ini pada prinsipnya "Bapak" atau "Patron" menanggung pemenuhan kebutuhan social, material, spiritual, dan pelepasan pemenuhan kebutuhan emosional untuk para "anak buah" atau client. Faktor utama yang menentukan dalam "Bapakisme" adalah hutang budi yang menimbulkan sikap hormat yang begitu tinggi dari "anak buah" kepada "bapak". Dalam hubungan seperti ini maka "anak buah" tidak akan pernah mau menentang "bapak" sekalipun jelas diketahui bahwa "bapak" tidak benar. Lihat Asep Nurjaman, *Kepolitikan Orde Baru dalam Perspektifkultural dan Struktural*, Malang: UMM Press, 1998. lihat juga, Anderson and Audrey Kahin, *Interpretating Indonesian Politics: Thirteen Contribution to The Debate*, New York, Interim Reporst Series, 1982.

108 Harry Tjan Silalahi, "The 1977 General Election: The Result and The Role of Traditional Authority Relation in Modern Indonesian Society, 1977, dalam Afan Gaffar, *Javanese Voters, A Case Study of Election Under's Hegemonic Party System*, Jogjakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.

pada umumnya. *Wong gedhe* umumnya dipahami sebagai pemimpin yang punya sudut pandang yang sama sebagaimana orientasi masyarakat kota, “orang pintar”, “pengambil keputusan yang efektif” dan “mempunyai kewenangan dalam kehidupan lokal.” Sementara *wong cilik* di sisi lain merupakan pengikut yang hanya dipahami sebagai orang pasif dan masa bodoh, dan “orang yang tidak mengerti” seperti Clifford Geertz (1965) menggambarkannya secara menarik.

Stratifikasi dalam masyarakat desa Jawa mungkin juga dapat dipahami dalam dua bagian pembilahan seperti di atas, yaitu pemimpin dan pengikut atau rakyat. Banyak para sarjana mencoba menggambarkan hubungan antara pemimpin dan rakyat sebagai pola komunikasi dimana pemimpin merupakan figur dominan ketika berhadapan dengan rakyat. Tipe hubungan dinamakan sebagai pola hubungan *patro-cilent* atau bapak-anak buah.

Dalam diskusinya Jackson (1980) mengemukakan mengenai pola partisipasi masyarakat Jawa Barat “*the critical factor for the vast majority who live in villages is that the decision have already been made for them by their superiors in the networks previously established superior-subordinate relations that dominate their social and hence their political lives*”. Persoalannya dalam analisis Jackson adalah, *pertama* dia tidak menunjukkan secara nyata dasar kekuasaan kepemimpinan politik di dalam masyarakat desa, *kedua*, clientilisme bukan hanya merupakan fenomena masyarakat Jawa, karena ini dapat juga ditemukan dalam berbagai pola hubungan kekuasaan baik itu di dalam masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. *Ketiga*, Jackson tidak memahami kenyataan bahwa ada faktor ideologi yang umum yang membuat pemimpin dan pengikut mempunyai pola perilaku politik umumnya. Dia mencatat bahwa “*obedient behavior is not based on agreement with the leader’s position regardless of the ideological contradictory turns that he may take*”. Dia juga menolak dengan menyatakan bahwa kenyataan pengikut akan tidak selalu patuh terhadap pemimpin sebagaimana ditunjukkan oleh James Scott.<sup>109</sup>

Konsep kekuasaan karismatik dalam pandangan Weberian lebih cocok untuk menjelaskan pola kepemimpinan dalam masyarakat desa Jawa. Menurut Weber, dasar kepemimpinan karismatik adalah

---

109 James C. Scoott, Patron Client Politics and Political Change in Southeast Asia, American Political Science Vol. 66, dalam Afan Gaffar, *Javanese Voters, A Case Study of Election Under's Hegemonic Party System*, Jogjakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.

kepercayaan bahwa pemimpin ditakdirkan dan kelebihan khusus yang orang pada umumnya tidak mempunyai, seperti kekuatan supra natural.

*“the charismatic leader gains and maintains authority solely by proving his strength in life...he must perform miracles, and he must perform heroic deeds, and it is the qualified leader as such who is obeyed by the virtue of personal trust in him and his revelation his heroism or his exemplary qualities so far as they are found within the scope of individual’s belief in his charisma”.*<sup>110</sup>

Konsep kepemimpinan karismatis juga dibahas oleh Soemarsaid Moertono dan juga Ben Anderson mengenai kesaktian (kesakten) dalam konsep kekuasaan Jawa. Karisma adalah kemampuan seorang pemimpin dalam ilmu gaib atau hal-hal bersifat keramat untuk memperbesar pengaruh sehingga keabsahannya sebagai pemimpin diakui dan didukung. Konsep kesakten adalah konsep inti dalam ideologi atau paham Jawa tradisional tentang kekuasaan.<sup>111</sup>

Sementara ciri-ciri kepemimpinan karismatis Ann Ruth Willner,<sup>112</sup> mengemukakan sebagai berikut. *Pertama*, adanya keyakinan bahwa sang pemimpin memiliki kualitas istimewa yang superhuman; *kedua*, para pengikutnya kehilangan kritisme terhadap pemimpinnya, bahkan cenderung memperlakukan pendapat atau sikap pemimpinnya sebagai sesuatu kebenaran; *ketiga*, para pengikut memberikan loyalitas mutlak kepada para pemimpinnya; dan *keempat*, massa pengikut senantiasa memperlihatkan komitmennya yang emosional dan personal terhadap pemimpinnya. Namun Menurut Hajrianto Tohari (2002), karena kepercayaan kepada karismatis seorang pemimpin selalu bersifat lokal dan terbatas, dan tidak pernah nasional, apalagi universal, yakni karisma ditempatkan, daerah, atau golongan tertentu saja, serta tidak bagi komunitas atau tidak pada entitas politik lainnya, maka kepemimpinan karismatis cenderung menciptakan primordialitas dan komunalitas.

---

110 Dalam Afan Gaffar, *Javanese Voters, A Case Study of Election Under’s Hegemonic Party System*, Jogjakarta: Gadjah Mada University Press, 1992. Hlm.19.

111 Hajriyanto Y. Thohari, *Kepemimpinan Nasional, Antara Primodialisme dan Akuntabilitas*, dalam Maruto MD dan Anwari WMK, (editor), *Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat, Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indoensia, 2002. Hlm. 144.

112 Ann Ruth Willner, *The Spellbinders: Charismatics Political leadershi*, Yale: Yale university Press, 1984. Hlm. 3-9.



Dalam masyarakat Desa Jawa, tipe kepemimpinan ini juga dimiliki baik oleh pemimpin yang mempunyai posisi dalam birokrasi formal sebagai kepala desa, dan pemimpin diluar birokrasi, khususnya pemimpin spritual. Dalam kasus ini, Sartono Kartodidjo (1984) berpendapat bahwa, "di luar pejabat pemerintahan terdapat juga pemimpin alami yang berkuasa seperti kyai lokal,<sup>103</sup> haji, guru, dukun. Para pemimpin tersebut mempunyai atribut tertentu seperti jimat yang memberika perlindungan dari bahaya, mempunyai ilmu kedigjayaan, ilmu pengetahuan, ilmu keselamatan, yang memberi kekuasaan sebagai manusia lebih. Tipe kepemimpinan ini dapat membentuk perilaku politik dalam negara berkembang seperti Indonesia.

---

113 Anderson menyebutkan bahwa dalam komunitas Islam, orang yang mempunyai status tertinggi adalah mereka yang berpengetahuan tinggi mengenai hukum agama dan mereka yang mengajarkan ajaran Islam. Lihat Benedict R. O'G. Anderson *Culture and Politics in Indonesia*, Ithaca and London: Cornell University Press, 1990, terutama hlm. 61.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

## **Tujuan Intruksional Bab 2**

Dalam bab ini penulis membahas mengenai sistem kepartaian dan pemilu yang terjadi di negara Indonesia. Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan dapat memiliki kompetensi sebagai berikut:

1. Mahasiswa dapat memahami dan mengerti tentang perkembangan partai politik di Indonesia, baik secara nasional maupun lokal.
2. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang bentuk sistem kepartaian yang dihasilkan dari proses pemilu yang dilaksanakan.
3. Mahasiswa dapat memprediksikan hasil pemilu yang dilaksanakan berdasarkan pada fakta, gejala maupun peristiwa-peristiwa politik yang terjadi.
4. Mahasiswa dapat menghubungkan sistem pemilu yang dipergunakan dengan sistem kepartaian yang akan dihasilkan dalam pemilu.
5. Mahasiswa dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar bertanggung jawab dalam melakukan tindakan politik.



# 2

## SISTEM KEPARTAIAN DAN PEMILU

Dalam bab ini akan membahas sistem kepartaian dan aturan main pemilu di era reformasi. Membahas sistem kepartaian akan berguna untuk memahami realitas kepartaian yang terbangun dari hasil pemilu pasca reformasi. Guna membahas sistem kepartaian, digunakan kerangka konseptual yang dibangun oleh Sartori yang melihat sistem kepartaian dari jumlah dan jarak ideologis. Setelah membahas sistem kepartaian, akan dilanjutkan dengan membahas aturan main pemilu serta perdebatan yang melatar belaknginya. Pembahasan aturan main pemilu, akan memberikan landasan pada pembahasan selanjutnya terkait ketatnya persaingan dalam arena electoral yang telah mendorong partai/caleg berperilaku pragmatis. Lebih jauh dengan memahami aturan main pemilu bisa memberikan gambaran mengenai proses terbentuknya aturan main pemilu yang mendorong terciptanya pemilu demokratis sebagai wahana bagi tumbuhnya sistem kepartaian kompetitif.

### A. Sistem Kepartaian

Sistem kepartaian terbentuk akibat adanya persaingan antar Partai.<sup>114</sup> Persaingan itu terjadi karena partai politik berusaha untuk mengartikulasikan berbagai kepentingan kolektif yang berbeda, yang salah satunya bersumber atau berbentuk persaingan ideologi. Lipset dan Rokhan melihat pembentukan sistem kepartaian dan partai politik dari pendekatan sosiologis, khususnya pembelahan sosial (*social*

---

114 Giovanni Sartori, *Parties and Party System, A Framework for Analysis*. New York: Cambridge University Press, 1959. p. 44.

*cleavages*).<sup>115</sup> Sementara Sartori menganalisis sistem kepartaian dari dua kriteria yaitu dari jumlah dan jarak ideologis partai politik. Sistem dua partai menunjukkan jarak ideologi yang sangat kecil; sistem multipartai moderat (3-5 partai) menunjukkan jarak ideologi yang kecil; dan sistem multipartai ekstrim (6 atau lebih partai) menunjukkan jarak ideologi yang besar.<sup>116</sup> Sebelum membahas mengenai sistem kepartaian kompetitif di era reformasi, penting kiranya dikemukakan terlebih dahulu historis perkembangan partai politik di Indonesia.

### 1. Perkembangan Partai Politik di Indonesia

Perkembangan partai politik di Indonesia bisa dilacak dari periodisasi sistem Politik yang pernah berkembang. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia, dapat kita catat ada sekitar empat kali pergantian sistem politik yang secara dinamik dari sistem demokrasi ke otoriter dan kembali ke demokrasi. Untuk pertama kali kita menjalankan sistem politik demokrasi yaitu pasca revolusi kemerdekaan yang dinamakan dengan Demokrasi Liberal, dimulai tahun 1950 awal hingga 1955.<sup>117</sup> Selanjutnya situasi politik berubah ketika terjadinya pertarungan ideologis yang tiada kunjung akhir antara kelompok Islam dan Nasionalis yang ingin merubah konstitusi. Kelompok Islam ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, sementara kelompok Nasionalis ingin menjadikan Indonesia sebagai negara sekuler. Dengan Dekrit Presiden, Soekarno membubarkan Konstituante yang bertugas membuat konstitusi baru, maka lahirlah sebuah era baru sistem politik Indonesia yang dinamakan dengan “demokrasi terpimpin”. Periode demokrasi terpimpin berjalan antara tahun 1959 hingga 1965.

Dinamika politik selanjutnya terjadi dengan berakhirnya rezim demokrasi terpimpin yang digantikan oleh rezim otoriter baru yang melibatkan militer. Era ini terlahir akibat pertarungan pengaruh politik antara PKI dan Militer dengan Soekarno sebagai wasitnya. Kondisi tersebut berujung pada pemberontakan PKI yang dikenal dengan

---

115 Kuskridho Ambardhi, *Mengungkap Politik Kartel*, Jakarta: PT Gramedia, 2009. hal 21. Bahasan tentang *cleavages* bisa dilihat dalam karyanya Mair, Cleavages, dalam Ricard S Katz and William Crotty, (edt) *Hand Books of Party Politics*, 2006, p. 371-375. Lihat juga Francesca Vassalo and Clyde Wilcox, *Party As A Carrier of Ideas*, Ricard S Katz and William Crotty, (edt) p. 414-417.

116 Sartori, P. 186.

117 Perjalanan politik era Demokarasi Liberal bisa dilacak dalam bukunya Herbert Feith, *The Decline of Constotutional Democracy in Indonesia*, Ithaca and London: Cornell University Press, 1962.

G.30.S/PKI,<sup>118</sup> dan momen ini menjadi jalan bagi masuknya militer ke panggung politik dengan Soeharto sebagai tokohnya, yang dikenal dengan Orde Baru. Periode ini cukup panjang, yaitu dari mulai tahun 1966 hingga 1971. Dinamika politik terus berlanjut. Akibat resesi ekonomi yang dialami Indonesia sebagai dampak dari krisis finansial global, pemerintahan Orde Baru yang membangun legitimasinya lewat pembangunan ekonomi terus mengalami delegitimasi. Pada akhirnya rezim Soeharto ini harus juga berakhir akibat desakan rakyat lewat demonstrasi brutal pada bulan Mei 1998. Setelah itu muncullah era baru sistem politik Indonesia demokratis jilid dua yang dikenal dengan era reformasi.

#### a. Masa Awal Kemerdekaan

Awal mula tumbuh dan berkembangnya partai politik di Negara kita bisa ditelusuri pada saat tahun 1908, karena pada waktu itu ada organisasi-organisasi yang memberi kesan adanya partai politik. Walaupun dalam kenyataannya, memang bukan partai politik dalam artian modern yaitu sebagai organisasi yang tujuannya untuk merebut kedudukan dalam Negara dan berkompetisi dalam pemilihan umum. Organisasi yang mirip partai politik itu mengemuka ketika zaman kolonial Belanda, persisnya saat gerakan nasional mulai muncul, yaitu Boedi Oetomo di tahun 1908 dan Syarikat Islam di tahun 1912.<sup>119</sup> Satu momentum besar yang penting bagi perkembangan kepartaian pada masa sekarang ini adalah dibentuknya Volksraad<sup>120</sup> tahun 1906 (Kahin, 1952; Riswanda, 2004), semacam parlemen yang pimpinannya orang Belanda.

---

118 Tesis terkait pemberontakan G.30.S/PKI bisa dilihat dalam bukunya Harold Crouch, *Army and Politics in Indonesia*, Ithaca: Cornell University Press, 1978.

119 Syarikat Islam didirikan oleh Oemar Said Tjokroaminoto pada tahun 1912, pada tahun itu HOS Tjokroaminoto tidak mau menyebut Syarekat Islam adalah sebuah partai politik dan banyak kalangan juga menganggap Syarekat Islam berada dalam asas yang sama dengan Budi Utomo. Bila Budi Utomo menggunakan himbauan cultural, maka Sarekat Islam memperdengarkan himbauan keagamaan demi kepentingan perdagangan. Sarekat Islam baru menjadi partai politik dalam arti yang sebenarnya ketika memecah menjadi Sarekat Islam Merah, dan dikembangkan selanjutnya oleh Sneevliet. Untuk lebih jelasnya lihat Daniel Dhakidae, *Partai Politik Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia*, dalam Seri Prisma, Analisa Kekuatan Politik, LP3ES, Cetakan kedua, 1988.

120 Kehadiran Volksraad menjadi penting karena mengaktifkan organisasi-organisasi gerakan itu, baik lewat dalam maupun luar Volksraad. Berkat gerakan yang bermain di luar Volksraad, pada tahun 1930-an berkembang usaha-usaha untuk menggabungkan partai-partai dan memperjuangkan apa yang disebut Indonesia Berparlemen. Pada tahun 1937 terbentuk MIAI (Majelisul Islamil A'laa Indonesia) yang merupakan gabungan dari partai-partai yang

Ketika masa pendudukan Jepang, kehidupan kepartaian mengalami kelumpuhan, dan baru ada harapan kembali setelah merdeka yaitu dengan muncul Maklumat X tanggal 16 Oktober 1945. Maklumat ini menjadi momentum penting bagi perkembangan partai-partai politik di Indonesia. Isi maklumat itu sendiri disamping membahas partai politik, juga termuat isi yang memberikan kewenangan legislatif kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Selanjutnya Badan Pekerja KNIP mengajukan usul agar kepada masyarakat segera diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mendirikan partai politik dalam rangka menyongsong pemilihan umum yang direncanakan pada Januari tahun 1946. Pada tanggal 8 November, berdirilah Masyumi,<sup>121</sup> kemudian PKI, dan partai-partai lainnya. Sampai menjelang tahun 1950, partai-partai ini memainkan peranan penting. Merekalah yang menjadi anggota kabinet dan anggota KNIP.

## b. Masa Orde Lama

- Demokrasi Liberal

Memasuki tahun 1950, ketika jelas jelas Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer (berdasarkan UUDS 1950), corak koalisi,

---

beraliran Islam. Dalam usahanya memperjuangkan Indonesia Berparlemen itu, pada tahun 1939 GAPI (Gabungan Politik Indonesia), yang merupakan gabungan partai-partai beraliran nasional, menggandeng MIAI dan mendirikan Komite Rakyat Indonesia (KRI). Tiga tahun kemudian, 1941, karena KRI dinilai kurang aktif, MRI (Majelis Rakyat Indonesia) dibentuk. Kali ini anggotanya bukan cuma partai politik, melainkan juga organisasi-organisasi non-partai, seperti serikat pekerja. Sampai pada periode ini fokus perjuangan atau peran mereka adalah membangkitkan kesadaran nasional. Untuk lebih jelasnya lihat Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.

<sup>121</sup> Sehubungan dengan maklumat pemerintah tersebut umat Islam mengadakan Kongres Umat Islam Indonesia pada tanggal 7-8 November 1945 di Yogyakarta. Mereka adalah para ulama dan para pejuang bersenjata yang datang dari berbagai daerah dan dari berbagai front bersenjata, seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, Persatuan Islam, Persatuan Umat Islam, dan sebagainya. Setelah bersidang selama dua hari, akhirnya kongres memutuskan dan menyepakati pembentukan partai tunggal umat Islam sebagai wadah perjuangan politik umat Islam Indonesia. Wadah tunggal tersebut bernama "Masyumi". Berdasarkan latar belakang yang demikian inilah, maka umat Islam memutuskan untuk membuat saluran politik bagi wadah perjuangan aspirasi umat Islam. Sejak masa inilah pulalah muncul partai-partai umat Islam. Partai pertama yang muncul pada masa itu adalah Masyumi

Masyumi didirikan pada tanggal 8 November 1945 di Yogyakarta yang dianggap oleh umat Islam sebagai satu-satunya partai politik bagi umat Islam. Sejak berdirinya hingga saat akan bubar pada tahun 1960 masalah struktur dan organisasi partai selalu menjadi pembahasan dari kongres ke kongres. Jenis keanggotaan Masyumi dapat dikelompokkan kepada dua macam. Pertama, perseorangan dan kedua organisasi. Anggota perseorangan disyaratkan berusia minimal 18 tahun atau sudah berumah tangga. Ia tidak dibenarkan merangkap keanggotaan partai lain. Anggota perseorangan ini mempunyai hak suara. Sedangkan anggota organisasi atau yang disebut dengan hak istimewa mempunyai hak untuk memberi nasehat atau saran.



yang selama tahun 1945-1949 sudah biasa mereka lakukan tadi, semakin kentara.<sup>122</sup> Selama periode ini (sampai tahun 1959) tak satu pun kabinet yang memerintah yang tak merupakan hasil koalisi, kecuali Kabinet Djuanda yang non-partai.<sup>123</sup> Karena mudahnya mendirikan partai, maka partai-partai yang ada sulit dipahami identitas dan kaitannya dengan paham-paham yang berkembang di masyarakat. Identitas atau kaitan ideologisnya dengan masyarakat hanya bisa dikenali lewat partai-partai besar, terutama empat besar yang memenangkan pemilu tahun 1955 itu, yakni PNI (22,3% dari seluruh jumlah suara), Masyumi 20,9%, Nahdlatul Ulama 18,4%, dan PKI 16,4 %. (Alfian, 1990).

Perbedaan orientasi ideologi atau aliran menjadi sebab dari munculnya perbedaan orientasi politik yang berujung pada konflik di antara mereka. Aliran yang berbeda bersaing terutama dalam menentukan masa depan Indonesia, atas dasar apa Republik Indonesia harus dibangun. Pertentangan politik yang terjadi dapat disederhanakan ke dalam dua kelompok aliran politik yaitu, santri dan abangan. Pada saat itu kekuatan dua aliran ini cukup berimbang, sehingga tidak cukup membentuk kekuatan menetapkan asas negara di Konstituante dan karena itu berakhir *deadlock*.

- Masa Demokrasi Terpimpin

Kenyataan ini mendorong Presiden Soekarno merevisi model demokrasi ala Barat karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi Indonesia. Untuk meng ganti model demokrasi ala Barat, Soekarno mengajukan alternatif berupa "Demokrasi Terpimpin." Akhirnya Soekarno membubarkan parlemen dan sejumlah partai penting melalui Dekrit 5 Juli 1959.<sup>124</sup> Dikeluarkannya Dekrit oleh Soekarno

---

122 Pertentangan ideologis menjadi salah satu ciri yang membedakan periode ini dengan kehidupan kepartaian periode sebelumnya. Kalau pada periode revolusi kemerdekaan arus besar perjuangan partai adalah perlawanan terhadap Belanda, pada periode ini tema besar yang mewarnai perdebatan publik dan kampanye, misalnya selama dan menjelang pemilu tahun 1955, adalah persoalan apakah negara Republik Indonesia akan menggunakan Pancasila ataupun Islam sebagai pilar negara. Perdebatan seperti ini berlanjut terus di Dewan Konstituante.

123 Berkenaan dengan jatuh banggunya cabinet masa pemerintahan parlementer bias dilihat dalam bukunya Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy In Indonesia*, Ithaca: Cornell University Press, 1978.

124 Dekrit ini bukan saja membubarkan Dewan Konstituante, tapi kehidupan partai politik boleh dibilang sejak itu, sampai suatu masa tertentu, menjadi "mandul.". Boleh dikata, pada periode Demokrasi Terpimpin ini sepak terjang partai dibatasi, dan itu dimungkinkan karena

dipercaya lebih mencerminkan kemenangan politik abangan. Dengan dibubarkannya Masyumi yang merupakan sayap utama politik santri, itu berarti menghapus secara signifikan polarisasi partai berbasis aliran.

### c. Masa Orde Baru

Kelanjutan dari peristiwa Dekrit, maka diberlakukan kebijakan negara dalam keadaan darurat (SOB). Kondisi ini mendorong militer muncul menjadi kekuatan politik, di samping partai-partai. Militer mendapat dukungan kelompok fungsional yang digalangnya sejak akhir 1950-an, sehingga militer menjadi satu-satunya kekuatan yang bisa mengimbangi PKI. Pada bulan Oktober 1964, dukungan golongan-golongan fungsional tadi secara resmi dilembagakan menjadi Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar).

Pada tahun 1965, terjadi peristiwa yang mengubah secara dramatis kehidupan politik nasional, tak terkecuali kepartaian. Pada tanggal 30 September 1965 terjadi tragedi politik di Indonesia, berupa pemberontakan PKI yang dikenal dengan *Gerakan Tiga Puluh September* (Gestapu), dan berakhir dengan dijadikannya PKI sebagai organisasi terlarang. Peristiwa ini pelan tapi pasti mengarah pada pergantian kepemimpinan politik di Indonesia, dari Soekarno ke Soeharto.<sup>125</sup> Di bawah kepemimpinan Soeharto, merupakan awal baru sejarah politik Indonesia (orde baru) dengan menekankan pada stabilitas politik dan pemebangunan ekonomi. *Politic no, economy yes* menjadi menjadi jargon baru masa rezim Soeharto.<sup>126</sup> Jumlah partai politik yang terlalu banyak dengan perbedaan-perbedaannya yang tajam di bidang ideologi dianggap sebagai penyebab konflik dan ketegangan yang bermuara pada perpecahan. Oleh karena itu pada tahun 1967, Presiden Soeharto mengajukan saran agar partai-partai yang ada mengelompokkan diri berdasarkan asas, aliran. Ini kemudian dikenal dengan sebutan konsensus nasional.

---

diumumkannya keadaan SOB di tahun 1957. Hanya PKI yang berhasil menonjolkan diri. Sebaliknya, PNI, NU, dan partai-partai kecil lainnya makin tertekan. Dan lebih dari sekadar membatasi ruang gerak, Presiden Soekarno juga membubarkan partai, seperti yang dialami Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI).

125 Super Semar sampai sekarang masih menjadi teka teki mengenai apa yang sebenarnya ada dalam surat perintah itu, namun yang pasti Super Semar ini menjadi jembatan bagi Soeharto untuk menjadi orang nomor satu di Indonesia.

126 Pembangunan menjadi ideology baru bagi Indonesia masa rezim Soeharto. Oleh karena itu segala sesuatu yang dianggap menghambat pembangunan ekonomi akan disingkirkan jauh-jauh, termasuk juga hiruk pikuk politik multi-partai.

Pada tanggal 7 Februari 1970 Presiden Soeharto menyerukan kepada parai-partai politik agar dalam menghadapi pemilu, partai-partai tetap menjaga stabilitas nasional dan kelancaran pembangunan ekonomi, menghindari perpecahan, dan memikirkan penglompokan diri dalam kelompok materil dan spirituil, disamping adanya Golongan Karya. Pada tanggal 27 Februari, Presiden Soeharto mengadakan konsultasi dengan para pimpinan parpol untuk melakukan pengelompokan partai-partai. Pertama-tama dukungan muncul dari PNI dan IPKI, kemudian diikuti oleh NU.

Dalam pengelompokan ini ada partai yang merasa tidak pas masuk kedalam kelompok spiritual yaitu Partai katolik dan Parkindo, akhirnya mereka memutuskan untuk bergabung dengan kelompok Nasionalis.<sup>127</sup> Akhirnya pada tanggal 4 Maret 1970 terbentuk kelompok Nasionalis yang merupakan gabungan dari PNI, IPKI, Murba, Parkindo, dan Partai katolik. Selanjutnya pada tanggal 14 Maret Tahun 1970 terbentuk kelompok spiritual yang terdiri dari NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Penyederhanaan (baca: penciptaan) baru tuntas pada tahun 1972. Partai-partai Islam seperti NU,<sup>128</sup> Parmusi, Perti,<sup>129</sup> dan PSII<sup>130</sup> dilebur menjadi

---

127 Situasi pada saat itu tidak memberikan pilihan lain bagi parpol kecuali mempusikan diri. Kelompok nasionalis yang disebut kelompok Demokrasi Pembangunan menjadi Partai Demokrasi Indonesia pada tanggal 10 Januari 1973. Sedangkan kelompok persatuan menjadi Partai Persatuan Pembangunan. Sejak saat itu Indonesia mempunyai system tiga partai, yaitu: Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan partai Golongan Karya. Walaupun dalam komunikasi politiknya Golkar tidak mau menyebutkan dirinya sebagai partai politik, dalam setiap pemilu yang dilaksanakan pada masa Orde baru selalu mencantumkan dirinya hanya Golkar tanpa di embel-embeli dengan partai.

128 NU yang lahir tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya tidak bisa dilepaskan dari konteks politik global, khususnya perkembangan politik di Turki Usmani. Turki Usmani merupakan imperium yang menganut sistem khilafah dan merupakan simbol kekuatan politik dunia Islam pada saat itu. Ketika sistem khilafah ini kemudian dihapus oleh Mustafa Kemal tahun 1924, dan menggantinya dengan sistem sekuler, dunia Islam mengalami keguncangan, termasuk di Indonesia sebagai negara penganut Islam terbesar.

Indonesia memandang bahwa kasus penghapusan sistem khilafah di Turki sebagai hal yang amat penting untuk disikapi. Sebagai negara yang sedang dijajah oleh Belanda, Indonesia menaruh harapan yang besar terhadap Turki Usmani sebagai pusat kekuatan politik dunia Islam, setidaknya secara moral. Dengan penghapusan sistem khilafah ini sedikit banyak turut melemahkan moral perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi kolonialisme. Oleh sebab itu, kasus penghapusan sistem khilafah ini kemudian ditanggapi secara serius oleh umat Islam di tanah air dengan membentuk komite khilafah sebagai forum untuk menentukan wakil Indonesia dalam kongres khilafah yang akan diadakan di Mesir. Agenda kongres khilafah di Mesir ini antara lain adalah untuk menentukan alternatif pengganti sistem khilafah yang telah dihapus di Turki Usmani.

Dalam perkembangannya kemudian, kongres khilafah di Mesir untuk sementara waktu ditunda. Atas penundaan ini umat Islam di tanah air khususnya para ulama di Jawa mengalihkan perhatiannya pada masalah perkembangan sosial politik di Hijaz. Di negara-

Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sedangkan Partai Katolik, Parkindo, IPKI, PNI, dan Murba menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dengan demikian, organisasi politik yang mengikuti pemilu tahun 1977 tinggal tiga. Bersamaan dengan itu, akar partai di tingkat desa dan kecamatan diputus, dan hanya diizinkan sampai daerah tingkat Kota atau Kabupaten (*floating mass*).

Dalam perkembangan PPP dan PDI yang masih mencantumkan asas khas masing-masing di samping asas Pancasila di dalam AD/ART nya, yaitu Islam untuk PPP dan Nasionalisme untuk PDI digiring untuk menerima asas tunggal Pancasila. Kemudian berlangsunglah apa yang disebut sebagai usaha menggiring parpol ke arah asas tunggal. Upaya pemerintah ini awalnya mendapat tentangan terutama dari kelompok Islam, namun akhirnya unsur-unsur dari Islam pulalah yang pertama kali secara eksplisit menerima, yaitu NU. Akhirnya, pada tahun 1984, bulatlah sudah pengakuan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi PPP dan PDI. Demikianlah pemilu tahun 1987 dan 1992 kemudian terlaksana dengan hanya tiga peserta yang semuanya berasas sama, dan perbedaan hanya diperbolehkan pada program saja.<sup>131</sup>

---

negara ini Ibnu Sa'ud bersama aliran Wahabi mengadakan tindakan pelarangan terhadap tradisi-tradisi beragama yang selama ini berjalan seperti berziarah ke maqam-maqam para wali, melaksanakan wirid-wirid, dan pengkajian terhadap kitab-kitab mazhab Syafi'i. K.H. A. Abdul Wahab atas nama kalangan tradisi mengajukan usu-usul agar kebiasaan beragama seperti yang dilarang di Makkah itu dihormati oleh penguasa Arab termasuk Makkah. Karena usul-usul ini tidak mendapat respon yang baik dari peserta kongres di Bandung, akhirnya K.H.A. Wahab beserta beberapa temannya keluar dari komite khilafah. Kemudian rapat-rapat secara intensifpun dilakukan yang menghasilkan Komite Merembuk Hijaz. Komite inilah kemudian diubah menjadi NU pada suatu rapat di Surabaya tanggal 31 Januari 1926. Dengan demikian kelahiran NU sangat terkait dengan perkembangan politik global sekaligus sebagai organisasi yang berusaha untuk menghempang laju perkembangan paham pembaru Islam di tanah air. Lebih lanjut mengenai pembahasan NU baca Martin Van Bruinessen, *NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pecarian Wacana Baru*, Yogyakarta, PT LKIS, 1994

129 Perti didirikan pada tanggal 20 Mei 1930. Perti merupakan organisasi tradisional Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang berpusat di Bukittinggi Sumatera Tengah. Di antara pendirinya adalah Syaikh Sulaiman Ar-Rasuli dari Candung dan Syaikh Muhammad Djamil Djaho dari Padang Jepang Payakumbuh. Mereka ini adalah ulama-ulama besar yang memiliki surau-surau besar.

Perti didirikan sebagai benteng pertahanan golongan tadisional Islam terhadap faham-faham atau aliran modern. Ia berhasil mengembangkan organisasinya hingga mencapai kawasan Jambi, Tapanuli, Bengkulu, Aceh, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Awal berdirinya Perti banyak mengurus masalah-masalah pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Kemudian para pndirinya mengubah Perti menjadi Partai Politik pada tanggal 22 November 1945 dan diperkuat oleh kongres di Bukittinggi pada tanggal 22-24 Desember 1945.

130 Partai Syarikat Islam Indonesia didirikan pada 13 Juli 1947 melalui suatu kongres di Banjarnegara Jawa Barat. Berdirinya partai ini tidak terlepas dari manuver formatur Amir Sjarifuddin ketika membentuk kabinet. Pada masa itu Amir Sjarifuddin mengikutsertakan

#### d. Masa Reformasi

Dominasi Orde Baru yang otoriter terhenti ketika Presiden Soeharto melepaskan jabatannya dan menyerahkannya kepada Habibie pada tahun 1998. Mulai saat itu gairah politik muncul kembali yang ditandai dengan berdirinya beragam partai politik. Kemunculan partai politik pada era reformasi, nampak seperti melanjutkan sejarah kejayaan partai politik masa Orde Lama seperti yang tercermin dalam pemilu 1955. Partai yang berbasis Islam, Nasionalis, kecuali komunis mewarnai perpolitikan Indonesia di era reformasi. Pemilu pertama kali dilakukan pada tahun 1999 yang diikuti oleh 48 partai politik. Partai-partai politik Islam yang muncul pada era reformasi ini mencapai 32, dan dari jumlah tersebut yang lolos Pemilu 1999 sebanyak 17 partai, yaitu PPP, PBB, PK, PUI, PSII, 1905, PNU, PKU, Partai Politik Islam Masyumi, PMB, PAY, PID, PIB, KAMI, PP, PUMI, dan Partai SUNI.

Dari sekian partai Islam, partai yang paling militan adalah Parta Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan (PK) dengan perolehan suara masing-masing 1,94% (mendapatkan 13 kursi) dan 1,36 % (mendapatkan 7 kursi). PBB menjadi harapan baru bagi kembalinya kejayaan Masyumi pada pemilu 1955. Pemimpin senior PBB merupakan aktivis Masyumi. Organisasi dan ideologi yang dibangun oleh PBB didasarkan pada organisasi DDII (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia), yang bermarkas di gedung Masyumi pada masa lalu di Jakarta Pusat.<sup>132</sup> Pada pemilu 2004, suara PBB meningkat dari 1,94% menjadi 2,56%. Bahkan yang lebih spektakuler adalah peningkatan suara PK yang sebelumnya hasil pemilu 1999 tidak lulus *Electoral Threshold* 3% dan harus berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahter (PKS), pada pemilu 2004 mendapatkan 7% suara nasional.

---

kalangan Islam, tetapi ditolak oleh Masjumi. Kalangan PSII tertarik dengan ajakan ini dan bersedia duduk dalam kabinet yang ia bentuk. Para pemimpin PSII tampaknya merasa tidak puas, khususnya Wondoamiseno dan Arudji Kartawinata. Keduanya tokoh sebelum perang, menduduki posisi yang tidak berarti dalam Masjumi. Mereka masuk dalam pimpinan Hizbullah dan Sabilillah yang kurang mempunyai pengaruh dalam mengambil keputusan politik. Pada masa jajahan Belanda mereka ini termasuk pimpinan PSII tingkat nasional. Bahkan Wondoamiseno malah duduk dalam pimpinan MIAI sebagai kepala sekretariat badan federasi itu. Oleh sebab itu dapat dipahami jika Partai Sjarikat Islam Indonesia (PSII) sering membanggakan dirinya sebagai partai tertua di Indonesia. Karena memang partai ini berasal dari Sarekat Dagang Islam (1911), dan Sarekat Islam (1912).

131 Meskipun secara formal perbedaan aliran dan ciri ideologi telah dihilangkan, pada pemilu tahun 1987 dan 1992 pun, tema-tema kampanye masih sangat diwarnai oleh slogan-slogan yang berkaitan dengan aliran dan ideologi. Kampanye pada kedua pemilu tersebut bukan melulu mengangkat isu-isu seperti pembangunan dan korupsi, melainkan juga agama.

132 DDII didirikan dan di pimpin selama beberapa dekade oleh Mohammad Natsir.

Partai Keadilan merupakan partai baru, dipimpin oleh para akademisi dan dosen berbagai universitas, umumnya dari universitas negeri, dan didukung oleh banyak santri modernis yang mempunyai pendidikan tinggi. Hal ini merupakan bagian dari produk pengembangan pendidikan pada masa Orde Baru, dan kesempatan yang diberikan pada generasi muda Muslim untuk sekolah ke luar negeri. Oleh karena itu, tidaklah heran apabila PKS mendapatkan dukungan dari kalangan mahasiswa perguruan tinggi. Dengan media pengajian, tarbiyah, para mahasiswa disamping mengembangkannya misi da'wah, juga sebagai alat konsolidasi dan sosialisasi partai.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dalam pemilu 1999 sudah mencatumkan asas partainya adalah Islam. Partai ini merupakan kelanjutan dari partai era Orde Baru yang merupakan hasil fusi dari partai-partai Islam. Pada saat menjelang didirikannya Partai Amanat Nasional (PAN), sebahagian elit PPP ini berupaya membujuk Amien Rais untuk tidak mendirikan partai, mereka khawatir kalau PAN didirikan maka suara partai Islam akan terpecah. Pada pemilu 1999 PPP mendapat 10,72%, namun dalam pemilu 2004 perolehan suara PPP mengalami penurunan menjadi 8,32%.

Sementara partai lain yang mempunyai hubungan dengan Islam, akan tetapi tidak memakai asas Islam seperti Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada pemilu 1999 masing-masing memperoleh suara 12,62% dan 7,12%. PAN didirikan oleh Amien Rais yang sebelumnya merupakan Ketua PP Muhammadiyah, sehingga dalam perjalanannya partai ini selalu dikaitkan dengan Muhammadiyah, walaupun secara organisatoris tidak ada hubungannya. Sedangkan PKB, sejak semula memang dinyatakan sebagai partainya Nahdlatul Ulama, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdurahman Wahid (Gus Dur). Memang tidak berlebihan kalau PKB dinyatakan sebagai partainya NU, karena Gus Dur sebagai pimpinan (Ketua Dewan Syuro) merupakan tokoh sentral di NU.

PDI-P yang merupakan representasi dari partai abangan dalam pemilu 1999 mendapatkan suara sangat tinggi dibandingkan dengan partai-partai lain dengan perolehan suara sebesar 33,76%. Kemenangan partai ini dianggap sebagai kemenangan wong cilik yang selama Orde Baru mendapat tekanan, dan Megawati yang merupakan putri dari seorang tokoh Proklamator menjadi simbol dari perjuangan wong cilik.

Akan tetapi, kemenangan PDI-P dalam pemilu 1999 tidak bertahan, rakyat mulai meragukan komitmen Megawati sebagai pembela *wong cilik* ketika menjabat sebagai Presiden. Pada Pemilu 2004, PDI-P mengalami penurunan suara yang sangat signifikan karena hanya memperoleh suara 19,58% di bawah Golkar.

Sementara Golkar yang merupakan partai pendukung rezim Orde Baru, walaupun terjadi hujatan akibat sepak terjangnya pada masa itu, namun pada pemilu 1999 tetap mendapatkan suara cukup signifikan yaitu 22,46%. Bahkan pada pemilu 2004, Golkar menjadi partai tertinggi dalam perolehan suara mengalahkan PDI-P yang pada pemilu 1999 memperoleh suara jauh melampaui partai-partai lain termasuk Golkar. Sebagai perbandingan pada pemilu 2004 Golkar mendapatkan 21,7% dan PDI-P mendapatkan suara 11,98%.

## **2. Sistem Kepartaian Kompetitif Era Reformasi: Dalam Konteks Lokal**

Dalam bahasan ini akan memotret sistem kepartaian, kasus di Malang Raya yang sifatnya lokal. Guna kepentingan ini, maka kompetisi yang akan dianalisis adalah kompetisi yang di tingkat lokal. Sebagaimana pembagian yang dikemukakan Sartori, sistem tipikal sistem kepartaian apa yang berlaku di suatu negara, dapat diukur dari berapa jumlah partai dan jarak ideologisnya. Dari sisi jumlah suatu negara dapat disebut sebagai bersistem satu partai, dua partai, atau multipartai, sementara dari jarak ideologis bisa disebut sistem multipartai moderat, dan sistem multipartai ekstrim.

Untuk mengukur kompetisi di tingkat lokal dapat dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa indikator terkait kekuatan partai yang dilihat dari perolehan suara: (1) Prosentase perolehan suara masing-masing partai dalam pemilu kepala Daerah; (2) Prosentase perolehan suara atau kursi masing-masing partai dalam pemilu legislatif; (3) Lamanya masing-masing partai politik dapat menguasai Kepala Daerah; (4) porsi waktu dalam mengontrol eksekutif dan legislatif yang sudah terbagi dari masing-masing partai politik.<sup>133</sup>

### **a. Sistem Kepartaian Semakin Terpolarisasi**

Konfigurasi perolehan suara partai-partai politik pemilu 1999 di Malang Raya menunjukkan suatu Pluralisme Moderat. Partai-partai

<sup>133</sup> John F. Bibby, *Politics, Parties, and election in America*, Chicago: Nelson-Hall Publisher, 1992, p. 52.

3 besar seperti PDI Perjuangan, PKB, Golkar, sementara tiga partai lainnya seperti PAN, PPP, dan PK jumlah kursi yang diperoleh tidak signifikan.<sup>134</sup> Dari keenam partai tersebut sebenarnya kalau dipilah-pilah ternyata masih memiliki visi yang hampir tidak jauh berbeda.<sup>135</sup> Golkar dan PDI Perjuangan, walaupun ditingkat *grassroot* sering terjadi gesekan, namun sesungguhnya kedua partai tersebut dalam hal *platform* memiliki banyak persamaan. Begitu juga dengan PKB, PAN, PPP, PK, walau jurang pemisah selalu ada terutama antara partai berbasis pemilih Islam Modernis dengan partai berbasis pemilih Islam Tradisional. Namun karena sama-sama mempunyai dukungan pemilih berbasis Islam, partai-partai tersebut sebenarnya relatif masih bisa saling bekerja sama. Akan tetapi dalam realitas, koalisi antara ke-6 partai tersebut agak sulit dilakukan baik untuk kepentingan pilkada maupun dalam memutuskan kebijakan di Dewan.<sup>136</sup>

**Tabel 2.1. Perolehan Kursi DPRD Kota dan Kabupaten Malang Tahun 1999**

NO	NAMA PARTAI	Jumlah Kursi	
		Kota	Kab.
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	15 kursi	17 kursi
2.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	12 kursi	12 kursi
3.	Partai Golongan Karya (Golkar)	7 kursi	9 kursi
4.	Partai Amanat Nasional (PAN)	4 kursi	1 kursi
5.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1 kursi	1 kursi
6.	Partai Keadilan (PK)	1 kursi	-
7.	TNI/POLRI	5 kursi	5 kursi
-	JUMLAH	45 kursi	45 kursi

Sumber: [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id) yang telah diolah.

<sup>134</sup> Kalau dilihat dari banyaknya partai politik yang memperoleh kursi di DPRD, sistem kepartaian di Malang Raya termasuk dalam sistem pluralisme terpolarisasi, dimana jumlah partai yang ada di parlemen 6 atau lebih partai politik. Namun karena jumlah kursi yang diperoleh PDIP, PKB, dan Golkar perolehan kursinya sangat mencolok dibanding dengan partai lain, maka bisa dikatakan bahwa sistem kepartaian di Malang Raya termasuk pluralisme Moderat. Mengenai system kepartaian, lihat Mark N. Hagovian, *Regimes, Movements, and Ideologies, A Comparative Introduction To Political Science*, New York and London, Logman Inc., 1978.

<sup>135</sup> Hal-hal yang terkait dengan latar belakang, ideologi, dan program partai politik, secara lebih detail bisa dilihat dalam Kompas, *Partai-Partai Politik Indonesia, Ideologi dan Program 2004-2009*, Jakarta: PTKompas Media Nusantara, 2004.



Hasil pemilu 1999 di Malang Raya menunjukkan politik aliran tetap pegang peranan. Kemenangan partai yang secara historis dan sosiologis punya kedekatan dengan Islam seperti PKB, PAN, serta Partai Nasionalis seperti PDIP dan Golkar bisa menjadi bukti kuat akan keberadaan politik aliran ini.<sup>137</sup> Walau demikian, partai politik pada pemilu 1999 yang dibangun dengan format sistem kepartaian yang Plural, namun dalam hal ideologi menunjukkan kecenderungan moderat.<sup>138</sup> Perolehan kursi di tingkat Dewan, masih menunjukkan adanya dominasi dari tiga aliran pokok, seperti PDIP mewakili Abangan, PKB dan PPP mewakili Islam Tradisional, PAN dan PK mewakili Islam Modernis, sementara Golkar mewakili Priyayi. Persentase suara masing-masing partai di Dewan hasil pemilu 1999, PDI Perjuangan, menjadi pemenang mayoritas dengan menguasai 36 % suara di tingkat Dewan, sementara PKB partai berbasis kelompok tradisional Islam menempati peringkat 2 dengan menguasai 27 % suara. Golkar, menguasai 18 %, dan PAN partai yang berbasiskan modernis Islam menguasai 6 % suara. PPP partai berbasis Islam kelanjutan era Orde Baru menguasai 2,2 % dan suara. Partai Keadilan, partai Islam modernis baru dan memiliki tipikal kelompok Ikhwanul Muslimin memperoleh suara 1,1 %.<sup>139</sup>

Partai-partai yang tergolong besar adalah PDI Perjuangan, Golkar, PKB memiliki garis ideologi yang cukup “moderat”.<sup>140</sup> Di sisi lain PPP,

---

136 Di Malang Raya, koalisi untuk kepentingan pilkada sampai tahun 2008 sering dilakukan diantara tiga partai besar pemenang pemilu seperti PDIP, PKB, dan Golkar. Dalam prakteknya koalisi terjadi antara PDIP dan PKB, PDIP dan Golkar, namun jarang terjadi koalisi antara Golkar dan PKB. Dalam rangka memenangkan perebutan kekuasaan di eksekutif, mau tidak mau harus melibatkan PDIP karena konsistensi dukungan pemilihnya cukup tinggi disamping secara kuantitas merupakan pemilih mayoritas. Oleh karena itu sampai penelitian ini dilakukan, semua Kepala Daerah baik itu Kota Malang, Kabupaten Malang, maupun Kota Batu merupakan Kepala Daerah yang diusung oleh PDIP.

137 Sesuai dengan skema politik aliran dimana Santri akan memilih partai Islam, Abangan akan memilih partai Nasionalis pada pemilu 1999 di Malang Raya masih terbukti. PDIP sebagai representasi dari Partai Nasionalis menjadi pilihan utama kelompok abangan, PKB sebagai representasi Partai Islam menjadi pilihan kelompok Santri, dan Golkar sebagai representasi pemilih dari kelompok priyayi.

138 Berkenaan dengan ideologi partai-partai politik secara lengkap bisa dilihat dalam “Partai-Partai Politik Indonesia, Ideologi dan Program 2004-2009”, Kompas, PT Media Kompas Nusantara, 2004.

139 Sumber: Sekretariat Dewan Kota Malang, dan Sekretariat Dewan Kabupaten Malang.

140 Yang dimaksud garis ideologi yang moderat adalah platform partai yang sama-sama memiliki orientasi kebijakan berspektrum dari tengah ke kanan. Pembangunan yang berorientasi pasar masih mewarnai platform masing-masing partai, sementara platform yang berhaluan kiri sudah tidak ada, seiring dengan hilangnya PKI dari konstelasi politik di Indonesia.

PKB, PAN dan PK, yang punya kedekatan secara historis dan sosiologis dengan pemilih Islam. Dengan demikian, kalau dilihat dari konsteks ideologi sesama partai Islam akan sangat mudah untuk berkoalisi, namun karena perbedaan kultur terutama PPP, PKB yang tradisional dan PAN, PK yang Modernis dalam kenyataannya agak sulit, sebagai contoh koalisi untuk pemenangan pilkada. Bagi PDI Perjuangan dan Golkar, memiliki platform ideologi yang tidak terlalu berbeda, sehingga kendala koalisi keduanya hanyalah “permusuhan” historis selama era Orde Baru.<sup>141</sup>

Perolehan suara pemilu 2004 tidak jauh berbeda dengan hasil pemilu 1999, namun sudah menunjukkan adanya pemudaran ikatan pemilih dengan partai politik yang dibuktikan dari banyak pemilih yang melakukan *swing votes*, terutama pemilih PDIP dan PKB.<sup>142</sup> Oleh karena itu, jumlah kursi yang diperoleh PDIP dan PKB di Malang Raya mengalami penurunan yang cukup drastis walaupun masih tetap menjadi mayoritas. Pemilu 2004 di Malang Raya memperebutkan 115 kursi di Dewan, dengan perincian Kabupaten Malang 45 kursi, Kota Malang 45 kursi, dan Kota Batu 25 kursi. Di Malang Raya PDIP keluar sebagai pemenang dengan mengantungi perolehan 101.732 suara atau 25,84 % total suara pemilih dengan menguasai 12 kursi atau 26 % di

---

141 Pada masa Orde Baru, banyak persoalan maupun dinamika yang berkembang, tidak hanya disebabkan oleh adanya regulasi kepartaian, namun juga dinamika politik pemilih yang menunjukkan adanya pengalihan pilihan politik besar-besaran kepada partai pemerintah yaitu Golkar. Menjelang pemilu pertama tahun 1971, partai-partai dilakukan pengelompokan kedalam tiga kelompok besar, yaitu: pertama, golongan Nasionalis; kedua, golongan spiritual; ketiga, golongan karya. Dengan demikian Partai politik yang ikut dalam pemilu 1971 hanya sepuluh, antara lain 9 partai sebagai warisan Orde Lama seperti NU, Parmusi, PSII, Perti, PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, dan Murba ditambah satu partai baru yaitu Golkar. Dan pada pemilu selanjutnya menjadi tiga, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (Golongan Spiritual), Partai Demokrasi Indonesia (Golongan Nasionalis), dan Golkar (Golongan Karya).

Fenomena politik pada masa rezim Orde Baru setelah terjadinya fusi adalah kemenangan yang konsisten Golkar dalam setiap pemilu dengan dukungan pemilih yang cukup besar. Perolehan suara Golkar berturut-turut dalam pemilu 1971 (62,8%), 1977 (62,1%), dan 1982 (64,3%) (Alfian, 1990:106). Dalam kondisi era Orde Baru, walaupun kita bisa melihat adanya konsistensi pemilih dalam pilihan politiknya, namun hal ini tidak bisa kita serta merta melakukan generalisasi bahwa Golkar mempunyai partisan politik sebagaimana dalam angka. Hal ini dikarenakan pada era Orde Baru situasi politik tidak berjalan secara fair dan bebas, karena faktor Orde Baru yang menjalankan politik *Bureaucrati Authoritarian*. Pemilu banyak terjadi kecurangan baik dalam proses maupun hasil, begitupun banyak pemilih terintimidasi terutama mereka yang berasal dari golongan sosialis. Banyak pemilih yang mencoblos partai Golkar karena takut dituduh komunis.

142 Warna politik aliran pada pemilu 2004 mengalami pemudaran seiring dengan beralihnya pilihan politik pemilih ke partai-partai lain. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya suara-suara partai yang merepresentasikan politik aliran seperti PDIP, PKB, PAN, dan Golkar. Lihat hasil pemilu 2004, KPU Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.

Dewan di Kota Malang, 357.008 atau 28,97 % dengan menguasai 17 kursi atau 37,7 % di Dewan Kabupaten Malang, 3.299 atau 16 % dengan menguasai 5 kursi atau 20 % di Dewan Kota Batu. PKB keluar sebagai pemenang kedua dengan mengantungi perolehan 68.321 suara atau 17,36 % total suara pemilih dengan menguasai 8 kursi atau 20 % di Dewan di Kota Malang, 316.665 atau 25,72 % dengan menguasai 13 kursi atau 32,5 % di Dewan Kabupaten Malang, 4.209 atau 12,6 % dengan menguasai 4 kursi atau 16 % di Dewan Kota Batu.<sup>143</sup>

Golkar keluar sebagai pemenang ketiga dengan mengantungi perolehan 48.612 suara atau 12,35 % total suara pemilih dengan menguasai 5 kursi atau 11,11 % di Dewan di Kota Malang, 205.505 atau 16,68 % dengan menguasai 7 kursi atau 15,55 % di Dewan Kabupaten Malang, 7.70 atau 23,4 % dengan menguasai 5 kursi atau 20 % di Dewan Kota Batu. Sementara Partai Demokrat keluar sebagai pemenang keempat dengan mengantungi perolehan 57.278 suara atau 14,55 % total suara pemilih dengan menguasai 7 kursi atau 15,15 % di Dewan di Kota Malang, 95.670 atau 7,76 % dengan menguasai 6 kursi atau 13,33 % di Dewan Kabupaten Malang, 4.517 atau 13,8 % dengan menguasai 4 kursi atau 16% di Dewan Kota Batu. Pada pemilu 2004 hampir semua partai besar mengalami penurunan suara dari pemilu 1999. Golkar, PDI Perjuangan, PKB mengalami penurunan perolehan suara.<sup>144</sup> Oleh karena itu, secara otomatis mengalami penurunan kursi, kecuali PKB walau mengalami penurunan suara namun mengalami kenaikan kursi dari 12 kursi pada pemilu 1999 menjadi 13 kursi pada pemilu 2004 di Kabupaten Malang.

Partai Demokrat, partai yang mengandalkan figur Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung memperoleh 14,55 % suara dengan total perolehan 7 kursi di Dewan Kota Malang, 7,76 % dengan perolehan 6 kursi di Dewan Kabupten Malang, dan 13,8 % dengan perolehan 4 kursi di Dewan Kota Batu. PKS (dulu PK) mengalami mengalami kenaikan jumlah suara yang cukup signifikan dari 0,79 % menjadi 7,16% di Kota Malang.<sup>145</sup> Pada pemilu 1999 PKS hanya memperoleh 1 kursi, pada

---

143 Lihat hasil pemilu 2004, *Ibid.*

144 Penurunan suara hasil pemilu yang paling besar dialami oleh PDIP, pada pemilu 1999 PDIP memperoleh suara 41,22 % di Kota Malang, sementara para pemilu 2004 hanya memperoleh 25,84%. Dengan demikian PDIP mengalami penurunan suara hampir 16%.

145 Kenaikan suara PKS di Kota Malang seiring dengan penurunan suara PAN. Oleh karena itu tidaklah salah apabila dikatakan bahwa sebagian pemilih PAN pada pemilu 1999 mengalihkan pilihan politiknya ke PKS pada pemilu 2004.

pemilu 2004 bertambah empat kursi menjadi 5 kursi. Di sisi lain, PAN di Kota Malang mengalami penurunan jumlah suara, dari 10,53 % di pemilu 1999 menjadi 6,77% di pemilu 2004. Meskipun demikian, kursi PAN di Dewan mereka bertambah dari 4 di pemilu sebelumnya menjadi 5 di pemilu 2004.<sup>146</sup>

Pola sistem kepartaian yang terjadi pada pemilu 2004 masih menyerupai Pluralisme Moderat layaknya seperti tampak di pemilu 1999. Partai-partai relatif besar seperti Golkar, PDI Perjuangan, PKB, dan PAN ditambah Partai Demokrat dan PKS masih menguasai kursi yang cukup besar di parlemen. Karena tidak ada partai yang mampu menjadi mayoritas, maka mereka harus saling berkoalisi. Partai yang menjadi partner pertama didasarkan kedekatan garis ideologis, baru kemudian faktor-faktor pragmatis seperti kemenangan suara untuk, pencalonan dalam pilkada, kebijakan tertentu dan lain sebagainya.

Pada pemilu 2009, peta politik agak berubah menjadi lebih terpolarisasi.<sup>147</sup> Dari data menunjukkan bahwa perolehan kursi partai di Dewan tidak lagi terkonsentrasi pada beberapa partai saja, melainkan sudah menunjukkan ada penyebaran. PDIP, PKB, dan Golkar yang merupakan simbolisasi dari politik aliran tidak lagi menjadi partai dengan perolehan kursi terbesar, pada pemilu 2009 dominasi ketiga partai ini tidak terjadi. Beberapa partai muncul ke permukaan seperti Partai Demokrat, PKS, PAN dan beberapa partai lain seperti Partai Gerinda dan Partai Hanura, bahkan Partai Demokrat bisa menghentikan dominasi PDIP di Kota Malang yang pada pemilu 1999 dan 2004 menjadi pemenang pemilu di Malang Raya. Partai Demokrat di Kota Malang yang pada pemilu 2004 memperoleh kursi 7 kursi kalah 5 kursi dari PDIP yang memperoleh 12 kursi, pada pemilu 2009 Demokrat memperoleh 12 kursi sementara PDIP 9 kursi.

Dengan demikian, pola komunikasi dan pola koalisi di Dewan periode 2009-2012 di Malang Raya relatif lebih banyak ketimbang pada pemilu 1999 dan 2004. Dengan demikian hasil kursi di Dewan

---

146 Sumber: KPUD Kota Malang

147 Pada pemilu 2009, dengan adanya perubahan dari sistem proporsional terbuka dengan BPP menjadi proporsional terbuka penuh telah mempengaruhi komposisi perolehan kursi di DPRD. Ada dua partai politik baru yang mendapatkan kursi signifikan yaitu Partai Gerindra dan Partai Hanura. Sementara partai Demokrat, yang pada pemilu 2004 hanya mendapatkan suara 7,76% dalam pemilu 2009, khususnya di Kota Malang mendapatkan suara 24,08 % dengan perolehan jumlah kursi sebanyak 12 kursi mengalahkan PDIP yang hanya mendapat 9 kursi.

menunjukkan perbedaan dengan hasil pemilu sebelumnya yaitu pluralisme moderat dengan empat sampai enam partai dominan. Pada pemilu 2009, hasil pemilu menunjukkan perubahan kearah pluralisme yang lebih terpolarisasi.

### 3. Koalisi dalam Pilkada: Sebuah Petunjuk Sistem Kepartaian yang Moderat

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa sistem kepartaian pasca reformasi kalau dilihat dari jumlah partai yang memperoleh kursi di Parlemen menunjukkan pluralisme terpolarisasi, namun sejatinya dalam konteks ideologi masing-masing partai punya kesamaan. Kondisi ini berpeluang pada terbangunnya koalisi antara partai tanpa ada hambatan ideologis. Dalam rangka memenangkan pilkada, partai politik akan melakukan koalisi satu sama lain dengan mudah tanpa ada hambatan ideologis, bahkan cenderung pragmatis.<sup>148</sup>

Di tingkat lokal justru menemukan adanya perilaku partai yang tidak konsisten di tingkat *electoral*. Dalam pemilu legislatif persaingan antar partai begitu tinggi, namun dalam kasus pemilu Kepala Daerah banyak partai yang bersaing tersebut justru bahu membahu untuk memenangkan persaingan. Sebagai mana kita pahami, dalam pemilu legislatif partai terlibat persaingan yang sengit yang bersumber pada cleavages (Islam vs Nasionalis), namun dalam kasus pemilihan Kepala Daerah tampaknya mereka mengabaikan ideologi, mereka justru bekerja sama, walaupun tampaknya secara ideologi berseberangan.

Fakta terjalinya koalisi antara partai yang berlainan ideologi, yang disinyalir hanya bersumber pada *vested interest* yaitu untuk meraih kekuasaan, jabatan dan privilege ekonomi. Namun demikian, kondisi ini juga dikarenakan jarak ideologi diantara masing-masing partai yang tidak terlalu ekstrim. Dalam hal ini berbeda dengan pandangan Ambardhi yang menunjukkan sebuah sistem kepartaian yang terkartelisasi. Sebagaimana dikemukakan Ambardhi, kondisi sistem kepartaian yang terkartelisasi di Indonesia pasca reformasi menjadi

---

148 Teori tentang koalisi digambarkan oleh Lieven De Winter dan Patrick Dumon, *Parties Into Government: Still many Puzles*, dalam Richard S Katz dan William Crotty (edt), *Handbook of Party Politics*, London: SAGE Publication, 2006. Sementara teori koalisi berbasis ideology dikemukakan oleh de Swan (1973) yang menekankan pentingnya ideology partai dalam pembentukan koalisi. Lihat Kuskridho Ambardhi, *Mengungkap Politik Kartel*, Jakarta: PT Gramedia, 2009. hal 26-27.

ajang “penjarahan” *resources* atau keuangan negara baik secara legal maupun illegal.<sup>149</sup> Dampak dari sistem kepartaian yang terkartelisasi ini adalah terjadinya kolusi antara pemerintah dan partai politik yang pada akhirnya merugikan kepentingan konstituen.

**Tabel 2.2. Koalisi Partai di DPRD dalam Mengusung Bupati dan Wali Kota di Malang Raya**

Daerah	Kolisi PDIP dan Golkar	Koalisi PDIP dan PKB	Koalisi P. Golkar dan P. Demokat
Kabupaten Malang	Sujud Pribadi dan Rendra Krisna Tahun 2005	Ir. Moch. Ibnu Rubianto, MBA dan Sujud Pribadi Tahun 2000	
Kota Malang	Drs. Peni Suparto dan Bambang Tahun 2003 dan Tahun 2008		
Kota Batu		1. Dr. Imam Kabul, MS.i dan Khudori Tahun 2003 2. Edi Rumpoko dan Budiono Tahun 2008	
Kabupaten Malang			Rendra Krisna dan Achmad Subchan 2010

Sumber: KPUD Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu yang telah diolah.

Sebagaimana kita pahami bahwa sistem kepartaian yang terpolarisasi ekstrim susah untuk terjadi koalisi di antara partai politik (*marginal turnover*) dalam membangun pemerintahan. Sementara dalam sistem Pluralisme Moderat, proses koalisi agak mudah karena tidak terlalu banyak partai yang bermain sehingga peta koalisi bisa diminimalisir. Hasil pemilu 1999 dan 2004 di Malang Raya menunjukkan bahwa perwakilan di Parlemen masih tergolong pluralisme moderat kalau dilihat dari jarak ideologi. Dengan demikian PDIP, Golkar, dan PKB (hasil pemilu 1999 dan 2004) merupakan partai dominan dan dapat dengan mudah untuk

149 Penjelasan lebih lanjut mengenai sistem politik yang terkartelisasi, lihat Kuskridho Ambardhi, *Mengungkap Politik Kartel*, Jakarta: PT Gramedia, 2009.

mendorong kader masing-masing dalam persaingan pilkada, namun mereka lebih memilih aman dengan cara berbagi kekuasaan di antara mereka. Walau pada awal koalisi (untuk mengusung calon Presiden maupun Kepala Daerah) dasar pertimbangan awal adalah kedekatan ideologi, namun dasar utama lebih banyak pada sisi pragmatis. Walau dalam kasus tertentu, adakalanya partai yang sangat berseberangan secara ideologis, karena kepentingan untuk mengusung calon (kasus pilkada), bisa berkoalisi dan bekerja sama dalam mengusung calon kepala Daerah.<sup>150</sup>

Dampak koalisi yang dibangun atas dasar pragmatisme, pemerintahan yang terbangun menjadi tidak jelas dalam arah kebijakannya. Bahkan kesulitan yang sering terjadi dalam mengelola pemerintahan bisa dilihat baik di pusat maupun di Daerah. Koalisi yang dibangun hanya dalam konteks berbagi kekuasaan, namun tidak linier dengan dukungan partai dalam persoalan arah kebijakan politik pemerintah yang akan di jalankan. Lebih lanjut, dampak dari koalisi pragmatis ini, di tingkat parlemen banyak melahirkan lobi dan transaksi yang cenderung bersifat material dalam menggolkan satu kebijakan.<sup>151</sup> Hal ini telah mendorong lahirnya genetik parlemen lama yang penuh dengan perilaku korup. Walaupun demikian, akibat sitem pemerintahan Presidensial yang tidak punya ruang untuk melakukan mosi tidak percaya pada pemerintah, maka posisi pemerintah, seberapa parahpun hancurnya bangunan koalisi tidak punya dampak serius pada posisinya sebagai Kepala Pemerintahan baik di Pusat maupun di Daerah.

Dilihat dari spektrum ideologis yang ada di DPRD Malang Raya sekarang ini, maka partai-partai yang punya potensi tinggi untuk membangun koalisi adalah partai politik yang berideologi Nasionalis Religius. Sebagai catatan, pembuktian apakah partai ini Nasionalis

---

150 Kasus dalam pilkada Jatim, dalam mengusung calon gubernur pasangan calon Khopipah-Mujiono, untuk memenuhi syarat minimal pencalonan harus menyatukan koalisi yang secara ideologis berseberangan yaitu PPP dan PDS. Dimana PPP secara ideologis menyatakan diri sebagai partai Islam seperti yang dicantumkan dalam asas partai, sementara PDS merupakan partai yang lahir dari kalangan Nasrani walaupun secara asas menggunakan Pancasila.

151 Hasil pengamatan penulis, selama beberapa periode anggota Dewan, tidak ada perdebatan serius mengenai kebijakan yang berusaha diperjuangkan baik oleh partai yang mengatasnamakan diri sebagai Partai Islam maupun Partai Nasionalis. Kecenderungan umum yang terjadi, para anggota dewan hanya berusaha untuk mengejar kepentingan yang bersifat material terkait dengan privileg atau hak-hak istimewa mereka. Lebih jauh diduga banyak anggota Dewan yang berperan sebagai broker dari dinas dalam mendapatkan anggaran dari APBD, dengan cara meminta imbalan sekian persen dari jumlah anggaran yang diterima.

Sekuler atau Nasionalis Religius, kalau dilihat dari platform partai sangat sulit. Namun partai Nasionalis Religius bisa dilihat dari komposisi dukungan atau basis pemilih yang dibidiknya dan tentu dengan sosiologis dan historis dari partai tersebut. Melihat dari konfigurasi ideologis yang ada, maka partai yang termasuk berideologi Nasionalis Religius dengan dukungan pemilih yang cukup signifikan adalah Partai Golkar, Partai Demokrat, dan termasuk juga PAN dan PKB yang punya kedekatan secara historis dan sosiologis dengan Islam. Sementara dua kutub yang ekstrim, yang secara ideologis tidak mungkin dipertemukan, walaupun secara pragmatis bisa ketemu, adalah PDIP dengan ideologi Nasionalisnya pada satu kutub, PKS, PPP,<sup>152</sup> dan PBB yang berideologi Islam pada kutub lainnya.

Dalam berkoalisi, partai tidak mau berisiko dengan mencalonkan sendiri Bupati atau Wakil Bupati. Bagi mereka yang penting dapat masuk dalam pemerintahan. Strateginya yaitu dengan memasang kader di masing-masing calon (Golkar), dan berkoalisi dengan calon yang bisa dipastikan menang. Padahal dengan hanya batas minimal 20 % suara sah atau kursi di parlemen, minimal ada empat calon yang bisa maju dalam setiap pilkada. Baik PDIP, PKB, maupun Golkar sebenarnya bisa mengusung calon Bupati atau Wali Kota sendiri, namun karena pertimbangan kekuasaan, mereka rela untuk bekerja sama. Dengan demikian kalau dilihat dari peta kolaborasi, maka pemerintahan di Malang Raya hanya di kuasai oleh tiga partai saja yaitu PDIP, PKB, dan Golkar.<sup>153</sup>

## B. Perubahan Sistem Pemilu

Dalam bahasan ini akan dibahas mengenai aturan main pemilu baru yang dibuat setelah lengsernya presiden Soeharto. Pembahasan ini penting untuk dikemukakan terkait dengan jaminan bagi partai politik untuk dapat berkompetisi dalam pemilu demokratis. Pada

---

152 Kembalinya PPP ke khittah 1973 menandai tekad partai berlambang Ka'bah ini melepaskan diri dari dilema ideologi. Menghadapi pemilihan umum 2004 lalu PPP tetap mengedepankan prinsip istiqomah dalam melakukan tugasnya sebagai partai politik yang berasaskan Islam.

153 Hal tersebut di atas merupakan peta politik hasil pemilu 1999 dan 2004. Pada pemilu 2009 peta politik berubah setelah Partai Demokrat mendominasi perolehan suara, khususnya di Kota Malang, seiring dengan kemerosotan perolehan suara PKB. Di samping itu ada dua partai politik baru yang mampun mendudukan wakilnya di DPRD di Malang Raya seperti Partai Gerindra dan Partai Hanura. Untuk lebih jelasnya lihat hasil pemilu 2009, KPUD Malang Raya.



bagian pertama akan dikemukakan asal usul terkait dengan perubahan aturan main pemilu, setelah itu proses perubahan yang terjadi sampai melahirkan sistem proporsional dengan sistem terbuka penuh, atau sistem majority.

### 1. Pendahuluan: Dibalik Lahirnya Aturan Pemilu Baru

Pada saat saat disumpah sebagai presiden, Habibie menjanjikan percepatan pelaksanaan Pemilu tapi tidak menyebutkan jadwal yang jelas. Baru setelah diyakinkan oleh Nurcholis Madjid dan Amien Rais, dalam bulan setelah pelantikannya, Habibie berjanji menggelar Pemilu satu tahun ke depan. Persoalan muncul ketika melihat realitas undang-undang politik yang tersedia yang tidak memadai untuk melaksanakan pemilu yang demokratis karena tidak bisa menjamin pelaksanaan pemilu yang jujur, adil. Dari mulai UU No. 3 / 1985 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya yang hanya mengakui tiga partai politik yaitu PP, Golkar, dan PDI. UU No.2/1985 tentang Struktur dan Kedudukan DPR/MPR, salah satu pasalnya menyebutkan bahwa DPR menyediakan 100 kursi bagi militer dan Utusan Golongan yang diangkat.<sup>154</sup>

Guna menuntaskan hambatan perundang-undangan ini, Syarwan Hamid yang menjabat sebagai Mendagri membentuk tim tujuh untuk merevisi undang-undang politik yang tidak memadai tersebut. Adapun tim tujuh tersebut diketuai oleh Ryass Rasyid (Rektor Istitute Ilmu Pemerintahan, IIP), dan anggotanya antara lain Ramlan Surbakti, Andi Mallarangeng, Afan Gaffar, Djohermansyah Djohan, Luthfi Mutty, dan Anas Urbaningrum. salah satu isu perubahan yang diajukan oleh tim tujuh adalah sistem pemilu.<sup>155</sup> Tujuan dasar dari perubahan aturan pemilu ini adalah terjaminnya pemilu yang *accountable*. Oleh karena itu, tim tujuh mengajukan perubahan rancangan sistem pemilu yang

---

154 Untuk lebih jelas tetang bahasan reformasi aturan pemilu pasca Orde Baru, lihat Dwight Y. King, *Half-Hearted Reform, Electoral Institution And The Struggle For Democracy In Indonesia*, USA: Praeger Publisher, 2003. p. 47-74; Kuskridho Ambardhi, *Mengungkap Politik Kartel*, Jakarta: PT Gramedia, 2009. hal 106-123; Harold Crouch, *Political Reform In Indonesia, After Soeharto*, Singapore: ISEAS Publishing, 2010. p. 43-86.

155 Awal bulan Mei Tahun 1998, Menteri Sekretaris Negara, Hartono, menunjuk sebuah tim yang berisikan orang-orang yang ahli yang di ketuai oleh Ryaas Rasyid untuk mengajukan perubahan rancangan perubahan hukum dan aturan system pemilu. Dan setelah terjadi penyerahan kekuasaan dari Soeharto ke Habibie, Mendagri Syarwan Hamid, meminta tim tujuh kembali untuk menyusun rancangan perubahan tersebut dalam waktu du bulan. King, p. 47.

cukup radikal dari proporsional ke sistem campuran (*hibrid*) yaitu *single member district plurality*<sup>156</sup> atau metode “*the first - past - the post*” (PTP) yang dikombinasikan dengan metode proporsional.

Sistem yang diajukan tim tujuh tersebut bisa dikatakan sebagai sistem hibrid, dimana wilayah pemilihan akan dibagi menjadi 420 distrik dan menghasilkan 420 kursi. Akan tetapi bagi partai yang tidak mendapatkan kursi di setiap distrik akan dialokasikan sebanyak 75 kursi, dimana caleg yang memperoleh suara lebih banyak mendapat kesempatan yang lebih besar untuk meraih kursi. Sebanyak 75 kursi tersebut akan diberi label “wakil-wakil rakyat”.<sup>157</sup> Sistem FPTP akan membawa dampak pada pengurangan jumlah partai, yang merupakan “hukum besi” sistem pemilu distrik karena hanya ada satu kursi yang diperebutkan, sehingga mendorong partai-partai yang lemah untuk bergabung dengan partai potensial atau caleg potensial. Untuk mengurangi dampak dari efek mekanis FPTP, tim tujuh menawarkan sistem perwakilan proporsional. Agar dapat menghasilkan sistem kepartaian pluralisme moderat, tim tujuh juga mengajukan syarat lain, yaitu: dalam mendirikan partai politik, satu partai harus memiliki jumlah minimal cabang yang tersebar di beberapa provinsi dan kabupaten. Bagi partai besar, hal ini tidaklah menjadi halangan, akan tetapi bagi partai baru hal ini menjadi kendala. Oleh karena itu, partai-partai baru menentang gagasan tentang jumlah cabang minimal tersebut. Alasannya ada dua: *pertama* karena alasan praktis, dimana waktu yang tersisa menjelang pemilu (yang rencananya digelar 7 Juni 1999)<sup>158</sup> tidak memungkinkan mereka mendirikan cabang sebagaimana disyaratkan. *Kedua* menyangkut keadilan, dimana partai-partai lama, menurut pandangan mereka telah memiliki berbagai cabang di semua provinsi dan banyak distrik. Dan pada akhirnya RUU Pemilu No. 4/1999 tetap memuat syarat tentang jumlah minimal cabang partai tersebut.

---

156 King, p. 55.

157 Crouch, p. 47. Selama masa kekuasaan Orde Baru, banyak pejabat Golkar dan wakil-wakil mereka di DPR dikenal luas oleh publik karena menjadi berita utama diberbagai media. Dengan demikian, logikanya sistem ini akan didukung oleh Golkar dan ditolak oleh PPP dan PDI. Dan kenyataannya sistem ini ditolak oleh PPP dan PDI, salah satu alasan kenapa mereka menolak aturan ini dikarenakan “hanya akan memberi keuntungan bagi para caleg Golkar” (Kompas, 24 Juli 98).

158 Dalam sesi khusus, MPR bersidang untuk mengambil keputusan pada bulan November 1998 mengenai percepatan pemilu yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2003 dimajukan menjadi paling lambat bulan Juni 1999. Coruch, p. 47.

## 2. Sistem Majority: Mendorong Partai Semakin Pragmatis

Setelah reformasi digulirkan pada tahun 1998, Indonesia sudah menjalankan tiga kali pemilihan umum, yakni: Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009. Pada Pemilu 1999, puluhan partai politik bermunculan meskipun hanya 48 partai politik yang dapat ikut pemilu.<sup>159</sup> Dimana sistem yang dipergunakan pada seluruh pemilu masa Orde Baru sampai Pemilu 1999 adalah sistem proporsional dengan daftar tertutup (*PR Closed List*). Persoalan yang paling menonjol terkait dengan sistem pemilu closed list ini adalah konflik dalam penentuan calon dan *stambus accord* (suara sisa).<sup>160</sup>

Pemilu 2004, berdasarkan UU No. 12 / 2003 menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka (*PR Open List*). Akan tetapi, karena penetapan calon terpilih masih dibatasi dengan perolehan suara sebesar Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), maka dalam kenyataannya di Malang Raya, sistem ini hampir sama dengan daftar tertutup karena tidak ada yang memperoleh suara memenuhi BPP sekalipun calon dari partai besar.<sup>161</sup> Seluruh anggota DPRD Malang Raya yang terpilih, lolos karena posisinya pada nomor urut atas (nomor jadi) dalam daftar calon. Data KPU (2004), secara Nasional calon anggota Dewan Pusat yang memperoleh suara memenuhi BPP adalah calon dari PKS, Hidayat Nur Wahid dengan perolehan suara 262.019 dari dapil DKI II dan calon dari Partai Golkar, Saleh Djasit dengan perolehan suara 195.348 dari dapil Riau.

Dalam Pemilu 2004 yang diikuti 24 partai politik, banyak hal baru yang diperkenalkan selain pemilihan anggota legislatif (DPR/DPRD), yaitu sistem pemilihan presiden langsung dan pemilihan anggota

---

159 Setelah Orde Baru, proses demokratisasi berkembang pesat seiring dengan reformasi yang terus dilakukan dari tahun 1998 sampai sekarang. Hal ini menjadi momentum bagi masyarakat (pemilih) untuk merubah kesadaran mereka tentang realitas kepartaian yang dihadapi. Apalagi di era reformasi masyarakat diberi kebebasan untuk mendirikan partai sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Hampir 140 calon partai lebih tercatat setelah tujuh bulan Presiden Habibie berkuasa, dan kemudian 48 partai dapat ikut pada pemilu Juni 1999.

160 Hasil wawancara dengan Deden Faturahman, Anggota KUPD Kabupaten Malang pada bulan Agustus 2008 di Kantor Jurusan Ilmu Pemerintahan UMM

161 Hasil pemilu 2004 menunjukkan bahwa tidak ada caleg yang lolos menjadi anggota dewan yang memenuhi BPP. Oleh karena itu hampir semua caleg yang lolos menjadi anggota dewan merupakan hasil dari akumulasi suara yang diperoleh partai politik, sehingga caleg dengan nomor urut rendah otomatis menjadi caleg yang lolos jadi anggota Dewan. Menurut Hadar N, Gumai, dari 550 anggota DPR hasil pemilu 2004, hanya 21,1% yang memperoleh kursi karena suara melebihi 30%. Republika, Rabu, 13 Agustus, 2008.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam pemilu legislatif DPR/DPRD digunakan sistem *proportional list* atau *open list system* dimana pemilih wajib mencoblos tanda gambar partai atau tanda gambar dan nama calon legislatif.<sup>162</sup> Sistem pemilu yang digunakan untuk memilih anggota DPD adalah *simple majority* dengan *multimember constituency* (berwakil banyak).

Pemilihan presiden dalam Pemilu 2004 dilakukan secara langsung. Sistem pemilu yang digunakan adalah *two round system*, dimana putaran pertama menggunakan sistem *plurality-majority* dan putaran kedua menggunakan sistem *run-off majority*. Sistem yang serupa juga digunakan dalam pemilihan kepala daerah, yang membedakan adalah putaran kedua dilaksanakan jika tidak pasangan calon yang menang lebih dari 25 persen. Sementara itu, penyelenggara Pemilu 2004 tidak lagi dilakukan oleh KPU yang beranggotakan wakil-wakil partai politik seperti yang dilakukan pada pemilu 1999 melainkan oleh KPU yang beranggotakan individu nonpartisan yang dipilih oleh DPR.<sup>163</sup>

Berkaca pada kinerja sistem pemilu dan tipe pemilihan yang digunakan pada Pemilu 2004, ternyata masih banyak permasalahan yang perlu direspon agar misi dari pemilu menjadi sempurna. Untuk melakukan variasi-variasi ini tentunya perlu ada pemahaman yang komprehensif tentang sistem pemilu dan tipe-tipe pemilihan, mana yang sesuai dengan kondisi sosial dan geografis Indonesia dan mana yang tidak.

Memasuki pemilu 2009, banyak kritikan dan masukan yang terkait dengan persoalan BPP. Banyak calon yang keberatan karena dianggap mengkhianati amanat dari pemilih bagi calon yang mereka dukung. Lebih jauh, bagi caleg yang ingin jadi melalui mekanisme BPP dianggap sebagai hal yang tidak mungkin. Sistem proporsional daftar terbuka hanya realistis di atas kertas atau aturan main, namun dengan adanya mekanisme BPP menjadi hal yang tidak realistis. Atas

---

162 Walaupun dalam pemilu 2004 sistem pemilu menggunakan proporsional daftar terbuka, namun caleg yang lolos menjadi anggota Dewan secara langsung harus melampaui Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Sementara apabila caleg tidak sampai pada BPP, maka yang akan lolos menjadi anggota Dewan adalah calon yang berada pada nomor urut di atasnya.

163 Perubahan substansi anggota KPU merupakan upaya meminimalisir adanya *conflicts of interest* dari anggota atau penyelenggara pemilihan umum. Akan tetapi karena anggota KPU, khususnya KPUD merupakan anggota nonpartisan dan bukan dari kalangan birokrasi, maka ada kendala dalam implementasi khususnya terkait dengan persoalan anggaran yang sangat bergantung kepada niat baik dari pemerintah Daerah.

dasar pertimbangan di lapangan, banyak dorongan dan masukan untuk menjadikan atau menjalankan sistem proporsional dengan daftar terbuka murni (*majority*) pada pemilu 2009. Namun perdebatan di Parlemen sangat alot antara mereka yang setuju dengan yang tidak setuju, namun pada intinya bermuara pada eksistensi partai politik. Hasil keputusan di Parlemen, untuk pemilu 2009 disepakati dengan BPP 30%.

Terkait dengan persoalan BPP 30 %, kalangan yang merasa dirugikan, khususnya para caleg yang ditempatkan pada nomor urut bawah, mengajukan permohonan peninjauan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Atas pengajuan permohonan caleg PDIP (yang merasa dirugikan oleh nomor urut) ke MK terkait BPP 30 % dalam sistem proporsional daftar terbuka ini, maka menjelang pemilu, MK mengabulkan gugatan tersebut. Maka pada pemilu 2009 diberlakukan sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka secara penuh.<sup>164</sup>

Dibalik dikabulkannya gugatan ke MK mengenai BPP, ada nuansa kekhawatiran dari partai-partai politik yang menganggap ada partai lain yang sudah secara tidak langsung menerapkan sistem suara terbanyak. Dalam hal ini, jauh sebelum pemilu 2009 dilaksanakan, ada sinyalemen bahwa PAN sebenarnya telah menerapkan aturan *open list* secara penuh. Kondisi ini teresonansi ke partai-partai lain untuk memberlakukan hal serupa, karena dianggap kalau tidak menjalankan strategi seperti PAN, maka akan mempengaruhi semangat calon dalam partainya mengendur. Sebagaimana diketahui, caleg PAN menjadi lebih heterogen karena banyak tokoh populer baik dari kalangan politisi, akademisi, bisnismen, maupun artis.<sup>165</sup>

Sistem ini telah mendorong terjadinya perubahan strategi partai dalam memenangkan pemilu. Partai tidak lagi dominan dalam baik dalam penentuan caleg, maupun dalam pemenangan pemilu. Sistem

---

164 Akibat putusan MK yang mengubah sistem pemilu dari *closed list proportional representation* menjadi *open list proportional representation*, menurut Bayu Dardias mengakibatkan beberapa hal: *Pertama* berubahnya perilaku politik caleg dari yang semula berkampanye untuk partai menjadi berkampanye untuk diri sendiri. *Kedua*, lemahnya control partai terhadap kadernya. Anggota DPR akan lebih memperhatikan aspirasi konstituen yang memilihnya daripada instruksi partai sehingga fungsi fraksi di DPR melemah. *Ketiga*, munculnya *free rider* dalam politik Indonesia yang bisa dilihat dari banyaknya *public figures* terpilih tanpa melalui kaderisasi partai yang ketat. *Keempat*, makin menyebarnya veto politik, sehingga semakin sulit untuk melakukan reformasi akibat harus bernegosiasi dengan semua pemegang veto. *Kelima*, terancamnya desain representasi perempuan. Bayu ardias, *Pemilu dan Putusan Hukum*, Kaulatan Rakyat, 30 Juli 2009.

165 Data KPU pemilu 2009, [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)

kompetisi terbuka antar caleg di dalam internal partai, mendorong gairah caleg untuk berjuang dengan segala cara agar dapat memperoleh suara tertinggi di dalam partai supaya lolos menjadi anggota legislatif. Kondisi ini mendorong persaingan keras di antara para caleg internal partai, tidak lagi dengan calon di luar partainya.

### C. Ringkasan

Partai politik pada pemilu 1999 dibangun dengan format sistem kepartaian yang Plural, namun dalam hal ideologi menunjukkan kecenderungan moderat. Perolehan kursi di tingkat Dewan, masih menunjukkan adanya dominasi dari tiga aliran pokok, seperti PDIP mewakili Abangan, PKB dan PPP mewakili Islam Tradisional, PAN dan PK mewakili Islam Modernis, sementara Golkar mewakili Priyayi. Persentase suara masing-masing partai di Dewan hasil pemilu 1999, PDI Perjuangan, menjadi pemenang mayoritas dengan menguasai 36 % suara di tingkat Dewan, sementara PKB partai berbasis kelompok tradisional Islam menempati peringkat 2 dengan menguasai 27 % suara. Golkar, menguasai 18 %, dan PAN partai yang berbasiskan modernis Islam menguasai 6 % suara. PPP partai berbasis Islam kelanjutan era Orde Baru menguasai 2,2 % dan suara. Partai Keadilan, partai Islam modernis baru dan memiliki tipikal kelompok Ikhwanul Muslimin memperoleh suara 1,1 %.

Pola sistem kepartaian yang terjadi pada pemilu 2004 masih menyerupai Pluralisme Moderat layaknya seperti tampak di pemilu 1999. Partai-partai relatif besar seperti Golkar, PDI Perjuangan, PKB, dan PAN ditambah Partai Demokrat dan PKS masih menguasai kursi yang cukup besar di parlemen. Karena tidak ada partai yang mampu menjadi mayoritas, maka mereka harus saling berkoalisi. Partai yang menjadi partner pertama didasarkan kedekatan garis ideologis, baru kemudian faktor-faktor pragmatis seperti kemenangan suara untuk, pencalonan dalam pilkada, kebijakan tertentu dan lain sebagainya. Namun karena jarak ideologis mereka relatif tidak jauh, maka kecenderungan berkoalisi diantara mereka sangat tinggi.

Pada pemilu 2009, peta politik agak berubah menjadi lebih terpolarisasi. Dari data menunjukkan bahwa perolehan kursi partai di Dewan tidak lagi terkonsentrasi pada beberapa partai saja, melainkan sudah menunjukkan ada penyebaran. PDIP, PKB, dan Golkar yang

merupakan simbolisasi dari politik aliran tidak lagi menjadi partai dengan perolehan kursi terbesar, pada pemilu 2009 dominasi ketiga partai ini tidak terjadi. Beberapa partai muncul ke permukaan seperti Partai Demokrat, PKS, PAN dan beberapa partai lain seperti Partai Gerindra dan Partai Hanura, bahkan Partai Demokrat bisa menghentikan dominasi PDIP di Kota Malang yang pada pemilu 1999 dan 2004 menjadi pemenang pemilu di Malang Raya. Partai Demokrat di Kota Malang yang pada pemilu 2004 memperoleh kursi 7 kursi kalah 5 kursi dari PDIP yang memperoleh 12 kursi, pada pemilu 2009 Demokrat memperoleh 12 kursi sementara PDIP 9 kursi.

Partai-partai yang tergolong besar adalah PDI Perjuangan, Golkar, PKB memiliki garis ideologi yang cukup “moderat”. Di sisi lain PPP, PKB, PAN dan PK, yang punya kedekatan secara historis dan sosiologis dengan pemilih Islam. Dengan demikian, kalau dilihat dari konsteks ideologi sesama partai Islam akan sangat mudah untuk berkoalisi, namun karena perbedaan kultur terutama PPP, PKB yang tradisional dan PAN, PK yang Modernis dalam kenyataannya agak sulit, sebagai contoh koalisi untuk pemenangan pilkada. Bagi PDI Perjuangan dan Golkar, memiliki platform ideologi yang tidak terlalu berbeda, sehingga kendala koalisi keduanya hanyalah “permusuhan” historis selama era Orde Baru.

Dengan demikian, sistem kepartaian pasca reformasi kalau dilihat dari jumlah partai yang memperoleh kursi di Parlemen menunjukkan pluralisme terpolarisasi, namun sejatinya dalam konteks ideologi masing-masing partai punya kesamaan. Kondisi ini berpeluang pada terbangunnya koalisi antara partai tanpa ada hambatan ideologis

Sementara terkait dengan sistem perubahan sistem pemilu dari sistem proporsional dengan daftar tertutup (*PR Closed List*), sistem proporsional dengan daftar terbuka (*PR Open List*), ke sistem proportional list atau open list system dimana pemilih wajib mencoblos tanda gambar partai atau tanda gambar dan nama calon legislatif telah mendorong terjadinya perubahan strategi partai dalam memenangkan pemilu. Partai tidak lagi dominan dalam baik dalam penentuan caleg, maupun dalam kemenangan pemilu. Sistem kompetisi terbuka antar caleg di dalam internal partai, mendorong gairah caleg untuk berjuang dengan segala cara agar dapat memperoleh suara tertinggi di dalam partai supaya lolos menjadi anggota legislatif. Kondisi ini mendorong persaingan keras di antara para caleg internal partai, tidak lagi dengan calon di luar partainya.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)



## **Tujuan Intruksional Bab 3**

Dalam bab ini penulis membahas mengenai politik aliran dan pemilu lokal. Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan dapat memiliki kompetensi sebagai berikut:

1. Mahasiswa dapat memahami dan mengerti tentang perilaku pemilih Indonesia baik secara nasional maupun lokal.
2. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang fakta, gejala maupun peristiwa-peristiwa politik yang terjadi selama pemilu berlangsung baik secara nasional maupun lokal.
3. Mahasiswa dapat memprediksikan naik dan turunnya hasil suara yang diperoleh oleh masing-masing partai berdasar pada politik aliran.
4. Mahasiswa dapat menjelaskan pola hubungan antara budaya politik dan perilaku politik dalam pemilu.
5. Mahasiswa dapat memberikan masukan kepada partai politik bagaimana agar partai tersebut dapat diterima oleh masyarakat.



# 3

## POLITIK ALIRAN DAN PEMILU LOKAL

Dalam rangka menjelaskan keberadaan politik aliran pasca reformasi, teorinya Evan dan Norris sangat relevan. Evan dan Norris (1999), bahwa tipe pemilu bisa dibagi ke dalam tiga kategori yaitu *maintaining*, *dealignment*, dan *realignment*.<sup>166</sup> *Maintaining* merujuk pada *status quo*, kondisi *dealignment* terjadi akibat kehilangan ikatan psikologis antara konstituen dengan partai, *realignment* adalah pemilu yang dicirikan dengan adanya evolusi dan akumulasi penguatan dukungan dalam serangkaian pemilu. Kondisi *dealignment* dibagi ke dalam dua tipe: *pertama, deviating elections; kedua, secular dealignment*, sementara kondisi *realignment* dibagi ke dalam *secular* dan *critical*.

Politik aliran yang sudah berkembang sejak pemilu 1955 terus berlangsung. Pemilih tetap memilih partai sesuai dengan pola aliran, santri memilih partai Islam dan Abangan akan memilih partai Nasionalis.<sup>167</sup> Koreksi yang terjadi, dalam pemilu era reformasi, bukan bukan menyentuh aspek substansial aliran, melainkan bentuk kekecewaan pemilih pada perilaku partai (elit partai). Pemilih Santri

---

166 Lebih lengkapnya lihat Geoferey Evans dan Pippa Norris, *Critical Elections, British Parties And Voters In Long-Term Perspective*, London: Sage Publication, 1999.

167 Dalam penelitian ini saya lebih condong mempergunakan istilah Islam dan Nasionalis ketimbang Agama dan Sekuler. Menurut saya pembagian pembilahan ideologi politik, agama dan sekuler, lebih akibat adanya fusi jaman Masa Orde Baru yang membagi partai politik kedalam kelompok sprituil dan materil. Namun kenyataannya pada saat itu Partai Kristen tidak mau bergabung dengan kelompok spiritual atau agama dan lebih memilih bergabung dengan keleompok materil atau nasionalis. Pada saat ini, walaupun partai Kristen berdiri sendiri seperti PDS dan Partai Katolik, namun seperti keberadaan agama lain (Hindu dan Budha) keberadaan mereka tidak terlalu signifikan secara politik. Oleh karena itu saya lebih memilih untuk menggunakan istilah Islam dan Nasionalis dalam pembahasan ini selanjutnya.

akan tetap mengidentifikasi dirinya dengan partai Islam, sebaliknya Pemilih Abangan akan mengidentifikasi dirinya dengan partai Nasionalis. Dengan demikian, demokrasi yang memberikan ruang kebebasan bagi partai dan pemilih untuk mengekspresikan gagasan, pemikiran, dan sekaligus harapan akan diwujudkan dalam bentuk perilaku politik baik itu partai politik maupun pemilih.

Kasus perubahan politik pemilih yang terjadi pada pemilu 2004 dan 2009, merupakan bukti akan adanya dinamika dalam pola hubungan partai dan pemilih, walau aliran masih tetap menjadi landasan bagi pemilih dalam menentukan pilihan politiknya. Dengan demikian dalam setiap pemilu, termasuk pemilu pasca reformasi, aliran selalu mewarnai pola hubungan partai dan pemilih.<sup>168</sup> Sebagaimana halnya pemilu multipartai 1955 (Orde Lama), pemilu Orde Baru, dan pemilu pasca reformasi punya warna ideologis yang berbasis aliran dengan tingkat kepekatannya yang berbeda-beda. Hasil pemilu pertama (tahun 1999) pasca reformasi, tampak jelas bagaimana aliran menjadi benang merah afiliasi politik masyarakat kepada partai politik. Dari sisi sistem kepartaian, pemilu 1999 ini mirip dengan pemilu 1955, sehingga bisa dikatakan bahwa pemilu 1999 sebagai reinkarnasi pemilu 1955. Namun demikian, konsistensi politik aliran pasca reformasi perlu diuji pada pemilu selanjutnya yaitu pemilu 2004 dan 2009.

Perubahan suara partai politik pada pemilu 2004 dan 2009 bukan karena berubahnya identifikasi Santri kepada Partai Islam, Abangan ke Partai Nasionalis. Yang terjadi adalah kekecewaan pemilih pada partai politik. Fiorina menyebutkan bahwa pemilih tidak peduli dengan program yang disampaikan oleh partai politik, tapi bagaimana program itu dapat dilaksanakan. Dengan kata lain bisakah mereka

---

168 Fachri Ali mengatakan bahwa pengaruh aliran dalam politik Indonesia adalah suatu produk sejarah sosial-politik dan ekonomi yang khas. Bahwa kendatipun masyarakat Indonesia telah mengalami proses kapitalisasi sejak abad ke-19, namun sumber-sumber material belum ditransformasikan menjadi alat politik dan daya pendorong bagi terciptanya afiliasi politik yang efektif bagi masyarakat Indonesia. Ini terjadi karena proses kapitalisasi modern itu berada di dalam kontrol tangan-tangan asing. Dalam arti kata lain, absennya kontrol kaum pribumi terhadap sumber-sumber material berbanding lurus dengan absennya kesadaran politik yang bersifat material-based di kalangan masyarakat Indonesia. Dia mencontohkan, gagalnya anggota Sarekat Islam untuk berkembang menjadi kelas ekonomi yang sadar—walau pada mulanya lahir dengan kesadaran itu—antara lain, menunjukkan kecenderungan kegagalan di atas. Di samping itu kegagalan PKI mengembangkan politik kelas yang cenderung membuat kompromi-kompromi ideologis dalam realitas politik Indonesia. Lihat Fachri Ali, *Pengaruh Aliran Dalam Politik Indonesia*, unpublished paper, 1996.

berbuat sesuatu untuk masyarakat setelah mereka terpilih. Pandangan Fiorina ini serasa cocok dengan kondisi pemilih di negara kita pasca reformasi, mereka tidak peduli dengan program partai yang penting bagi mereka (masyarakat pemilih) apa yang dapat dirasakan setelah dilaksanakannya pemilu.

### A. *Swing Votes: Sebuah Gejala Electoral Volatility*

Perolehan suara partai-partai sangat ditentukan oleh tiga faktor baru yang muncul dalam pemilu 2004: *Civic disengagement*, *swing votes*, dan *spilt voting*. *Civic disengagement* adalah kemampuan rakyat mengambil jarak dengan proses politik, sehingga mampu mereorientasi konsep dari kedaulatan negara menjadi kedaulatan rakyat. *Swing votes*, adalah suara pindah dari satu ke lain partai.<sup>169</sup> *Spilt voting* adalah pola memberi suara yang tidak hanya kesatu parpol untuk berbagai kesempatan memilih yang tersedia. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan electoral (*electoral Volatility*).

Ketidakstabilan electoral adalah ketidak konsistenan perolehan suara dari partai-partai yang ikut dalam pemilu. Dalam pemilu 1999 perolehan suara partai-partai papan tengah ke atas seperti PDIP, Golkar, PKB, PPP, PAN, PBB dalam pemilu 2004 mengalami penurunan dan memunculkan partai baru yang masuk ke papan tengah yaitu PKS dan Partai Demokrat. Penurunan suara partai-partai ini merupakan akibat dari adanya pengalihan suara pemilih dari partai yang di pilih pada pemilu 1999 ke partai lain yang ikut dalam pemilu 2004, kondisi ini dinamakan sebagai *swing votes*. Sementara, suara yang diberikan terhadap caleg dan partai politik dalam pemilu legislatif tidak sama dengan pilihan terhadap Presiden. Atau dalam pemilu 2009, ada kemungkinan terjadinya perbedaan pilihan terhadap caleg, misal untuk tingkat Kota dan Kabupaten memilih caleg dari partai A, tingkat provinsi caleg dari partai B, dan mungkin untuk tingkat Nasional memilih caleg dari partai C. Fenomena pilihan politik demikian disebut dengan *split Voting*.

Pada pemilu 2004 partai-partai yang meraih suara cukup signifikan pada pemilu 1999 mengalami degradasi. Dan kondisi tersebut di atas

---

169 Riswanda, Kompas 2004. Istilah swing vote digunakan untuk menggambarkan pemungutan suara atau pemilu dimana partisan pemilih pergi meninggalkan partainya dan memilih partai lain dalam pemilu dalam pemilu berikutnya.

ditenggarai telah mendorong terjadi pergeseran pilihan politik pemilih yang merasa kecewa dengan partai politik atau adanya pendekatan dari partai lain yang dianggap pas dengan harapan pemilih. Masyarakat pemilih mengatakan kecewa terhadap kinerja dari partai politik dan mengakui bahwa mereka tidak ikut mencoblos serta sebagian lagi mengalihkan pilihan politiknya. Fenomena tersebut berujung pada menurunnya perolehan suara beberapa partai-partai besar yang lulus *electoral threshold*. Sebagai contoh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang dalam pemilu 1999 memperoleh sekitar 33,67 %, dalam pemilu 2004 mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu menjadi 19,58 %. Yang juga diikuti oleh Partai Persatuan Pembangunan dari 10,72% menjadi 8,32% dan Partai Amanat Nasional dari 7,12% menjadi 6,47%.

**Tabel 3.1. Perolehan Suara Nasional Pemilu 1999 dan 2004**

No	Partai Politik	Suara (%)	
		1999	2004
1.	PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	33,76	19,58
2.	Partai Golkar (Partai Golongan Karya)	22,46	21,7
3.	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	12,62	11,98
4.	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	10,72	8,32
5.	PAN (Partai Amanat Nasional)	7,12	6,47
6.	PBB (Partai Persatuan Pembangunan)	1,94	2,56

Sumber: Data Hasil Pemilihan Umum 1999 dan 2004 Komisi Pemilihan Umum Pusat, yang telah diolah penulis.

Namun demikian secara umum partai-partai yang berbasis Nasionalis tetap mendominasi dalam pemilihan umum baik pada pemilu 1999 maupun 2004. Kondisi ini hampir mirip dengan pemilu demokratis pertama tahun 1995, dimana ada empat partai besar yang berhasil mendominasi dalam pemilu yaitu PNI 22,3 % suara, Masyumi 20,9% suara, NU 18,4 % suara, dan PKI 16,4 % suara. Dari data tersebut menunjukkan bahwa suara mayoritas dipegang oleh PNI yang Nasionalis.<sup>170</sup>

Dalam pemilu 2004, walaupun hasilnya tidak begitu jauh berbeda dengan pemilu 1999 dimana partai besar tetap dominan, namun ada fenomena yang menarik dengan munculnya partai politik baru yang

170 Alfian, *Analisis Hasil Pemilihan Umum 1971*, LIPI, Jakarta, 1973.

mendapat simpati sehingga mendapatkan suara yang cukup besar seperti Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan disisi lain ada partai yang mengalami peningkatan pemilih seiring dengan berkurangnya pemilih yang lain. Kenyataan ini menunjukkan bahwa dalam pemilu 2004 telah terjadi pergeseran pemilih. Pola perubahan dalam perilaku politik pemilih dalam proses pembangunan politik punya hubungan yang sangat erat dengan berbagai perubahan sosial (*social changes*)<sup>171</sup> yang terjadi dalam masyarakat.

Hasil yang diperoleh dalam pemilu 1999, menunjukkan hanya ada 6 parpol yang mendapat simpati para pemilih. Dari keenam parpol tersebut pada Pemilu 2004 menjadi parpol yang lolos dengan tidak melalui proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU, baik administratif maupun faktual. Keenam partai tersebut telah lulus electoral threshold (mempunyai 3 % dari jumlah suara secara nasional). Berdasarkan ketentuan UU No. 12/2003 partai yang sudah memenuhi electoral threshold tersebut, langsung ditetapkan menjadi peserta Pemilu 2004 apabila mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pemilu ke KPU. Keenam partai tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai BulanBintang. Sementara jumlah partai yang mengikuti proses verifikasi ada 44, dan setelah proses verifikasi selesai, hanya ada 18 partai yang lulus. Ditambah dengan 6 partai yang lulus *threshold*, jumlah keseluruhan partai yang berhak menjadi peserta Pemilu 2004 adalah 24.

Kebanyakan partai politik yang gagal meraih simpati pemilih pada pemilu 1999 karena kurang mampu menjadi representasi politik masyarakat. Berbagai aspirasi, harapan, ketakutan, keinginan yang melekat dengan pemaknaan partai oleh masyarakat pemilih tidak ditangkap dan dijadikan dasar dalam melakukan strategi pemenangan pemilu. Buktinya partai keadilan yang pada pemilu 1999 tidak memenuhi batas ambang suara, pada pemilu 2004 dengan mengubah namanya menjadi PKS bekerja secara sistematis dan programatik dengan mendekati diri pada masyarakat mendapatkan simpati dari pemilih pada pemilu 2004.

---

171 Persoalan-persoalan yang terkait dengan perubahan sosial dan pembangunan politik banyak dibahas dalam bukunya Jason L. Finkle and Rachard W. Gable, *Political Development and Social Change (second edition)*, Canada: John Wiley & Sons, Inc., 1971.

Kegagalan dalam memenuhi harapan masyarakat pada era pemerintahan Megawati telah membawa dampak pada kekecewaan pemilih pada reformasi yang berujung pada keinginan kembalinya suasana masa lalu (masa Orde Baru). Kondisi ini memberi angin segar bagi Golkar yang merupakan partai pendukung rezim orde baru pada masa itu. Alhasil, pada pemilu tahun 2004 Golkar menjadi pemenang. Masyarakat pemilih menghendaki kembali ke jaman normal (ketika Orba), dimana sandang, pangan dan keamanan terjamin.

Kondisi tersebut di atas bisa di lacak dari pilihan politik pemilih di tingkat lokal. Dalam pemilu 1999 dan 2004, Malang Raya menjadi miniatur politik yang bisa mewakili alur politik berdasarkan pola aliran tersebut. Masyarakat Malang Raya yang mayoritas beragama Islam, terbagi kedalam kedua kelompok pemeluk Islam yaitu Santri dan Abangan. Kedua kelompok itu, walaupun dalam aspirasi politik dan perilaku keberagamaannya berbeda, namun dalam konteks tertentu mereka masih bersama-sama. Dengan demikian, keberpihakan politik tidak menjadikan mereka berkonflik dengan sesama pemeluk Islam. Dengan adanya kebebasan politik ini, masyarakat berkecenderungan mengekspresikan kebebasan politiknya secara khas baik yang Santri maupun yang Abangan. Tidak ada tekanan sesama mereka, baik yang Santri maupun yang Abangan sama-sama menunjukkan identitas politik sendiri.

**Tabel 3.2. *Swing Votes* dari Pemilu 1999 ke 2004 di Kabupaten dan Kota Malang**

No.	Nama Partai	Kota Malang			Kabupaten Malang		
		1999	2004	<i>Swings Vote</i>	1999	2004	<i>Swings vote</i>
1	PDI-P	41,22 %	25,84 %	15,38 %	38,47 %	28,97 %	9,50 %
2	PKB	19,60 %	17,36 %	2,24 %	29,57 %	25,72 %	3,85 %
3	P. Golkar	16,04 %	14,55 %	1,49 %	18,32 %	16,68 %	1,64 %
4	PPP	0,78 %	2,36 %	-	3,46 %	4,51 %	-
5	PAN	10,53 %	6,77 %	3,76 %	2,93 %	2,61 %	0,32 %
6	PDS	2,80 %	2,36 %	0,44 %	0,086 %	1,08 %	-
7	PBB	2,41 %	1,28 %	1,13 %	0,74 %	0,93 %	-

Sumber: [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id) dan KPUD Malang Raya yang telah diolah penulis



Tingginya *swing votes*<sup>172</sup> yang ada di Malang Raya lebih dikarenakan kekecewaan pemilih pada partai. *Swing votes* yang paling besar berasal dari PDIP yaitu sebesar 15,38 % dan 9,50 % suara dari Kota dan Kabupaten Malang. Menurunnya suara PDIP, menurut hasil *Focus Group Discussion*, akibat dari kebijakan pemerintahan Megawati yang tidak pro *wong cilik*, dan hal ini telah menurunkan tingkat identifikasi pemilihnya pada PDIP. Selanjutnya tingkat *swing votes* dari pemilih di Kota dan Kabupaten Malang masing-masing sebagai berikut: PKB dengan 2,24 % dan 3,85 %; Golkar 1,49 % dan 1,64%; PAN 3,76 dan 0,32 %. *Swing votes* dari PDIP dan Golkar banyak yang masuk ke Partai Demokrat yang memperoleh suara 12,35 % Kota Malang dan 7,76 % Kabupaten Malang. Hal ini dikarenakan Partai Demokrat merupakan partai yang pluralis berasas Nasionalis Religius. Sementara *swing votes* dari PKB dan PAN banyak masuk ke PKS sebagai partai yang berasas Islam dengan tingkat militansi kader yang tinggi dan didukung dengan program partai yang sangat menyentuh kehidupan masyarakat berupa program bantuan sosial.<sup>173</sup>

Terkait dengan pemilu legislatif 5 April 2004, Pratikno menyatakan bahwa sejumlah partai memperebutkan suara dari kelompok masyarakat pemilih yang sama, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Golkar yang memperebutkan kaum Nasionalis, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) mencari suara kaum Islam modernis, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperebutkan suara kelompok Islam tradisional.<sup>174</sup> Sejalan dengan Pratikno, Ichlasul Amal menyampaikan bahwa hasil pemilu legislatif menunjukkan dengan jelas

---

172 *Swing votes* adalah perpindahan pilihan politik pemilih dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Pada pemilu 1999, PDIP, PKB, PAN dan Golkar yang merupakan representasi dari politik aliran, Abangan - PDIP, Santri Tradisional - PKB, Santri Modernis - PAN, dan Priyayi - Partai Golkar merupakan partai yang memperoleh suara tertinggi. Pada pemilu 2004 ketiga partai tersebut, terutama PDIP, mengalami penurunan suara yang sangat signifikan. Analisis hasil pemilu 2004 di Malang Raya.

173 Hasil wawancara dengan pemilih di Malang Raya pada bulan Januari 2007, menunjukan bahwa pemilih yang paling banyak melakukan *swing votes* adalah PDIP dan PKB. Hampir hampir lima puluh persen lebih pemilih dari partai Nasionalis mengalihkan pilihan politiknya ke Partai Demokrat, sementara pemilih PKB agak cukup menyebar, namun umumnya ke PKS dan Partai Demokrat. Hal ini juga didukung hasil penelitian penulis mengenai pergeseran pilihan politik di Kota Batu pada tahun 2006. Menurut hasil penelitian menunjukan bahwa pemilih Partai Golkar dan PDIP pada pemilu 1999 yang mengalihkan pilihan politiknya hampir 70 % menjadikan Partai Demokrat sebagai pilihan politik pada pemilu 2004. Sementara pemilih PAN dan PKB hampir 50 % mengalihkan pilihan politiknya ke PKS.

174 Kompas, 2004.

asal-muasal suara yang diperoleh empat besar partai pemenang pemilu, Golkar, PDI-P, PKB, dan PPP. Keempat partai itu mendulang suara dari kelompok Islam dan Nasionalis. Masyarakat masih mencoblos partai berdasarkan aliran, budaya, dan agama.<sup>175</sup>

## B. *Electoral Volatility* dan Konsistensi Politik Aliran

Politik aliran masih tetap berjalan, pergeseran politik yang signifikan hanya terjadi pada partai-partai yang berada dalam payung ideologis yang sama. Pergerakan suara dari satu partai ke partai lainnya akan lebih aktif dalam sesama partai Islam atau sesama partai Nasionalis. Sementara pergeseran antar partai yang berbeda ideologis, relatif lebih kecil jika dibanding dengan pergeseran antar partai yang berbeda ideologis. Sebagai contoh pergeseran politik pemilih dari PAN ke PKS yang sama modernis, pergeseran dari PKB ke PKNU (2009) yang sama tradisional, pergeseran dari PDIP dan Partai Golkar ke Partai Demokrat yang sama Nasionalis.

### 1. Konsistensi Aliran dalam Pergeseran Politik Antar Partai

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPUD, di wilayah Kabupaten Malang yang paling banyak ditinggalkan oleh pemilih adalah Partai Golkar, pada pemilu 2009, khususnya untuk dapil 7, Partai Golkar kehilangan suaranya sebesar 18,26%.

**Tabel 3.3. Perolehan Suara Tujuh Partai pada Pemilu 1999, 2004, dan 2009 di Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu**

No.	Nama Partai	Kabupaten Malang			Kota Malang			Kota Batu		
		1999	2004	2009	1999	2004	2009	1999	2004	2009
01.	PDI-P	39,66%	19,88%	22,59 %	41,22%	25,84%	20,69 %	38,47%	18,97%	19,17%
02.	P. Golkar	23,98%	20,62%	13,55 %	16,04%	12,35%	7,23 %	18,32%	19,67%	16,34%
03.	PKB	20,36%	13,19%	13,08 %	19,60%	17,36%	10,30 %	29,57%	12,59%	3,32%
04.	PPP	2,84%	2,51%	4,12 %	2,80%	2,36%	2,57 %	3,46%	4,51%	1,18%
05.	PAN	5,82%	5,91%	2,19 %	10,53%	6,77%	4,86 %	2,93%	5,64%	9,76%
06.	PKS	0,4%	3,05 %	5,27 %	0,8%	7,16 %	7,43 %	-	2,95 %	4,12%
07.	PBB	1,31%	1,12%	1,02%	2,41%	1,28%	1,23%	0,74%	1,03%	0,66%

Sumber: Data KPUD Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu yang telah diolah penulis.

Selanjutnya partai yang mengalami kehilangan suara cukup signifikan adalah PDIP yang kehilangan suara sebesar 15,44%, disusul

<sup>175</sup> Statemen ini merupakan jawaban dari pertanyaan yang diajukan wartawan kompas terkait dengan pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2004. *Ibid.*

oleh PAN sebesar 2,08%. Sementara partai politik yang paling banyak mendapatkan penambahan suara adalah partai Demokrat, dengan tambahan suara sebesar 5,65%, disusul oleh PPP sebesar 2,83%, PKB berjumlah 0,88, dan PKS sebesar 0,26%.

Fenomena pemilih meninggalkan partai dalam pemilu 2004 dan 2009 tidak hanya kasus di dapil, namun secara umum hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten dan Kota juga menunjukkan fenomena yang sama. Sebagai perbandingan, bisa dilihat bahwa hampir semua partai baik di Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu mengalami penurunan suara, kecuali Partai Demokrat, dan PKS.

## 2. Konsistensi Aliran dalam Pergeseran Antar Kluster

Dari data menunjukkan bahwa perubahan politik yang terjadi antar golongan ideologis partai politik dari Islam ke Nasionalis maupun sebaliknya pada tahun 1999 ke 2004 baik di Kabupaten Malang, Kota Malang, maupun Kota Batu tidak begitu signifikan yaitu hanya sekitar 1-2%.

**Tabel 3.4. Pergeseran Politik Antar Kluster di Malang Raya**

No	Partai	Kabupaten Malang			Kota Malang			Kota Batu	
		1999	2004	2009	1999	2004	2009	2004	2009
1	Islam	37,77%	38,28%	23,25%	39,10%	36,21%	26,16%	25,81%	27,47%
2	Nasionalis	61,54%	60,85%	75,10%	60,65%	59,59%	68,6%	73,01%	71,31%
3	Kristen	0,71%	1,08%	1,65%	0,25%	4,20%	5,24%	1,18%	1,22%
	Jumlah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: KPUD Kabupaten, Kota Malang, Kota Batu yang telah diolah penulis.

Pergeseran antar kluster partai yang cukup signifikan justru terjadi pada pemilu 2004 ke pemilu 2009, khususnya di Kabupaten Malang yaitu sekitar 15%. Kenyataan tersebut bisa dijelaskan dengan kemunculan 2 partai baru pada pemilu 2009 yang mendapat apresiasi cukup signifikan dari pemilih, yaitu Partai Hanura dan Partai Demokrat. Sementara pergeseran yang terjadi dalam partai Kristen menunjukkan tren meningkat, khususnya yang terjadi di Kota Malang. Partai berhaluan Kristen yang pada pemilu 1999 hanya mendapatkan 0,25%, pada pemilu 2004 meningkat menjadi 4,20%, dan pada pemilu 2009 mendapatkan suara 5,24%.

Dalam pemilu 1999, sebagai justifikasi pada politik aliran, bisa dikemukakan bahwa organisasi massa solidaritas yang dikemukakan Geertz menunjukkan afiliasinya terhadap partai politik tertentu.

Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang modernis walaupun secara formal tidak menjadi bagian pendukung partai (PAN), namun kelahiran PAN mau tidak mau akan selalu dikaitkan dengan Muhammadiyah dikarenakan Amin Rais sebagai pendiri PAN merupakan mantan Ketua Umum PPM Muhammadiyah. Apa lagi di tingkat kepengurusan baik Wilayah maupun Daerah, sebagian besar mereka adalah orang-orang yang merupakan aktivis Muhammadiyah. Artinya ada benang merah yang menghubungkan antara Muhammadiyah sebagai organisasi massa keagamaan yang Modernis dengan PAN sebagai partai politik.

Di sisi lain, Nahdhotul Ulama (NU) yang menjadi representasi dari organisasi massa keagamaan Tradisional, harus merelakan diri apabila diklaim sebagai ormas pendorong lahirnya partai politik, dalam hal ini PKB. Kelahiran PKB sebagai partai politik tidak lepas dari karyanya Gus Dur atau Abdurahman Wahid sebagai cucu pendiri NU yang sekaligus mantan Ketua Umum PB NU, dan juga sebagai mantan Presiden. Dengan adanya Gus Dur, PKB sepertinya dianggap sah mempergunakan basis pemilih NU yang cukup besar khususnya di Jawa Timur. Oleh karena itu, mau tidak mau, suka tidak suka, baik PAN atau pun PKB, walaupun tidak secara formal mencantumkan Islam sebagai asas partai, keduanya baik secara sosiologis maupun historis merupakan partai Islam. Alasan sosiologis yang sangat jelas tergambar dari para elit partai maupun konstituennya, serta historis dari kelahiran partai-partai itu.

Lebih jauh, bagi kelompok yang disebut dengan abangan, walaupun dalam hal organisasi tidak bisa di lihat secara jelas sebagaimana pada kelompok Santri baik yang Tradisional maupun Modern, namun kelompok masyarakat yang dibedakan dari perilaku keberagamaannya yang minimalis (Islam Nominal) mempunyai hubungan yang kuat dengan partai Nasionalis. Pada pemilu 1999 dan 2004 pemilih abangan ini sebagian besar afiliasi politiknya pada PDIP yang merupakan partai politik yang berhaluan Nasionalis. Dengan demikian, sesuai dengan kerja dari politik aliran bahwa kelompok santri yang taat beragama akan membentuk partai politik yang sama yaitu Islam, sementara abangan akan membentuk partai yang bukan agama yaitu Nasionalis.

Dalam pemilu 2004 para pemilih Santri juga tidak bisa dipisahkan dari partai-partai Islam atau yang secara sosiologis dan historis dengan Islam seperti PKB, PPP, PAN, PKS dan PBB, walaupun ada sebagian

yang memilih partai Partai Nasionalis Religius, seperti Golkar dan Demokrat. Secara khusus PKB, PPP, PPNU merupakan partai politik yang menjadi afiliasi bagi kalangan Santri Tradisional, dan PAN, PKS dan PBB merupakan partai politik yang menjadi afiliasi bagi kalangan Santri Modernis. Sementara Partai Golkar dan Partai Demokrat merupakan partai tempat penyaluran aspirasi dari sebagian kalangan Muslim baik yang Tradisional maupun Modernis.

Sebagai mana telah dikemukakan, afiliasi politik pemilih Abangan punya kecenderungan besar tertuju pada PDIP, di samping Partai Nasionalis yang lain seperti Golkar, Demokrat, dan lain-lain. Dalam kelompok pemilih Abangan PDIP merupakan pilihan politik yang mayoritas, sehingga di Malang Raya pada pemilu 1999 dan 2004 PDIP menjadi partai politik yang mempunyai suara signifikan. Bahkan dalam pemilu 1999, PDIP di Malang Raya melebihi perolehan PDIP secara nasional. Secara nasional PDIP mendapat 37,78%, sementara di Malang Raya berdasar wilayah berturut-turut mendapat 39,66% di Kabupaten Malang, dan 41,22% di Kota Malang. Secara nasional PDIP, pada pemilu 1999 memperoleh suara sebesar 33,76%.

Konfigurasi politik di Malang Raya menunjukkan bahwa politik aliran yang dikemukakan Clifford Geertz (1960) masih jelas. Kenyataan ini bisa dilihat dari konsistennya pilihan masyarakat pada Partai Islam maupun Partai Nasionalis. Walaupun pada pemilu 1999, tidak semua partai-partai berlabel Islam mendapat suara signifikan, kecuali empat partai saja, yakni PBB, PAN yang mewakili pilihan Santri Modernis dan PKB PPP, yang mewakili pilihan Santri Tradisional. Dan di sisi lain partai politik berhaluan Nasionalis yang di wakili PDIP menjadi pilihan politik bagi kalangan Abangan.

Kekuatan partai yang lahir di era Orde Baru, yaitu partai Golkar mampu tetap bertahan karena masih banyaknya pemilih baik Santri maupun Abangan yang tetap setia. Adanya keseimbangan pemilih Santri dan Abangan, menunjukkan bahwa Partai Golkar sebagai partai Nasionalis yang berwajah *catchall party*. Partai Golkar berupaya menanggalkan ideologinya, untuk menjangkau konstituennya yang datang dari kalangan Santri dan Abangan. Dengan demikian ada spektrum afiliasi politik yang bergeser keluar baik dari kelompok Santri maupun Abangan. Sebagian pemilih Santri maupun Abangan berafiliasi dengan Partai Golkar.

Dengan demikian, walaupun telah mengalami sedikit perubahan, namun secara garis besar dapat dikatakan bahwa aliran politik masih tetap eksis dalam pemilu era multipartai ini. Pemilih Santri masih berkecenderungan memilih partai politik yang Islam, sementara pemilih Abangan masih punya kecenderungan memilih partai yang Nasionalis. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pemilu 1999 dan 2004 di Malang Raya keyakinan sosio-religi yang bersumber aliran seperti yang dikemukakan Geertz, masih menjadi bagian yang mewarnai kehidupan politik masyarakat. Hal ini, mungkin akan terus berlangsung dalam beberapa pemilu ke depan, dengan derajat yang berbeda.

### C. Dinamika Politik Aliran dalam Pemilu Pasca Reformasi

Pemilu pasca reformasi sudah dilaksanakan sebanyak tiga kali yaitu pemilu 1999, pemilu 2004, dan pemilu 2009. Pola aliran yang menjadi dasar interaksi antara partai dan pemilih dalam setiap pemilu terus mengalami dinamika. Pola identifikasi berbasis aliran masih berjalan, akan tetapi fakta pemilu menunjukkan bahwa pada pemilu 2004 dan 2009 partai politik yang lulus *electoral threshold* mengalami kehilangan suara yang cukup signifikan. Pada pemilu 2004 telah terjadi pergeseran suara dalam internal partai yang punya basis ideologis dan pemilih yang sama. Sementara pada pemilu 2009, pergeseran politik telah melampaui batas ideologis partai.

Penjelasan bagi hilangnya suara partai politik yang lulus *electoral threshold* pada pemilu 2004 adalah akibat kekecewaan publik yang terjadi terkait rendahnya kinerja partai politik sebagai *servicing of interest*.<sup>176</sup> Namun demikian pada pemilu 2004 ini tidak menyebabkan perubahan pola politik aliran karena pergeseran pilihan politik pemilih hanya terjadi pada internal partai politik dalam satu payung ideologis (di internal Partai Islam dan Partai Nasionalis). Sementara pada pemilu 2009, perubahan pilihan politik pemilih telah menembus batas politik aliran, hal ini bisa dilihat dari perubahan perolehan suara pada dapil-dapil yang pada pemilu 2004 dimenangkan PKB. Dapil-dapil yang mulanya dimenangkan PKB yang merupakan pilihan politik pemilih yang datang dari basis Santri Tradisional, pada pemilu 2009 justru di menangkan oleh Partai Demokrat yang merupakan Partai Nasionalis.<sup>177</sup>

<sup>176</sup> Lihat John F. Bibby, *Politics, Parties, and election in America*, Chicago: Nelson-Hall Publisher, 1992. terutama p. 5.

## 1. Pemilu 1999: Reinkarnasi Pemilu 1955

Dari 48 partai politik pada pemilu 1999, tercatat ada 10 partai politik yang secara formal berasaskan Islam.<sup>178</sup> Sementara yang lainnya berasaskan Pancasila dan dua partai yang berasaskan gabungan antara Pancasila dan Islam. Kategorisasi ideologis yang didasarkan pada asas partai yang secara formal tercantum dalam AD/ART tidak akan mampu mendalami secara substantif dari partai politik yang bersangkutan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa walaupun ada partai yang secara formal mencantumkan asas selain Islam, namun dalam praktiknya basis massa mereka adalah pemilih Islam. Di sisi lain, figur-figur elit partai dilihat dari latar belakang keagamaannya termasuk tokoh-tokoh yang tidak diragukan lagi keberpihakannya terhadap Islam. Sebagai contoh PAN yang didirikan oleh Amin Rais yang punya latar belakang sebagai Pimpinan Pusat Muhammadiyah, termasuk PKB, ada Gus Dur yang merupakan tokoh Islam mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Nahdlotul Ulama. Begitupun ada beberapa partai yang dibangun, walaupun tidak mengatasnamakan partai Islam, tapi konstituen yang dibidiknya adalah konstituen Islam.<sup>179</sup>

---

177 Hasil analisis data pemilu juga menunjukan bahwa daerah-daerah yang ada pesantren tingkat perolehan suara PKB cukup signifikan, seperti di daerah Kedung Kandang, Singosari, Bululawang. Lebih lengkap bisa dilihat dari hasil pemilu 2004 KPUD Kota dan Kabupaten Malang.

178 Secara formal berasas Islam artinya partai tersebut mencantumkan Islam secara formal sebagai asas partai dalam AD dan ART nya.

179 Hingga saat ini, apa yang dimaksud dengan partai Islam masih ditemukan pemahaman yang beragam. Hal ini sejalan dengan pandangan yang berkembang di kalangan umat Islam, khususnya di Indonesia tentang hubungan antara Islam dan negara yang juga mendapat tanggapan yang beragam. Bagi kalangan akademisi, keragaman pandangan ini tidak terlalu sulit untuk dipahami. Akan tetapi, bagi kalangan awam keragaman ini masih relatif sulit dipahami dan tidak jarang menimbulkan gesekan-gesekan yang berpotensi memicu konflik. Untuk itulah, dalam kajian ini penting dikemukakan tentang apa yang dimaksud dengan partai Islam dan yang terkait dengan hal ini berikut argumentasi-argumentasi yang melandasinya, agar keragaman pandangan tentang apa yang dimaksud dengan partai Islam mendapat apresiasi yang proporsional. Pembahasan ini menjadi terasa penting bila dikaitkan dengan posisi umat Islam Indonesia yang menempati jumlah terbanyak di dunia, sekaligus yang memiliki jumlah partai Islam terbanyak pula. Sebagian kalangan berpendapat bahwa yang dimaksud dengan partai Islam adalah partai-partai yang menggunakan nama atau simbol simbol Keislaman. Sebagian yang lain menyatakan bahwa yang dimaksud dengan partai Islam adalah partai yang menjadikan Islam sebagai azasnya. Sebagian kalangan lagi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan partai Islam adalah partai yang bertujuan memperjuangkan kepentingan-kepentingan umat Islam, meskipun tidak menggunakan simbol atau atribut Islam, dan masih banyak lagi pendapat tentang hal ini. Dari berbagai pendapat yang berkembang tentang apa yang dimaksud dengan partai Islam tersebut, paling tidak dapat ditemukan suatu rumusan dengan kriteria-kriteria sebagai berikut. *Pertama*, yang dimaksud dengan partai Islam adalah partai yang menggunakan nama, azas, tanda gambar, yang terkait dengan Islam. *Kedua*, yang dimaksud dengan partai Islam adalah partai

Pola electoral pemilu 1999 banyak dihubungkan dengan pemilu 1955 karena punya kemiripan, khususnya terkait bekerjanya politik aliran. Walaupun menurut King (2003), antara pemilu 1955 dan 1999 tidak persis sama karena nama partainya berbeda, organisasi, anggota, dan perolehan suaranya juga berbeda.<sup>180</sup> Sebagaimana kita ketahui, dalam pemilu 1955 ada empat partai politik yang memperoleh suara signifikan yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Sementara pada pemilu 1999 yang memperoleh suara signifikan dan lolos *electoral threshold* ada enam yaitu PDIP, Partai Golkar, PKB, PPP, PAN, dan PBB. Sebagai catatan, hasil perolehan suara partai pada pemilu 1999 di tingkat nasional tidak jauh berbeda dengan perolehan suara di tingkat lokal, khususnya di Malang Raya.<sup>181</sup>

Pada pemilu 1999 menunjukkan bahwa di Kota Malang PDI-P meraih 162.818 suara atau 41,32 % dengan perolehan kursi 15 kursi. PKB dengan 77.429 suara atau 19,65 %, mendapatkan 12 kursi. Golkar memperoleh suara 63.363 atau 16,08 % sehingga mendapatkan 7 kursi. PPP dengan 11.080 suara atau 2,81 % mendapatkan 3 kursi. PAN meraih 41.582 suara atau 10,55 %, mendapatkan 2 kursi. Sementara di Kabupaten Malang, PDI-P meraih 510.450 suara atau 38,46 % dengan perolehan kursi 17 kursi. PKB dengan 392.472 suara atau 29,57 %, mendapatkan 12 kursi. Golkar memperoleh suara 243.110 atau 18,32 % sehingga mendapatkan 9 kursi. PPP dengan 45.939 suara atau 3,46 % mendapatkan 1 kursi. PAN meraih 38.891 suara atau 2,931 %, mendapatkan 1 kursi.

Dari beberapa partai Islam atau yang mempunyai hubungannya dengan pemilih Islam, yaitu PKB, PPP, PAN, PK, PBB, dan yang lainnya, hanya PKB mempunyai dukungan pemilih paling besar. Partai Kebangkitan Bangsa menempati urutan kedua terbesar setelah PDIP yaitu 29, 57 % untuk Kabupaten Malang, 19,60 % untuk Kota Malang, padahal secara nasional jumlah pemilih yang memberikan suaranya ke

---

yang konstituen utamanya adalah umat Islam. *Ketiga*, yang dimaksud dengan partai Islam adalah partai yang program dan tujuannya memperjuangkan kepentingan-kepentingan semua warga negara, tetapi konstituennya adalah umat Islam. Jadi, yang dimaksud dengan partai Islam adalah partai yang di dalamnya mengandung ketiga unsur di atas. Lebih jelas mengenai karakteristik partai, khususnya partai politik peserta pemilu 1999, lihat *Partai-Partai Politik Indonesia, Ideologi dan Program, 2004-2009*, PT. Kompas Media Nusantara, 2004.

180 Dwight Y. King, *Half-Hearted Reform, Electoral Institution And The Struggle For Democracy In Indonesia*, USA: Praeger Publisher, 2003 p. 124.

181 Sumber Sekretariat Dewan Kota dan Kabupaten Malang.



PKB ini pada tahun 1999 hanya 12,62 %.<sup>182</sup> Hal ini bisa dipahami karena wilayah Jawa Timur, khususnya Malang Raya merupakan basis dari Partai NU yang pada pemilu 1955 merupakan pemenang kedua setelah Masyumi. Sementara dukungan pemilih pada partai Islam lainnya tidaklah signifikan, kecuali untuk PAN yang punya basis pemilih golongan Islam Modernis mendapat 10,53 % di Kota Malang.

**Tabel 3.5. Perbandingan Perolehan Suara Partai pada Pemilu 1955 dan 1999**

No	Pemilu 1955		Pemilu 1999	
	Partai	Suara (%)	Partai	Suara (%)
1.	PNI	22,3	PDIP	33,76
2.	Masyumi	20,9	Partai Golkar	22,46
3.	NU	18,4	PKB	12,62
4.	PKI	16,4	PPP	10,72
5.	-	-	PAN	7,12
6.	-	-	PBB	1,94

Sumber: Data Pemilu 1955 diambil dari A. Van Marle, 1956 dalam Alfian, *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik, Kumpulan Karangan*, Jakarta PT. Gramedia, 1990, hal 103. Data pemilu 1999 diambil dari [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id).

Kalau kita analisis dari basis pemilih, yang mendukung partai-partai peserta pemilu 1999 masih sejalan dengan politik aliran,<sup>183</sup> sebagaimana

182 Besarnya dukungan pemilih kepada PKB, yang umumnya merupakan kelompok santri tradisional, tidak lepas dari pemahaman mereka bahwa PKB adalah partai NU. Gur Dur yang menjadi ikon di PKB, bagi kalangan Nahdliyin sudah cukup untuk merepresentasikan NU di PKB. Bagi kalangan pemilih Santri Tradisional, tinggi rendahnya ke NU-an mereka juga diukur dari pilihan politiknya. Maka ketika, PKB diidentikan dengan NU, makan memilih PKB seakan-akan sudah menjadi kewajiban. Oleh karena itu banyak di antara mereka yang rela untuk menghadiri acara-acara kampanye yang diadakan oleh PKB dengan biaya sendiri. Simbol-simbol yang menjadi ciri khas dari organisasi NU yaitu bola dunia yang dikelilingi bintang sembilan menjadi menu wajib warga Nahdiliyin dalam menghiasi rumahnya, baik dalam bentuk kalender maupun poster. Begitupun dalam setiap acara keagamaan yang dilakukan, selalu menjadi ajang sosialisasi dari para elit PKB untuk menegaskan bahwa apabila mengaku NU harus memilih PKB. Hampir semua kekuatan NU, baik itu kyai dengan pesantren nya, guru agama dengan sekolahnya banyak yang terlibat dalam mensosialisasikan dan sekaligus mengkampanyekan untuk kemenangan PKB. Dengan demikian tidak lah mengherankan apabila PKB dalam pemilu 1999 mendapat suara yang signifikan, walaupun ada partai lain yang juga lahir dari rahim NU seperti PNU dan PKU.

183 Konsep politik berdasarkan pola aliran menjadi menonjol, tatkala kehidupan politik dalam masyarakat bukan didasarkan pada ideologi politik belaka, melainkan antar hubungan organisasi-organisasi sosial dengan kehidupan dari suatu sistem sosial yang kompleks (dari suatu infrastruktur sosial dan kebudayaan di pedesaan dan perkotaan). Karena itu

yang berkembang pada pemilu 1955.<sup>184</sup> PDIP yang merupakan representasi dari pemilih Abangan, PKB dan PPP yang merupakan representasi dari pemilih Santri Tradisional, PAN dan PK representasi dari pemilih santri Modernis, sementara Partai Golkar merupakan representasi dari pemilih Priyayi.<sup>185</sup> Jika kita bandingkan dengan partai-partai peserta pemilu 1955, dimana PNI dan PKI mewakili kelompok Nasionalis dengan basis pemilih Abangan. PNI mendapat dukungan terbesar dari Abangan kelas menengah atas dan birokrat (priyayi), sementara PKI kelompok Abangan kelas bawah. Di sisi lain Masyumi dan NU yang mewakili kelompok partai Islam, Masyumi merupakan basis bagi pemilih Santri Modernis dan NU merupakan basis pemilih Santri Tradisional. Dengan demikian tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa pemilu 1999 pasca reformasi merupakan reinkarnasi dari pemilu 1955.

Namun demikian, ada perbedaan dalam persaingan politik yang dirasakan cukup penting untuk dikemukakan. Pada pemilu 1955 Masyumi dan NU sebagai partai pemenang empat besar yang mewakili segmen pemilih Santri. Ditingkat legislatif (DPR dan Konstituante) kedua partai ini berjuang untuk menggolkan syariat Islam atau negara Islam, dan mereka setuju dengan Piagam Jakarta. Di sisi lain PNI dan PKI yang merupakan representasi dari kaum Abangan yang Nasionalis, dan ditingkat legislatif tidak berkehendak untuk menjadikan negara Islam, dan berjuang agar Pancasila dipertahankan sebagai Dasar negara.<sup>186</sup> Pada pemilu 1999, pertarungan politik yang berpusat pada pembentukan jati diri negara dalam hal ideologi tidaklah menjadi tema

---

terbentuk suatu aliran politik yang terformulasikan melalui istilah-istilah yang lebih bersifat ideologis. Sebenarnya perumusan tentang aliran politik di Indonesia telah dinyatakan di dalam pemikiran Soekarno tentang rumpun ideologi utama di Indonesia (Nasionalisme, Islam, dan marksisme). Namun klasifikasi tiga kelompok itu dianggap masih mengandung banyak kesulitan. Sebab tiap-tiap kategori sifatnya masih terlalu heterogen. Contohnya, perbedaan yang tajam antara kaum komunis dengan kaum sosialis, kelompok-kelompok yang radikal dan keningratan di kalangan Nasionalis, di samping pengaruh dari kehidupan subkultur terhadap kehidupan politik di kalangan Islam.

185 Patut disampaikan, walaupun PKB dan PAN dalam platform partai tidak mencantumkan asas Islam, namun dari kacamata sosiologis dan historis kedua partai ini bisa dikategorikan partai Islam karena mempunyai kedekatan dengan pemilih Islam. PKB didirikan oleh Gus Dur yang merupakan mantan Ketua Umum PP NU dan sekaligus cucu pendiri NU yaitu KH. Hasyim Asyari, sementara Amin Rais merupakan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah.

186 Pertarungan ideology di tingkat legislative pasca pemilu 1955 lihat Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Ithaca London: Cornell Univeristy Press, 1962.

persaingan partai politik. Persaingan antara partai Islam dan Nasionalis lebih fokus pada bagaimana mengisi negara Republik Indonesia ini dari perspektif ideologisnya masing-masing. Partai Islam berusaha agar Syariat Islam itu dapat teraktualisasi dalam kehidupan atau dalam hukum formal, seperti hukum waris atau ekonomi Islam.<sup>187</sup> Lebih jauh, pada pemilu 1955 spektrum ideologi kiri dan kanan masih jelas. Kutub ter kiri dari garis ideologi partai ditempati oleh PKI. Sementara pada pemilu pasca reformasi kutub kiri menghilang, yang ada hanya partai-partai yang berideologi tengah kanan.

## 2. Pemilu 2004: Migrasi Suara sebagai Bentuk Protest Voters

Pada pemilu 2004, walaupun terjadi migrasi suara yang signifikan dari partai-partai besar dan menengah, namun pola aliran masih tetap berjalan. Perubahan pilihan politik pemilih yang terjadi bukan disebabkan oleh menurunnya identifikasi pemilih, akan tetapi merupakan bentuk protes dari pemilih kepada partai. Hal ini juga telah diprediksi oleh Pratikno (2004), "perilaku pemilih di Indonesia masih belum berubah dari pola yang berkembang sejak Pemilu 1955. Masyarakat tetap menyalurkan aspirasi politiknya dengan basis ideologi, sedangkan kelompok masyarakat yang rasional hanya sekitar 20 persen."<sup>188</sup>

Sebagai mana kita ketahui, secara nasional PDI-P yang merupakan representasi dari partai abangan dalam pemilu 1999 mendapatkan suara sangat tinggi dibandingkan dengan partai-partai lain dengan perolehan suara sebesar 33,76%. Kemenangan partai ini dianggap sebagai kemenangan wong cilik yang selama Orde Baru mendapat tekanan, dan Megawati yang merupakan putri dari seorang tokoh

---

187 Argument ini saya kemukakan karena pada pemilu 1999, walaupun partai-partai memberi label sebagai Nasionalis atau Islam, namun secara ril isu-isu yang dimunculkan tidaklah terlalu ekstrim. Walaupun demikian, lompatan ideology terjadi pada PPP yang lebih mengarah ke kanan, sementara PKS lebih mengarah ke tengah. Lihat, Kuskridho Ambardhi, *Mengungkap Politik Kartel*, Jakarta: PT Gramedia, 2009. hal 239.

188 Kompas 2004. Sebagai contoh kasus adalah hasil pemilu 2004 di wilayah Singosari yang ada 8 (delapan) pesantren (Pondol Ilmu Qur'an, Miftahul Falah, Nurul Huda, Al-Islahiyah, Darul Karomah, Al-Qur'aniyah, Darul Qur'an, Salafiyah Al-Fatah). Di wilayah ini Partai Kebangkitan Bangsa mengalami kemenangan cukup signifikan dibanding dengan peserta pemilu lainnya, dengan total suara 26.052 suara. Perolehan suara PKB cukup mencolok jika dibandingkan dengan perolehan suara peringkat ke dua, yaitu PDIP yang berjumlah 13.386 suara. Begitu pun kasus di Bululawang, yang ada 5 (lima) Pesantren (Al-Munawwariyah, An-Nur I, An-Nur II, An-Nur III, Oudhotul Muhsinin). Perolehan suara di wilayah ini, PKB juga menang cukup signifikan, yaitu sebesar 15.514 suara. Sementara PDIP yang menempati peringkat kedua hanya memperoleh 8.245 suara.

Proklamator menjadi simbol dari perjuangan wong cilik. Akan tetapi, kemenangan PDI-P dalam pemilu 1999 tidak bertahan, rakyat mulai meragukan komitmen Megawati sebagai pembela wong cilik ketika menjabat sebagai Presiden. Pada Pemilu 2004, PDI-P mengalami penurunan suara yang sangat signifikan karena hanya memperoleh suara 19,58% dibawah Golkar. Semetara Golkar yang merupakan partai pendukung rezim Orde Baru, walaupun terjadi hujatan akibat sepek terjangnya pada masa itu, namun pada pemilu 1999 tetap mendapatkan suara cukup signifikan yaitu 22,46%. Bahkan pada pemilu 2004, Golkar menjadi partai tertinggi dalam perolehan suara mengalahkan PDI-P yang pada pemilu 1999 memperoleh suara jauh melampaui partai-partai lain termasuk Golkar. Sebagai perbandingan pada pemilu 2004 Golkar mendapatkan 21,7% dan PDI-P mendapatkan suara 19,98%.

Walau pada pemilu 1999 dan 2004, partai-partai Islam berupaya keras berjualan dengan berbagai iklan yang menjanjikan seperti Syariat Islam (PPP), namun fakta hasil pemilu menunjukkan bahwa masyarakat sudah tidak lagi begitu terpengaruh dengan ide Syariat Islam. Hal ini dibuktikan dari hasil perolehan suara dalam pemilu untuk partai-partai Islam yang getol meng-isu-kan Syariat Islam, seperti PPP, yang tidak mendapat suara besar. PKB yang nota bene sebagai partai yang berasas Nasionalis (Pancasila) dan tidak menggunakan isu Syariat Islam justru banyak didukung oleh pemilih Islam, khususnya Santri Tradisionalis yang cenderung umumnya sering terpengaruh oleh isu Syariat Islam.

Tidak jauh berbeda dengan kondisi di tingkat Nasional, di Malang Raya juga terbukti bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mampu mendominasi perolehan suara, walau terjadi penurunan suara yang signifikan. Perolehan suara PDIP di Kota Malang 101.732, Kabupaten Malang 357.008, dan Kota Batu 3.299. Sementara partai Islam atau yang secara sosiologis bisa dikategorikan partai Islam, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menempati posisi ke dua, dengan perincian Kota Malang 68.321, Kabupaten Malang 316.665, dan Kota Batu 4.209.

Realitas lain, dari sembilan partai Islam<sup>189</sup> yang berlaga pada pemilu 2004, tiga partai mengalami penurunan dukungan suara (PPP, PKB dan

---

189 Hingga saat ini, apa yang dimaksud dengan partai Islam masih ditemukan pemahaman yang beragam. Hal ini sejalan dengan pandangan yang berkembang di kalangan umat Islam, khususnya di Indonesia tentang hubungan antara Islam dan negara yang juga mendapat tanggapan yang beragam. Bagi kalangan akademisi, keragaman pandangan ini tidak terlalu sulit untuk dipahami. Akan tetapi, bagi kalangan awam keragaman ini masih relatif

PAN) dan dari tiga partai politik lainnya meningkat, yakni PKS, PBB, dan partai persatuan Nahdatul Ummah Indonesia (PPNUI). Satu partai lagi adalah pendatang baru, yaitu Partai Bintang Reformasi (PBR). Hal menarik, pada pemilu 2004 ada kecenderungan dari pemilih Santri sudah mulai melirik partai yang benar-benar berasaskan Islam seperti PKS, walaupun dengan prosentase relatif kecil. Setelah kekalahan pada pemilu 1999, PKS yang awalnya bernama Partai Keadilan, melakukan konsolidasi sehingga pada pemilu 2004 menjadi partai papan tengah dengan perolehan suara 6,44 % secara nasional.

**Tabel 3.6. Hasil Perolehan Kursi Pemilihan Legislatif DPRD  
Malang Raya Tahun 1999 dan 2004**

No	Nama Partai	Jumlah Kursi				
		Kota Mlg		Kab. Mlg		Kota Batu
		1999	2004	1999	2004	
1.	PDIP	15	12	17	15	5
2.	PKB	12	8	12	13	4
3.	Golkar	7	5	9	7	5
4.	Partai Demokrat	-	7	-	6	4
5.	PAN	4	5	1	-	2
6.	PK / PKS	1	5	1	1	1
7.	PPP	1	1	1	3	-
8.	PDS	-	2	-	-	1
9.	PSI	-	-	-	-	1
10.	PNBK	-	-	-	-	1
11.	PNI Marhaen	-	-	-	-	1
-	JUMLAH	40	45	40	45	25

Sumber: [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id) dan KPUD Malang Raya yang telah diolah penulis.

sulit dipahami dan tidak jarang menimbulkan gesekan-gesekan yang berpotensi memicu konflik. Untuk itulah, dalam kajian ini penting dikemukakan tentang apa yang dimaksud dengan partai Islam dan yang terkait dengan hal ini berikut argumentasi-argumentasi yang melandasinya, agar keragaman pandangan tentang apa yang dimaksud dengan partai Islam mendapat apresiasi yang proporsional. Pembahasan ini menjadi terasa penting bila dikaitkan dengan posisi umat Islam Indonesia yang menempati jumlah terbanyak di dunia, sekaligus yang memiliki jumlah partai Islam terbanyak pula. Sebagian kalangan berpendapat bahwa yang dimaksud dengan partai Islam adalah partai-partai yang menggunakan nama atau simbol simbol Keislaman. Sebagian yang lain menyatakan bahwa yang dimaksud dengan partai Islam adalah partai yang menjadikan Islam sebagai azasnya. Sebagian kalangan lagi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan partai Islam adalah partai yang bertujuan memperjuangkan kepentingan-kepentingan umat Islam, meskipun tidak menggunakan simbol atau atribut Islam, dan masih banyak lagi pendapat tentang hal ini. Dari berbagai pendapat yang berkembang tentang apa yang dimaksud dengan partai Islam tersebut, paling

Penurunan suara partai berimplikasi pada penurunan kursi di DPRD dari pemilu 1999 ke pemilu 2004. PDIP dari 15 kursi turun dua menjadi 12 pada, PKB dari 12 kursi turun empat menjadi 8 dan Golkar dari 7 kursi turun dua menjadi 5. Sementara di Kabupaten Malang, PDIP dari 17 kursi turun 2 menjadi 15, Golkar dari 9 turun dua menjadi 7. Seiring dengan penurunan suara yang dialami PDIP, PKB, dan Golkar, ada partai yang memperoleh suara pantastis pada pemilu 2004 yaitu PKS dan Partai Demokrat. Parta Demokrat yang baru ikut pemilu tahun 2004 langsung menempati urutan keempat dengan perolehan suara 14,55 % dan 7,76 % untuk Kota dan Kabupaten Malang, sementara PKS mendapatkan suara sebesar 7,16 % dan 3,05 % untuk Kota dan Kabupaten.<sup>190</sup>

Hasil pemilu 2004 yang menyesak napas bagi partai-partai besar dan menengah ada indikasi kuat sebagai dampak dari perilaku partai beserta elitnya yang membuat publik kecewa. Berbagai peristiwa yang mendahului sebelum pemilu 2004 seperti konflik internal partai,<sup>191</sup> kasus korupsi anggota dewan, dan ketidakmampuan partai memerankan fungsi mediasi kepentingan telah dibaca sebagai “penghianatan” terhadap kepercayaan publik yang telah diberikan. Oleh karena itu, partai-partai tersebut perlu diingatkan dan sekaligus dihukum, dengan cara mengalihkan pilihan politiknya ke partai lain pada pemilu berikutnya.

Tidak bekerjanya fungsi partai dikarenakan partai lebih berfungsi sebagai alat negosiasi dengan penguasa untuk mencapai kompensasi politik ketimbang benar-benar memperjuangkan aspirasi konstituen,

---

tidak dapat ditemukan suatu rumusan dengan kriteria-kriteria sebagai berikut. *Pertama*, yang dimaksud dengan partai Islam adalah partai yang menggunakan nama, azas, tanda gambar, yang terkait dengan Islam. *Kedua*, yang dimaksud dengan partai Islam adalah partai yang konstituen utamanya adalah umat Islam. *Ketiga*, yang dimaksud dengan partai Islam adalah partai yang program dan tujuannya memperjuangkan kepentingan-kepentingan semua warga negara, tetapi konstituennya adalah umat Islam. Jadi, yang dimaksud dengan partai Islam adalah partai yang di dalamnya mengandung ketiga unsur di atas. Lebih jelas mengenai karakteristik partai, khususnya partai politik peserta pemilu 1999, lihat *Partai-Partai Politik Indonesia, Ideologi dan Program, 2004-2009*, PT. Kompas Media Nusantara, 2004.

190 Analisis hasil rekapitulasi pemilu KPUD 2004 di Malang Raya (Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu).

191 Kasus perebutan kuasa di tubuh partai, hampir terjadi pada semua kepengurusan partai di Malang Raya. Kasus yang paling menonjol adalah perebutan pimpinan partai di tubuh PAN Kota Malang yang melahirkan dualisme kepemimpinan yaitu antara kepemimpinan Darul Komar dan Kepemimpinan Prof, Kaprawi, SH., dan tidak bisa secara cepat diselesaikan walaupun sudah ada campur tangan dari pengurus pusat PAN. Hasil wawancara dengan pengurus partai Kota Malang.

sebagaimana hal konsep politik kartel. Sementara di sisi lain, fungsi mendasar sebuah parpol, sebagai sarana artikulasi, agregasi, lebih-lebih sarana pendidikan politik yang sehat bagi masyarakat sepertinya kian jauh dari harapan. Ketidakmampuan parpol dalam mengorganisasikan diri, meredam konflik internal, dan menumbuhkan militansi positif, pada saat yang sama agaknya telah menumpulkan kemampuan mereka dalam menerjemahkan kehendak politik publik dan memberi pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat. Wadah organisasi yang demokratis, sehat, dan bersih belum banyak tercermin pada partai politik yang mapan maupun beberapa partai yang baru. Ketidakmampuan menyerap aspirasi publik itu rupanya terus berlanjut saat parpol menjalankan fungsi agregasi politik mereka sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif.

Sejumlah penilaian buruk yang datang dari masyarakat masih ditambah dengan konflik internal, rekrutmen keanggotaan dan kaderisasi yang tidak lancar serta ketergantungan pada sosok elit partai. Sejumlah partai pada pemilu 2004 tidak lepas penilaian negatif masyarakat. Bahkan Partai Keadilan Sejahtera, yang dikenal dengan slogan “jujur dan peduli” pun, juga dinilai ada sisi negatif dari masyarakat. Sebagaimana pula penilaian kepada PDI Perjuangan, Golkar, PKB, PAN, PPP, dan partai lainnya, masyarakat menilai parpol saat ini kian menurun komitmennya pada masyarakat.

Beberapa ungkapan yang mereka kemukakan adalah sebagai berikut: bahwa kebanyakan calon anggota Dewan mengobral janji untuk mendapatkan suara namun tak pernah ditepati, kebanyakan anggota Dewan lebih mementingkan partai sendiri dari pada negara, para anggota Dewan cuma berbicara melulu dan tanpa tindakan, kebanyakan para calon anggota Dewan yang mencalonkan hanya untuk mencari pekerjaan dan menghabiskan uang rakyat politisi, sekali mereka menjadi anggota Dewan mereka melupakan pemilih-pemilihnya. Ada juga pemilih yang menyampaikan ungkapan bernada apathy seperti “ada pemilu maupun tidak ada pemilu sama saja”. Ungkapan itu jelas menunjukkan bahwa pemilih menganggap bahwa aktivitas politik, dalam hal ini memilih, merupakan kegiatan yang menurut mereka sia-sia. Oleh karena itu, para pemilih akan datang ke TPS, apabila ada rangsangan kepada mereka. Rangsangan yang diberikan bukan rangsangan politik, melainkan rangsangan yang

bersifat ekonomi seperti imbalan memberi uang kepada mereka. Sikap sinis dan apatis ini, secara tidak sadar telah menumbuhkan perilaku parktis-pragmatis, karena banyaknya calon dan partai yang meminta jasa dukungan pada pemilih.

Pemilih Abangan memandang bahwa PDIP merupakan partai pembela wong cilik, sementara simbol wong cilik yang mereka lihat adalah Megawati sebagai pimpinan partai. Kenapa Megawati yang dijadikan simbol, menurut salah seorang pemilih simpatisan PDIP, alasannya karena “Megawati sudah lama terjun di politik dan sudah lama berjuang untuk PDI.” Sebagian pemilih menyatakan bahwa Megawati menjadi figure di PDIP sekarang sangat diperuhi oleh kharisma Bung Karno, Megawati yang merupakan putri Bung Karno dianggap mewarisi ajaran dari ayahnya. Ajaran Bung Karno, mengenai Marhaenisme, merupakan cita-cita politik yang harus diperjuangkan. Sementara marhaenisme sendiri merupakan simbol politik yang merujuk pada sebuah masyarakat kelas bawah atau apa yang disebut dengan “*wong cilik*”. Oleh karena itu, Bung Karno dengan partainya yaitu PNI pada masa Orla dianggap sebagai partainya wong cilik. Pada saat Orde Baru, PDI, walaupun tidak selamanya Megawati jadi pimpinan di partai namun keluarga Soekarno tetap dipakai sebagai *vote getter* karena pimpinan teras PDI pada saat itu menyadari betul bahwa ruh partai ini adalah keluarga Soekarno.

Para pemilih yang mencoblos PDI-P lebih banyak dipengaruhi oleh figur Pak Karno, sedangkan Megawati sendiri tidak begitu dijadikan figure, dia diterima karena sudah berjuang cukup lama. Oleh karena itu ketika Megawati menjadi presiden dianggap tidak menjalankan komitmennya untuk memperbaiki wong cilik, maka pada saat pemilu presiden banyak dari pemilih PDIP tidak mencoblos Megawati. Begitu juga kegagalan PDIP mempertahankan hasil pemilu 1999, akibat dari kebijakan Megawati yang ketika menjabat sebagai presiden tidak memperhatikan wong cilik.<sup>192</sup> Pada akhirnya, sebagian pemilih yang mencoblos PDIP pada Pemilu 1999 mengalihkan suaranya ke partai lain, terutama partai baru yang menurut mereka punya harapan untuk perubahan.

---

192 Pada saat Megawati menjadi Presiden, di kota-kota, khususnya di Jakarta pada saat Gubernur Sutiyoso yang didukung PDIP, banyak terjadi penggusuran lahan maupun penertiban pedagang kaki lima yang nota bene adalah kebanyakan pendukung PDIP.



### 3. Pemilu 2009: Perubahan Partai Politik Dominan

Dari data pemilu 2009 hasil rekapitulasi KPUD Malang Raya, menunjukkan bahwa perolehan kursi partai di DPRD tidak lagi terkonsentrasi pada beberapa partai saja, melainkan sudah menunjukkan ada penyebaran. PDIP, PKB, dan Golkar yang merupakan sibolisasi dari politik aliran tidak lagi menjadi partai dengan perolehan kursi terbesar, pada pemilu 2009 dominasi ketiga partai ini tidak terjadi. Beberapa partai muncul ke permukaan seperti Partai Demokrat, PKS, PAN dan beberapa partai lain, bahkan Partai Demokrat bisa menghentikan dominasi PDIP di Kota Malang yang pada pemilu 1999 dan 2004 menjadi pemenang pemilu di Malang Raya.<sup>193</sup> Partai Demokrat di Kota Malang yang pada pemilu 2004 memperoleh kursi 7 kursi kalah 5 kursi dari PDIP yang memperoleh 12 kursi, pada pemilu 2009 Demokrat memperoleh 12 kursi sementara PDIP 9 kursi.

Kondisi hasil perolehan suara partai yang tidak konsisten dari satu pemilu ke pemilu menunjukkan bahwa pemilu berada dalam kondisi dealignment yang dicirikan dengan menurunnya identifikasi pemilih terhadap partai,<sup>194</sup> dan diikuti dengan meningkatnya *swing votes*. Dalam pemilu 1999 di Malang Raya perolehan suara partai-partai papan tengah ke atas seperti PDIP, Golkar, PKB, PPP, PAN, PBB dalam pemilu 2004 mengalami penurunan dan memunculkan partai baru yang masuk ke papan tengah yaitu PKS dan Demokrat, dan bahkan pada pemilu 2009 Partai Demokrat menjadi partai papan atas mengalahkan PDIP, khususnya di Kota Malang.<sup>195</sup>

193 Hasil pemilu 2009 di Malang Raya terjadi perubahan yang signifikan, baik dari sisi perolehan suara partai maupun peningkatan partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD. Partai yang mengalami peningkatan suara cukup signifikan adalah Partai Demokrat dan PKS, sementara partai baru yang langsung mendapatkan kursi cukup signifikan adalah Partai Hanura yang dibentuk oleh Wiranto, dan Partai Gerindra yang didirikan oleh Prabowo. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu 2009 KPUD Malang Raya.

194 Memudarnya dukungan terhadap partai akan berarti hilangnya suara partai yang bersangkutan. Di dalam negara-negara demokrasi liberal, termasuk Indonesia, fenomena memudarnya dukungan atau menurunnya identifikasi partai akan menyebabkan berpindahnya pemilih ke partai lain atau/dan terbentuknya partai baru sebagai wadah baru untuk menyampaikan aspirasinya. Seperti yang dikemukakan Harrop, "*Partisan dealignment can lead to electoral volatility which may in turn produce changes in the party system. These may take the form of new parties emerging (such as the Greens), or old ones declining (such as the French Communists).*" Rod Hague, Martin Harrop and Shaun Breslin *Political Science, A comparative Introduction*. Great Britain: The Macmillan Press LTD, 1992.

195 Kemenangan Partai Demokrat di Malang Raya tidak lepas dari popularitas SBY, serta kebijakan populer Pemerintahnya pada saat-saat menjelang pemilu. Kebijakan Bantuan

Penurunan tingkat identifikasi pemilih kepada partai tertentu di Malang Raya bisa diindikasikan oleh menurunnya kebanggaan pemilih pada simbol-simbol partai.<sup>196</sup> Kalau dalam pemilu 1999 dan 2004 banyak pemilih yang memakai kaos merah dengan gambar partai seperti gambar banteng sebagai simbol PDIP, atau baju hijau dengan gambar bola dunia yang dikelilingi sembilan bintang yang merupakan simbol PKB. Mereka sangat fanatik dengan kaos bergambar partai PDIP dan PKB tersebut, dan tidak akan berani secara terang-terangan memakai kaos bergambar partai lain. Menjelang pemilu 2009, fenomena pemakaian kaos bergambar partai tertentu secara fanatik sudah tidak nampak.<sup>197</sup> Pemilih tidak lagi sungkan atau ragu-ragu untuk memakai kaos yang bergambar lain partai yang tidak sealiran baik dari kalangan Abangan maupun kalangan Santri Tradisionalis. Banyak pemilih yang berasal dari kelompok Abangan maupun Santri tradisional yang dalam keadaan tertentu memakai kaos PAN.

Dalam kondisi *dealignment*, sebuah pemilu akan mengalami perubahan tajam dalam isu ataupun perolehan suara partai-partai besar dibanding dengan pemilu sebelumnya. Perubahan tersebut apabila sifatnya hanya

---

Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin, pemberian beras bagi masyarakat miskin (raskin), penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi daya dorong kuat bagi pemilih kalangan menengah ke bawah untuk memilih Partai Demokrat. Sementara kebijakan peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, seperti menaikkan gaji bulanan, dan pemberian gaji ke 13 telah menodorong sebagian PNS Sipil maupun militer (aktif maupun pensiunan) mengalihkan dukungannya ke Partai Demokrat. Khusus untuk kalangan Guru, daya tarik ke Partai Demokrat lebih banyak dikarenakan oleh kebijakan sertifikasi. Dengan demikian, dukungan pemilih ke Partai Demokrat sangat ditentukan oleh faktor SBY dan kebijakan yang pro rakyat, oleh karena itu dukungan ini sangat cair dan bisa berubah seiring dengan perubahan popularitas SBY dan kebijakan pemerintah.

196 Hasil observasi yang penulis lakukan di Malang Raya pada sebelum dan setelah pemilu 1999 sampai menjelang pemilu 2004 banyak masyarakat yang bangga mempergunakan simbol-simbol maupun tanda gambar partai, terutama PDIP, PKB. Hampir setiap hari banyak dijumpai warga yang memakai kaos bertanda gambar kepala banteng yang merupakan simbol PDIP maupun tanda gambar bola dunia dengan bintang sembilan yang merupakan simbol PKB. Tidak hanya dalam kaos, namun berbagai simbol tersebut juga di pajang di rumah-rumah seperti gambar Bung Karno dan Megawati untuk PDIP, dan gambar partai atau pemimpin partai dari PKB.

197 Menjelang pemilu 2009, masyarakat tidak lagi fanatik dengan memakai kaos dengan tanda gambar kepala banteng, atau juga gambar bola dunia. Dari hasil pengamatan, menunjukkan bahwa masyarakat pemilih sudah mulai terbiasa dengan memakai kaos dari gambar partai yang sebenarnya bukan identifikasi politik mereka. Sebagai mana yang terjadi di Dusun Caru Desa Pendem Kota Batu, pada pemilu 1999 dan 2004 tingkat identifikasi masyarakat kepada PDIP dan PKB sangat tinggi, hal ini bisa dilihat dari maraknya simbol-simbol partai yang ada dirumah-rumah penduduk. Namun pada pemilu 2009, seiring dengan berubahnya sistem pemilu, telah menyebabkan identifikasi kepartaian mereka menjadi menurun dan tidak lagi sepanatik sebelumnya.

sementara dinamakan kondisi *deviating*, sebaliknya apabila perubahan tersebut berlangsung cukup lama dan penurunan ikatan antara partai dan pemilih secara gradual, dinamakan kondisi *secular*.<sup>198</sup>

Pemilu 2009 tengah mengalami apa yang dinamakan Evan dan Norris (1999) sebagai kondisi *secular dealignment*. Dalam kondisi dealignment pelemahan identifikasi partai relatif kecil, dan perubahan pilihan politik yang besar terjadi hanya pada pemilih dengan tingkat identifikasi lemah.<sup>199</sup> Dengan demikian kalau kita kaitkan dengan identifikasi pemilih terhadap partai yang berbasis aliran, maka pemilih Santri akan tetap mengidentifikasi dirinya dengan partai Islam begitu juga pemilih Abangan akan tetap mengidentifikasi dirinya dengan partai Nasionalis.

**Tabel. 3.7. Perubahan Perolehan Suara Partai Politik dari Mulai Pemilu 1999, 2004, 2009 di Kota dan Kabupaten Malang**

No.	Nama Partai	Kabupaten Malang			Kota Malang		
		1999	2004	2009	1999	2004	2009
01.	PDI-P	39,66 %	19,88 %	22,59%	41,22 %	25,84 %	20,69%
02.	P. Golkar	23,98 %	20,62 %	13,55%	16,04 %	12,35 %	7,23%
03.	PKB	20,36 %	13,19 %	13,08%	19,60 %	17,36 %	10,30%
04.	PPP	2,84 %	2,51 %	4,12%	2,80 %	2,36 %	2,57%
05.	PAN	5,82 %	5,91 %	2,19%	10,53 %	6,77 %	4,86%
06.	PBB	1,31 %	1,12 %	-	2,41 %	1,28 %	-

Sumber: KPUD Kota dan Kabupaten Malang, yang telah diolah penulis.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa pemilu 2009 adalah pemilu yang paling menarik di era pasca reformasi.<sup>200</sup> Dengan sistem pemilu baru yang menerapkan rejim suara terbanyak bagi calon yang lolos ke

198 Geoferey Evans dan Pippa Norris, hal xxviii-xxix.

199 Ivor Crewe dan Katarina Thomson, *Party Loyalties: Dealignment or Realignment?*, dalam Evan dan Norris, 1999, p.66.

200 Pemilu 2009 menarik, tidak hanya karena adanya perubahan dalam sistem pemilu dari proporsional daftar terbuka dengan BPP ke proporsional dengan daftar terbuka penuh, namun juga hasil perolehan suara pada pemilu 2009 menunjukkan adanya perubahan yang signifikan. Di Malang Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa yang pada pemilu 2004 masih mendominasi perolehan suara, pada pemilu 2009 mengalami perubahan, dimana PDIP tidak lagi mendominasi perolehan suara, karena untuk Kota Malang PDIP kalah suara dengan Partai Demokrat. Dari hasil perolehan suara terlihat bahwa wilayah-wilayah yang ada tangsi militer, maka dengan jelas terlihat keunggulan Partai Demokrat. Analisis hasil rekapitulasi pemilu 2004 KPUD di Malang Raya (Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu).

Dewan telah mempengaruhi strategi dalam meraih simpati pemilih. Pada pemilu 2009, peran partai menjadi minimal, dan peran caleg menjadi menonjol, oleh karena itu pendekatan ideologi mengalami kekaburan dengan adanya caleg-celeg yang berasal dari luar basis pendukung partai. Pendekatan yang dilakukan para caleg lebih menitikberatkan pada pendekatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Hal ini didorong oleh tingginya kompetisi yang terjadi antara sesama caleg di tingkat partai. Masing-masing caleg dengan menggunakan jaringan sosial masing-masing menyalurkan berbagai bantuan baik untuk pembangunan jalan, Mushala, Mesjid, bantuan sembako, dan bahkan uang tunai.<sup>201</sup>

Hasil pemilu yang terjadi menunjukkan bahwa sebaran perolehan suara sangat berbeda dengan pemilu sebelumnya.<sup>202</sup> Bahkan partai-partai yang punya basis massa yang jelas seperti PDIP, dan PKB harus menerima kenyataan bahwa mereka telah banyak ditinggalkan oleh konstituennya. Bahkan perolehan suara PKB di Kota Batu mengalami penurunan yang sangat tajam, sehingga PKB yang pada pemilu 2004, pada pemilu 2009 tidak dapat satu kursi pun.

Pada pemilu 1999 dan 2004, PKB cukup mendapat apresiasi dari masyarakat Malang Raya, dukungan terbesar berada di lingkungan-lingkungan pesantren. Namun pada pemilu 2009 PKB mengalami kemunduran, dan bahkan di Kota Batu PKB yang pada pemilu 2004 mendapatkan 4 kusi menjadi tidak mendapatkan kursi. Sebagai contoh kasus pada pemilu 2004 di wilayah Mojorejo Pendem calon dari PKB yang bernama Saiful berhasil terpilih menjadi anggota Dewan karena dukungan dari masyarakat Mojorejo yang didukung oleh tokoh agama (kyai). Wilayah Mojorejo ini terkenal dengan lingkungan pesantren, karena ada dua pesantren yang cukup banyak santrinya yang pertama dipimpin oleh Gus Rokim, dan yang kedua dipimpin oleh GU Syamsul.<sup>203</sup>

201 Pada pemilu 2009, walaupun sebenarnya pendekatan ideologi masih ada, namun prosentasinya sudah semakin kecil. Karena sistem pemilu yang dipergunakan sudah mempergunakan daftar terbuka penuh, maka peran partai menjadi kecil dan peran caleg menjadi lebih besar. Oleh karena itu para caleg dalam upaya meraih simpati pemilih lebih banyak menggunakan pendekatan sosial kemasyarakatan dan ekonomi. Oleh karena itu, dalam pemilu 2009, figur caleg menjadi sangat berpengaruh dalam pilihan masyarakat. Hasil observasi di wilayah pedesaan, seperti Desa Pendem Kota Batu, Desa Ampel Dento Kabupaten Malang, Desa Karang Ploso Kabupaten Malang, menjelang pemilu 2009.

202 Analisis hasil rekapitulasi pemilu 2004 KPUD di Malang Raya (Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu).

203 Hasil pemilu 2004 di wilayah Singosari yang ada 8 (delapan) pesantren (Pondol Ilmu Qur'an, Miiftahul Falah, Nurul Huda, Al-Islahiyah, Darul Karomah, Al-Qur'aniyah, Darul Qur'an,

Dan pada pemilu 2009 di wilayah ini PKB tidak lagi mendapatkan kursi, karena suara yang didapat tidak memenuhi untuk satu kursi. Untuk kasus penurunan partai-partai Islam atau yang secara sosiologis bisa dikategorikan Partai Islam.

Lain dengan nasib dari partai Islam, perolehan suara partai Nasionalis di Kota Malang pada pemilu 2009 mengalami kenaikan, kasus yang cukup menarik adalah kemenangan Partai Demokrat. Perolehan suara Partai Demokrat di Kota Malang sebesar 83.065 suara, dan disusul oleh PDIP dengan perolehan 71.370 suara. Padahal pada pemilu 2004, wilayah Kota Malang ini menjadi basis utama dari PDIP. Kemenangan Partai Demokrat tidak lepas dari faktor figur SBY yang menjadi Presiden. Selain faktor SBY, kemenangan Partai Demokrat di Malang Raya, juga dikarenakan Partai Demokrat banyak mendapat dukungan dari keluarga TNI dan Malang Raya merupakan wilayah yang paling banyak ditempati garnizun militer.<sup>204</sup> Fakta menunjukkan bahwa wilayah-wilayah yang terdapat tangsi, atau disekitar tangsi militer, maka Partai Demokrat umumnya menang.

Berbeda dengan di Kota Malang, Kabupaten Malang yang merupakan bagian penduduk terbesar di Malang Raya masih banyak yang setia pilihan politiknya dengan PDIP. Masyarakat di Kabupaten Malang umumnya adalah petani dan dengan tingkat pendidikan yang umumnya relatif lebih rendah dibanding dengan Kota.<sup>205</sup> Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa afiliasi politik pemilih berdasar aliran masih kuat

---

Salafiyah Al-Fatah). Di wilayah ini Partai Kebangkitan Bangsa mengalami kemenangan cukup signifikan dibanding dengan peserta pemilu lainnya, dengan total suara 26.052 suara. Perolehan suara PKB cukup mencolok jika dibandingkan dengan perolehan suara peringkat ke dua, yaitu PDIP yang berjumlah 13.386 suara. Begitu pun kasus di Bululawang, yang ada 5 (lima) Pesantren (Al-Munawwariyah, An-Nur I, An-Nur II, An-Nur III, Oudhotul Muhsinin). Perolehan suara di wilayah ini, PKB juga menang cukup signifikan, yaitu sebesar 15.514 suara. Sementara PDIP yang menempati peringkat kedua hanya memperoleh 8.245 suara. Sumber: KUPD Kota Malang.

204 Beberapa tempat pangkalan militer dan pemusatan di Malang adalah Pangkalan TNI Angkatan Udara Abdul Rachman Saleh, Divisi 2 Kostrad Singosari, Brigade Infanteri 2 Lintas Udara Jabung, Divisi Zeni Kepanjen, Divisi Artileri Pertahanan Udara Pende, batalyon infanteri 512 Kodam V Brawijaya, Kompi Brimob 5111, Komando Daerah Maritim II. Pemusatan Latihan Brimob dan Kepolisian Watukosek, Pendidikan Arhanud Pendem, Dodikjur Kodam V Brawijaya, Pusat Pelatihan Marinir Sumbermanjing Kulon.

205 Menurut data yang diperoleh dari Pemkab Malang, Pemkot Malang, penduduk Kabupaten lebih banyak yang bermata pencaharian sebagai petani, dengan tingkat pendidikan tidak tamat SD, SD, dan SMP masih merupakan Mayoritas. Sementara Kota Malang, prosentase penduduk yang tidak tamat SD, SD, dan SMP tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan Kabupaten Malang. Sumber Kota Malang Dalam angka, 2004.

di Kabupaten. Lebih jauh sikap sungkan dan seduluran masih mewarnai pilihan politik, dan kenyataan para pengurus partai di tingkat pedesaan sangat intens membina komunikasi dengan masyarakat.

**Tabel 3.8. Perolehan suara pemilu 2009 Partai Politik yang Lulus Parliament Threshold di Kabupaten Malang**

No	Nama Partai	Perolehan Suara Per Dapil							Jumlah
		Dapil I	Dapil II	Dapil III	Dapil IV	Dapil V	Dapil VI	Dapil VII	
1	PDIP	26.974	30.588	33.795	39.715	30.427	42.108	36.615	240.222
2	Demokrat	26.321	49.315	21.821	23.714	9.745	23.953	30.354	185.223
3	Golkar	9.096	17.060	12.347	23.935	30.766	21.210	29.703	144.117
4	PKB	33.195	13.342	22.006	16.261	29.964	11.580	12.759	139.107
5	PKS	6.908	11.335	7.026	6.404	10.188	5.013	9.184	56.058
6	Hanura	4.538	8.946	6.732	7.457	4.782	9.634	11.727	53.816
7	Gerindra	5.767	7.420	5.886	5.973	2.985	7.196	10.240	45.467
8	PPP	18.301	4.649	3.735	5.238	4.116	2.850	4.951	43.840
9	PAN	2.825	4.536	3.995	5.825	962	1.817	3.421	23.381

Sumber: KPUD Kabupaten Malang 2009.

Menyikapi kasus larinya konstituen, partai politik memilih untuk melakukan ekspansi ke luar basis pemilihnya. Partai politik tidak lagi semata-mata mengandalkan identitas ideologis, partai sudah berusaha bergeser ke arah yang lebih tengah. Partai Islam berusaha menghaluskan isu-isu ideologisnya dengan cara tidak telalu lagi getol menyuarakan syariat Islam, sementara partai Nasionalis sudah berusaha mendekati kepada segmen-segmen pemilih Islam.<sup>206</sup> Di sisi lain pemilih sudah berusaha melepaskan diri dari keterikatan dengan partai (*civic disengagement*) dan sudah berusaha realistis dalam menjalin

206 Literatur mengenai sistem politik yang mapan, terutama di Eropa, selalu menampilkan spektrum ideologis partai-partai politik yang konsisten: kiri-tengah-kanan. 'Kiri' berarti mendukung peran negara yang dominan dalam ekonomi dan kesejahteraan (bersifat sosialistik, belum tentu sinonim dengan komunis), 'tengah' adalah Moderat, dan 'kanan' adalah kelompok Liberal yang berusaha mengeliminir peran negara (singkatnya tidak setuju subsidi dan pajak yang tinggi misalnya) dan berusaha mengembalikan kapital lewat aktifitas masyarakat (pasar). Adanya spektrum ideologi yang signifikan itu membuat sistem politik di Eropa menjadi mapan karena partai politik terdorong untuk mengedepankan kebijakan berbasis orientasi ideologis yang jelas. Dengan demikian pemilih juga menjadi rasional, para pemilih memilih partai yang sejalan ideologi nya, terutama dalam masalah substansial seperti peran negara dalam ekonomi dan politik. Pemilih menjadi rasional dalam arti pemilih bisa dipilah preferensinya.

komunikasi dengan partai.<sup>207</sup> Dampak dari kondisi tersebut adalah pola hubungan partai dan pemilih tidak lagi sepenuhnya menggambarkan aliran politik (*partially constructed*).

#### D. Ringkasan

Dalam pemilu 1999, partai politik belum punya pengalaman riil dalam berhubungan dengan pemilih. Oleh karena itu, salah satu langkah bijak yang diambil adalah dengan mendasarkan diri pada realitas politik yang pernah ada. Ideologi menjadi salah satu komponen utama dalam upaya menggaet simpatisan pemilih dalam pemilu. Hal ini juga diakibatkan karena basis material yang lain seperti kelas, belum berkembang di negara kita. Oleh karena itu, basis material yang bersumber dari primordialisme lebih nyata dan lebih realitis untuk dijadikan sebagai pondasi pembangunan partai politik. Dengan demikian, hasil pemilu 1999 menunjukkan bahwa aliran politik masih tetap eksis dalam pemilu era multipartai ini. Pemilih Santri masih memilih partai politik yang Islam, sementara pemilih Abangan masih memilih partai yang Nasionalis.

Pada pemilu 2004 terjadi fenomena swings votes karena merosotnya citra partai akibat rendahnya kinerja partai politik. Hal ini berdampak pada merosotnya perolehan suara partai yang lolos electoral threshold pada pemilu 1999. Penurunan suara masing-masing partai baik itu di Kota Malang maupun di Kabupaten Malang dari pemilu 1999 ke 2004 sebagai berikut: PDIP 15,38% dan 9,5%; Partai Golkar 1,49% dan 1,64%; PKB 2,24% dan 3,85%; PAN 3,76% dan 0,32%. Walaupun terjadi perubahan dalam perolehan suara partai politik, namun sebaran migrasi pemilih masih terjadi dalam payung ideologis yang sama. Pemilih Santri masih tetap memilih partai Islam pada pemilu 2004 walaupun partainya berbeda dengan pemilu 1999, demikian juga pemilih Abangan masih memilih partai Nasionalis.

Hasil perolehan suara pemilu 2009 menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan terkait perolehan suara partai. Perolehan suara

---

207 Yang dimaksud pemilih sudah berusaha realistis adalah keinginan pemilih untuk keluar dari jebakan ideologis yang bagi mereka tidak bisa mendapat keuntungan secara material. Kejujuran mereka terhadap partai ternyata disalahgunakan oleh elit politik untuk memperkaya mereka sendiri dan lupa terhadap nasib dari konstituen. Hasil wawancara dengan masyarakat pemilih pada bulan Februari 2007 di Malang Raya.

partai masih terjadi dinamika di dalam partai-partai yang sejenis, namun sudah ada kecenderungan pemilih meloncati pagar ideologis. Hal ini dibuktikan dengan semakin habisnya suara PKB yang mewakili pemilih Santri Tradisionalis, dan sisi lain semakin meningkatnya suara Partai Demokrat. Sebagai contoh hasil pemilu 2004 untuk PKB dan Partai Demokrat di Kota Malang masing-masing 13,08% dan 17,42%, sebagai perbandingan hasil pemilu 2009 untuk PKB dan Partai Demokrat masing-masing 10,30% dan 24,08%. Asumsi bahwa sebagian pemilih Santri Tradisional tidak lagi memilih partai yang secara sosilogis maupun historis dapat di kategorikan sebagai Partai Islam yaitu PKB, dikarenakan PPP dan PKNU yang merupakan basis dari pemilih Santri Tradisional tidak mengalami penambahan suara yang signifikan, bahkan PPP bisa dikatakan perolehan suaranya dari pemilu ke pemilu di Malang Raya menunjukkan grafik yang stagnan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pola aliran pada pemilu 2009 telah mengalami deviasi jika dibandingkan dengan pemilu 2004 dan 1999.



## **Tujuan Intruksional Bab 4**

Dalam bab ini penulis membahas mengenai pola hubungan partai dan pemilih di tingkat lokal. Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan dapat memiliki kompetensi sebagai berikut:

1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang proses identifikasi diri masyarakat dengan partai politik.
2. Mahasiswa dapat memahami dan mengerti tentang perilaku pemilih Indonesia baik secara nasional maupun lokal.
3. Mahasiswa dapat memaknai fakta, gejala maupun peristiwa-peristiwa politik yang terjadi selama pemilu berlangsung baik secara nasional maupun lokal.
4. Mahasiswa dapat mendesain model pola hubungan antara partai dan pemilih yang terjadi baik secara nasional maupun lokal.
5. Mahasiswa dapat menjelaskan terjadinya penurunan suara yang diperoleh partai politik dari pemilu ke pemilu.



# 4

## POLA HUBUNGAN PARTAI DAN PEMILIH

Dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana pola hubungan partai dan pemilih di tingkat lokal. Ada tiga sub pembahasan yang akan dijelaskan yaitu: *pertama*, identifikasi dan proses sosialisasi baik yang terjadi dalam kelompok Santri maupun Abangan; *kedua*, dukungan kelompok masyarakat, khususnya dua kelompok besar keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU); *ketiga*, image partai politik.

Identifikasi diri pemilih pada partai politik merupakan buah dari kedekatan seseorang pada kelompok dalam satu aliran politik. Identifikasi diri merupakan hasil dari proses sosialisasi, sehingga dalam teori *voting behavior*, model identifikasi ini sering juga disebut dengan model sosialisasi.<sup>208</sup> Ketika proses sosialisasi yang terjadi dalam satu kelompok tersebut tidak berubah, maka identifikasi seseorang juga tidak berubah. Sementara terkait dengan dukungan kelompok, dalam hal ini organisasi keagamaan, sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa kelompok merupakan kepanjangan tangan ideologis. Lebih jauh, budaya patrimonial yang ada dalam masyarakat melahirkan tingkat kepatuhan yang tinggi pada pemimpin,<sup>209</sup> yang menjaga, membina

---

208 Pendekatan psikologis menggunakan dan mengembangkan konsep dari psikologi, terutama konsep sikap dan sosialisasi, untuk menjelaskan perilaku pemilih. Menurut pendekatan ini para pemilih di Amerika menentukan pilihan karena pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagai produk dari proses sosialisasi. Mereka menjelaskan bahwa sikap seseorang, sebagai refleksi dari kepribadian seseorang merupakan variabel yang menentukan dalam mempengaruhi perilaku politiknya. Herbert H. Hyman, *Political Socialization*, Canada: Collier Mcmillan, Ltd., 1969

209 Masalah kekuasaan tradisional Jawa secara teoritik dibahas oleh Benedict R. O'G. Anderson, *The Idea of Power in Javanese Power*, dalam Benedict R. O'G. Anderson *Culture and Politics in*

serta mempertahankan norma, ajaran, serta nilai-nilai yang ada dalam kelompok organisasi keagamaan. Dukungan kelompok atau dalam hal ini organisasi keagamaan pada partai bisa seiring dengan dukungan pemimpin agamanya. Dan apabila salah satunya berubah, misal secara organisasi kelompok keagamaan secara struktural tidak mendukung partai politik, sementara pimpinan kulturalnya mendukung, maka hal ini akan bergantung pada sejauh mana ketokohan dari pemimpin tersebut. Maka apabila ketokohan dari pemimpin tersebut tinggi, maka dukungan pemimpin tersebut bisa menjadi simbol dukungan kelompok masyarakatnya.

Image partai merupakan *intervening variabel* dari identifikasi kepartaian dengan voting. Identifikasi tidak secara otomatis akan menjadi suara karena harus melawati dulu tiga variabel yaitu isu kebijakan, kualitas kandidat dan kinerja partai. Terkait dengan image partai, Fiorina mengembangkan teorinya yang dikenal dengan *Restrospective Voting*.<sup>210</sup> Berdasar pada teori ini, pemilih tidak peduli dengan isu yang disampaikan oleh partai politik, bagi mereka justru kinerja partailah yang mereka akan lihat. Teori ini melihat pada masa lalu terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh partai politik. Apabila pemilih menganggap partai tersebut gagal dalam menjalankan pemerintahan, atau tidak mampu mengemban aspirasi mereka, maka ketidakmampuan tersebut akan menjadi landasan bagi pemilih untuk tidak memilihnya pada pemilu berikutnya.

## A. Proses Identifikasi Politik Pemilih

Proses sosialisasi merupakan kajian penting dalam pendekatan psikologi. Salah satu hasil kajian yang paling signifikan dalam keterlibatan seseorang dalam politik adalah pentingnya atau kuatnya faktor keluarga dalam menentukan sikap atau perilaku. Ketika orang tua punya keyakinan akan norma serta tata nilai tertentu tentang politik, maka keyakinan politik tersebut akan ditransmisikan kepada anak-anak mereka.<sup>211</sup> Di samping keluarga agen yang juga sangat penting dalam

---

*Indonesia*, Ithaca and London: Cornell University Press, 1990. Lihat juga Benedict R. O'G. Anderson, *Language and Power, Exploring Political Cultures in Indonesia*, Ithaca and London: Cornell University Press, 1990.

210 Lihat Morris P. Fiorina, *Restrospective Voting in American National Elections*, America: Yale University, 1981.

211 Herbert H. Hyman, p.52.

sosialisasi adalah kelompok,<sup>212</sup> berbagai pandangan, pemikiran, sikap yang disampaikan baik melalui lisan maupun tulisan atau dalam bentuk komunikasi lain. Ketika kelompoknya punya program politik, anggota yang mengidentifikasi dirinya dengan kelompok tersebut akan juga mengidentifikasi program tersebut sebagai programnya juga.<sup>213</sup>

Pada pembahasan ini akan dijelaskan proses sosialisasi di lingkungan masyarakat baik dalam kelompok Santri maupun Abangan, yang menjadi pondasi dasar bekerjanya politik aliran. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa identifikasi politik pemilih merupakan produk dari proses sosialisasi panjang yang terjadi di arena keluarga, masyarakat, dan lingkungan kerja. Dengan demikian identifikasi diri seseorang terhadap kelompok, organisasi, atau partai bukan terjadi secara tiba-tiba. Proses identifikasi terjadi secara kontinyu dan membutuhkan waktu yang panjang lewat sosialisasi yang terus menerus.<sup>214</sup> Seberapa besar tingkat identifikasi seseorang terhadap kelompok, organisasi, atau partai sangat bergantung kepada berapa lama seseorang terlibat atau berada di dalamnya, serta berapa intens komunikasi yang terjalin. Oleh karena itu, bagi mereka yang sudah tua, karena sudah lama mengalami proses sosialisasi, maka tingkat identifikasi dirinya akan kuat dibanding dengan mereka yang masih muda. Dengan demikian, orang-orang muda akan relatif lebih mudah keluar atau pindah dan bergabung dengan kelompok, organisasi, atau partai baru ketimbang orang yang sudah tua.<sup>215</sup>

## 1. Kelompok Santri

Menurut Rose and Urwin (1969) hasil kajian di 17 negara demokrasi justru agama, bukan kelas, yang paling banyak menjadi

---

212 Rober E. Lane, *Political Life, Why and How People Can Get Involved in Politics*, New York: The Free Press, 1959. p. 189.

213 Lane, p. 190.

214 Proses sosialisasi yang terjadi dalam masyarakat baik itu yang terjadi dalam kelompok Abangan maupun Santri, sudah terjadi sejak dini. Dala kelompok Abangan proses sosialisasi dilakukan lewat berbagai kegiatan kesenian seperti Jaranan, Bantengan. Sementara proses sosialisasi dalam kelompok Santri, khususnya santri Tradisional dilakukan lewat berbagai aktifitas keagamaan. Hasil observasi di wilayah Malang Raya selama penelitian ini dilaksanakan.

215 Hasil studinya Bibby juga menunjukkan bahwa orang-orang muda menunjukkan kecenderungan rendah partisipasinya dalam pemilu, hanya sekitar 18,6 - 20 persen saja mereka yang berusia 18 tahunan berpartisipasi dalam pemilu. Lihat John F. Bibby, *Politics, Parties, and election in America*, Chicago: Nelson-Hall Publisher, 1992. p. 259.

pendukung partai.<sup>216</sup> Hal ini diperkuat oleh kajian Lijphart (1979) yang mempertimbangkan kekuatan relative kelas, agama, dan bahasa dalam menentukan pemilih di empat Negara yang keempat cleavages tersebut berkembang saat seperti Belgia, Kanada, New Zeland, dan Afrika Selatan. Agama unggul dalam tiga Negara; bahasa unggul di satu Negara yaitu Afrika Selatan. Hasil kesimpulan dari Lijphart (1982) menunjukkan penilaian yang kompromistis: Kelas sosial sangat penting khususnya di negara-negara demokrasi industri dan agama seringnya tidak begitu penting. Namun ketika kelas sosial dan agama ini memainkan peranan, maka ada kecenderungan agama punya pengaruh kuat pada pilihan partai.<sup>217</sup>

Dalam masyarakat Nadliyin, proses sosialisasi terjadi baik dalam keluarga maupun kelompok secara instens. Perbedaan perilaku keberagamaan secara umum, antara Santri Tradisional dan Santri Modernis terletak pada aspek ritual keagamaan seperti tahlilan, Yasinan, Dibaan, Istighosahan, Slametan, Kunjungan ke makam para wali, yang hal ini menjadi ciri khas dari kelompok Santri Tradisional.

#### **a. Simbol, Pemimpin dan Ritual Keagamaan sebagai Pembentuk Identifikasi Kelompok**

Kehidupan kalangan Santri Tradisional di Malang Raya sangat disiplin menjalankan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan ritual keagamaan. Kegiatan keagamaan tersebut melekat dengan kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan yang berimpitan dengan nilai budaya lokal, khususnya budaya Jawa. Bagi Santri Tradisional,<sup>218</sup> apa yang mereka lakukan disadarinya sebagai bagian dari implementasi keberagamaan mereka termasuk dalam berpolitik atau memilih partai. Mereka lebih paham sesuatu yang tersurat dari pada yang tersirat,

---

216 Rose and Urwin dalam Martin Harrop and William L. Miller, *Elcetion and Voters, A Comparative Introduction*, London: The Macmilan Press Ltd, 1987. p. 177.

217 Lihat Harrop dan Miller, p. 177-178.

218 Santri Tradisional yang dimaksud adalah kelompok Islam Santri dari kalangan Nahdilyin. Di Malang Raya, kelompok Santri Tradisional ini merupakan kelompok Islam mayoritas. Selama penelitian ini dilaksanakan penulis banyak melibatkan diri dalam aktivitas kelompok Santri Tradisional secara langsung, khususnya di kampung Jengglong, Dusun Caru, Desa Pendem, Kecamatan Junrejo Kota Batu. Daerah ini merupakan basis dari PKB dan PDIP, dengan mayoritas penduduknya beragama Islam (Tradisional). Hal ini dimaksudkan untuk memahami bagaimana perilaku politik dalam kaitannya dengan kehidupan sosio-religi yang dijalankan sehari-hari. Dari hasil pengamatan penulis, warga nahdhilyin mensejajarkan NU dan PKB, sehingga mereka akan merasa hilang ke NU-annya apabila tidak mencoblos PKB.

lebih senang dengan hal yang kongkrit/permukaan daripada substansi. Dengan demikian bagi kalangan Santri Tradisionalis, lambang, simbol menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan Santri Tradisional. Seorang Santri Tradisional akan sangat mudah dibedakan dengan mereka yang bukan Santri. Cara berpakaian Santri Tradisional sangat khas, dimana sarung, baju koko, peci, sorban menjadi ciri khas dari Santri Tradisional. Namun hal yang paling umum, mereka yang tergolong Santri Tradisional, adalah pemakaian sarung dalam kehidupan keseharian mereka.<sup>219</sup>

Pada jaman Orde Baru, orang memilih PPP karena dianggap partai Islam yang disimbolisasikan dengan gambar Ka'bah. Oleh karena itu, banyak pemilih Tradisional memilih PPP walaupun banyak tekanan dari aparat maupun pemerintah. Banyak dari masyarakat yang rela dan setia untuk mendukung PPP karena mereka menganggap dengan memilih PPP berarti sudah bisa menjalankan dan membela Islam. Apalagi dalam gambar PPP ada Ka'bah nya yang merupakan simbolisasi dari Islam. Melihat kenyataan ini pemerintah Orba merasa perlu untuk melakukan rekayasa, sehingga pemerintah meminta lambang Ka'bah diganti.<sup>220</sup>

Pada pemilu 1999 dan 2004, walaupun PPP masih ada, namun para pemilih di Malang Raya yang berbasis Islam Tradisional mengalihkan pilihan politiknya ke PKB. Alasan yang muncul kenapa mereka tidak memilih PPP dikarenakan pimpinan PKB merupakan tokoh dan sekaligus pimpinan teras NU yang mempunyai garis keturunan langsung dari K.H. Hasyim Ashari yaitu Abdurahman Wahid atau

---

219 Hasil pengamatan penulis selama penelitian ini dilaksanakan, umumnya Santri Tradisional dalam kehidupan kesehariannya memakai sarung, peci, dan baju koko terutama pada saat menjalankan shalat. Kantong-kantong Nahdhiliyin yang sempat penulis amati adalah kantong Nahdhiliyin yang ada di wilayah pendem Kota Batu, wilayah Ampel Dento, Jetis, Singosari Kabupaten Malang, serta daerah Lowokwaru Kota Malang.

220 Ketika jaman Orde Baru banyak pemilih Santri Tradisional memilih PPP dengan alasan bahwa partai ini merupakan satu-satunya partai Islam. Apalagi ketika PPP di pimpin oleh Idham Cholid yang nota bene sebagai pemimpin ormas Islam Tradisional Nahdlatul Ulama (NU). Banyak para kader NU yang berjuang habis-habisan untuk mengkampanyekan dan memenangkan PPP dalam setiap pemilu yang dilaksanakan. Dorongan kuat dari pemilih Tradisional untuk membela PPP didasarkan pada keyakinan bahwa membela PPP sama dengan membela Islam, karena PPP merupakan partai Islam yang disimbolisasikan dari pemimpin teras partai yang merupakan tokoh-tokoh Islam khususnya NU. Dalam memperjuangkan PPP mereka tanpa pamrih, setiap kegiatan yang mereka lakukan untuk mengkampanyekan PPP tanpa bantuan apapun mereka jalan, bahkan untuk mendukung dan memenangkan PPP banyak pendukungnya yang rela urunan sendiri, bahkan mereka berani mati untuk membela PPP. Terkait keterlibatan NU dalam PPP, lihat Martin Van Bruinessen, *NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pecarian Wacana Baru*, Yogyakarta, PT LKIS, 1994.

yang dikenal dengan Gus Dur. Padahal PKB yang dideklarasikan oleh Gus Dur ini bukan merupakan partai Islam, karena dalam AD ART nya tidak mencantumkan Islam sebagai asas tapi Pancasila. Namun bagi pemilih Santri Tradisional itu tidak penting, karena yang mereka lihat bukan substansi dari partai itu melainkan siapa yang duduk dalam kepengurusan partai itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kalangan pemilih Santri Tradisional, tolak ukur untuk menentukan pilihan politik partai tidak pada platform partai melainkan pada siapa tokoh yang duduk di partai itu. Hal ini merupakan bagian dari tradisi di kalangan NU yang menjadikan pemimpin agama (dalam hal ini ulama/kyai) sebagai panutan, tidak hanya untuk urusan keagamaan dan kehidupan sosial, namun juga untuk urusan politik ulama menjadi referensi dalam menentukan pilihan politik mereka.

Dari apa yang dikemukakan di atas terlihat jelas bahwa tingkat fanatisme mereka pada partai sangat tinggi. Karena dalam pandangan mereka memilih partai adalah juga pengejawantahan Keislaman, maka hal ini berpengaruh pada kondisi psikologis mereka yang tidak bisa menerima partai lain dengan tingkat kecurigaan yang tinggi pada pemilih lain. Kondisi ini menyimpan potensi konflik yang tinggi dengan pemilih lain ketika terjadi benturan antara sesama masyarakat yang berbeda, terutama ketika saat kampanye terbuka. Bahkan banyak dari pemilih Tradisional menganggap bahwa mereka yang tidak memilih partai yang sama dengan mereka tidak baik keislamannya, sehingga cenderung dijauhi oleh kelompoknya.

Di sisi lain, banyak pemilih Santri Tradisional enggan meninggalkan partai pilihannya karena alasan merasa tidak tenang.<sup>221</sup> Mereka merasa apabila tidak memilih partai yang sesuai dengan kelompoknya, keislaman dia menjadi berkurang. Oleh karena itu, mereka akan sangat bangga apabila memiliki kaos yang berlambangkan partai, khususnya partai PKB yang logonya mirip dengan logo Nahdatul Ulama dengan bintang sembilannya. Implikasi dari kebanggaan akan keislaman mereka yang ditranslasikan dalam pemilihan partai. Para pemilih dan pendukung PKB di Malang Raya, ada sikap-sikap heroik yang muncul

---

221 Hasil Observasi di Dusun AmpelDento, Desa Ampel Dento, Kecamatan Karang Ploso, Kabupaten Malang; Dusun Desa Pendem Kota Batu. Hasil wawancara dengan warga di Dusun Ampeldento, dan Dusun Caru, Tono seorang simpatisan PPP dan tergolong Santri Tradisional, Muslimin seorang simpatisan PKB yang tergolong Santri Tradisional, mereka merasa tidak enak apabila memilih partai yang berbeda dengan teman-temannya.



dari para pendukung PKB. Bahkan anggapan mereka membela PKB disamakan dengan membela agama. Dengan demikian mereka akan rela datang ke tempat-tempat kampanye yang diadakan PKB sejauh apapun dan dengan biaya sendiri.<sup>222</sup>

Perbedaan yang cukup menonjol antara kelompok Santri Modernis dan Santri Tradisional adalah tradisi dalam melakukan sosialisasi dan transfer keilmuan. Di kalangan Santri Modern, sosialisasi dan transfer keilmuan lebih banyak dilakukan lewat buku-buku teks, sehingga dikenal dengan budaya baca. Bagi kelompok Santri Tradisional, transfer keilmuan lebih banyak dilakukan lewat kyai, sehingga lebih dikenal dengan budaya lisan.<sup>223</sup> Lebih jauh, perbedaan antara kelompok Santri Modernis dan Tradisional juga pada agen sosialisasi. Di Malang Raya, keluarga, sekolah formal, organisasi menjadi agen yang paling menonjol dalam proses sosialisasi nilai-nilai dan doktrin di kalangan kelompok Modernis. Bagi kelompok Tradisional, pesantren, Langgar atau Mesjid, acara pengajian, Yasinan, Tahlilan lebih berperan dalam proses sosialisasi berbagai doktrin serta adat dan kebiasaan yang melingkupi kehidupan kelompok masyarakat Islam Tradisional. Berbagai acara lain yang mempunyai keterkaitan dengan kehidupan beragama Santri Tradisionalis, seperti ziarah ke makam para wali, ataupun kunjungan tetap tiap bulan kepada kyai-nya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan Santri Tradisionalis.<sup>224</sup> Hal itu semua menjadi proses pembentukan identifikasi bagi kalangan

---

222 Hasil Pengamatan Penulis selama kampanye terbuka yang diadakan oleh PKB, di lapangan Gajayana Malang, baik pada pemilu 1999 maupun pemilu 2004, selalu dijubeli oleh pengunjung yang merupakan simpatisan PKB, dan mereka umumnya berasal dari kalangan Santri Tradisional. Hasil Wawancara dengan Muslimin seorang simpatisan PKB, menyebutkan bahwa kedatangan mereka ke tempat kampanye bukan untuk ikut kampanye, hanya untuk mendengarkan ceramah atau pengajian.

223 Perbedaan dalam proses sosialisasi dan transfer keilmuan di antara kedua kelompok ini telah berpengaruh pada kultur serta perilaku keberagamaan masing-masing. Transfer keilmuan lewat buku dalam kelompok Santri Modernis telah melahirkan sikap dan perilaku independen yang tidak taklid pada seseorang. Di sisi lain, budaya lisan yang telah dikembangkan dalam tradisi pesantren, telah membangun hubungan kuat antara kyai dan santri termasuk masyarakat yang memposisikan kyai sebagai patron. Dengan demikian posisi kyai menjadi dominan dan sentral dalam kehidupan kelompok Santri Tradisional, sebaliknya santri dan masyarakat berada pada posisi dependen.

224 Menurut hasil pengamatan penulis, kegiatan yang dilakukan Santri Tradisional seperti ziarah ke makam para wali, istigosah, kunjungan ke kyai tidak mutlak dilakukan oleh semua santri tradisional di setiap tempat. Dilakukan atau tidaknya kegiatan tersebut bergantung pada tokoh masyarakat, tokoh agama atau kyai yang memprakarsainya. Kegiatan kunjungan pada para wali, seperti yang dilakukan warga santri tradisional di Dusun Caru, Desa Pendem,

masyarakat yang mengatasnamakan dirinya sebagai kelompok Santri yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama (NU).

Terbentuknya identifikasi melalui melalui sosialisasi tata nilai dan norma yang berkembang dalam satu kelompok masyarakat berfungsi sebagai filter terhadap norma-norma lain yang dianggap berbeda atau bertentangan. Dalam hal ini kelompok Nahdilyin yang mempunyai norma-norma berbeda akan menolak pengaruh yang datang dari kelompok masyarakat Muhammadiyah. Makanya tidaklah mengherankan apabila warga Nahdilyin di tingkat grassroot menganggap Muhammadiyah sebagai “agama baru”, atau “Islam murni” yang secara praktik keagamaan banyak yang tidak bisa diterima oleh warga NU di tingkat grassroot. Warga NU sering melakukan tahlilan, kajatan dan berbagai ritual lain yang umumnya melibatkan tokoh agama lokal yaitu Kyai. Sementara orang Muhammadiyah tidak mengenal tahlilan, Yasinan, dan berbagai kajatan lainnya, padahal dalam konteks masyarakat NU kegiatan-kegiatan itu tidak melulu urusan keagamaan tetapi juga sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial, dimana kyai sebagai pemimpinya. Dan umumnya para kyai yang menjadi tokoh agama di tingkat grassroot adalah mereka yang mempunyai kedekatan dengan tokoh-tokoh PKB atau sekaligus mereka juga menjadi pengurus PKB pimpinan Gusdur. Oleh karena itu, ketika PAN diasosiasikan dengan Muhammadiyah maka PAN sulit untuk mendapat simpati dari anggota masyarakat Nahdilyin.

#### **b. Kyai: Patron Sosial dan Politik**

Dalam masyarakat Desa Jawa, tipe kepemimpinan dimiliki baik oleh pemimpin yang mempunyai posisi dalam birokrasi formal sebagai kepala desa, dan pemimpin diluar birokrasi, khususnya pemimpin spiritual. Dalam kasus ini, Sartono Kartodidjo berpendapat bahwa, “di luar pejabat pemerintahan terdapat juga pemimpin alami yang

---

Kecamatan Junrejo, Kota Batu umumnya diprakarsai oleh tokoh masyarakat yang bekerja sama dengan agen perjalanan (parawisata). Kenyataan di lapangan, menunjukkan bahwa mereka yang ikut ziarah para wali tidak hanya dari kalangan Santri Tradisional, akan tetapi juga diikuti oleh kelompok masyarakat yang tergolong Abangan. Alasan mereka yang utama bagi kelompok Abangan ikut ziarah para wali adalah rekreasi. Di sisi lain, kunjungan ke kyai hanya dilakukan oleh Santri yang pernah belajar atau mondok, atau telah mendapat pembinaan dari kyai tersebut. Biasanya kunjungan ke kyai paling banyak dilakukan pada bulan puasa menjelang hari raya Idul Fitri. Masyarakat yang datang ke kyai biasanya sambil memberikan zakat Fitrah atau pun sodakoh kepada kyai.

berkuasa seperti kyai<sup>225</sup> lokal, haji, guru, dukun (Sartono Kartodirdjo 1972). Para pemimpin tersebut mempunyai atribut tertentu seperti jimat yang memberikan perlindungan dari bahaya, mempunyai ilmu kedigjayaan, ilmu pengetahuan, ilmu keselamatan, yang memberi kekuasaan sebagai manusia lebih. Tipe kepemimpinan ini dapat membentuk perilaku politik dalam negara berkembang seperti Indonesia.

Masyarakat Malang Raya dikenal dengan masyarakat yang berbasis NU, namun hal itu lebih merupakan corak dari kehidupan masyarakat yang Islami, seperti menjadikan kyai atau ulama-ulama sebagai Patron yang dihormati sekaligus menjadi panutan dalam kehidupan spiritualnya.<sup>226</sup> Kondisi ini secara tidak langsung diwariskan turun temurun, dari generasi ke generasi mengikuti kebiasaan menjadikan kyai ataupun ulama-ulama tertentu sebagai panutan.

Lebih jauh, walaupun masyarakat Malang Raya secara kultural berbeda dengan kultur masyarakat Jawa Timur pada umumnya, khususnya wilayah kultur padalungan,<sup>227</sup> namun pola budaya paternalis yang memberikan stratifikasi tertinggi pada kyai berkembang. Kondisi sosial demikian berimplikasi pada pola hubungan sosial dan pola komunikasi yang terjadi dalam masyarakat. Kyai menjadi sosok panutan dan tauladan dalam setiap gerak dan langkahnya. Oleh karena itu, apa yang menjadi ucapan dan tindakan kyai menjadi contoh dan pegangan masyarakat, tidak hanya dalam urusan sosial, namun juga masuk ke dalam ranah politik. Fenomena kepatuhan kepada kyai bukan hanya fenomena lokal, akan tetapi boleh dikatakan pola umum yang terjadi di masyarakat Jawa, dan Indonesia pada umumnya. Sebagai contoh hasil

---

225 Anderson menyebutkan bahwa dalam komunitas Islam, orang yang mempunyai status tertinggi adalah mereka yang berpengetahuan tinggi mengenai hukum agama dan mereka yang mengajarkan ajaran Islam. Lihat Benedict R. O'G. Anderson, *Culture and Politics in Indonesia* (Ithaca and London: Cornell University Press, 1990) terutama Hlm. 61.

226 Anderson menyebutkan bahwa dalam komunitas Islam, orang yang mempunyai status tertinggi adalah mereka yang berpengetahuan tinggi mengenai hukum agama dan mereka yang mengajarkan ajaran Islam. Lihat Benedict R. O'G. Anderson *Culture and Politics in Indonesia* (Ithaca and London: Cornell University Press, 1990) terutama Hlm. 61.

227 Menurut Prawiroatmojo (1985), kata *padalungan* berasal dari kata dasar "dhalung" artinya periuk besar. Wadah bertemunya budaya sawah dengan budaya tegal atau budaya Jawa dengan budaya Madura, yang membentuk budaya *Padalungan*. Hasilnya, masyarakat yang berciri agraris-egaliter, bekerja keras, agresif, ekspansif, dan memiliki solidaritas yang tinggi, tetapi masih menempatkan pemimpin agama Islam sebagai tokoh sentral. Daerahnya meliputi Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, dan Jember.

penelitiannya Karl D. Jackson di Jawa Barat mengenai kewibawaan Tradisional.<sup>228</sup>

Peran sentral kyai di dalam masyarakat telah membuat kyai menjadi orang yang ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari secara sosial, namun juga secara politik. Di Malang Raya ada banyak pesantren baik yang berskala besar maupun kecil, dan lingkungan masyarakatnya sangat kental dengan suasana keagamaan Santri, khususnya Santri Tradisionalis. Oleh karena itu, tidaklah salah apabila kehidupan sosial masyarakat di Malang Raya sangat dipengaruhi oleh peran ulama atau kyai.<sup>229</sup>

Petunjuk yang datang dari tokoh atau kyai punya pengaruh kuat untuk menggiring masyarakat memilih partai tertentu. Kenyataan ini disadari betul oleh banyak tokoh politik. Oleh karena itu, ketika menjelang pemilu banyak tokoh Parpol melakukan kunjungan ke pesantren-pesantren untuk mendapatkan dukungan dari kyai. Namun menurut salah seorang warga, kedatangan para tokoh politik ke pesantren-pesantren itu tidak akan efektif kalau dilakukan hanya pas menjelang pemilu. Begitu juga dengan nada yang sama, rohim mengatakan, "memberi dana tapi hanya ketika pemilu, partai seharusnya melakukan silaturahmi ke-kyai harus continue tidak sebatas pada pemilu. Kalau ini dilakukan akan mengutungkan partai itu dalam masa mendatang.

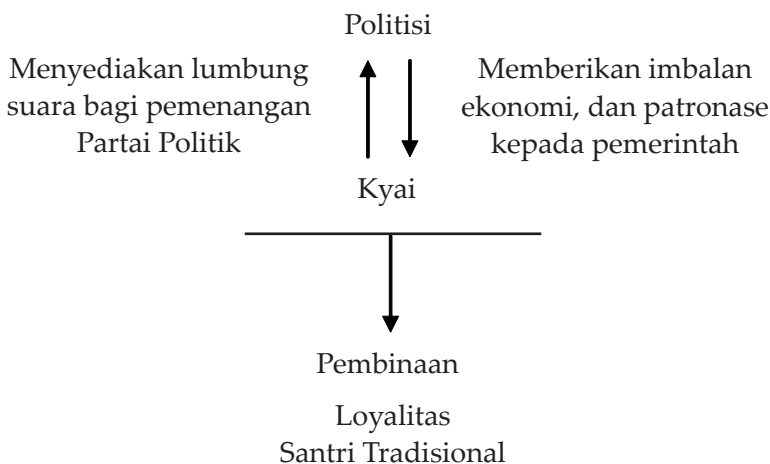
Pada saat pemilu, seorang kyai lokal di Malang Raya sangat besar pengaruhnya dalam menentukan arah kemana masyarakat akan memilih partai politik, dan kondisi ini telah melahirkan pemilih-pemilih yang loyal. Semakin dekat dengan kultur pesantren atau dengan dengan lingkungan kyai, maka semakin besar pengaruh kyai tersebut pada pilihan politik masyarakat. Kecenderungan umum pemilu pemilu 1999 dan 2004, para kyai lokal di Malang Raya mengidentifikasi dirinya

---

228 Masalah kekusaan Tradisional Jawa secara teoritik dibahas oleh Benedict R. O'G. Anderson, *The Idea of Power in Javanese Power*, dalam Benedict R. O'G. Anderson *Culture and Politics in Indonesia* (Ithaca and London: Cornell University Press, 1990). Lihat juga Benedict R. O'G. Anderson, *Language and Power, Exploring Political Cultures in Indonesia* (Ithaca and London: Cornell University Press, 1990). Lihat juga, Jackson, Karl D., *Traditional Authority, Islam and Rebellion*. Berkeley : University of California Press, 1973.

229 Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa di dalam masyarakat Santri, berbagai ritual yang mereka lakukan selalu berhubungan dengan peran ulama atau kyai baik itu ritual kematian, kelahiran, maupun perkawinan. Bahkan, hampir setiap saat seorang ulama itu, dari mulai pagi sampai malam, selalu terlibat dengan kehidupan masyarakat dari mulai menjadi imam shalat, guru ngaji, pemberi ceramah, khotbah jum'at, pemimpin do'a, pemimpin tahlil dan lain-lain. Dengan demikian posisi ulama atau kyai di masyarakat Santri sangat sentral.

dengan partai Islam, khususnya PKB, walaupun ada sebagian kecil yang menyebrang ke PPP, PPNU atau ke partai Islam lainnya.<sup>230</sup> Oleh karena itu, lingkungan yang ada pesantren maka ada kecenderungan kuat di wilayah tersebut PKB menang, sementara masyarakat santri tradisional yang jauh dari pusat pesantren ada kecenderungan pilihan politiknya menyebar.<sup>231</sup>



**Gambar 4.1. Model Pola Pembentukan Loyalitas Pemilih Santri Tradisional**

Karena pilihan politik kaum Santri Tradisionalis itu tidak independen (ketergantungan pada kyai), maka ada kecenderungan pilihan politiknya seragam. Namun di sisi lain keputusan politik kyai sangat independen, karena sangat bergantung pada keterikatan psikologis maupun ekonomis. Oleh karena itu, para kyai lokal, atas dorongan kepentingannya baik itu pembangunan, maupun eksistensi diri, maka ada yang melakukan

230 Para kyai lokal yang ada di Malang Raya umumnya punya ikatan sosiologis dengan PKB, karena umumnya mereka pernah ngaji di pondok Tebu Ireng yang didirikan oleh KH. H. Hasyim Asari yang merupakan pendiri dari Nahdatul Ulama. Sementara salah seorang cucu pendiri NU, Abdurahman Wahid, merupakan pendiri dari PKB. Oleh karena itu, sebagai seorang Santri Tradisional yang sangat menghormati guru dan keturunannya, maka banyak kyai di Malang Raya mendukung PKB karena ada figur Gus Dur. Sementara bagi kyai yang tidak mendukung PKB umumnya karena ada unsur kedekatan pribadi dengan tokoh atau elit politik yang duduk dalam kepengurusan partai tersebut.

231 Hasil analisis dokumen pemilu menunjukkan bahwa untuk wilayah-wilayah yang ada pesantren, PKB mendapatkan suara cukup signifikan jika dibanding dengan wilayah-wilayah yang tidak ada pesantren. Menurut data yang ada, khusus untuk wilayah Kabupaten Malang dan Kota Malang, jumlah pesantren yang terdaftar berjumlah 48 pesantren. Sumber: [www.pesantrenvirtual.com](http://www.pesantrenvirtual.com).

pengalihan politik dari alur kebanyakan. Di Malang Raya umumnya, para kyai lokal menyalurkan aspirasi politiknya ke PKB karena dalam PKB ada Gus Dur. Namun demikian ada sebagian ulama atau kyai yang tidak mendukung PKB, tetapi mendukung partai Islam lain seperti PPP, PPNU (PKNU 2009) atas dasar kepentingan dan kedekatan pribadi dengan pimpinan partai tersebut.

Peran kyai lokal terhadap kemenangan PKB sangat strategis. Secara tersirat kyai memberikan informasi, isu dan gagasan politik melalui berbagai aktivitas keagamaan dari mulai pengajian, tahlilan, istighosah dan lain sebagainya. Kegiatan ini menjadi penting dalam mendulang suara, karena pesan yang tersirat adalah “apabila mengaku warga nahdilyin, maka PKB harus menjadi pilihan politiknya”. Dengan demikian, banyak dari warga Nahdilyin yang sangat fanatik dengan pilihan politiknya. Mereka tidak merasa nyaman dan aman secara sosial apabila memilih partai politik selain partai yang dilahirkan oleh NU ini.<sup>232</sup>

**Tabel 4.1. Perolehan Suara PKB pada Pemilu 1999 dan 2004 di Malang Raya**

Nama Wilayah	Perolehan Suara		Prosentase	
	1999	2004	1999	2004
Kabupaten Malang	392.472	316.665	29,57%	25,72%
Kota Batu		14.148		13,19%
Kota Malang	77.429	68.321	19,60%	17,36%

Sumber: KPUD Kabupaten dan Kota Malang, Kota Batu yang telah diolah penulis.

Keterangan: Pada pemilu 1999, status Kota Batu masih Kota Administratif di bawah Pemerintahan Kabupaten Malang.

Keberpihakan massa Santri Tradisional kepada partai Islam, khususnya PKB, yang merupakan dampak dari adanya peran kyai, bisa dijelaskan dalam perspektif budaya masyarakat Jawa. Budaya patron-client atau hubungan “bapakisme”<sup>233</sup> yang berkembang, menjadikan

232 Sikap yang tidak mau berbeda dengan lingkungan sangat kental dalam lingkungan masyarakat Santri Tradisional maupun abangan, khususnya masyarakat yang tinggal di pedesaan. Pilihan politik santri tradisional ke PKB yang cukup, tidak lain karena mereka takut dianggap bukan bagian dari kelompok mereka.

233 Hubungan sosial “bapakisme” lebih halus (*sophisticated*) dari pada hubungan patron-client yang banyak terdapat di beberapa Negara Asia lainnya dan Amerika Latin yang sangat menitik beratkan aspek material. Sebab dalam sistem bapakisme ini pada prinsipnya “bapak” atau “patron” menanggung pemenuhan kebutuhan sosial, material, spiritual, dan melepaskan pemenuhan kebutuhan emosional untuk para “anak buah” atau client. Faktor

pilihan politik kyai menjadi pijakan masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya. Hal ini dikarenakan tokoh-tokoh itu merupakan simbolisasi dari ideologi yang mereka perjuangkan. Di PKB, Gus Dur yang nota bene sebagai cucu dari pendiri NU, K.H. Hasyim Asyari, selalu mendapat dukungan dari warga Nadhliyin karena budaya NU yang paternalistis yang patuh pada guru, kyai atau menghormati keluarga dari gurunya.<sup>234</sup>

### c. Identifikasi dan Afiliasi Politik Kelompok Santri

Di Malang Raya pilihan politik seseorang terhadap partai, tampaknya sudah menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan sosial. Artinya, partai politik tertentu akan dipilih secara bersama-sama oleh semua anggota masyarakat yang mempunyai norma dan kebudayaan yang sama. Oleh karena itu, dalam Kalangan Santri Tradisional, yang mempunyai tradisi keagamaan sendiri, setiap anggotanya akan memilih partai yang sama.

Identifikasi dari kelompok Santri, dalam hal ini kelompok Santri Tradisional, umumnya lebih dekat dengan partai-partai yang punya ikatan historis dengan NU. Sementara kelompok Santri Modernis umumnya mengidentifikasikan dirinya dengan partai politik Islam yang punya ikatan historis dengan ormas Modernis, seperti Muhammadiyah. Kategori partai Islam bagi pemilih tidak hanya berdasar pada platform partai. Para pemilih mengkategorikan apakah itu partai Islam atau bukan juga ditentukan oleh tokoh yang ada di dalam partai tersebut.

Dalam kasus kemenangan relatif PAN pada pemilu 1999, terhadap partai-partai Muslim Modernis lain seperti PBB, PK, Partai Masyumi, sebagian besar dapat dijelaskan dengan kehadiran Amien Rais sebagai tokoh nasional di pucuk kepemimpinan partai tersebut yang merupakan tokoh Islam Modernis. Begitupun keunggulan pengumpulan suara oleh PKB dibanding partai-partai NU yang lain seperti PNU, dan Partai Suni, dan bahkan PPP sendiri, merupakan hasil dari ketokohan Gus Dur di partai tersebut. Walaupun PAN dan PKB keduanya tidak mencantumkan Islam sebagai asas tetap menjadi partai pilihan kaum

---

<sup>234</sup> Budaya penghormatan kepada kyai sangat kental dalam masyarakat Madura. Pola hubungan antara santri dan kyai atau masyarakat dengan kyai juga terjadi sangat kental di daerah tapal kuda seperti Situbondo, Probolinggo, Bondowoso, Banyuwangi dan Jember. Pola hubungan tersebut juga berkembang di daerah Malang Raya, hal ini menurut saya karena adanya pengaruh dari pola kehidupan masyarakat Madura yang banyak menetap di beberapa tempat di wilayah Malang Raya seperti Kedung Kandang, Bulu Lawang.

Modernis dan Tradisional. Oleh karena itu, tidaklah heran apabila PKB yang dianggap sebagai partainya NU banyak mendapat dukungan di wilayah Malang Raya, begitu juga dengan PAN dianggap sebagai partainya warga Muhammadiyah.

Dengan demikian, image Muhammadiyah dikalangan warga Nahdilyin, terutama yang tinggal di pedesaan tidak baik, karena mereka menganggap Muhammadiyah sebagai agama baru tersebut. Oleh karena itu, jangankan masuk menjadi anggota PAN yang dianggap sebagai partai Muhammadiyah, ada orang ataupun warga yang dianggap simpatisan Muhammadiyah saja mereka sangat antipati sehingga tidak jarang simpatisan Muhammadiyah yang diisolir dalam kehidupan sosial di lingkungannya. Bahkan sering terjadi benturan ditingkat *grassroot* antara warga Muhammadiyah dan warga NU. Perbedaan atau khilafiah sering menjadi penyulut ketegangan antara NU dan Muhammadiyah, seperti khunut dalam shalat, tahlilan bagi yang meninggal, ataupun ritual lain telah menjadi barometer dari perbedaan warga Muhammadiyah dengan NU ditingkat *grassroot*. Di sisi lain bagi partai politik yang dilahirkan oleh NU, berbagai ritual keagamaan yang dilakukan oleh warga dijadikan sebagai sarana untuk melakukan sosialisasi dan sekaligus jastifikasi bahwa partai politiknya merupakan bagian integral dari NU.

Hasil proses sosialisasi yang dilakukan baik oleh tokoh struktural maupun kultural NU telah melahirkan sikap antipati dari warga Nahdilyin terhadap Muhammadiyah dan sekaligus kepada PAN yang dianggap partainya Muhammadiyah. Hasil dari FGD yang dilakukan, diperoleh satu kesimpulan bahwa bagi Warga Nahdilyin, lebih bisa menerima PDIP atau Golkar dari pada PAN. Mereka menganggap dengan memilih Golkar maupun PDIP tidak mempunyai konsekuensi sosial dalam masyarakat ketimbang harus memilih PAN.

## 2. Kelompok Abangan

Kalangan Abangan tidak begitu memperhatikan doktrin Islam, dan mereka sangat mengutamakan dan memperhatikan detail keupacaraan, sementara dikalangan Santri perhatian terhadap doktrin hampir seluruhnya mengalahkan ritual Islam yang telah menipis. Seorang Abangan tahu kapan harus menyelenggarakan slametan dan apa yang harus jadi hidangan pokoknya – bubur untuk kelahiran, apem untuk



kematian. Walaupun mereka tidak memahami memahami makna itu semua, namun secara umum mereka tahu alakadarnya tentang apa yang dilambangkan oleh berbagai unsur dalam hidangan itu.

Dalam hal bersih desa, sebagaimana peneliti amati, hampir setiap rumah membuat “ancak”, sebuah hidangan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk alakadarnya diwadahi dalam sebuah wadah yang alasnya terbuat dari anyaman bambu dan pinggirnya dari kulit pohon pisang. Umumnya acara bersih desa dilakukan pada sore hari atau abis shalat Isya, yang selanjutnya diisi dengan acara kesenian seperti jaranan, dan yang terpenting adalah wayangan. Acara inti dipimpin oleh tokoh agama, dengan sambutan sepatah dua patah kata, tokoh agama itu memberikan penjelasan mengenai apa arti dan fungsi bersih desa itu. Setelah itu dilanjutkan dengan do’a bersama. Bersih desa ini, tidak hanya diikuti oleh kalangan Abangan, tapi juga oleh kalangan Santri Tradisional.

Acara slametan dilakukan oleh masing-masing rumah tangga, dimana para kepala rumah tangga jugalah yang datang untuk mengikuti slametan itu, untuk kemudian membawa pulang sebagian makanan bagi anggota keluarganya yang lain. Bahkan upacara bersih desa, yang paling dekat kepada upacara publik atau upacara supra rumah tangga yang dapat ditemukan orang dalam sistem Abangan. Bersih desa tak lain adalah penggabungan sumbangan dari berbagai slametan terpisah yang dilakukan oleh rumah tangga-rumah tangga desa itu dari pada suatu upacara untuk desa itu secara keseluruhan: hidangannya merupakan penganan dari berbagai dapur yang lantas dibagi-bagi. Kenapa slametan ini dilakukan oleh rumah tangga, karena dalam kalangan Abangan unit sosial yang paling dasar tempat hampir semua upacara berlangsung adalah rumah tangga – seorang pria, istrinya dan anak-anaknya.

Kelompok Abangan banyak membina hubungan dengan elit-elit partai politik yang berasal dari Partai Nasionalis. Bahkan dalam kehidupan sosialnya, para kader politik di tingkat lokal mempunyai peran besar dalam membangun solidaritas kelompok Abangan ini. Kader politik di tingkat lokal ini menjadi media penyalur aspirasi dari masyarakat Abangan kepada para tokoh politik yang lebih tinggi. Dilihat dari aspek demografi, kelompok Abangan di Malang Raya, banyak mendiami wilayah-wilayah pinggiran atau sebuah perkampungan kota

yang padat.<sup>235</sup> Kalau di pedesaan umumnya mereka bermata pencaharian sebagai petani atau buruh tani, buruh bangunan atau kerjaan yang sifatnya insidental. Sementara mereka yang ada di perkotaan bekerja sebagai tukang parkir, tukang becak, pedagang kaki lima atau pekerjaan lain yang menunjukkan bahwa mereka adalah kalangan wong cilik.

Dengan melihat karakter Abangan, walaupun pola patrimonial ini merupakan gejala umum dalam masyarakat Jawa, namun tokoh panutan antara Santri dan Abangan ini berbeda. Bagi kelompok Abangan, mereka yang menjadi panutan biasanya di samping tokoh politik lokal, juga aparat desa baik dari mulai Kepala Desa, Kepala Dusun, RW, RT. Dari pengamatan, banyak dari aparat desa, ketika pemilu tokoh formal ini sering didatangi oleh elit politik terutama dari Partai Nasionalis, untuk memberikan dukungan. Sebagian besar mereka yang menjadi RT atau RW umumnya mereka yang berlatar belakang Abangan, sementara yang Santri cenderung lebih banyak mengurus kegiatan dan aktivitas di Langgar atau Masjid.

Faktor loyalitas yang terbangun di lingkungan kelompok Abangan lebih banyak terbentuk karena kehidupan sosial masyarakat yang lebih dicirikan dengan pola kehidupan "egaliter".<sup>236</sup> Tokoh masyarakat yang biasanya menjadi insirator dan mobilisator masyarakat dalam kehidupan sosial, baik itu dalam kegiatan gotong royong untuk pembangunan lingkungan, bersih desa, maupun acara-acara yang melibatkan masyarakat seperti peringatan Hari Besar Nasional, menjadi panutan dari masyarakat. Posisi tokoh yang aktif dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan biasanya sekaligus menjadi tokoh formal baik itu sebagai RT, RW, atau Kepala Desa.<sup>237</sup>

---

235 Masyarakat abangan sangat kental kelihatan di daerah-daerah yang jauh dari lingkungan pesantren, baik itu di pedesaan maupun di perkotaan. Di Malang Raya, masyarakat abangan banyak mendiami di daerah pinggiran sungai Brantas. Hasil observasi selama penelitian ini dilaksanakan di Malang Raya.

236 Pola hubungan egaliter dalam masyarakat abangan sangat kental sekali. Hubungan antara orang tua dan anak muda menunjukkan tidak adanya jarak, kalau tidak dikatakan tidak ada totokromo. Bahkan antara mereka yang muda dan tua, tidak risih untuk saling mengejek satu sama lain sebagai tanda keakraban di antara mereka. Akan tetapi diantara mereka, khususnya kalangan muda, karena perilaku egaliter ini juga kerap terjadi perselisihan yang berakhir dengan perkelahian. Hasil observasi penulis terhadap masyarakat abangan yang ada di Dusun Caru Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu selama penelitian ini dilaksanakan.

237 Hasil observasi penulis, kelompok abangan ini banyak yang menjadi tokoh formal di setiap daerah, baik itu yang menjadi TR, RW, Kepala Dusun, Maupun Kepala Desa. Kelompok santri lebih banyak akitivitasnya di lingkungan langgar atau mesjid. Kadang dari hasil

### a. Wong Cilik dan Identifikasi Kelompok

Dalam kehidupan sosial yang mengidentifikasikan dirinya sebagai wong cilik, unsur kekerabatan masih cukup menonjol. Sikap guyub dan rukun cukup kental mewarnai kehidupan sehari-hari masyarakat.<sup>238</sup> Perilaku kehidupan masyarakat, khususnya di pedesaan, jarang ditandai dengan adanya kejutan-kejutan. Pola kehidupan mereka sepertinya sudah teratur dengan konsep sosial yang mereka pahami dan tetap dipertahankan dari generasi ke generasi. Ketika ada kajatan besar baik itu yang berkaitan upacara keagamaan maupun upacara nasional, mereka bersatu padu satu sama lain dengan pembagian peran yang permanen. Hal yang paling menonjol dari semua yang dilakukan oleh masyarakat adalah kesadaran akan kebersamaan baik dalam kehidupan sosial maupun politik.

Dalam kegiatan lima tahunan (Pemilu), yang oleh masyarakat sering dinamakan sebagai kajatan besar nasional, nampak jelas masing-masing bagian dari masyarakat berperan aktif sesuai dengan porsi masing-masing. Dalam pilihan politik, khususnya pada pemilu 2009, selain identifikasi politik yang menjadi pertimbangan dalam memilih juga faktor kekeluargaan, pertemanan, maupun hubungan sosial kemasyarakatan. Ada kecenderungan bahwa pilihan masyarakat pada partai politik dalam setiap pemilu seperti perilaku “ikut-ikutan” dengan pilihan sodara, teman atau lingkungan masyarakat lain karena takut dianggap bukan merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang bersangkutan.<sup>239</sup>

---

pengamatan sepintas, kelompok santri yang sudah aktif di langgar atau Mesjid, kurang acuh dengan kegiatan lingkungan. Hasil observasi penulis di Wilayah Malang Raya selama penelitian ini dilaksanakan.

238 Sikap guyub rukun masyarakat Malang Raya masih cukup kental, terutama di wilayah pinggiran atau desa-desa. Banyak kegiatan-kegiatan pembangunan lingkungan yang dilakukan secara bersama-sama seperti pembautan saluran air, sarana ibadah, perbaikan jalan. Hal yang menarik dari sikap guyub rukun ini dalam kasus pembangunan rumah warga, terutama bagi mereka yang miskin, masyarakat biasanya melakukan kerja bakti untuk membantu pembangunan rumah tersebut. Akan tetapi sikap guyub rukun ini, terutama dalam hal gotong royong untuk pembangunan lingkungan, setelah banyaknya bergulir program yang sifatnya *carity* dan *pelantrophy*, sikap guyub rukun ini sudah agak memudar karena mereka sudah menganggap aktifitas pembangunan lingkungan ini ada uangnya. Hasil Observasi di daerah Landung Sari Kota Malang, Sekar Putih dan Caru Kota Batu, Ampel Dento dan Karang Ploso Kabupaten Malang selama penelitian ini dilakukan dari mulai tahun 2004-2009.

239 Masyarakat Malang Raya, khususnya dari golongan menengah ke bawah, umumnya tidak mempunyai idependensi dalam hal menentukan pilihan politik. Walaupun mereka tidak setuju atau bahkan tidak senang dengan partai atau caleg dari partai tertentu, mereka

Salah seorang warga di Kota Batu, Muslim (30), menyampaikan bahwa dalam pemilu 1999 dan 2004 masyarakat tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi wakil-wakil mereka yang akan duduk di DPR.<sup>240</sup> Mereka memilih partai tertentu tidak lebih karena takut disebut tidak guyub atau takut dikucilkan oleh kelompoknya. Dengan demikian, pilihan partai politik tidak menjamin mereka sadar bahwa hal itu merupakan konsekuensi dari pemahaman mereka.

Lebih jauh dapat dikemukakan bahwa sebagian masyarakat Abangan sangat peduli dengan sikap kebersamaan kelompok di lingkungan mereka.<sup>241</sup> Mereka sadar bahwa kebersamaan merupakan bagian dari pengamanan sosial dari ketakberdayaan secara individu dalam melangsungkan kehidupan mereka, dan hal ini nampaknya telah terpatri dalam alam bawah sadar mereka. Oleh karena itu, mereka cenderung akan mengikuti pola umum dalam masyarakat karena mereka sangat bergantung dengan masyarakat yang lain. Dengan demikian, banyak dari anggota masyarakat berupaya mendapatkan peran di lingkungannya dalam membina dan membangun lingkungan. Biasanya mereka yang punya peran menonjol dalam masyarakat, secara langsung maupun tidak, masyarakat akan patuh pada mereka yang telah punya andil dalam membangun lingkungannya.

Berkaitan dengan aktivitas kemasyarakatan, banyak dari tokoh masyarakat yang sudah dikenal menjadi kepanjangan tangan dari elit politik dari partai tertentu, walaupun mereka secara pribadi jarang yang aktif dalam partai.<sup>242</sup> Hal yang penting adalah manfaat yang akan

---

cenderung untuk tetap memilih partai tersebut karena partai tersebut merupakan pilihan dari kelompok atau lingkungan di mana dia berada. Hal ini sangat mencolok pada masyarakat di sekitar pesantren, atau masyarakat yang homogen (penduduk asli bukan pendatang). Hasil observasi penulis di beberapa wilayah di sekitar pesantren seperti daerah Bululawang dan Singosari Kabupaten Malang, Kedungkandang Kota Malang, Junrejo Kota Batu. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan pemilih, Madi 47 tahun di Dusun Caru Kota Batu pada bulan April 2008.

240 Muslimin merupakan aktifis PAN yang berada di lingkungan masyarakat homogen, wawancara dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2008 di Rumah Jaenuri jetis Kabupaten.

241 Konsep dasar dari Sosialis adalah *"from each according to his/her ability, to each according to his/her need"*. Konsep sosialis ini sebenarnya dalam kehidupan masyarakat di Malang Raya telah berjalan secara mekanis. Bagi mereka yang mempunyai anak sedikit atau pun banyak tetap mereka bisa hidup karena ada konsep sosial ini, yang di wujudkan dalam perilaku *"burwuh"* (pemberian sejumlah uang kepada keluarga yang mengkhitankan atau menikahkan anak baik diundang maupun tidak di undang. Hasil observasi dan pengalaman penulis sendiri yang tinggal di wilayah Malang Raya.

242 Kelompok abangan lebih aktif untuk mencari bantuan dalam pengembangan lingkungan kepada tokoh-tokoh politik ketimbang kelompok Santri. Sementara kelompok Santri

diterima oleh masyarakat dari apa yang mereka lakukan sebagai bagian dari pengabdian mereka kepada masyarakat dan lingkungannya. Oleh karena itu, setiap warga yang menjadi aktivis atau pun kepanjangan dari partai politik tertentu, tidak lebih peran mereka hanya mencari sesuatu yang bisa diberikan kepada masyarakat. Tidak jarang mereka yang punya hubungan dengan partai tertentu menjadi media bagi partai untuk membagikan kaos, uang bensin pada saat kampanye, ataupun yang berkaitan dengan bantuan bagi pembangunan lingkungan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebersamaan, tidak mau berbeda dengan yang lain, merupakan jaminan sosial bagi lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, partai politik yang ingin mendapatkan simpati dari masyarakat, mau tidak mau, harus melakukan interaksi langsung ke dalam masyarakat. Sugiono, seorang warga menyatakan, "pentingnya tokoh partai politik untuk turun dalam kegiatan kemasyarakatan kalau ingin terpilih, di daerah sini ada calon dari Golkar tapi tidak dipilih karena jarang ikut dalam kegiatan masyarakat."<sup>243</sup>

#### **b. Pentas Kesenian: Ekspresi Sosial dan Politik**

Proses sosialisasi yang terjadi dalam masyarakat Abangan dimulai dari keluarga, kelompok permainan, dan lingkungan masyarakat. Keluarga Abangan, dengan berbagai upacara yang dilakukan, perilaku kehidupan anggota keluarga terutama ayah, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses asimilasi perilaku anak dalam keluarga tersebut. Aktivitas kesenian yang digemari oleh kaum Abangan, jaranan, sejak kecil sudah diperkenalkan. Berbagai alat peraga yang sering dimainkan dalam kesenian jaranan juga menjadi alat permainan anak-anak Abangan sejak kecil, seperti kuda-kudaan, pecut, bahkan perilaku kalap yang sering dipertontonkan dalam pertunjukan jaranan. Begitu juga dengan apa yang disebut bantengan, kesenian ini selalu dipertontonkan dalam masyarakat Abangan terutama menjelang

---

biasanya lebih pasif, dan cenderung menunggu tokoh politik yang datang. Oleh karena itu kelompok santri biasanya lebih banyak bantuan untuk langgar atau Mesjid kalau menjelang akan ada pemilu, sebagai contoh langgar yang ada di daerah Jengglong Dusun Caru Kota Batu menjelang pemilu 2004 dapat bantuan dari Imam Kabul yang merupakan Walikota dari PDIP, dan menjelang pemilu 2009 mendapat bantuan lewat APBD sebesar 10 juta yang diajukan oleh Andre Prana yang merupakan calon dari Partai Barnas. Hasil Observasi, *ibid.*

243 Pada pemilu 2004 ada calon dari Golkar yang berasal dari Dapil Junrejo Kota Batu, tinggalnya di daerah Jengglong Desa Pendem, namun masyarakat tidak memilih calon tersebut karena mereka menganggap tidak pernah memperhatikan dan ikut bermasyarakat. Hasil observasi dan wawancara dengan Agung pada tanggal 17 Juli 2007 di Pendem Kota Batu.

peringatan kemerdekaan. Hal ini secara sadar atau tidak, masyarakat Abangan telah mempunyai gambaran sendiri tentang kehidupan sosial maupun kehidupan politik dengan simbol-simbol dalam setiap aktivitas yang dilakukan dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, pentas kesenian yang mereka peragakan menjadi bagian dari ekspresi kehidupan sosial dan politik dari kelompok yang mengidentifikasi diri sebagai kelompok wong cilik.

Simbol perjuangan mereka dalam melawan penguasa yang sering menindas kaum golongan kecil (*wong cilik*) mereka ilustasikan dalam sebuah aktivitas kesenian yang disebut bantengan. Dalam kesenian itu wong cilik disimbolkan dengan kerbau/banteng, sementara penguasa disimbolkan dengan harimau. Kesenian ini menjadi totonan yang menarik dari kalangan Abangan karena dirasakan mewakili kesadaran dan kenyataan kolektif mereka akibat tekanan dan himpitan ekonomi yang mereka alami setiap hari. Acara kesenian bantengan ini digelar selalu bertepatan dengan acara tujuh belasan, sebagai bagian dari peringatan kemenangan masyarakat melawan penjajah. Dan mereka yang mengidentifikasi dirinya sebagai wong cilik, merasakan bahwa bagi mereka kenyataan nasib yang selalu tidak berubah, salah satunya diakibatkan oleh adanya regulasi dan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada mereka. Maka dari itulah, makna PDI perjuangan yang mengusung simbol kepala banteng, dengan embel-bel perjuangan memberikan napas baru yang menyalurkan energi bagi kelompok Abangan untuk membangun solidaritas kelompok seperjuangan dengan sama-sama mendukung partai pimpinan Megawati.

### c. Identifikasi dan Afiliasi Politik Kelompok Abangan

Pembelahan sosial yang dikemukakan oleh Geertz yaitu Santri, Abangan menjadi dasar masyarakat dalam mengidentifikasi dirinya dengan partai politik tertentu. Kelompok Abangan mengidentifikasi dirinya dengan partai-partai yang berhaluan Nasionalis, sementara kelompok Santri mengidentifikasi dirinya dengan partai-partai yang berhaluan Islam. Kelompok Abangan pola pengidentifikasian dirinya mengarah pada PDIP, terutama dalam pemilu 1999 dan 2004. Walau demikian, ada sebagian dari mereka yang dalam perilakunya menunjukkan ciri dari Abangan namun dalam afiliasi politiknya tidak ke PDIP, namun dia lebih memilih partai Nasionalis lainnya seperti Golkar dan Demokrat.

Tingkat identifikasi politik masyarakat Abangan di Malang Raya terhadap PDIP yang cukup besar, hal ini bisa ditunjukkan dari besarnya perolehan suara PDIP baik pada pemilu 1999 maupun 2004. Jika dibandingkan antara golongan pemilih Abangan dengan pemilih Santri, secara kuantitatif pemilih Abangan lebih besar, walaupun Malang ini terkenal juga dengan masyarakat Islami. Karena besarnya masyarakat Abangan ini, maka PDI-P Malang Raya memiliki pendukung cukup banyak yang dibuktikan dengan pilihan politik pemilih pada PDIP ketika pemilu 1999 dan 2004. Kemenangan PDIP di Malang Raya hampir merata di setiap daerah (Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu).

Sementara tingkat identifikasi politik masyarakat Malang Raya ke partai Nasionalis lainnya tidak begitu besar. Partai-partai yang tidak memperoleh apresiasi umumnya partai tersebut tidak punya legitimasi yang jelas untuk menjustifikasikan diri sebagai partainya kelompok Abangan sesuai pakem politik aliran, disamping lemahnya strategi yang dijalankan dalam meraih simpati pemilih.

Pada pemilu 2009, pola identifikasi politik pemilih kepada PDIP mengalami perubahan signifikan. Peroleh suara partai-partai pada pemilu 1999 dan 2004 yang menempatkan tiga besar perolehan suara di Malang Raya, yaitu PDIP, PKB, dan Golkar, dengan suara mayoritas ada di tangan PDIP. Pada pemilu 2009 PDIP mengalami penurunan suara seiring dengan bertambahnya partai politik yang mendapat suara signifikan dan bahkan Partai Demokrat mengalahkan perolehan suara PDIP di Kota Malang.

Pembelahan sosial yang dikemukakan oleh Geertz yaitu Santri, Abangan menjadi dasar masyarakat dalam mengidentifikasi dirinya dengan partai politik tertentu. Kelompok Abangan mengidentifikasi dirinya dengan partai-partai yang berhaluan Nasionalis, sementara kelompok Santri mengidentifikasi dirinya dengan partai-partai yang berhaluan Islam. Kelompok Abangan pola pengidentifikasian dirinya mengarah pada PDIP, terutama dalam pemilu 1999 dan 2004. Walau demikian, ada sebagian dari mereka yang dalam perilakunya menunjukkan ciri dari Abangan namun dalam afiliasi politiknya tidak ke PDIP, namun dia lebih memilih partai Nasionalis lainnya seperti Golkar dan Demokrat.

Tingkat identifikasi politik masyarakat Abangan di Malang Raya terhadap PDIP yang cukup besar, hal ini bisa ditunjukkan dari besarnya

perolehan suara PDIP baik pada pemilu 1999 maupun 2004.<sup>244</sup> Jika dibandingkan antara golongan pemilih Abangan dengan pemilih Santri, secara kuantitatif pemilih Abangan lebih besar, walaupun Malang ini terkenal juga dengan masyarakat Islami. Karena besarnya masyarakat Abangan ini, maka PDI-P Malang Raya memiliki pendukung cukup banyak yang dibuktikan dengan pilihan politik pemilih pada PDIP ketika pemilu 1999 dan 2004. Kemenangan PDIP di Malang Raya hampir merata di setiap daerah (Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu).

Sementara tingkat identifikasi politik masyarakat Malang Raya ke partai Nasionalis lainnya tidak begitu besar, kecuali pada pemilu 2009, dimana Partai Demokrat dapat mengungguli perolehan suara PDIP di Kota Malang. Partai-partai yang tidak memperoleh apresiasi umumnya partai tersebut tidak punya legitimasi yang jelas untuk menjustifikasikan diri sebagai partainya kelompok Abangan sesuai pakem politik aliran, di samping lemahnya strategi yang dijalankan dalam meraih simpati pemilih.<sup>245</sup>

## B. Dukungan Kelompok Keagamaan

Sebelum membahas lebih jauh terkait dukungan ormas keagamaan pada partai politik, perlu kiranya dikemukakan bagaimana relasi partai dan agama sebagai justifikasi masuknya agama dalam ranah politik. Angus Campbell (1976) menunjukkan adanya korelasi antara variable agama dalam pemungutan suara di samping variable ras, pekerjaan, pendidikan, dan pendapatan.

Pada pemilu 1999 dan 2004, di Malang Raya walaupun secara tidak langsung menjadikan ormas Islam sebagai partai politik, namun pada praktiknya agama dijadikan sebagai alat untuk memobilisasi massa. Ada alasan yang kuat kenapa banyak partai politik menggunakan organisasi massa atau agama sebagai dasar atau basis dalam partai politik. Salah satu alasannya adalah tidak berkembangnya basis sosial secara material,

---

244 Mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu partai politik baik pada pemilu 2004 maupun 2009, bisa dilihat dari rekapitulasi hasil pemilu KPUD baik Kota, Kabupaten Malang, maupun Kota Batu.

245 Partai-partai baru baik itu yang mengambil segmen pemilih Abangan maupun Santri, umumnya tidak melakukan seperti yang dilakukan partai-partai besar. Salah satu alasan yang dikemukakan adalah kurangnya dana untuk melakukan kampanye. Sebagaimana hasil wawancara dengan warga, sony, yang ikut kampanye pada pemilu 2004, menyebutkan bahwa kalau ikut kampanye akan mendapatkan uang bensin, biasanya antara 20-50 ribu rupiah.



seperti yang diperlihatkan oleh lemahnya pengelompokan profesi yang akan memobilisasasi massa untuk mendukung partai politik. Di Indonesia, khususnya di Malang Raya, justru alat mobilisasi massa yang paling efektif adalah agama, dalam hal ini Islam. Pemeluk agama Islam tidaklah homogen karena ada varian-varian yang bisa dilihat dari karakteristik penganutnya. Salah satu pencetus dari varian Islam itu adalah Geertz, yang mengemukakan bahwa pemeluk agama Islam terkategoriisasikan ke dalam tiga, yaitu Santri, priyayi dan Abangan.<sup>246</sup>

### 1. Relasi Agama dan Politik

Terseretnya agama dalam politik bukanlah hal yang aneh, karena secara riil pemeluk agama, khususnya pemeluk Islam, di Malang Raya merupakan pemeluk agama yang umumnya terkategoriakan Tradisional dengan tingkat kepanatikan terhadap agama yang tinggi. Dari segi kuantitas, sebagai contoh, jumlah pemeluk agama Islam di Malang Raya merupakan mayoritas, dibanding dengan agama lain seperti Kristen kira-kira hanya 5%, Katolik sekitar 4% dan Hindu dan Budha merupakan minoritas ketiga dan keempat.

Memahami tingginya korelasi agama dan partai politik, Komaruddin Hidayat dan M. Yudhi Haryono (2004), menyebutkan bahwa fenomena partai dan politik agama bisa dijelaskan dengan tiga cara: *Pertama*, agama adalah politik, atau lebih tepatnya produk politik. Berbagai fakta sejarah menunjukkan bahwa kelahiran agama (terutama agama Ibrahimian) adalah kritik perlawanan, pemberontakan, dan pembebasan dari hegemoni dan sistem politik rezim penguasa. Agama menjadi kumpulan daya kohesif yang mengikat umat untuk melakukan perlawanan. *Kedua*, agama adalah stuktur penyelamat yang menghasilkan agen

---

246 Setidaknya ada dua karya terpenting sering jadi rujukan jika membicarakan masyarakat Islam dalam konteks Indonesia. *Pertama*, *The Religion of Java* karya Clifford Geertz yang didasarkan studi di Mojokuto, sebuah desa kecil di Jawa Tengah. *Kedua*, *Indonesia Political Thinking* karya Herbert Feith dan Lance Castles yang mengacu pada koleksi tulisan sejumlah tokoh Indonesia. Kedua karya tersebut ditulis sekitar tahun 1950-1960-an. Hasil studi Geertz intinya mengungkapkan temuan trikotomi politik aliran. yaitu: Abangan, Santri, dan priyayi. Abangan adalah ciri kelompok masyarakat yang berbasis pertanian (pedalaman) dengan orientasi keagamaan tidak ketat. Santri adalah berbasis pada perdagangan (perkotaan) dengan orientasi keagamaan yang kuat. Sedang priyayi yang berbasis birokrasi berorientasi lebih kental pada warisan tradisi aristokrat atau pamong. Berbeda dengan teori Gertz, formulasi Feith mengungkap lima kutub aliran. Yaitu, Islam, Nasionalisme radikal, sosialisme, komunisme, dan Tradisionisme Jawa. Tumbuhnya kelima aliran itu dipengaruhi oleh dua sumber utama, yakni: khasanah Barat (modern) dan domestik (Hindu-Buddha dan Islam). Dari situlah mengejawantah heterogenitas partai.

penyelamatan. Agama berkaitan dengan usaha-usaha manusia untuk mengukur dalamnya makna dan keselamatan sendiri, keluarga dan keselamatan alam semesta. Karenanya agama juga telah menimbulkan khayalan yang paling luas dan digunakan untuk membenarkan kekejaman pada orang lain, membangkitkan kebahagiaan, dan menjalari rasa takut yang luar biasa, sehingga gagasan penyelamatan demikian sentral dalam setiap agama. *Ketiga*, agama adalah alat analisis sekaligus jawaban persoalan dunia. Ia adalah sumber pembaharu-pembaharu yang kreatif. Karena paradigma inilah, kita bisa melihat jejak rekam para nabi yang ditempatkan sebagai tempat bertanya sekaligus tempat menjelaskan problem umat.<sup>247</sup>

Walaupun demikian, dalam kalangan Islam sendiri tidak homogen. Banyak aliran pemikiran yang berkembang, dan pada akhirnya menjadi mainstream baru dalam mazhab pemikiran Islam. Perbedaan pemikiran ini tidak hanya dalam hal kehidupan sosial, namun juga dilatar belakangi persoalan politik. Berkembangnya perbedaan pandangan politik di dalam Islam bersumber pada perbedaan pemikiran tentang relasi Islam dan Negara.<sup>248</sup> Dalam khazanah pemikiran umat Islam, diskursus tentang Islam dan Negara memang bukan barang baru. Diskursus ini telah berlangsung sangat lama, namun sampai sekarang belum juga berakhir. Ini menandakan bahwa masalah Islam dan negara merupakan masalah laten yang akan terus mewarnai diskursus politik nasional.

Kalau kita menengok ke belakang, sejarah berdirinya partai politik Islam di inspirasi oleh adanya keinginan untuk membentuk wadah politik tunggal untuk perjuangan ummat Islam pasca kemerdekaan 1945. Sesuai dengan manifestasi politik pemerintah yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta bulan November 1945 semua golongan ummat Islam sepakat untuk membentuk suatu wadah politik tunggal yang bernama MASYUMI.

Partai Politik Masyumi ini didukung oleh organisasi-organisasi Islam besar seperti NU, Muhammadiyah, dan PSII. Akan tetapi kebersamaan ketiga ormas Islam ini mengalami perpecahan dalam

---

247 Komarudin Hidayat dan M. Yudhie Haryono, *Manuver Politik Ulama, Tafsir Kepemimpinan Islam dan Dialektika Ulama-Negara*, Jogjakarta: Jalasutra, 2004.

248 Secara epistemologis maupun ontologis ada perbedaan mendasar mengenai konsep demokrasi antara Barat dan Islam. Demokrasi Barat kosep dasarnya adalah kedaulatan rakyat, sementara dalam Islam adalah kedaulatan Tuhan.

mendukung Masyumi pada tahun 1948 dengan dibentuknya kembali Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dibawah pimpinan Arudji Kartawinata, Abikoesno Tjokrosoejoso dan lain-lain. Kemudian pada tahun 1953 disusul dengan keluarnya Nahdlatul Ulama (NU) dan menjadi partai politik sendiri. Dan akhirnya, sebagai benteng terakhir, Muhammadiyah menyatakan diri untuk tidak lagi menjadi anggota istimewa dari Masyumi sebelum partai ini dibubarkan pada tahun 1960.<sup>249</sup>

Pada masa Orde Baru partai Islam mengalami kehancuran akibat adanya fusi partai politik yang hanya membolehkan dua partai yaitu partai berhaluan agama yang diwakili PPP dan partai yang berhaluan Nasionalis yang diwakili PDI (Mohtar Mas'ood, 1994). Pada masa ini partai Islam banyak ditinggalkan konstituennya akibat adanya tekanan dan politik adopsi dari penguasa sehingga pemilih Islam banyak yang lari ke Golkar sebagai partai pemerintah. Ketika rezim Orde Baru berakhir, Partai Islam kembali berkembang. Pada pemilu 1999 tercatat ada sekitar 114 partai yang secara tegas mencantumkan Islam sebagai asas maupun yang secara sosiologis termasuk partai Islam yaitu PAN dan PKB yang berasas Pancasila. Sementara pada pemilu 2004, Partai Islam tidak sebanyak pada pemilu 1999.

## 2. Dukungan Politik Muhammadiyah dan NU

Di Indonesia dan khususnya di Malang Raya ada dua kekuatan poros besar Ormas Islam. Sebenarnya masih ada Ormas Islam selain Muhammadiyah dan NU, tapi tidak sebesar pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia jika dibandingkan dengan kedua Ormas Islam tersebut. Pada perjalanannya Ormas Islam ini juga tidak pernah lepas dari kegiatan politik Indonesia. Walaupun dalam AD/ART Ormas Islam itu tidak secara frontal menyebutkan Ormas ini terjun di dunia politik. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa baik secara langsung maupun tidak langsung Ormas Islam yang ada tidak dapat dikatakan bebas dari keterlibatan dalam dunia politik. Bisa di amati dalam perjalanan peta panggung politik di Indonesia, nama Muhammadiyah berada di belakang pendirian Partai Amanat Nasional. Demikian juga NU dengan nahdliyyinnya berada di belakang Partai Kebangkitan

---

249 Untuk lebih jelasnya bias dilihat, Moh. Sifaat Mintaredja, *Masyarakat Islam dan Politik di Indonesia*, Jakarta, Permata Jakarta, 1971.

Bangsa. Bahkan setelah muncul nama PKB ada juga PKNU yang juga mengklaim dirinya sebagai partai warga Nahdliyin (sebutan untuk warga Nahdliyat Ulama) selain Partai Kebangkitan Bangsa yang telah lebih dahulu terbentuk.

Pertama kali NU terjun ke politik secara langsung yaitu pada saat NU menyatakan keluar dari Masyumi tahun 1952, kemudian mendirikan partai politik sendiri dan ikut dalam pemilu 1955. Perolehan suara NU cukup signifikan karena meraih 45 kursi di DPR dan menjadi empat besar perolehan suara.

Semenjak memenangkan perolehan suara empat besar dalam pemilu 1955, kiprah NU dalam politik tidak begitu besar. Ketika Orde Baru yang menempatkan NU dalam satu kantong dengan PPP, banyak kader NU yang tidak menjadi wakil di parlemen. Hal ini telah menyebabkan banyak tokoh NU yang kecewa sehingga lahir satu gagasan untuk keluar dari penyangga utama suara PPP. Akhirnya pada muktamar NU di Situbondo, NU menyatakan diri untuk kembali ke khittah 1926 yaitu tidak aktif dalam politik praktis.

Secara formal, kembali ke khittah 1926, sampai terjadinya reformasi politik tidak berubah. Akan tetapi para elit NU, khususnya Gusdur membentuk PKB sebagai wadah dari aspirasi warga NU. Karena Gusdur merupakan cucu dari pendiri NU yaitu Kh. Hasyim Asari, maka banyak kyai yang menjadi pendukung PKB. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa dukungan NU pada PKB bukanlah dukungan formal organisasi, melainkan dukungan informal karena di PKB ada Gusdur yang merupakan tokoh NU.

Begitupun Muhammadiyah, setelah tidak mendukung Masyumi dan keluar dari Parmusi,<sup>250</sup> hubungannya dengan partai politik secara organisatoris sudah tidak ada lagi. Walau demikian, banyak dari kader-kader Muhammadiyah yang aktif di politik baik itu di Golkar, PPP, bahkan PDI (masa Orde Baru). Keberadaan mereka di partai politik tidak mewakili secara organisasi, tapi mewakili keberadaan mereka secara pribadi. Karena perjalanan politik Parmusi tidak baik karena banyak terjadi konflik dan perebutan kekuasaan, maka Muhammadiyah

---

250 Kelahiran Parmusi merupakan hasil dari khittah 1969 di Ponorogo. Dalam rumusan khittah tahun 1969 disebutkan bahwa dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar dilakukan melalui dua saluran: politik kenegaraan dan kemasyarakatan. Dan dengan khittah ini menjadi legitimasi Muhammadiyah untuk terjun ke politik dengan ikut mendukung kelahiran Parmusi.

memutuskan untuk keluar dari Parmusi. Dan sampai sekarang Muhammadiyah tidak pernah ikut dalam kehidupan politik praktis.

Seperti halnya NU, ketika salah satu tokoh Muhammadiyah yaitu Amin Rais mendirikan PAN, maka banyak dari kader Muhammadiyah yang ikut terjun dalam kepengurusan PAN baik di pusat maupun di daerah. Bahkan di Malang Raya terbentuknya kepengurusan PAN, hampir semuanya dimotori oleh kader-kader Muhammadiyah. Partai Amanat Nasional kota Malang digagas untuk didirikan pada tanggal 29 Agustus 1998 di Kantor Muhammadiyah kota Malang, difasilitasi oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Malang, dan gagasan mendirikan partai ini adalah hasil dari forum silaturahmi yang menghadirkan berbagai komponen Muhammadiyah seperti Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Pimpinan Cabang Muhammadiyah, Organisasi otonom tingkat daerah seperti: Aissyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Tapak Suci, Ikatan Remaja Muhammadiyah dan mereka yang peduli dan mau berkiprah di kancah perpolitikan di kota Malang.<sup>251</sup>

Walaupun demikian, tidak semua warga Muhammadiyah setuju dan ikut PAN, karena banyak warga Muhammadiyah yang menyangsikan dalam hal ideologi karena PAN tidak mencantumkan Islam sebagai asas partai. Pada pemilu 2004 dan 2009 karena menganggap PAN tidak jelas ideologinya, maka banyak warga Muhammadiyah yang mengalihkan pilihan politiknya ke PKS yang dianggap lebih islami. Di samping itu animo yang berkembang dikalangan warga Muhammadiyah sendiri, bahwa warga Muhammadiyah yang terlibat di PAN itu lebih banyak mewakili perorangan. Mereka yang duduk di legislatif yang diharapkan mampu membawa aspirasi Muhammadiyah ternyata tidak begitu memberikan banyak pengaruh terhadap perkembangan Muhammadiyah. Lebih jauh, warga Muhammadiyah, khususnya perorangan yang ada di Legislatif dalam perjalanannya mereka menjadi wakil rakyat terkesan tidak punya citra positif di kalangan warga Muhammadiyah.

### **3. Figur Kharismatik: Simbolisasi Ideologi Partai**

Kedekatan secara emosional terhadap pemimpin, tokoh, atau figur nasional dari partai politik tertentu dalam pemilu pasca reformasi

251 Jaenuri, konflik elit di Partai Amanat Nasional, Tesis S-2, 2008.

cukup menonjol dalam kesuksesan partai meraih suara. Tokoh-tokoh yang relatif dikenal luas secara nasional adalah variabel yang relatif independen untuk menarik massa agar memilih partai di mana sang tokoh merupakan pimpinan di partai tersebut. Orang memilih Golkar, PDI-P, PKB, PAN, PPP, PBB, dan lain-lain bukan karena daya tarik partai-partai itu sendiri, tapi lebih karena ada tokoh-tokoh karismatis terlibat di puncak kepemimpinan partai.

Pada pemilu 1999, Habibie yang merupakan putra Sulawesi telah mendorong perolehan suara Golkar di Sulawesi dibanding dari daerah-daerah lain, termasuk dari Jawa. Keunggulan PDI-P atas partai-partai lain yang punya kesamaan historis dan sosiologis seperti PDI Budi Hardjono, PNI Supeni, PNI Marhaen, dan lain-lain juga karena ketokohan Megawati sebagai Putri Soekarno. Selain itu, Megawati merupakan tokoh yang sangat tidak diuntungkan sepanjang sejarah politik Orde Baru yang secara nasional mendapat ekspos cukup besar dari media massa.<sup>252</sup> Kemenangan PAN relatif terhadap partai-partai Muslim modernis lain seperti PBB, PK, Partai Masyumi, sebagian besar dapat dijelaskan dengan kehadiran Amien Rais sebagai tokoh nasional di puncak kepemimpinan partai tersebut.<sup>253</sup> Keunggulan pengumpulan suara PKB dibanding partai-partai NU yang lain seperti PNU, PKU, dan Partai Suni, dan bahkan PPP sendiri, merupakan hasil dari ketokohan Gus Dur di partai tersebut, bukan karena faktor ke-NU-an itu sendiri.<sup>254</sup>

---

252 Pada masa pemerintahan Orde Baru, walaupun PDI masih diberi kesempatan untuk ikut maju sebagai konestestan pemilu, namun keberadaan PDI tidak boleh berkembang. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Orde Baru adalah dengan mengeliminir keberadaan keluarga Soekarno dalam kepengurusan, termasuk Megawati. Oleh karena itu, ketika megawati terpilih menjadi pimpinan PDI menggantikan ketua lama Soerjadi, maka pemerintah berusaha untuk menggagalkannya dengan cara membuat Munas tandingan. Peristiwa yang terkenal proses penggusuran kepemimpinan Megawati, adalah peristiwa kudeta satu Juli yang dikenal dengan peristiwa "kuda tuli". Dalam peristiwa ini menurut beberapa sumber telah terjadi korban yang cukup banyak, namun secara pasti angka berapa jumlah pastinya tidak ada data yang pasti.

253 Amin Rais adalah tokoh repormasi yang berjuang bersama Mahasiswa untuk menuntut Presiden Soeharto lengser. Setelah reformasi bergulir, Amin Rais memprakarsai lahirnya PAN. Karena figur Amin Rais inilah maka PAN dalam pemilu Legislatif 1999 punya dukungan yang cukup luas, khususnya di kalangan Santri Mordernis (Muhammadiyah) karena memang Amin Rais Merupakan mantan Pinpinan Pusat Muhammadiyah, selain bersatu sebagai dosen Ilmu Politik Jurusan Hubungan Internasional UGM.

254 Gus Dur terkenal sebagai tokoh populis, dan banyak yang lebih menyebutnya seniman ketimbang kyai. Selama memimpin NU, Gus Dur terkenal dengan gerakan-gerakan politiknya yang kerap mengundang konstroversi, termasuk menarik dukungannya terhadap PPP pada saat dipimpin Idham Khalid, dan bergandengan dengan Golkar. Menurut Bruinessen, pengaruh pengembosan NU atas perolehan suara PPP dalam pemilu ternyata

Sebab kalau ke-NU-an itu sendiri yang dominan, maka partai-partai NU yang lain juga akan mendapat suara yang cukup hingga PKB tidak keluar sebagai partai NU yang besarnya mencolok dibanding partai-partai NU yang lain. Begitu juga keberadaan Susilo Bambang Yudhoyono, yang merupakan figur sentral dari keberadaan Partai Demokrat.<sup>255</sup>

Karena Partai Demokrat sangat diwarnai oleh popularitas SBY, maka citra Partai Demokrat, sangat bergantung dari naik dan turunnya citra SBY. Hal ini sangat disadari oleh para kader Partai Demokrat di Malang Raya, dimana saat tahun 2004 orang terbius oleh yang namanya SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Untuk mempertahankan suara yang diperolehnya, para kader Partai Demokrat berusaha mensosialisasikan siapa itu SBY, dan keberhasilan-keberhasilan pemerintah yang merupakan nilai positif bagi Presiden SBY, dengan harapan punya imbasan pada citra Partai Demokrat.

Keadaan tokoh atau figur populer ini sebenarnya bisa dijelaskan dengan konsep kepemimpinan kharismatik, serta budaya paternalis di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya Jawa.<sup>256</sup> Untuk beberapa pemilu ke depan, kekuatan partai politik di Tanah Air akan banyak ditentukan sejauh mana partai-partai tersebut mampu melakukan *recruitment* terhadap tokoh-tokoh yang populer di mata massa pemilih.

---

dramatis. Pada tiga pemilu sebelumnya, suara PPP tetap kurang lebih stabil. Pada pemilu 1971 keempat Partai Islam memperoleh 27,1 % (dua pertiga di antaranya untuk NU), pada tahun 1977 pun ada penambahan tipis menjadi 27,8%, dan pada tahun 1982 turun sedikit. Akan tetapi, pada tahun 1987, perolehan suara PPP menurun menjadi 16 %. Lebih jelasnya lihat Martin Van Bruinessen, NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana baru. Yogyakarta : LKIS, 1994.

255 Kasus pemilu 2004, besarnya perolehan suara Partai Demokrat juga berkat dari figur Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebagai figur yang berlatar belakang militer dan juga punya hubungan dengan Sarwo Edi sebagai mertua, yang pernah berjasa dalam penumpasan gerakan 30.S/PKI. Bahkan dengan perolehan suara 7 % telah menghantarkan SBY menjadi Presiden terpilih langsung pertama pada pilpres 2004.

256 Studi yang paling awal mengenai masyarakat Jawa, khususnya masyarakat desa Jawa, menunjukkan peran menentukan dari kepemimpinan dalam membentuk perilaku individu. Karya Feith (1962-3), Geertz (1960a,1960b, 1965), Hofstede (1971), Robert Jay (1963, 1969), Kuncaraningrat (1967, 1985), dan Sartono Kartodirjo (1966, 1972, dan 1984) tidak hanya menunjukkan satu kasus. Masyarakat Jawa umumnya memahami masyarakat dalam dua pembilahan, yaitu wong gedhe orang berpengaruh dan wong cilik orang pada umumnya. Wong gedhe umumnya dipahami sebagai pemimpin yang punya sudut pandang yang sama sebagaimana orientasi masyarakat kota, "orang pintar", "pengambil keputusan yang efektif" dan "mempunyai kewenangan dalam kehidupan lokal." Sementara wong cilik disisi lain merupakan pengikut yang hanya dipahami sebagai orang pasif dan masa bodoh, dan "orang yang tidak mengerti". Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam Geertz, Clifford, *The Religion of Java* (Glencoe : The Free Press, 1960), lihat juga Afan Gaffar, *Javanese Voters, A Case Study of Election Under s Hegemonic Party System*, (Jogjakarta: Gadjah Mada University Press, 1992).

Kemampuan elite partai untuk membangun citra positif terhadap tokoh partai dan kemampuan untuk mensosialisasikan citra yang positif ini secara massif lewat media massa merupakan poin krusial bagi perkembangan dan kekuatan partai saat ini.<sup>257</sup> Ketokohan tetap merupakan faktor krusial, dan setidaknya dalam jangka pendek dan menengah ketokohan akan menjadi tulang punggung untuk menarik massa pemilih di Malang Raya, khususnya bagi partai yang tidak punya basis pemilih tradisional yang jelas.

### C. Menurunnya Image Partai

John F. Bibby (1992) menyebutkan ada enam fungsi dari partai politik. Fungsi-fungsi tersebut salah satunya antara lain *servicing as intermediaries*, yaitu sebagai penghubung atau mekanisme penghubung antara warga Negara dengan pemerintah. Fungsi ini sangat fundamental didalam negara demokrasi karena menjadi mekanisme penghubungan antara masyarakat dengan pemerintahannya.<sup>258</sup> Ketika partai politik tidak bisa menjalankan fungsi ini, maka logikanya konstituen mereka akan meninggalkan pada pemilu berikutnya. Banyak pemilih yang kecewa dengan partai yang mereka pilih, namun mereka tetap memilih partai tersebut dikarenakan kuatnya pengaruh kelompok seideologis. Akan tetapi ada juga pemilih yang melakukan protes terhadap partai yang tidak bisa mengartikulasikan kepentingannya dengan cara bersikap pragmatis dalam pemilu.

---

257 Pengkajian mengenai media massa dengan pemilihan umum belum banyak dilakukan di Indonesia. Namun setidaknya terdapat dua studi yang mencoba mengungkapkan peranan media massa sebagai sarana komunikasi politik, khususnya pada saat kampanye pemilihan umum. Pengkajian pertama yang perlu dicatat adalah studi yang dilakukan Fakultas Publishing Bandung (Sutanto, dalam Jackson (ed), 1978) yang meneliti isi pemberitaan surat kabar harian "kompas" (mewakili surat kabar Pusat) dan "harian Rakyat" mewakili surat kabar daerah selama tiga bulan menjelang pemilihan umum 1971. Studi tersebut bermaksud melakukan analisis dengan dua tahap. Pertama, menghitung frekwensi pemberitaan tentang pemilihan umum dan menghitung rata-rata setiap surat kabar. Kedua, presentase luas kolom (yang dihitung dengan centimeter) dari kedua surat kabar tersebut. Studi tersebut mengungkapkan bahwa surat kabar "pikiran Rakyat" lebih sering memberitakan tentang pemilihan umum dibanding dengan harian "kompas". Selain itu studi tersebut mengungkapkan pula, kedua harian mempergunakan berita yang berdeda. Kompas lebih mengandalkan sumber berita melalui wartawan-wartawannya, dedangkan hatian "pikiran rakyat" mengandalkan kantor berita (*news agency*). Perbedaan lain terjadi pula dalam hal jenis laporan berita. Surat kabar pusat lebih memusatkan pada feature dan artikel utama (lead article). Sementara itu surat kabar daerah hampir seluruhnya jenis berita langsung straight news stories. Lihat J.Kristiadi, *Pemilihan Umum dan Pemilih*, Desertasi Doktor Di Universitas Gadjah Mada, 1994.

258 John F. Bibby, *Politics, Parties, and election in America*, Chicago: Nelson-Hall Publisher, 1992. terutama halaman. 5.



Berdasar pada teori *Restrospective Voting*,<sup>259</sup> pemilih tidak peduli dengan isu yang disampaikan oleh partai politik, bagi mereka justru kinerja partailah yang mereka akan dilihat. Apabila pemilih menganggap partai tersebut gagal dalam menjalankan pemerintahan, atau tidak mampu mengemban aspirasi mereka, maka ketidakmampuan tersebut akan menjadi landasan bagi pemilih untuk tidak memilihnya pada pemilu berikutnya.

### 1. Kasus-kasus yang menjadi Sorotan Publik

Ada dua kasus yang perlu disampaikan, karena kedua kasus ini sangat mendapat perhatian dari publik. Pertama kasus pelanggaran RTRW di Kota Malang, dan kedua kasus PHK massal karyawan PT Wastra Indah. Kedua kasus tersebut sempat menjadi polemik karena keduanya mempunyai dampak langsung pada kepentingan masyarakat. Pembangunan *Malang Town Square* (Matos), selain terjadinya indikasi korupsi, namun hal yang paling menjadi perhatian adalah tempat pembangunan matos tersebut menempati areal Ruang Terbuka Hijau dan pendidikan. Sementara PHK massal karyawan PT Wastra Indah di Kota Batu menjadi menarik, karena Pimpinan tertinggi dari managemennya dianggap orang yang punya kaitan dengan Golkar.

#### a. Kasus Pelanggaran RTRW: Pembangunan Matos dan MOG

Kasus yang paling mendapatkan perhatian publik, khususnya di Kota Malang, selain penyalahgunaan wewenang dan korupsi di Dewan, adalah pelanggaran RUTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Dalam Perda RTRW No 7 Tahun 2001, yang berlaku hingga tahun 2010 banyak terjadi penyimpangan dengan pelaksanaan pembangunan di Kota Malang. Perda tersebut lebih banyak dilanggar daripada dipatuhi dan dijadikan acuan pembangunan. Beberapa kawasan RTH yang beralihfungsinya itu di antaranya adalah eks lahan Akademi Penyuluh Pertanian (APP) Tanjung yang menjadi paru-paru kota berubah menjadi kawasan perumahan mewah dan *Malang Town Square* (Matos) di Jalan Veteran. Selain itu, sebagian lahan di kawasan Stadion Gajayana juga berubah menjadi mol, *Malang Olympic Garden* (MOG), lahan resapan Pulosari berubah menjadi Hero Swalayan serta beberapa taman kota yang berubah menjadi gedung atau perkantoran.

259 Lihat Morris P. Fiorina, *Restrospective Voting in American National Elections*, America: Yale University, 1981.

Pembangunan pusat perbelanjaan berskala regional MATOS (*Malang Town Square*) di Kota Malang yang berdiri diantara banyak lembaga pendidikan, dari Sekolah Dasar (SD) sampai Perguruan Tinggi (PT) mengundang banyak kritik dari berbagai pihak, terutama dari pemerhati dan praktisi pendidikan serta dari aktivis lingkungan. Hal ini dikarenakan pembangunan MATOS tersebut melanggar Perda No. 07 tahun 2001 tentang Rencana Tata ruang dan wilayah karena menempati ruang yang semestinya merupakan ruang untuk pengembangan pendidikan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Selain itu juga melanggar menurut Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Hayati dan Ekosistem harus dilindungi keberadaannya. Ketentuan itu juga diatur dalam INMENDAGRI Nomor 24 tahun 1985 yang menyatakan adanya larangan untuk perubahan fungsi tanah bengkok, taman kota, kebun binatang dan lapangan olahraga; yang diperjelas lagi dengan INMENDAGRI No. 14 tahun 1988 yang berisi tentang instruksi kepada Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan pengelolaan dan pengendalian dalam rangka meningkatkan fungsi dan peran ruang terbuka hijau kota, dengan melarang adanya perubahan penggunaan RTH (Ruang Terbuka Hijau) untuk kepentingan lain. Dengan dibanggunnya MATOS maka ruang terbuka hijau (RTH) yang mempunyai fungsi sebagai paru-paru Kota dan penyangga ekosistem menjadi hilang.

Kontroversi pembangunan pusat perbelanjaan berskala regional MATOS, bermula ketika pada tahun 1993 terjadi ruislagh tanah antara Akademi Penyuluhan Pertanian (APP) yang terletak di Kelurahan Tanjung (akan dibangun Perumahan) dan di Jl. Penanggungan (Saat itu sedang dibangun pusat perbelanjaan MATOS) dengan PT Bangun Karsa Bentala yang bermitra kerja dengan PT Duta Perkasa Unggul Lestari/PT DPUL.<sup>260</sup>

---

260 Ikhwan Fahroji, SH, Staf Komisi Hukum Nasional (KHN) menyampaikan bahwa dalam proses pembangunan Matos ada beberapa persoalan yang bisa mengindikasikan kasus korupsi, antara lain: *Pertama*, Aset negara dinilai dengan harga yang murah. Kampus APP Malang jurusan Pertanian (Tanjung) pada tahun 1990 pernah ditawarkan oleh PT Gudang Garam Kediri senilai Rp. 53,5 Milyar. Namun Direktur APP/SNAKMA bapak Ir. Soemarjo pada saat itu menolak mengingat pentingnya APP/SNAKMA bagi kelestarian lingkungan Kota. Namun ruislagh yang terjadi antara APP dengan PT Bangun Karsa Bentala pada tahun 1993 hanya dihargai sebesar Rp. 23, 5 Milyar. *Kedua*, Ruislagh tidak berdasarkan harga tertinggi yang menguntungkan, melainkan menggunakan nilai rata-rata antara harga terendah dan harga tertinggi sebagaimana tercantum dalam NJOP. Selisih harga tersebut menurut hasil

Selanjutnya terkait dengan pembangunan MOG, berdasarkan pada Rapat Paripurna DPRD Kota Malang pada tanggal 22 September 2006 dengan agenda penyampaian pendapat Fraksi DPRD Kota Malang terhadap persetujuan kerjasama antara Pemkot Malang dengan PT. Mustika Olympic dalam rangka optimalisasi kawasan Stadion Gajayana Malang menjadi suatu kawasan olah raga terpadu lengkap dengan berbagai sarana dan prasarana, menghasilkan keputusan sebagai berikut: Fraksi Kebangkitan Bangsa dapat menerima dan menyetujui; Fraksi Demokrat mendukung dengan beberapa catatan; Fraksi Partai Golkar dapat menyetujui dengan beberapa catatan; Fraksi Keadilan Sejahtera belum dapat menerima dan menyetujui; Fraksi Amanat Nasional rancangan perjanjian kerja sama dapat diteruskan menjadi perjanjian kerja sama. Dilihat dari pendapat fraksi tersebut kita dapat melihat bahwa hampir semua fraksi tidak ada yang menolak kecuali Fraksi Keadilan Sejahtera. Dari hasil pelaksanaan voting didapat hasil 39 suara setuju dan 5 suara tidak setuju dan tidak ada yang abstain.

#### **b. Kasus Hubungan Kerja: PHK Massal Pegawai Wastra Indah di Kota Batu**

Kasus ini bermula dari rontoknya kerajaan bisnis PT Texmaco akibat terimbas krisis moneter yang melanda Indonesia. PT Texmaco merupakan kerajaan bisnis milik seorang taipan asal India, Marimutu Sinivasan. Sinivasan merupakan orang yang punya hubungan dekat dengan petinggi Golkar ketika Orde Baru, oleh karena itu dia dapat dengan mudah mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan. Namun setelah rezim Orde Baru berakhir, kondisinya menjadi lain, karena PT Texmaco tidak lagi bisa dengan mudah mendapatkan

---

penelitian Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencapai Rp. 25 Milyar artinya negara telah dirugikan sejumlah Rp. 25 Milyar. Sedangkan menurut Irjen Departemen Pertanian akibat selisih tersebut negara dirugikan sebesar Rp. 16 Milyar. Hal itu jelas tidak sesuai dengan surat izin pemindahan DIKLAT APP Malang dari Menteri Keuangan RI Nomor : S-3130/A/45/0792 yang mengaskan bahwa nilai asset pengganti dari pihak ketiga harus menguntungkan negara cq. Departemen Pertanian dan dapat meningkatkan daya guna demi kepentingan Departemen Pertanian. Demikian juga dalam Surat Menteri Negara Agraria Nomor 500-468 perihal masalah ruislagh tanah-tanah pemerintah pada tanggal, 12 Februari 1996 point 4 dinyatakan bahwa : "Dalam kaitannya dengan masalah pertanahan, setelah diproses ijin dan Menteri Keuangan dan telah ditetapkan keanggotaan Panitia Penaksir, dalam pelaksanaan penafsiran tanahnya digunakan komponen nilai harga yang ada, yaitu harga dasar, NJOP dan harga umum (dari PPAT) diambil angka tertinggi." *Ketiga*, Ada indikasi terjadi penurunan nilai antara nilai penawaran dalam tender dengan akta perjanjian tukar menukar tanah dan bangunan, serta dalam realisasi asset pengganti. <http://siap-bos.blogspot.com/2009>.

kucuran dana.<sup>261</sup> Kondisi inilah yang membuat PT Texmaco mengalami kebangkrutan dan menjadi persoalan lanjutan terkait PHK massal di seluruh anak perusahaannya yang menyisakan masalah.

Pegawai Wastra Indahdi Kota Batu yang merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Texmaco juga kena imbas dari krisis keuangan PT Texmaco, akhirnya semua karyawan Wastra Indah ini dirumahkan dan pada akhirnya kena PHK massal. Persolaan muncul karena manajemen Wastra Indah tidak bisa memenuhi hak-hak karyawannya yang kena PHK. Kasus ini terus berlarut-larut, karena tidak ada titik temu walaupun sudah dilakukan penyelesaian lewat rapat tripartiat.<sup>262</sup>

Sebelum terjadinya PHK massal, menurut Suwardi, Ketua SPSI Unit Kerja PT WI didampingi Korlap Tim Peduli Buruh PT WI, Andi Haryadi semalam mengungkapkan, tanggungan manajemen PT WI yang belum dibayarkan kepada buruh dan karyawan adalah pembayaran gaji karyawan dan upah buruh Januari-April sebesar Rp 6 miliar, dana Jamsostek Rp 1,6 miliar dan pembayaran koperasi sebesar Rp 540 juta serta dana kematian sebesar Rp 500 juta.<sup>263</sup>

Karena proses penyelesaian tidak ketemu, akhirnya 2.340 buruh dan karyawan pabrik tekstil PT Wastra Indah (WI), di Jalan Panglima Sudirman, Kota Batu, Jatim, yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhitung mulai 1 Mei mendatang, sejak Rabu (21/4) pekan lalu hingga Kamis (29/4) tadi pagi terus melakukan pendudukan di lokasi pabrik. Bahkan sekitar 300 buruh dan karyawan lainnya mengepung rumah tinggal Dirut PT WI, Drs Sivabalan, di Jalan Flamboyan. Untuk mendukung keberadaan para karyawan itu tetap di dua lokasi terpisah itu, mereka mendirikan posko yang dilengkapi dapur umum.<sup>264</sup>

---

261 Pengerukan uang rakyat dari kucuran dana hutang nampaknya telah menjadi PROFESI dari Manajemen Texmaco Group, terbukti dari ketidakpedulian Manajemen untuk melakukan perbaikan-perbaikan di dalam perusahaan ataupun paling tidak melakukan pengiritan biaya dengan memulangkan Expatriat. Setiap kali terjadi kekurangan modal kerja (yang tentunya akibat dari pemborosan tersebut), penyelesaian yang dilakukan selalu melalui pendekatan politik uang ke pejabat negara agar memberikan kucuran hutang terus menerus. Bahkan kali ini mereka tidak malu-malu menggunakan keroncongan perut 40.000 karyawannya untuk mendapatkan kucuran hutang lagi. <http://forteks.wordpress.com/2008>.

262 Dalam rapat tripartit, Jumat (23/4) lalu, pihak manajemen PT WI sudah menetapkan, mulai 1 Mei seluruh karyawan dan buruhnya akan di PHK uang pesangon satu kali PMTK. Keputusan manajemen PT Texmaco (induk PT WI) itu, ditolak para wakil buruh dan karyawan yang tetap menuntut pesangon dua kali PMTK dibayarkan sekaligus (tunai) serta harus didahului dengan pembayaran upah empat bulan terakhir. Suara Pembaruan 2004

263 Suara Pembaruan, 2004

264 Suara Pembaruan, 2004

Karena persoalan penyelesaian hak tenaga kerja PT Wastra Indah tidak kunjung selesai, Ketua DPRD Kota Batu Mashuri Abdulrochim mengusulkan untuk membentuk panitia khusus (pansus). Namun usulan ini ditolak oleh karyawan karena jika melalui pansus, selain membutuhkan waktu sedikitnya tiga bulan dan yang didapat hanyalah berupa rekomendasi.<sup>265</sup>

## **2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Kinerja Partai**

### **a. Tidak Berjalannya Pendidikan Politik**

Salah satu peran dari partai politik yang banyak dilupakan adalah pendidikan politik. Kebanyakan partai-partai yang ada lebih menekankan pada solidaritas serta konsistensi dari pemilih terhadap partai mereka masing-masing, tanpa menyentuh sisi pencerahan bagi konstituen. Hal ini sebagai wujud dari upaya partai politik dalam mengamankan basis konstituennya agar tidak lari ke partai lain. Ketakutan dari partai politik untuk melakukan pendidikan politik pada masyarakat disebabkan oleh karena partai yang dibangun adalah partai yang tumbuh dalam pondasi sektarian.<sup>266</sup> Partai politik di negara kita cenderung memupuk dan memperkuat identifikasi konstituen mereka masing-masing baik mereka yang berhaluan Nasionalis maupun Islam.

Memasuki pemilu 2009, banyak partai politik yang sudah berusaha memberikan pendidikan politik pada masyarakat dengan cara memberikan gambaran tentang peran dan fungsi partai politik. Hal ini dilakukan oleh partai politik yang umumnya partai politik yang merasa tidak punya basis massa yang jelas, dan ketakutan dengan realitas pemilih yang sudah sangat transaksional dalam berhubungan dengan partai politik. Adapun partai-partai besar lebih banyak disibukan dengan program-program yang menggambarkan kepedulian kepada

265 Menurut saya, penolakan karyawan PT Wastra Indah terhadap Mashuri sebagai Ketua Dewan Kota batu untuk membentuk pansus juga karena di Kota Batu sudah berkembang bahwa bos manajemen PT WI ini merupakan orang yang penya kedekatan dengan Golkar.

266 Hasil observasi yang dilakukan selama penelitian ini dilakukan, menunjukan bahwa umumnya partai politik lebih menekankan pada penguatan identitas kelompok dengan mempertegas simbol-simbol kelompok guna memperkuat solidaritas diantara mereka. PDIP dalam rangka memperkuat identitas kelompoknya, elit partai berusaha tetap mendukung dan melestarikan simbol-simbol wong cilik baik dari kesenian seperti Jaran Kepang (jaranan) maupun Bantengan, atau pun simbolisasi ideologi Marhaen yang ada dalam keluarga Soekarno. Begitu Juga PKB, simbol-simbol kelompok, khususnya kelompok Santri Tradisional (NU) menjadi daya tarik utama, sehingga terus dilestarikan dengan cara tatap masuk unsur kyai dalam struktur kepemimpinan PKB, baik di tingkat pusat maupun daerah.

basis mereka dengan cara yang jauh dari mendidik. Partai yang berbasis Islam banyak melakukan program yang lebih berorientasi pada aktivitas atau kegiatan yang relevan dengan kelompok keagamaan seperti pengajian, tahlilan, istigosahan, yang banyak dilakukan oleh kalangan Santri Tradisional.

Di sisi lain, partai politik yang berbasis Nasionalis untuk mendekatkan diri dengan konstituennya lebih condong untuk membuat program yang sifatnya menghibur dengan dalih untuk menyenangkan masyarakat yang menurut mereka lebih banyak dari kalangan wong cilik. Kesadaran akan hak dan kewajiban warga maupun partai politik tidak banyak disentuh. Kegiatan partai yang sering dilakukan hanyalah kegiatan hiburan terutama pada saat merayakan hari besar Nasional seperti peringatan kemerdekaan tanggal 17 Agustus.

Kondisi tersebut tidak lepas dari realitas pemilih yang masih berbasis primordialitas dan juga partai juga dibangun dalam pondasi sektarian. Dalam kondisi seperti ini sangat sulit melakukan komunikasi politik pada konstituennya dengan bersandar pada platform partai yang lebih rasional dan kongkrit sebagai wujud dari tanggung jawab partai terhadap masyarakat. Komunikasi yang dibangun oleh partai politik, menunjukkan sebagai berikut: *Pertama*, para tokoh partai politik yang bernaung dalam partai berhaluan Nasionalis jarang berkomunikasi langsung dengan konstituennya dalam bahasa verbal. Mereka lebih banyak menyatu dan melebur dengan konstituennya sambil mendukung pola perilaku dan budaya yang merupakan ciri khas dari kelompok Abangan yang selalu identik dengan pesta rakyat. Pesta rakyat ini biasanya diisi dengan berbagai kegiatan dan atraksi yang merupakan ciri khas kelompok Nasionalis (Abangan) yang umumnya berasal dari kalangan masyarakat kecil (*wong cilik*). *Kedua*, bagi partai Islam atau partai yang punya kedekatan dengan pemilih Islam, logika dan bahasa agama lebih banyak ditonjolkan oleh partai politik. Begitu pun media yang dipergunakan tidak jarang menggunakan simbol-simbol agama seperti Mesjid, Langgar maupun kegiatan ritual keagamaan dari mulai tahlilan, pengajian, maupun khajatan dan lain-lain. Komunikasi yang dibangun pun hanya komunikasi satu arah, karena tujuan komunikasi yang mereka lakukan bukan untuk pendidikan politik tapi untuk memperjelas identifikasi politik serta memperkokoh kekuasaan elit politik yang umumnya merangkap sebagai tokoh agama.

Sukar dinafikkan rendahnya kesadaran partai politik melakukan pendidikan politik ini telah mempengaruhi kualitas demokrasi yang dihasilkan. Banyaknya konflik dalam pemilu baik secara vertikal maupun horizontal yang disertai dengan tindakan anarkisme adalah bukti masih rendahnya pendidikan politik masyarakat kita. Bahkan rendahnya kualitas pendidikan politik masyarakat ini sengaja dibiarkan, agar elite partai mudah memobilisasi dukungan untuk kepentingannya.<sup>267</sup>

#### **b. Tidak Berfungsinya Partai sebagai Artikulator Kepentingan**

Selama ini agregasi politik banyak diwakili langsung oleh para anggota legislatif, mereka bertindak sebagai “wali” bukan “delegasi”.<sup>268</sup> Praktik demikian akan baik apabila para anggota dewan benar-benar tahu dan merasakan apa yang diinginkan masyarakat. Namun pada kenyataannya banyak anggota dewan yang mengatasnamakan rakyat, akan tetapi kebijakannya justru lebih condong untuk kepentingannya sendiri atau lebih jauh untuk kepentingan partainya. Sebagai contoh. PDI-P yang banyak disebut sebagai partai Nasionalis, dalam prakteknya tidak diterjemahkan dalam wujud kongkrit seperti Nasionalisme ekonomi, politik, dan budaya. Demikian pula partai Islam dan partai modern seperti Partai Golkar.

267 Partai Politik seharusnya melakukan apa yang idealnya dikerjakan sebuah partai yang sehat, yaitu pendidikan politik bagi para kadernya untuk menyiapkan dan mencetak calon pemimpin partai serta bermanfaat bagi masyarakat. Apabila hal ini terus terjadi, politisi yang dihasilkan parpol adalah mereka yang tidak memberikan empati kepada masyarakat. Sebenarnya keberhasilan partai politik terletak pada konsistensi dan komitmen Parpol terhadap mekanisme pendidikan politik. Melalui pendidikan politik yang sehat diharapkan terbentuk loyalitas serta militansi kader calon figur pemimpin eksekutif, legislatif terhadap partai dan diimbangi oleh loyalitas kepada visi, misi dan program partai sesuai dengan aturan dan mekanisme yang demokratis. Parpol harus sesuai mekanisme kaderisasi internal partai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat.

268 Menurut Heywood (1997) tidak ada satu kesepakatan mengenai teori representasi. Paling tidak istilah representasi mempunyai empat implikasi: *Pertama*, mewakili berarti sebuah kepercayaan, seseorang yang ditetapkan tanggung jawab formal bagi kepentingan orang lain. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Edmund Burke (1729-1797), yang berpendapat bahwa perwakilan melayani konstituen mereka dengan cara memikirkan diri mereka dengan mempergunakan pertimbangan matang sendiri. *Kedua*, representasi merupakan delegasi, yaitu seseorang yang dipilih untuk bertindak mewakili orang lain atas dasar arahan yang jelas. Delegasi merupakan penyambung tidakan atau pandangan orang lain tanpa di masuki atau dipengaruhi pendapat pribadi. *Ketiga*, wakil adalah orang yang membawa mandat, yang telah dijanjikan dalam sebuah pemilu. Dalam teori ini lebih menunjuk pada partai politik dari pada politisi secara individu yang merupakan agen dasar dalam perwakilan. *Keempat*, mewakili mirip seperti sebuah kelompok atau orang yang menyatakan diri sebagai wakil, yang umumnya datang dari kelompok mereka sendiri. Pandangan ini diwujudkan dalam ide mengenai “*representative cross-section*”, dan secara tidak langsung bahwa sebuah pemerintahan atau parlemen yang mewakili merupakan miniatur dari masyarakat yang

Sebagai organisasi politik, partai merepresentasikan berbagai aspirasi, kepentingan, dan ideologi yang ada dalam masyarakat. Melalui partai, semua aspirasi, kepentingan, dan ideologi diagregasikan menjadi sebuah kebijakan publik. Ketidakjelasan sikap parpol terhadap pemerintah barangkali merefleksikan ketidakkonsistenan partai menjaga haluan perjuangannya. Semangat perjuangan yang biasanya lekat dengan ideologi yang dibawa bisa saja berubah, bergantung kepentingan partai yang ditawarkan. Padahal peran partai seharusnya memperjuangkan aspirasi masyarakat yang lebih utama bukan memperjuangkan kepentingan partai atau elit partai.<sup>269</sup>

Tingkat kekritisian parpol, khususnya di Malang Raya, dalam mengevaluasi kebijakan-kebijakan pemerintah melemah, terbukti dari lolosnya proyek pembangunan *Malang Town Square Garden* (Matos) yang menjadi kontroversi dalam masyarakat Kota Malang karena menempati lahan hijau (area resapan air hujan).<sup>270</sup> Hal ini menunjukkan bahwa sikap partai-partai besar — terutama yang terkooptasi oleh pemerintah — yang lebih banyak mengambil posisi sebagai mitra pemerintah. Perjalanan parpol di Malang Raya yang lebih banyak diwarnai dengan persaingan untuk mendapatkan kekuasaan. Masih sedikit — bahkan hampir tak ada — partai yang mau menempatkan dirinya sebagai agregator kepentingan masyarakat. Partai-partai politik tampaknya berdiri hanya dengan satu tujuan, yaitu “kekuasaan”. Kegairahan dalam mengartikulasikan kepentingan masyarakat nyaris tak tampak.

Implikasi lebih jauh dari kondisi tersebut, para kader politik baik yang ada di legislatif maupun yang ada di eksekutif banyak yang terlibat korupsi.<sup>271</sup> Dewan Perwakilan Rakyat berperilaku korup. Para anggota

---

lebih luas, yang berisikan anggota-anggota yang menggambarkan dari semua kelompok atau bagian dari masyarakat, dan dalam segi jumlah mewakili secara proporsional berdasarkan besarnya kelompok dalam masyarakat secara keseluruhan.

269 Sebagian besar responden yang diwawancarai pada bulan Februari 2007 menganggap parpol telah lupa dengan konstituennya, karena tidak pernah memperjuangkan aspirasi mereka. Bahkan menurut mereka, partai dan elit partai hanya mementingkan kepentingannya sendiri, sehingga marak korupsi yang dilakukan oleh Anggota Dewan.

270 Pembangunan *Malang Town Square Garden* (matos), sempat menjadi polemik, karena berdasarkan pada Rancangan Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Kota Malang, Daerah tersebut masuk dalam area pendidikan. Namun pembangunan Matos tersebut tetap diteruskan walaupun melanggar RUTRW. Baru pada tahun 2009 RUTRW direncanakan akan dilakukan revisi. Hasil wawancara dengan Kondinator MCW, Lufti J. Kurniawan, pada bulan Maret Tahun 2006 di Kampus UMM.

271 Korupsi yang dilakukan anggota dewan, khususnya di Kota Malang, banyak yang terkait dengan penyelewengan program jaring aspirasi masyarakat (jaring asmara). Di antara



Dewan seperti berlomba untuk menguras keuangan negara, sementara rakyat hanya jadi penonton dan kadang berlaku sinis karena mereka berlaku mewah sementara rakyat harus hidup melarat.<sup>272</sup>

### c. Rekrutmen Politik yang Bersifat Nepotisme

Ichlasul Amal (1988), ideologi dan kepentingan merupakan basis sosiologis yang selalu menggerakkan parpol pada usaha-usaha untuk memperoleh kekuasaan. Pemanfaatan partai politik (parpol) sebagai kendaraan untuk mencapai kekuasaan sebenarnya merupakan hal wajar dalam kehidupan politik. Parpol dan kekuasaan seolah identik satu sama lain karena melalui partai politik suksesi kepemimpinan politik yang absah dilakukan. Di sisi lain, Mark N Hagopian (1978), menyebutkan bahwa parpol merupakan suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.

Oleh karena itu, salah satu proses politik yang penting bagi partai politik adalah rekrutmen politik. Proses ini sangat menentukan bagi kelangsungan aktivitas partai politik dan kualitas demokrasi. Proses rekrutmen yang dilakukan partai politik menjadi titik permulaan yang harus dilakukan partai politik terutama dalam proses pengkaderan anggotanya maupun promosi elite politik baru. Namun bagi sebagian besar partai politik di Indonesia, termasuk juga di Malang Raya, masalah tersebut tidaklah begitu diperhatikan. Banyak rekrutmen yang dilakukan oleh partai, khususnya untuk pejabat teras partai dan caleg, yang dilakukan berdasarkan nepotisme. Di samping itu juga rekrutmen partai politik hanya berorientasi bagaimana mendapat kekuasaan secara cepat dengan biaya murah sehingga mengabaikan rekrutmen politik berbasis ideologis dan karir politiki. Padahal rekrutmen politik adalah sebagai fungsi mengambil individu dalam masyarakat untuk dididik, dilatih sehingga memiliki keahlian dan peran khusus dalam sistem politik. Diharapkan dari proses rekrutmen ini individu yang

---

mereka sudah banyak yang diproses ke pengadilan. Terkait dengan penyelewengan dana yang terkait dengan anggaran untuk dewan juga telah menyeret Sri Rahayu sebagai Ketua PDRD Kota Malang dari Fraksi PDIP. Namun kasus ini selesai karena dianggap tidak terbukti di pengadilan. Hasil wawancara dengan koordinator MCW, Lutfi Kurniawan, *ibid.*

272 Kasus di Kota Batu, semua anggota Dewan Periode 2004-2009 menjadipada jatah mobil dinas, paling rendah untuk anggota mobil kategori niaga, Daihatsu Senia. Sementara untuk Ketua dan Wakil Ketua, dengan jenis yang lebih mewah. Hasil observasi di DPRD Kota Batu pada tahun 2007.

dididik dan dilatih tersebut memiliki pengetahuan, nilai, harapan dan kepedulian politik yang berguna bagi konsolidasi demokrasi.

Sebenarnya rekrutmen politik ini sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari aktifitas partai politik di manapun berada. Sayangnya, fungsi ini baru dapat berjalan ketika pemilu akan diadakan.<sup>273</sup> Lemahnya fungsi rekrutmen politik ini sebenarnya sudah dapat dijumpai terutama sejak verifikasi partai politik dilakukan oleh KPU.

Rendahnya kualitas pendidikan politik masyarakat juga dapat dilihat dari kesulitan partai politik menyusun daftar calon keanggotaan legislatif yang diajukan setiap pemilu.<sup>274</sup> Tidak berjalannya pendidikan politik berdampak pada kualitas wakil rakyat yang diajukan partai politik. Paling tidak dari tiga pemilu sebelumnya dapat diambil pelajaran siapa yang dipilih dan bagaimana mekanisme mereka dipilih untuk duduk sebagai wakil rakyat di parlemen masih belum jelas. Kurangnya kader partai dan menguatnya politik kekerabatan berdampak pada proses penentuan calon anggota legislatif ini. Celakanya, dengan munculnya partai baru dalam setiap pemilu membawa dampak pada kualitas wakil rakyat yang akan diajukan partai politik, karena banyak calon yang diajukan tidak punya *treck record* yang jelas.<sup>275</sup>

---

273 Rekrutmen politik yang baik seharusnya dimulai dengan pendidikan politik yang dilakukan secara berkesinambungan oleh partai politik. Namun banyak partai politik tidak melakukannya karena berbagai kendala. Misalnya masalah keuangan yang memang menjadi masalah besar dalam perkembangan partai politik di Indonesia. Selain itu, tidak jelasnya ideologi partai politik berdampak pula pada visi, misi dan program yang partai politik tersebut. Sukar dinafikan bahwa partai politik yang ada belum memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan masyarakatnya berpolitik. Bahkan partai politik tidak dapat melaksanakan rencana strategisnya seperti rekrutmen anggota secara berkesinambungan, pembinaan kader secara konsisten serta pengembangan kader ke tahap pembentukan elite politik. Ini semua merupakan bukti belum maksimalnya fungsi partai politik di negeri ini.

274 Pada saat pencalonan anggota legislatif, banyak partai kesulitan dalam menentukan daftar urutan calon (khususnya pemilu 1999 dan 2004) karena tidak adanya kriteria jelas dari partai dalam kriteria penentuan daftar urut calon. Oleh karena itu, masyarakat tidak paham kenapa seseorang bisa dicalonkan, padahal bukan merupakan kader dari partai tersebut atau kader yang belum banyak berbuat untuk partai.

275 Kemunculan partai-partai baru pada setiap pemilu, telah mendorong partai melupakan sistem kaderisasi baik dalam kepengurusan partai maupun dalam penentuan calon anggota legislatif. Bahkan menurut banyak kalangan menyebutkan bahwa, pemilu 2009, dengan sistem proporsional dengan daftar terbuka penuh telah melahirkan anggota parlemen yang secara kualitas lebih rendah dengan hasil pemilu sebelumnya. Masuknya calon anggota legislatif dari kalangan artis, tokoh populer, pengusaha telah mendorong masyarakat bersifat pragmatis dalam memilih, dan di sisi lain partai politik melupakan sistem kaderisasi dan *treck record* calon karena lebih mementingkan kepentingan jangka pendek yaitu memenangkan pemilu.

Penjaringan calon-calon yang akan diajukan dalam pemilu jauh dari demokrasi karena penjaringan dilakukan di dalam mekanisme formal internal partai. Penjaringan di internal partai ini sarat dengan intervensi kepentingan personal dan kelompok sehingga sangat bergantung pada kedekatan personal dan hubungan baik dengan pimpinan teras parpol. Banyak calon yang terdaftar dalam urutan jadi (pada pemilu 1999 dan 2004) merupakan orang-orang yang punya hubungan dengan petinggi partai politik, atau merupakan orang yang didesakan dari kelompok organisasi tertentu yang dianggap basis konstituen mereka, termasuk juga adanya unsur uang dalam pencalonan. Walaupun dalam lingkungan internal masing-masing partai ada aturan main untuk menseleksi calon dengan berbagai kriteria, namun dalam kenyataannya aturan tersebut kadang diabaikan atau dimanipulasi. Sebagai kekecualian, rekrutmen calon yang ada di Partai Keadilan Sejahtera (PKS), proses pencalegan sangat ketat karena penjaringannya dimulai dari tingkat bawah dengan aturan yang ketat.

Kondisi tersebut merupakan bias dari perilaku elit partai politik yang terjadi masa Orde Baru yang sarat dengan nepotisme. Masa Orde Baru, proses rekrutmen sarat dengan restu, surat sakti, nepotisme dan intervensi pemerintah. Partai politik bukan untuk menjaring kandidat anggota legislatif yang dapat menyuarakan aspirasi rakyat, namun hanya akan dijadikan sebagai legitimasi demokrasi bagi rezim berkuasa.<sup>276</sup> Dengan demikian tidak dibutuhkan orang-orang yang punya idealis dan kemampuan yang baik, cukup dengan hanya sikap kooperatif dengan penguasa saja. Di sisi lain, ada hal yang cukup penting untuk dijadikan argumen dari rendahnya kinerja partai politik pasca Orde Baru adalah tingginya ketergantungan pada tokoh partai. Sebagai contoh, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ada Megawati, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ada Gus Dur, Partai Amanat Nasional (PAN) ada Amin Rais, dan Partai Demokrat ada Soesilo Bambang Yudhoyono.<sup>277</sup>

---

276 Pada masa Orde Baru, partai politik seperti PPP, PDI, tidak punya fungsi sebagaimana fungsi partai politik. Intervensi pemerintah ke dalam tubuh partai sangat tinggi, sehingga setiap terjadi pergantian kepemimpinan dalam partai, pimpinan terpilih harus merupakan orang yang bisa bekerja sama dengan pemerintah. Begitupun dalam proses pencalonan untuk anggota parlemen, sistem penelitian khusus (litsus) diberlakukan untuk mencegah lolosnya calon yang berpotensi membangun pada keputusan rezim Orde Baru.

277 Menurut saya, keberadaan tokoh populer di partai sangat mengganggu kinerja partai politik dalam membangun organisasi partai. Para kader partai tidak berusaha serius untuk menjalin komunikasi yang baik dengan konstituen dengan berbagai upaya peningkatan peran

Kemandegan proses kaderisasi di dalam partai politik ini telah menimbulkan kekecewaan dalam masyarakat. Kekecewaan ini diwujudkan dengan banyak kader partai yang beralih ke partai lain karena dalam partainya merasa tidak ada kejelasan dalam proses kaderisasi yang dijalankan.<sup>278</sup> Oleh karena itu, banyak harapan yang muncul dari para kader partai, menegenai kejelasan dalam proses kaderisasi agar tidak terjadi konflik internal yang sering terjadi dalam proses pencalegan maupun dalam nominasi untuk menjadi calon kepala daerah dari partai.<sup>279</sup> Keberhasilan partai politik dalam melakukan proses rekrutmen politik yang bisa menghasilkan kader-kader muda yang handal akan dengan sendirinya menghapuskan kekecewaan publik. Selanjutnya, wajah-wajah baru akan muncul dan siap untuk menggantikan posisi generasi lama.

### 3. Perilaku Pragmatis Pemilih: Bentuk Kekecewaan pada Partai

Resesi ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 dampaknya sangat terasa pada masyarakat yang secara ekonomi menengah ke bawah, tidak terkecuali masyarakat yang ada di Malang Raya. Kelompok masyarakat yang paling kena dampak dari resesi ekonomi ini, mengharap adanya perubahan nasib pada berubahnya kehidupan politik. Oleh karena itu, pada pemilu 1999 di Malang Raya, hampir semua orang yang terkena imbas dari resesi ini menumpahkan suaranya ke PDIP yang dipimpin Megawati yang mereka anggap sebagai simbol dari perjuangan *wong cilik*.

---

agregasi dan artikulasi kepentingan. Lebih jauh, para kader partai tidak lebih hanya sebagai pengekor yang tidak punya jati diri, sehingga segala ucapan, tindakan dan keputusan dari tokoh berpengaruh di partai selalu jadi rujukan dan pedoman tanpa reserve, secara umum hal ini terjadi di PKB dan Partai Demokrat. Hasil Observasi di Malang Raya selama penelitian ini dilaksanakan.

278 Kasus yang terjadi di Malang Raya, pada pemilu 1999 dan 2004 banyak terjadi persoalan dalam penentuan siapa yang akan menjadi calon dan nomor urut calon. Tidak sedikit para kader yang kecewa karena diberi nomor urut besar, padahal sudah mengabdikan cukup lama di partai, sedangkan ada beberapa calon yang punya kedekatan dengan pimpinan partai atau secara ekonomi lebih mampu diberi nomor urut yang kecil (nomor urut jadi). Hasil wawancara dengan pengurus PAN Kota Malang, pada tanggal 25 Agustus 2008.

279 Kasus yang terjadi di Kota Malang, Ketua DPC Partai Demokrat menjelang pencalonan Wali Kota harus merelakan dirinya di ganti karena tidak disetujui untuk mencalonkan diri sebagai calon Wali Kota. Selanjutnya Partai Demokrat mencalonkan Latif seorang pengusaha yang berasal dari Malang. Begitupun yang terjadi di Golkar, Aris Puji Anggoro, maju sebagai Wali Kota berpasangan dengan Mohan Katelu dari PAN, namun Golkar juga memajukan Bambang sebagai wakil Peni Suparto dari PDIP. Hasil observasi pada tahun 2008, dan analisis dari berbagai sumber seperti media cetak (Radar Malang, Malang Pos), dan media elektronik (radio).

Pasca pemilu 1999, harapan akan perubahan nasib yang mereka dambakan bukannya kesampaian, namun justru disuguhi oleh kenyataan ironis dimana para pemimpin yang mereka pilih pada saat pemilu justru berpesta pora sendiri. Kondisi ini melahirkan kekecewaan masyarakat dan pada akhirnya masyarakat pemilih mencari jalan keluarnya sendiri dengan melakukan pola hubungan transaksional dalam pemilu berikutnya. Akhirnya dalam setiap pemilu, baik itu pemilu 2004 maupun 2009 di Malang Raya, *money politics* menjadi tidak terbantahkan. Pada pemilu 2004, karena partai masih dominan dalam kemenangan pemilu, maka *money politics* lebih banyak berbentuk pemberian bantuan pembangunan, sementara pada pemilu 2009 pemberian uang tunai lebih menonjol. Oleh karena itu, fungsi uang bagi partai politik menjadi dominan dan berperan strategis, partai politik tidak bisa hidup tanpa uang. Dan realitas yang terjadi, di era kepartaian di Malang Raya banyak partai yang terjebak dalam pola politik praktis pragmatis agar dapat *survive* dari pemilu ke pemilu.<sup>280</sup>

Suasana kehidupan politik yang penuh dengan nuansa pasar, dapat dilihat dari program dan strategi partai serta perilaku politik pemilihnya. Partai dan caleg lebih tertarik untuk membuat program karikatif dan berbiaya tinggi dari pada menekankan pada aspek ideologi partai yang sifatnya jangka panjang. Sikap pemilih lebih pragmatis dalam mendukung dan memberikan suaranya kepada partai. Pemilih akan memilih partai tertentu dengan syarat mendapatkan imbalan berupa barang atau uang. Dengan demikian, pola hubungan partai dan pemilih lebih menunjukkan pola transaksional.<sup>281</sup> Di Malang Raya pada pemilu 1999 pola transaksional itu sudah terjadi, namun lebih terfokus

---

280 Hampir semua partai politik di era reformasi ini berusaha untuk mempertahankan konstituennya agar tidak lari ke partai lain dengan berbagai cara termasuk dengan cara pembelian suara. Dengan sistem proporsional terbuka penuh, setiap caleg punya kesempatan yang sama untuk memperoleh dukungan dari pemilih, akan tetapi caleg yang berangkat dari partai besar peluangnya lebih besar karena segmen pemilihnya sudah jelas tinggal mempertahankan. Salah satu cara untuk mempertahankan agar konstituennya tidak lari, para caleg harus merogoh koceknya dalam-dalam karena kalau tidak ada caleg lain yang sudah menunggu untuk membeli suara mereka. Dari hasil analisis data pemilu 2009, daerah yang paling keras persaingannya adalah Kota Batu. Hal ini disebabkan penduduk Kota Batu sangat kecil, dengan jumlah pemilih sekitar 130 ribu pemilih. Untuk mendapatkan satu kursi penuh atau memenuhi BPP hanya sekitar 4-5 ribuan setelah dikurangi golput dan suara tidak sah. Dalam kenyataannya, caleg terpilih di Kota Batu ada yang di bawah seribu suara, seperti suara yang diperoleh Nardi dari Partai Demokrat.

281 Pola hubungan transaksional adalah pola hubungan partai dan pemilih yang terjebak pada hubungan jual beli seperti layaknya pasar, ada uang ada suara.

dalam lingkup partai dengan konstituennya, dan biasanya berupa bantuan sosial. Dalam pemilu 2004, pola transaksional ini sudah mulai merambah, tidak hanya antara konstituen dengan partainya namun juga dengan partai lain. Bentuk imbalan dengan partai lain sudah lebih spesifik yaitu pemberian barang dan uang kepada individu pemilih. Pada pemilu 2009, pola hubungan partai dan pemilih menjadi pola hubungan yang benar-benar transaksional. Banyak caleg yang harus menghabiskan uang ratusan juta, dan bahkan ada yang sampai milyaran hanya untuk dapat dipilih dalam pemilu 2009 yang sudah menggunakan sistem pemilu terbuka murni.<sup>282</sup>

Walaupun demikian, sikap atau perilaku transaksional tidak hanya berkembang di era pemilu 2009, namun juga terjadi pada era pemilu sebelumnya. Pada era pemilu 1999 pola perilaku transaksional hanya berkembang dalam basis mereka masing-masing, dari konstituen kepada partai bersangkutan. Dalam pemilu 2004, perilaku transaksional mulai berkembang, tidak hanya pada satu partai politik yang menjadi identifikasi politiknya, namun juga telah sedikit berkembang ke partai lain walaupun dalam keadaan terbatas.<sup>283</sup>

Dalam pemilu 2009 perilaku transaksional sudah tidak lagi teratur, semua partai bisa dan melakukan transaksi kepada pemilih. Semua segmen masyarakat sudah menjadi tempat pemasaran politik bagi semua caleg partai, dan para pemilih sudah terbiasa dengan produk-produk partai baru.<sup>284</sup> Maka dalam pemilu 2009 menjadi ajang transaksi

---

282 Menurut beberapa responden yang sempat penulis wawancarai, dalam pemilu 2009 setiap calon yang jadi minimum menghabiskan uang lima puluh juta untuk tingkat Kabupaten dan Kota di Malang Raya. Di Kota Batu, caleg yang jadi menurut informasi, menghabiskan uang antara 150 juta sampai 400 juta. Uang yang dibagikan pada pemilih ada yang 50 ribu, 75 ribu sampai 100 ribu. Biaya yang lebih besar lagi tidak hanya untuk membeli suara pada pemilih, tapi biaya yang dikeluarkan oleh caleg guna membiayai tim sukses dan saksi. Seperti halnya Kota Batu, Kabupaten dan Kota Malang tidak jauh berbeda dalam persoalan politik transaksional. Bahkan biaya untuk memenangkan pemilu di Kota dan Kabupaten Malang relatif lebih besar ketimbang Kota Batu karena jumlah BPP yang lebih banyak dan jangkauan wilayah yang lebih luas.

283 Pada pemilu 2004, dengan adanya sistem proporsional terbuka dengan BPP, perilaku transaksional pemilih sudah mulai menjalar ke partai lain yang mulai agresif dalam memperoleh suara. Adanya keinginan dari caleg dengan nomor urut jadi telah mendorong caleg tersebut untuk melakukan ekspansi ke basis-basis pemilih dari partai lain. Hal ini terutama dilakukan oleh partai-partai gurem yang memang tidak punya basis massa yang jelas. Hasil observasi dan hasil wawancara menjelang dan sesudah pemilu 2004.

284 Pada pemilu 2009, dengan sistem proporsional terbuka penuh, semua caleg merasa punya kesempatan yang sama. Bagi caleg yang ikut dalam pemilu 2009, yang merasa punya kemampuan ekonomi dan sosial, banyak yang tidak memperlmasalahkan dari partai mana

politik yang dilakukan oleh hampir semua partai politik lewat para caleg yang punya jaringan sosial dan bebas menentukan kendaran partai mana yang mereka pilih atau dapat. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam pemilu 2009, ideologi partai tidak lagi banyak berperan dalam pilihan politik pemilih, hal ini disebabkan maraknya transaksi politik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemilu 2009 adalah pemilu pragmatis.

**a. Perilaku Kolektif: Permintaan Bantuan Pembangunan**

Masyarakat miskin tidak menganggap politik uang sebagai hal buruk. Mereka memang menantikan jatah uang itu, bahkan ada yang tidak mau memilih kalau tidak mendapatkan uang. Sebagian elite juga menganggap pemberian uang dalam politik juga sebagai hal yang biasa, bahkan seperti keharusan yang wajar dilakukan.

Pada pemilu 2004, dalam rangka memenangkan pemilu, disamping partai-partai menjaga konstituennya agar tidak lari ke partai lain, juga melakukan pendekatan ke basis massa lain. Cara yang jamak dilakukan dalam pemilu 2004 adalah memberikan sumbangan untuk kepentingan warga dan lingkungan. Oleh karena itu, banyak partai yang berusaha membantu kebutuhan warga, baik bantuan untuk pembangunan maupun untuk kegiatan.

Kalau pada pemilu sebelumnya, bantuan ke warga diberikan lewat partai kepada kader, namun pada pemilu 2009 bantuan banyak berasal dari caleg sendiri atau lewat tim sukses caleg tersebut yang sudah punya ikatan dengan caleg dari partai tersebut. Bagi caleg *incumbent*, selain memberi bantuan langsung bagi kepentingan warga pada saat pemilu, juga telah lama melakukan bantuan untuk kepentingan warganya dengan cara menyalurkannya lewat APBD. Sebagai contoh anggota Dewan di wilayah Lowokwaru Kota Malang, para anggota Dewan bersaing agar mereka mendapatkan tempat di hati masyarakat dengan cara memperjuangkan berbagai program pembangunan yang ada di masyarakat agar bisa mendapat simpati dari warga yang diperjuangkan. Dalam kenyataannya, partai yang sering memberikan bantuan, seperti Fujianto caleg dari PAN terpilih kembali pada pemilu 2009.

---

mereka dicalonkan, yang penting dapat jadi caleg. Hal ini dikarenakan persaingan yang terjadi dalam pemilu 2009 tidak lagi antara partai, melainkan antara caleg baik dalam inten partai maupun dengan caleg dari luar partai. Hasil wawancara dengan Rafiq, caleg PAN Kota Malang di Lowok Waru pada tanggal 25 Agustus 2008.

Kenyataan tersebut di atas, secara langsung menunjukkan bahwa pandangan subyektif dari warga terhadap partai. Partai yang sering memberi bantuan dianggap partai yang baik, sementara partai yang jarang memberi bantuan dianggap partai yang jelek. Partai selalu dimaknai dengan bantuan yang bersifat material, dan hal ini sangat terasa dalam setiap pemilu pasca reformasi dilaksanakan, khususnya yang terjadi di akar rumput. Kondisi tersebut juga didorong oleh perubahan sistem pemilu dari proporsional daftar tertutup dengan BPP (2004) menjadi proporsional daftar murni (2009). Persaingan di antara caleg menjadi semakin keras, dengan demikian berbagai cara dilakukan oleh caleg untuk memenangkan kompetisi dalam pemilu, termasuk mempergunakan celah dalam masyarakat yang cenderung menonjolkan makna ekonomi terhadap partai dengan melakukan transaksi politik atau pembelian suara lewat berbagai bantuan atau pemberian uang tunai.

Rasionalitas ekonomi yang berkembang pada pemilih di Malang Raya bukannya rasionalitas seperti yang ada di negara maju. Di negara maju rasionalitas dimaksudkan untuk menunjukan pada pemilih yang dalam menentukan pilihan politiknya didasarkan pada preferensi kebijakan partai, dan mereka akan memilih partai yang dianggap akan lebih menguntungkan mereka atau sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian, pemilu dianggap sebagai pasar, dan partai politik dianggap sebagai pedagang yang menjajakan produknya berupa rencana-rencana yang akan dijalankan kalau terpilih. Di Malang Raya, rasionalitas ekonomi lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi jangka pendek dan bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat dari partai atau caleg. Dengan demikian, kalau di negara maju hak pilih dibelanjakan kepada partai untuk membeli rencana-rencana yang sesuai dengan pemilih, sementara di Malang Raya partai membeli hak pilih dengan sejumlah uang, bantuan sosial dan pembangunan lingkungan.<sup>285</sup>

#### **b. Perilaku Individual: Meminta Imbalan Uang**

Salah satu simpatisan PDIP, Sony, menyampaikan pada menulis bahwa “umumnya mereka yang sudah didukung untuk menjadi anggota

285 Menurut penulis, rasionalitas pemilih sangat dipengaruhi oleh tingkat ekonomi masyarakat, sebagai mana demokrasi. Menurut Lipset, *“the higher the level of economic development, the better the prospec for democracy”*. Sementara indikator perkembangan ekonomi adalah tingkat pendidikan, GNP, Urbanisasi, Industrialisasi. Untuk lebih jelasnya, lihat bukanya Seymour Martin Lipset, *Political Man, The Social Bases of Politics*, New York: Feffer & Simons INC., 1960.



dewan, mereka lupa janji-janjinya sebelum jadi.”<sup>286</sup> Oleh karena itu, menurut dia, sekarang masyarakat sudah pintar, masyarakat tidak akan memilih kalau tidak ada uangnya. Lanjutnya, “hal yang penting bahwa pembagian itu harus *roto*, tidak boleh ada yang tidak kebagian.”<sup>287</sup> Pernyataan tersebut mensiratkan adanya kekecewaan dari pemilih terhadap anggota Dewan yang tidak memperhatikan konstituennya, oleh karena itu pemilih meresponnya dengan perilaku pragmatis.

Di sisi lain, sebagian pemilih yang kelihatan Santri dan pendukung dari partai-partai Islam, menyampaikan “bahwa partai itu identik dengan figur seseorang, dimana partai itu dianggap baik apa bila sering memberi bantuan.”<sup>288</sup> Pandangan ini sejalan dengan apa yang sering disosialisasikan dalam setiap pengajian ataupun khotbah jum’at di lingkungan komunitas Islam Tradisional bahwa seorang Muslim harus sering bersodakoh.<sup>289</sup> Dalam Islam juga diajarkan bahwa kita sebagai pemeluk Islam harus memperhatikan masyarakat miskin. Karena setelah menjalankan ibadah, sholat mendoakan fakir miskin ajaran Islam itu sangat berpihak pada masyarakat bawah seperti kelompok duafa, mustadafin. Karena seringnya disosialisasikan kepada masyarakat, nilai-nilai ini juga menjadi bagian dari barometer masyarakat untuk menilai baik buruknya seorang calon atau partai politik.

---

286 Sail wawancara dengan Sony, simpatisan PDIP, di Dusun Caru Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu.

287 Masyarakat merasa bahwa para calon anggota Dewan setelah mereka terpilih dan duduk di Dewan, umumnya mereka lupa dengan masyarakat yang memilihnya. Harapan mereka, bagi anggota dewan yang terpilih harus tetap mengunjungi masyarakat dan memberikan perhatian akan nasib yang mereka rasakan. Ibid. Alasan para anggota dewan kenapa jarang menemui konstituennya, menurut salah seorang calon dari PPP yang punya hubungan baik dengan pemuda Muhammadiyah, Habib (dipanggil Habib karena keturunan Arab), menyebutkan bahwa bukan kita tidak mau ketemu dengan konstituen yang mau menemui atau mendatangi, namun setiap yang datang atau ketika datang yang dibicarakan selalu urusan bantuan dan dana. Perbincangan santai pada saat menjelang pemilu 2009 di Rumah Baca Cerdas, Perumahan Permata Jingga Jl. Soekarno Hatta Kota Malang.

288 Hasil wawancara dengan Muslimin, seorang santri, simpatisan PKB Februari 2008, hal ini juga sejalan dengan pemahaman aguk, seorang simpatisan PDIP yang penulis wawancarai pada bulan Juli 2007.

289 Hasil pengamatan yang penulis lakukan dalam setiap ceramah yang dilakukan di lingkungan Santri Tradisional dan Santri Modernis di Malang Raya. Pentingnya sodakoh selalu dijadikan tekanan dalam setiap pengajian, disamping penekanan pada bahasan mengenai surga dan neraka. Dalam setiap pengajian yang dilakukan di komunitas Santri Tradisional, jarang sekali ada pembahasan yang berkenaan dengan kehidupan riil masyarakat. Hal ini berbeda dengan pengajian yang di lakukan dalam komunitas Santri Mordernis, walaupun tetap bahasan tentang sodakoh itu ada, namun sudah jarang membahas terlalu mendalam berkenaan dengan sorga dan neraka. Dan lebih banyak melakukan pembahasan yang lebih altikulatif dalam kehidupan.

#### D. Ringkasan

Pendekatan untuk memahami perilaku pemilih bisa ditelusuri kedalam tiga pendekatan umum yaitu sosiologis, psikologis, dan rational choice. Dalam konteks Indonesia, memahami perilaku pemilih selalu dikaitkan dengan politik aliran seperti yang dikemukakan oleh Geertz yang membagi masyarakat kedalam tiga kategori yaitu Santri, Abangan, dan Priyayi. Menurut teorinya Geertz, pemilih santri identik dengan Partai Islam, sementara Abangan identik dengan Partai Nasionalis. Pemilih Santri bisa digolongkan ke dalam dua varian yaitu Santri Tradisional dan Santri Modernis. Kedua varian santri ini secara politik terwadahi dalam partai yang berbeda, walaupun pernah menjadi pendukung partai yang sama yaitu Masyumi. Secara organisasi Santri Tradisional umumnya dipayungi oleh Ormas Nahdhatul Ulama (NU), dan Santri Modernis dipayungi oleh Ormas Muhammadiyah.

Pasca reformasi aktivitas keagamaan yang dijalankan oleh kedua varian santri tidak mengalami perubahan. Kalangan Santri Tradisionalis tetap menjalankan ritual keagamaan mereka seperti Tahlilan, Yasinan, Dibaan, Jiarah ke makam para Wali. Salah satu ciri khas dari masyarakat Nahdhiliyin adalah kepatuhan pada pemimpin (kyai) yang sangat tinggi, atau sering dimakan dengan sifat taqlid. Kyai menjadi contoh dan panutan tidak hanya dalam kehidupan sosial, namun juga dalam kehidupan politik. Oleh karena itu, banyak dari kyai yang mengarahkan pilihan politiknya ke partai yang didirikan oleh pemimpin NU. Sementara bagi kalangan Santri Modernis yang umumnya berdomisili di perkotaan dan secara sosial ekonomi relatif lebih maju sifat taqlid pada pimpinan kurang berkembang. Peran organisasi dalam kelompok Santri Modernis lebih menonjol ketimbang figur individual. Namun demikian, ketika PAN yang dimotori Amin Rais berdiri, banyak dukungan dari warga Muhammadiyah, walaupun dari pemilu ke pemilu semakin berkurang.

Sebagaimana dikemukakan oleh Geertz, pemilih Santri akan memilih Partai Islam dan sebaliknya pemilih Abangan akan memilih Partai Nasionalis. Dalam konteks PKB dan PAN, kedua partai ini tidak memproklamkan sebagai Partai Islam karena keduanya sama-sama memakai asas Panca sila. Kenyataan ini tidak lepas dari adanya tokoh-tokoh yang duduk didalam kepengurusan partai yang mewakili kelompok masyarakat pendukungnya. Dengan demikian dapat

dikatakan bahwa kehadiran para tokoh kharismatis dalam partai politik bisa dijadikan sebagai simbolisasi ideologis dari partai yang bersangkutan.

Lebih jauh, seiring dengan perkembangan waktu dimana pemilu pasca reformasi terus berlanjut dari mulai 1999, 2004, dan 2009 banyak partai politik yang lulus *threshold* mengalami penurunan jumlah perolehan suara. Penurunan jumlah perolehan suara partai politik beriringan dengan menurunnya citra partai politik akibat perilaku elit yang cenderung korup dan mengabaikan kepentingan masyarakat. Banyak kasus-kasus yang menarik perhatian publik, khususnya di Malang Raya, mulai dari kasus perburuhan terkait PHK massal karyawan PT Wastra Indah di Kota Batu, pembangunan yang menyerobot lahan konservasi seperti pembangunan Matos dan MOG di Kota Malang, yang semua itu tidak menjadi kepedulian anggota Dewan.

Akibat kondisi psikologis massa yang kecewa dengan perilaku elit dan kondisi politik yang tidak berpengaruh pada nasib mereka, muncul fenomena yang menarik, khususnya dalam perilaku voting. Banyak pemilih yang tidak mau datang ke tempat pemungutan suara ketika pemilu dilaksanakan, tingginya *swing votes*, banyak pemilih yang tidak merasa punya ikatan dengan partai (*nonpartisan*). Hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pemahaman, pandangan, dan sekaligus orientasi pemilih pada partai politik.

Akibat kondisi tersebut, hubungan partai dengan pemilih menjadi terjebak pada pola hubungan transaksional. Untuk mendapatkan suara dalam pemilu, parpol/caleg membeli suara pemilih lewat uang, sembako, kaos, pembangunan mesjid, pembangunan jalan dan lain-lain. Hal ini dilestarikan oleh hubungan anggota dewan dengan konstituennya, yang terhanyut dalam pola politik sejenis pasca Pemilu. Kondisi ini berakibat pada hilangnya peran substansial anggota Dewan sebagai pembuat keputusan politik yang merupakan terjemahan dari aspirasi dan kepentingan pemilih.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

## **Tujuan Intruksional Bab 5**

Dalam bab ini penulis membahas mengenai respon partai terhadap kondisi electoral yang terjadi. Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan dapat memiliki kompetensi sebagai berikut:

1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang perubahan kondisi masyarakat baik dari sisi ideologi maupun perubahan orientasi politik.
2. Mahasiswa dapat membuat program kerja partai dan model kampanye dalam memenangkan pemilu berdasar pada perubahan situasi dan kondisi masyarakat.
3. Mahasiswa dapat menjelaskan fakta, gejala maupun peristiwa-peristiwa perilaku politik memilih masyarakat dalam pemilu.
4. Mahasiswa dapat mendesain model pola hubungan antara partai dan pemilih yang terjadi baik secara nasional maupun lokal.
5. Mahasiswa mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang cukup untuk berpartisipasi dalam politik praktis di partai politik.





# 5

## PRAGMATISME POLITIK: RESPON PARTAI TERHADAP KONDISI ELECTORAL

Pada bab ini akan dibahas mengenai perilaku partai dalam merespon perubahan kondisi electoral. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam rangka mempertahankan diri, partai politik biasanya melakukan upaya dengan mengubah wajah partai atau menggeser posisi politiknya ke arah yang lebih moderat secara ideologis. Konsekuensi dari perubahan posisi politik ini, partai politik harus membangun konstituen partai yang lebih heterogen, walaupun tidak serta merta meninggalkan basis pemilih tradisionalnya. Partai Islam masih menjadikan pemilih Santri sebagai lumbung utama perolehan suara, begitupun partai Nasionalis tetap menjadikan kelompok Abangan sebagai basis pemilihnya.

Sebagaimana dikemukakan Mair *et. al.* (2004), partai politik akan berusaha merespon krisis electoral. Respon partai dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain dengan cara melakukan perubahan dalam manajemen partai, khususnya terkait dengan seleksi kandidat; merubah basis pemilih partai dengan cara meninggalkan basis pemilih tradisionalnya; mengembangkan partai *catch-all* dengan cara memperluas segmen pemilih, dan bisa juga dilakukan dengan cara membangun partai kartel untuk melindungi diri dari partai lain dengan cara bekerja sama dengan partai lain tanpa mempertimbangkan identitas ideologis; terakhir bisa dilakukannya dengan cara perubahan yang bersifat institusional yaitu melakukan upaya untuk merubah aturan main pemilu.

Guna pembahasan dalam bab ini, akan dijelaskan bagaimana respon partai dilakukan terkait perubahan electoral tersebut. Partai politik

dalam merespon walau lebih pragmatis akan tetap memperhatikan aliran, walaupun ada upaya untuk melangkah keluar, namun sebelah kaki mereka tetap berpijak pada aliran. Untuk kepentingan pembahasan, argumen Geertz tentang aliran politik dan Mair mengenai respon partai politik akan menjadi perpaduan konsep. Pembahasan dalam bab ini akan dimulai dengan mengkaji pengorganisasian partai, khususnya bagaimana partai melakukan seleksi dan rekrutmen calon anggota legislatif; selanjutnya mengkaji segmen pemilih yang dibidik masing-masing partai politik, dan terakhir terkait dengan upaya partai dalam mengembangkan atau memperluas segmen pemilih.

## A. Kebijakan Organisasi Partai

### 1. Rekrutmen Calon

Partai politik berusaha untuk meraih suara pemilih dengan cara merekrut tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap memiliki massa. Tokoh agama, tokoh partai, maupun tokoh masyarakat menjadi bahan rebutan partai politik untuk bisa menjadi bagian dari parpol mereka. Sebagai contoh, banyak calon anggota legislatif dari partai-partai pada pemilu 2004 yang awalnya merupakan kader dari partai politik lain, khususnya dari Partai Demokrat yang banyak berasal dari tokoh Golkar dan PDIP.<sup>290</sup> Begitupun calon dari partai-partai Islam, khususnya PKB banyak tokoh agama yang menjadi calon anggota legislatif ataupun menjabat sebagai pimpinan teras partai.

Mengingat besarnya peranan figur populer dalam meningkatkan perolehan suara partai, maka pada pemilu selanjutnya (2009), banyak partai yang juga mengandalkan figur populer untuk mendongkrak suara dalam pemilu. Banyak figur-figur terkenal baik dari kalangan akademisi, artis, olahragawan direkrut oleh partai menjadi anggota dan bahkan menjadi caleg dari partai bersangkutan. Di PDIP ada Diyah Pitaloka, dari kalangan artis; Miing tokoh komedi. Di Partai Demokrat ada Komar yang berasal dari tokoh komedian, Aji Massa'id

---

<sup>290</sup> Hasil analisis dokumen pemilu 2004 dan 2009, KPUD Malang Raya. Dari data yang ada membuktikan bahwa ada calon anggota legislatif yang terdaftar dari partai tertentu yang merupakan perpindahan dari partai lain. Sebagai contoh pada pemilu 1999, di Kota Malang caleg dari PAN, Subur Triono yang pada pemilu 2004 merupakan caleg dari Partai Demokrat, di Kota Batu, Ishom terdapat sebagai caleg PAN yang pada pemilu 2004 merupakan caleg dari PSI. Hasil wawancara dengan Jaenudin, Anggota KPUD Kota Malang, pada bulan April 2009 di Kantor KPUD.



dan Agnelia Sondah dari kalangan artis. Di Golkar ada Indra J. Piliang dari akademisi; Icuk Sugianto dari kalangan olah ragawan; Tantowi Yahya dari kalangan presenter. Di PAN ada Wanda Hamidah, Primus, dan Ikgang Fauji dari kalangan artis; Eko Patrio, Mandra dari kalangan komedian dan lain lain. Bahkan PAN karena banyaknya caleg dari kalangan artis, maka kepanjangan PAN banyak diplesetkan menjadi "partai artis nasional."<sup>291</sup>

Caleg-caleg populer yang ikut dalam pemilu 2009 cukup mendapat apresiasi dari pemilih.<sup>292</sup> Bahkan dengan adanya caleg artis dalam satu partai, dapil dimana mereka di tempatkan dapat mengangkat perolehan suara di dapil tersebut yang otomatis mengangkat caleg Provinsi dan caleg Kota/Kabupaten. Contoh kasus daerah pemilih Madiun, Nganjuk, Ponorogo, dan Magetan yang merupakan dapil caleg pusat Eko Patrio dapat mengangkat caleg Kota/Kabupaten yang pada pemilu lalu tidak ada yang lolos. Oleh karena itu, di tengah persaingan yang ketat dalam pemilu 2009, PAN masih bisa bersaing di papan tengah dengan perolehan suara sekitar 6 % secara Nasional.<sup>293</sup>

Pola rekrutmen yang terjadi pada awal pemilu yang berlangsung tahun 1999 menunjukkan adanya peran dominan dari pimpinan teras partai, baik di pusat atau pun di daerah, dalam menentukan calon anggota

---

291 Di tingkat provinsi, figur-figur populer umumnya berasal dari kelompok sektarian. Khusus di Provinsi Jawa Timur, banyak caleg-caleg yang populer dari kalangan agamawan dicalonkan menjadi caleg, khususnya dari kelompok Santri Tradisional. Tokoh struktural maupun tokoh kultural NU banyak yang direkrut untuk menjadi caleg partai, utamanya partai yang punya kesamaan secara sosiologis dengan NU seperti PKB, PPP, PKNU. Sementara untuk tingkat Kota dan Kabupaten, khususnya di Malang Raya, figur-figur yang jadi andalan dalam perolehan suara disamping figur populer dari segmen masyarakat, juga figur pengusaha yang dianggap punya modal ekonomi. Tokoh-tokoh masyarakat dari kalangan kyai, mantan Kepala Desa, istri perangkat Desa, keluarga dari birokrat seperti Camat banyak yang mencalonkan diri sebagai caleg, dan terbukti banyak yang berhasil lolos menjadi anggota Dewan. Caleg-caleg berasal dari tokoh masyarakat, umumnya mereka menjadi caleg dari partai-partai baru atau dibarukan yang ikut pemilu 2009 seperti PIB, PKNU, Hanura, Gerinda dan lain-lain. Sebagai contoh di Kota Batu, Saudah istri mantan Camat Junrejo lolos menjadi anggota Dewan dari Partai Indonesia Baru (PIB), Nur Jayanti istri Carik Desa Pendem lolos menjadi anggota Dewan dari Partai Hanura.

292 Secara umum memang caleg populer yang berasal dari kalangan artis cukup mempengaruhi perolehan suara partai seperti keberadaan caleg Pusat Eko Patrio dari PAN yang merupakan dapil VIII yang meliputi Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Madiun; Aji Masaid dapil III yang meliputi Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Bondowoso. Namun kasus di Malang Raya tidak ada caleg populer dari kalangan artis yang mempengaruhi perolehan suara partai. Hasil dari berbagai sumber yang penulis peroleh pada pemilu 2009.

293 Analisis hasil pemilu legislatif 2009 dari berbagai sumber, seperti media cetak Jawa Pos, Kompas, dan media elektronik seperti TV One, Metro TV, Indosiar, RCTI, dan lain-lain.

legislative.<sup>294</sup> Dalam pemilu dengan sistem proporsional daftar tertutup (*proportional closed list*), saham suara dari pemilu mutlak menjadi hak prerogratif partai kepada siapa suara pemilih itu akan diberikan. Kondisi ini melahirkan adanya penyakit kekuasaan berupa oligarkisme di tubuh partai, dimana pengambilan keputusan terpusat hanya pada segelintir elit partai dan akan berusaha terus menerus untuk dipertahankannya.<sup>295</sup> Dalam kondisi seperti itu banyak dari kader partai yang menunjukkan kesetiiaannya, khususnya pada pimpinan partai, agar bisa menjadi nominasi dalam pencalegan atau sekedar menjadi pengurus partai.

Lebih jauh, karena berharganya kekuasaan struktural partai, maka perebutan kekuasaan di tubuh partai sangat kompetitif, kalau tidak dikatakan kasar. Kasus perebutan kuasa di tubuh partai, hampir terjadi pada semua kepengurusan partai di Malang Raya. Kasus yang paling menonjol adalah perebutan pimpinan partai di tubuh PAN Kota Malang yang melahirkan dualisme kepemimpinan yaitu antara kepemimpinan Darul Komar dan Kepemimpinan Prof, Kaprawi, SH., dan tidak bisa secara cepat diselesaikan walaupun sudah ada campur tangan dari pengurus pusat PAN.

Hasil *focus group discussion* dengan beberapa pengurus partai,<sup>296</sup> terungkap bahwa dalam penentuan calon anggota legislatif, unsur kedekatan dengan pimpinan partai menjadi dominan. Lebih jauh, bagi kader yang ingin dicalonkan akan selalu memberikan kontribusi sejumlah uang kepada partai dengan alasan untuk kemenangan pemilu. Dapil-dapil yang menjadi lumbung suara partai, menjadi perebutan dan sekaligus menjadi dapil dengan harga yang besar untuk menjadi caleg.

Pada pemilu 2004, kondisi tersebut tidak banyak berubah, walaupun sudah ada perubahan dalam sistem pemilu yaitu proposional daftar daftar tertutup (*propotional closed list*) menuju proposional daftar terbuka

---

294 Pada pemilu 1999 peran partai sangat dominan dalam penentuan caleg, utamanya caleg yang berada pada nomor urut jadi, hal ini dikarenakan pada pemilu 1999, sistem pemilu masih mempergunakan proposional tertutup. Untuk lebih jelasnya lihat Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, Lihat juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 33 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

295 Kondisi tersebut menjadi tembok tebal dari adanya regenerasi kepemimpinan di tubuh partai, dan juga tampilnya muka-muka baru di Parlemen. Hasil pemilu 2004, menunjukkan masih banyaknya dari kader-kader partai yang berwajah lama tetap mendominasi anggota Dewan karena besarnya kekuatan partai dalam menentukan caleg.

296 Hal ini terungkap dari focus group discussion (FGD) dengan beberapa aktifis partai, di rumah Jaenuri Jetis Kecamatan Mulyo Agung Kabupaten Malang pada tanggal 25 Agustus 2008.

(*proportional open list*). Pemilih boleh mencoblos partai, caleg, atau keduanya, dengan ketentuan suara partai akan menjadi suara nomor urut tertinggi. Sistem ini tidak serta merta para caleg memberikan garansi untuk dapat lolos menjadi anggota legislatif, karena caleg harus bisa memenuhi Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Hal ini sangat sulit mengingat peran partai masih dominan dalam kampanye, disamping masih diperbolehkannya mencoblos partai yang justru banyak disuarakan oleh partai saat kampanye.<sup>297</sup>

Memasuki pemilu 2009, sistem pemilu berubah lagi menjadi sistem proporsional daftar terbuka (*proportional open list*) murni (tanpa BPP). Sistem ini telah mendorong terjadinya perubahan strategi partai dalam memenangkan pemilu. Partai tidak lagi dominan dalam baik dalam penentuan caleg, maupun dalam kemenangan pemilu. Sistem kompetisi terbuka antar caleg di dalam internal partai, mendorong gairah caleg untuk berjuang dengan segala cara agar dapat memperoleh suara tertinggi di dalam partai supaya lolos menjadi anggota legislatif. Kondisi ini mendorong persaingan keras di antara para caleg internal partai, tidak lagi dengan calon di luar partainya.<sup>298</sup>

Dengan sistem baru, partai tidak hanya memasang caleg-caleg yang punya kualifikasi kepopuleran, jaringan, dan sumber daya keuangan dari internal partai. Akan tetapi partai berusaha mencari tokoh-tokoh populer yang punya tingkat akseptabilitas dan *electabilitas* tinggi dari eksternal partai untuk di pasang dalam nomor urut caleg. Keadaan ini telah melahirkan perilaku pragmatis dari kader partai, maupun partai dalam memperebutkan kekuasaan. Para kader yang kecewa dengan partainya, mereka dengan enteng masuk ke partai lain tanpa ada beban historis, sosiologis, maupun psikologis.

---

297 Kasus di Malang Raya tidak ada satupun dari para caleg yang bisa lolos lewat BPP. Bahkan untuk tingkat pusat, hanya calon dari PKS yaitu Hidayat Nurwahid dan calon dari Partai Golkar yaitu Saleh Djasit yang bisa lolos dengan melewati BPP. Oleh karena itu, dalam pemilu 2004 para caleg yang terdaftar di masing-masing partai, nomor urut paling atas hampir pasti diisi oleh pimpinan teras partai.

298 Hasil observasi menjelang Pemilu April 2009 dilaksanakan, menunjukkan bahwa persaingan yang lebih ketat justru terjadi di internal partai. Caleg dalam satu partai berusaha untuk menjatuhkan sesama caleg dalam satu partai karena dianggap pesaing yang paling nyata dalam perolehan kursi di Dewan. Hal ini juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Rofiq yang merupakan caleg dari PAN Lowok Waru Kota Malang. Rofiq berusaha keras untuk bersaing dengan caleg satu partai yaitu Fujianto, menurut Rofiq, karena pada pemilu 2004 PAN di Lowok Waru mendapatkan satu kursi, dan kemungkinan pada pemilu 2009 mendapatkan kursi yang sama, maka focus utamanya adalah bagaimana agar suara Fujianto bisa di bawah suara yang diperolehnya.

Di Malang Raya, banyak kader Golkar maupun kader PDIP yang pindah haluan ke Partai Demokrat, begitupun sebaliknya dari Partai Demokrat banyak juga pindah ke partai lain. Sebagai contoh, Subur Triono anggota Dewan Kota Malang yang pada pemilu 2004 di usung oleh Partai Demokrat, karena kasus Pilakada dia diberhentikan, dan dengan mudah diterima menjadi caleg dari PAN. Termasuk juga Ishom dan Andre Prana, Ishom yang merupakan anggota Dewan Kota Batu periode 2004-2009 dari PSI, meloncat ke PAN, sementara Andre Prana Anggota Dewan dari Partai Demokrat pindah ke Partai Barisan Nasional (Barnas).<sup>299</sup>

Kasus lain yang terjadi di Kota Batu, tokoh-tokoh lokal yang dianggap punya massa menjadi bidikan utama partai politik untuk menjadi caleg dari partai tertentu. Hasil observasi menunjukkan bahwa banyak dari keluarga perangkat Desa, ataupun pemerintah yang menjadi calon dari partai politik tertentu. Dari dapil Junrejo Kota batu, caleg yang berasal dari keluarga perangkat Desa adalah Siti Nurjanah yang merupakan istri dari Kepala Desa Pendem, dia dicalonkan dalam nomor urut satu dari PNBK, NurJayanti Istri Sekretaris Desa yang dicalonkan Partau Hanura pada nomor urut dua. Dari kedua calon tersebut, salah satu calon berhasil mendapatkan suara yang cukup signifikan, untuk ukuran BPP Kota Batu dengan jumlah pemilih sekitar 130.000 pemilih, karena mendapatkan suara, dengan perkiraan BPP sebesar 3000-an suara. Sementara calon yang merupakan anggota keluarga dari Birokrasi, juga berhasil lolos menjadi anggota Dewan yaitu Syaodah Isteri Mantan Camat Junrejo melalui Partai Indonesia Baru (PIB) dan Endang Istri Mantan Wali Kota Batu Alm. Imam Kabul dari PDIP dari dapil Batu.<sup>300</sup>

Pada umumnya partai politik peserta pemilu 2009 di Malang Raya menerima pendaftaran untuk caleg dari kader non partai, akan tetapi untuk masuk menjadi caleg dari partai-partai besar seperti PDIP, P. Golkar, maupun P. Demokrat sangat susah. Partai-partai yang paling banyak menerima caleg dari luar kader partai sendiri adalah partai-partai baru dan partai-partai yang pada pemilu 2004 kurang mendapatkan suara signifikan dan tidak mempunyai basis pengkaderan serta basis massa yang jelas. Sebagian partai politik sudah secara terbuka membuka ruang bagi calon dari luar kader untuk menjadi caleg dari

299 Hasil observasi di Malang Raya selama penelitian ini dilaksanakan.

300 Hasil observasi di Kota Batu menjelang pemilu dan sesudah pemilu 2009.

partai mereka. Dengan demikian, sistem pemilu proporsional daftar terbuka secara murni telah merubah peta politik di Malang Raya secara keseluruhan. Banyak caleg yang direkrut oleh partai yang bukan dari kadernya dengan pertimbangan caleg tersebut akan menguntungkan partai bersangkutan.

Beberapa pertimbangan kenapa seseorang dapat direkrut, walaupun bukan kader partai, yaitu *pertama* karena punya modal sosial; dan *kedua* karena punya modal ekonomi. Modal sosial terkait dengan banyaknya pengikut yang seseorang miliki karena posisinya, baik sebagai tokoh agama, tokoh politik, maupun tokoh masyarakat lainnya. Modal ekonomi terkait dengan kekayaan yang dia miliki, biasanya mereka adalah seorang pengusaha atau orang yang punya kekayaan cukup untuk mendanai kampanye pemenangan pemilu.

Dengan demikian, perubahan dari memilih partai menjadi memilih calon pada pemilu legislatif 2009 sedikit banyak telah menegasikan pendekatan ideologis. Para kader partai bisa pindah ke partai manapun yang dia suka dan bisa menerimanya menjadi caleg, tanpa hirau dengan identitas ideologis dan historis. Begitupun partai bisa menerima setiap orang yang akan menjadi caleg dari partai yang bersangkutan, senyampang dianggap punya potensi baik ekonomi maupun politik, tidak menghiraukan latar belakang caleg yang akan diterima. Pada tingkatan pemilih, pada pemilu 2009 dasar pertimbangan latar belakang atau ideologi partai tidak lagi menonjol, justru yang dominan adalah, apakah calon itu mempunyai kedekatan secara sosial atau pribadi!, dan apakah calon itu bisa memberikan kontribusi secara ekonomi kepada mereka!. Dengan demikian tingkat identifikasi diri kepada partai pada pemilu 2009 sudah sangat rendah dibanding dengan pemilu 1999 dan 2004. Kondisi tersebut telah menyebabkan konstruksi pendekatan ideologi dalam membangun pola hubungan partai dan pemilih semakin pragmatis.<sup>301</sup>

## 2. Penentuan Dapil Caleg

Sudah menjadi semacam peraturan tidak tertulis dalam partai bahwa daerah-daerah yang menjadi lumbung partai, para calegnya selalu diisi

---

301 Yang dimaksud dengan pragmatis adalah cara partai atau caleg dalam melakukan pendekatan kepada pemilih yang sudah tidak lagi mengandalkan pendekatan ideologi atau platform partai namun sudah menjurus ke pendekatan yang berbasis materi berupa program karikatif dan pemberian uang dan barang kepada pemilih.

oleh pimpinan teras partai. Bahkan banyak pemilih yang tidak mengenal sama sekali calon yang akan mewakilinya. Kondisi marak dan jamak terjadi pada pemilu 1999 dan 2004 yang menempatkan partai dalam posisi dominan dalam kemenangan pemilu maupun penentuan caleg. Keadaan ini membuat banyak Pimpinan Daerah atau Cabang partai yang kecewa karena tidak punya kesempatan untuk menjadi caleg dengan nomor urut jadi. Hal ini berdampak pada kurang bergairahnya Daerah atau Cabang partai dalam memenangkan pemilu. Akan tetapi, karena tingkat persaingan dalam internal partai rendah dan perolehan kursi bersifat urut kacang (kalau tidak ada yang mendapat BPP), maka calon-calon yang berada pada nomor urut jadi banyak bekerjasama dan membantu secara finansial calon dengan nomor urut di bawahnya.<sup>302</sup> Hal ini diasumsikan bahwa semakin banyak caleg yang mendapatkan suara, maka kepastian caleg untuk lolos menjadi anggota Dewan semakin tinggi.

Lain pemilu 1999 dan 2004, lain lagi pemilu 2009. Dengan sistem proporsional daftar terbuka (*proportional open list*) para pejabat teras partai harus berjuang keras untuk bisa bersaing dengan caleg lainnya dalam satu partai. Oleh karena itu bagi partai-partai menengah ke bawah, penempatan calon menjadi sangat krusial karena terkait dengan tingkat akseptabilitas calon di daerah pemilihan.<sup>303</sup> Bagi caleg Kabupaten dan Kota, hampir dipastikan akan menempati dapil sesuai dengan asas domisili karena dianggap lebih dikenal dengan calon lain.

Mengingat persaingan yang cukup keras di dapil masing-masing, partai politik tidak sembarangan dalam menurunkan caleg di dapil tertentu kalau memang caleg tersebut tidak dikenal oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, banyak calon-calon dari partai yang di tempatkan dalam dapil yang berdomisili dari dipil caleg yang bersangkutan. Walaupun demikian, ada juga caleg yang keluar dari dapil dimana mereka berada, dengan pertimbangan tingkat persaingannya

---

302 Kalau pada pemilu 2004, kerja sama para caleg terjadi antara caleg dengan nomor urut kecil dan nomor urut dibawahnya. Asumsinya apabila suara yang diperoleh masing-masing caleg, maka besar kemungkinan caleg dengan nomor urut kecil bisa lolos. Sementara kerja sama yang terjadi diantara para caleg pada pemilu 2009 terjadi antara caleg untuk Pusat, Provinsi, dan Kota/Kabupaten.

303 Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa para caleg yang terdaftar, khususnya dari partai kecil dan baru, umumnya mereka yang punya kapasitas baik dari sisi social kemasyarakatan maupun ekonomi.

lebih rendah, seperti tidak ada calon *incumbent*, atau terjadi konflik atau ada dua atau lebih calon yang sama dalam satu daerah sehingga di pindah ke dapil lain.<sup>304</sup>

Sementara bagi caleg yang datang dari luar partai biasanya ditempatkan di dapil yang dalam pemilu sebelumnya tidak mendapatkan kursi dan biasanya ditempatkan dalam urutan bawah. Heterogenya calon yang berada dalam satu partai telah berdampak pada pilihan segmen massa. Baik partai Nasionalis maupun partai Islam sudah tidak lagi membedakan basis konstituen mereka, karena yang jadi pertimbangan dalam pileg 2009 adalah latar belakang dari calon yang bersangkutan.<sup>305</sup>

**Tabel 5.1. Kriteria Penentuan Caleg di Daerah Pemilihan (Dapil) pada Pemilu 2009**

Kriteria Penentuan Caleg di Dapil			
No.	Kriteria Dapil	No.	Kriteria Caleg
1.	Basis Pemilih Partai atau bukan	1.	Besaran Massa: Dari kalangan politisi dan pemerintahan
2.	Adanya <i>Incumbent</i> atau tidak	2.	Modal Ekonomi: Dari kalangan Pengusaha
3.	Jumlah wakil yang diperebutkan	3.	Modal Sosial: dari kalangan organisasi massa baik baik yang berlatar belakang agama maupun umum
4.	Segmen Pemilih (dilihat dari sisi sosiologis)	4.	Popularitas: Dari kalangan seniman, akademisi, olahragawan, dan lain-lain.

Sumber: Hasil wawancara dengan beberapa caleg di Malang Raya pada Maret 2009.

304 Fenomena ini terjadi pada partai-partai yang pada pemilu sebelumnya mempunyai kursi di DPRD, sehingga mereka sangat mengetahui basis pemilih partai secara geografis. Untuk itu caleg yang baru, namun punya jabatan struktural di partai ada kelonggaran untuk memilih dapil lain kalau dalam dapil tersebut ada *incumbent* yang memungkinkan caleg baru tersebut kalah bersaing.

305 Karena pola hubungan partai dan pemilih pada pemilu 2009, akibat dari pengaruh sistem pemilu dengan daftar terbuka penuh, sudah sangat transaksional, maka hampir semua partai politik sudah tidak lagi menekankan basis pemilih tradisionalnya. Karena yang paling menentukan dalam pemilu 2009 adalah kemampuan financial dan kemampuan dalam mengorganisasikan tim kampanye yang bisa mendukung kemenangan caleg. Dari hasil observasi yang dilakukan di Dapil Junrejo Kota Batu, ada caleg dari Partai Hanura yang berlatar belakang seorang pengusaha, menurut salah seorang caleg, dia menghabiskan hampir 400 juta, namun tidak lolos menjadi anggota Dewan karena tim pemenangannya tidak bekerja maksimal.

Pencalon yang tidak mempertimbangkan asas domisili, lebih menonjol untuk caleg Provinsi dan Pusat. Sebagai contoh, caleg DPR RI dari PDIP, Prof. Dr. Gayus Lumbuun menjadi caleg di dapil Malang Raya yang bukan berasal dari Malang Raya. Dalam hasil pemilu menunjukkan bahwa kekuatan Gayus Lumbuun, dengan kapasitas pribadi dan kepopulerannya tidak begitu banyak berperan. Hal ini berbeda dengan Sri Rahayu, yang merupakan tokoh lokal Malang Raya yang relatif tidak begitu populer di pentas Nasional mampu meraup suara yang signifikan.<sup>306</sup> Kasus pencalegan yang relatif tidak mempertimbangkan asas domisili ini lebih banyak dari caleg PDIP dan PKS, hal ini disebabkan karena pemilih PDIP dan PKS lebih fanatis dan lebih ideologis ketimbang partai partai lain.

## B. Pendekatan Pada Pemilihan

### 1. Penguatan Ideologi Partai dan Kaderisasi

Ideologi dan nilai-nilai merupakan pondasi hubungan partai politik dengan konstituen. Disamping itu ada tiga pilar yang dapat membangun partai, yaitu sumber daya manusia, prosedur dan mekanisme internal partai, dan sumber daya finansial. Partai harus membangun ideologi sebagai landasan pemikiran dan program partai. Kalau ada ideologi dan nilai-nilai yang jelas, partai dapat mengidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kurang lebih satu kesamaan dengan ideologi yang mau dikembangkan partai, kemudian pengembangan program dapat dijalankan. Ideologi dan nilai-nilai dihadapkan pada semua masalah untuk mengembangkan tawaran solusi atas masalah-masalah, baik masalah ekonomi, sosial, budaya, dan politik.<sup>307</sup>

---

306 Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari KPU di Malang Raya, suara Gayus Lumbuun lebih rendah dibanding dengan suaranya Sri Rahayu yang nota bene sebagai caleg yang berdomisili di Malang.

307 Dalam pemetaan Ideologi politik di Indonesia kita bisa menelusurinya dengan memahami berbagai pemikiran yang telah dikemukakan oleh para tokoh politik maupun akademisi pada era tahun 1950-an. Dari kalangan politisi, Soekarno (1964) memetakan ideologi partai politik ke dalam Nasionalis-Agama-Komunis (Nasakom), dimana kelompok Nasionalis diwakili oleh PNI, Agama oleh Masyumi dan NU sedangkan Komunis direpresentasi oleh PKI. Dari kalangan akademisi, Feith dan Castles (1970) menyodorkan pembagian yang lebih kompleks untuk Sungai Budaya tahun 1950-an, yaitu, Nasionalisme radikal (PNI), Tradisionalisme Jawa (PNI-PKI-NU), Islam (NU, Masyumi), sosialisme demokratis (PNI-Masyumi) dan komunisme (PKI). Mencoba mengikuti Feith dan Castles, Dhakidae (1999) membagi masyarakat ke dalam empat kelompok, yaitu kelompok Nasionalis (PDI-P), Pembangunan (Golkar), Agama (PBB) dan Sosialisme (PRD). Sedangkan Suryadinata (2002)



Berbagai program dan kegiatan yang akan direalisasikan perlu direncanakan dan dipersiapkan dengan baik agar tidak terjadi kekacauan dalam pelaksanaannya. Hal ini merujuk pada apa yang dikemukakan partai politik, dimana secara konseptual apa yang mereka kemukakan baik yang tertulis maupun yang dikemukakan para elit politik sangat bagus, namun dalam tahap implementasi tidak sebaik gagasan dan konsep yang dikemukakan. Dengan demikian, kelemahan yang terjadi banyak pada tataran implementasi di lapangan, yang menyebabkan banyak masyarakat kecewa karena menganggap tidak sesuai dengan janji yang disampaikan.

Oleh karena itu, pengelolaan hubungan yang transparan dan konsisten dengan masyarakat menjadi penting bagi keberlangsungan dan survival partai politik. Hal ini membutuhkan hubungan dan komunikasi dengan masyarakat yang setara di bawah payung ideologi yang sama, agar masyarakat lebih akrab dan terikat pada partai dan akan memberikan kontribusi kepadanya. Dalam kenyataannya, partai politik tidak berusaha membangun hubungan dengan konstituen yang stabil dan berjangka panjang. Hubungan jangka panjang dengan konstituen dapat dicapai dan dikelola dengan cara mengembangkan pemahaman ideologi dan nilai-nilai dasar partai, termasuk membangun (infra-) struktur partai.<sup>308</sup>

Kejelasan ideologi partai politik dianggap memberikan kepastian bagi pemilih, terutama bagi oleh pemilih Santri Modernis. Selama ini ada kegamangan dari partai-partai yang cenderung menuju ke pusat/tengah dalam ranah ideologi dengan alasan untuk dapat menjangkau konstituen yang lebih luas dan fleksibel. Akan tetapi bagi sebagian pemilih hal ini dirasakan membingungkan, karena pemilih tidak mempunyai keyakinan dan ketenangan ketika memutuskan partai apa yang harus menjadi pilihannya. Sebagai contoh adalah konstituen

---

mengkristalkan kembali pemikiran dan aliran politik yang ada ke dalam dua kategori besar, yaitu, Pancasila dan Islam Politik (*Political Islam*).

308 Yang dimaksud dengan Infra struktur partai adalah jaringan organisasi partai yang modern dan professional dari Pusat sampai ke Daerah. Walaupun demikian banyak yang mengidentikan bahwa organisasi partai politik modern lebih ditunjukkan oleh partai elit dengan mengkreasi platform partai untuk dijual kepada masyarakat pemilih, namun demikian, partai massa yang cenderung mengutamakan ideologis dengan tanggung jawab untuk menyalurkan aspirasi dari bawah tetap membutuhkan infrastruktur partai yang kuat. Salah satu hal penting dari terbangunannya infra struktur partai yang baik adalah akan berjalannya proses regenerasi dan meminimalkan konflik internal partai, serta konflik partai dengan konstieunnya.

yang berlatar belakang Muhammadiyah, di satu sisi PAN merupakan partai bentukan tokoh-tokoh Muhammadiyah, namun di sisi lain partai ini tidak mencantumkan Islam sebagai dasar ideologis partai. Oleh karena itu, sebagian warga Muhammadiyah menjadi gamang, terutama mereka yang Konservatif, dalam menentukan pilihan politik kepada PAN. Hal ini dibuktikan dengan ada sebagian kelompok pemilih dari warga Muhammadiyah yang merasa lebih pas dengan PKS atau PBB karena dianggap secara ideologi lebih jelas, dimana PKS maupun PBB Islam secara formal menjadi dasar ideologi partai.

Berkenaan dengan upaya penguatan ideologi hampir semua partai politik tidak punya agenda yang jelas,<sup>309</sup> kecuali PKS yang memang melakukan pengkaderan dari bawah lewat aktivitas keagamaan yang dinamakan "tarbiyah". Dalam perkembangannya partai politik kita sudah mengalami degradasi moral, tidak berani mengusun visi dan misi. Kalau partai yang berbasis Islam ingin maju dan mendapat perhatian serta dukungan dari kalangan umat Islam, maka partai Islam harus sungguh-sungguh memperjuangkan Islam. Partai Islam yang ada sekarang hanya partai Islam yang melulu mengejar kekuasaan. Akan tetapi partai juga tidak boleh terjebak dengan ideologi. Artinya partai tidak hanya jualan ideologi saja kepada masyarakat tanpa ada upaya kongkrit untuk menyelesaikan persoalan riil yang dihadapi masyarakat.

Pandangan umum dalam masyarakat Malang Raya menunjukkan bahwa walaupun penguatan ideologi itu penting terutama berkaitan dengan proses kaderisasi partai, namun ada hal yang mereka tidak setuju dengan praktek yang dijalankan partai sekarang ini yang berkaitan dengan penggunaan agama sebagai justifikasi partai politik. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu, yang menganggap partai Islam sekarang ini cuma formalitas saja karena dalam prakteknya antara partai Islam dan partai non-Islam

---

309 Hasil observasi terhadap parta-partai peserta pemilu 2004 maupun 2009, terutama partai-partai yang lolos electoral threshold, aktifitas partai lebih menonjol hanya pada saat-saat mendekati pemilu. Sementara yang terkait kaderisasi, walaupun hasil wawancara dengan aktifis partai maupun anggota dewan, mengemukakan bahwa kaderisasi dilakukan, namun dalam prakteknya tidak bisa menunjukkan bukti kongkrit yang sifatnya continue. Dengan demikian bisa dikatakan, kaderisasi yang dilakukan partai-partai hanya bersifat insidental, kecuali kaderisasi yang dilakukan oleh PKS. Kaderisasi yang dilakukan PKS, cukup intens, dengan sistem tarbiyah yang banyak dilaksanakan di kampus-kampus, sebagaimana penulis amati di Kampus Universitas Muhammadiyah Malang.

sama saja. Partai Islam yang bagus tidak hanya menjual ideologi – justru harus memperjuangkan kepentingan riil kebutuhan masyarakat, karena masyarakat tidak memikirkan ideologi. Pada saat ini para pemilih melihat partai Islam hanya namanya saja, karena tidak ada yang bisa membedakan secara kongkrit dimata masyarakat. Partai Islam dan non Islam hampir sama saja, baik visi maupun misi tidak bisa secara tegas dibedakan, dalam keadaan tertentu partai sekuler lebih banyak perhatian pada masyarakat Islam, sementara di sisi lain partai yang mengatasnamakan Islam tidak atau jarang memperjuangkan kepentingan orang-orang Islam.

Dalam ceramah agama sering juga terdengar kalimat, “dalam Islam juga diajarkan kepada kita, sebagai pemeluk Islam harus memperhatikan masyarakat miskin.” Begitu juga, doa-doa yang disampaikan setelah menjalankan ibadah sholat banyak mendoakan fakir miskin. Akan tetapi sekali lagi dalam prakteknya kalangan umat Islam, termasuk mereka yang duduk di legislatif, kurang peduli dengan hal itu. Mereka baru datang hanya pada saat menjelang pemilu.

Walaupun demikian ada sebagian masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah yang ada di pedesaan, yang kurang peduli dengan pemberitaan mengenai citra negatif dari anggota legislatif dari partai mereka. Bagi mereka yang penting bukan kinerja dalam menjalankan peran dan fungsi partai, namun apakah calon anggota dewan tersebut punya kedekatan dengan mereka? dan apakah mereka punya karakteristik perilaku sosial yang sama dengan mereka?. Tidak bisa berbuat apa-apa ketika duduk jadi anggota dewan bukan kesalahan dimata masyarakat kecil, yang menjadi masalah apabila mereka tidak bisa menjadi bagian dari mereka. Oleh karena itu, bagi masyarakat Abangan, calon yang akan duduk di legislatif harus punya budaya Abangan, begitu pun calon dari partai Islam harus mempunyai karakteristik keislaman, atau kepekaan sosio-religiusitas.

Hal yang paling menarik, masyarakat Malang Raya punya identifikasi kuat terhadap partai yang mereka pilih, khususnya pemilih PDIP dan PKB pada pemilu 1999 dan 2004.<sup>310</sup> Garis ideologis yang

310 Hasil observasi selama penelitian ini dilaksanakan di Malang Raya, konstituen PDIP dan PKB menunjukkan tingkat identifikasi yang tinggi. Hal ini bisa dilihat dari tingkat panatisme konstituen mereka pada partai, yang bisa dibuktikan dengan kebanggaan mereka dalam pemakaian kaos partai mereka masing-masing, khususnya pada pemilu 1999 dan 2004. Pada pemilu 2009, tingkat identifikasi pemilih santri Tradisional terhadap PKB mengalami

dikemukakan Geertz (1960) yang jelas kelihatan dalam alur kehidupan politik masyarakat. Walaupun mereka banyak tahu dan tidak senang dengan perilaku anggota dewan yang suka melupakan janji-janjinya, namun mereka tetap berpegang pada partai yang telah dipilihnya. Begitupun dalam soal berkomunikasi dengan anggota dewan dari parpol lain, menurut hasil pengamatan, mereka tidak merasa “sreg” kalau yang diajak komunikasinya itu adalah mereka yang berlatar belakang berbeda. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian perilaku pemilih di pedesaan Jawa oleh Afan Gaffar (1992), orientasi *sosio-religious* mempunyai korelasi terhadap perilaku pemilih PPP, Golkar dan PDI. Santri cenderung memilih partai Islam dan kaum Abangan memilih partai yang tidak membela dan memajukan Islam.

Keberhasilan partai dalam mempertahankan massa lewat pendekatan ideologi bisa dibuktikan dari tetap bertahannya para pemilih mendukung partai politik mereka baik yang berasal dari segmen pemilih Santri, Abangan, maupun Piyayi.<sup>311</sup> Keberhasilan partai-partai yang memperoleh dukungan pemilih bersumber dari ideologi bukan dari upaya sistem kaderisasi yang terprogram, namun umumnya lewat kaderisasi yang bersifat alami.<sup>312</sup> Walau demikian, tidak semua partai mengandalkan sistem kaderisasi alami, karena ada juga dilakukan dengan sistem kaderisasi yang terprogram seperti Partai Golkar dan

---

penurunan yang sangat drastis. Hal ini disebabkan oleh karena PKB dilanda konflik, akibat rencana pemecatan Muhaimin Iskandar oleh Gus Dur, namun hal ini tidak bisa terlaksana. Akibat peristiwa itu, muncul dua kubu kepemimpinan, yaitu kubu pro-Muhaimin dan kubu pro-Gus Dur, dan kubu Muhaimin memenangkan sengketa sehingga berhak untuk mengikuti pileg 2009. Namun akibat tidak adanya dukungan Gus Dur, maka konstituen yang pada pemilu 1999 dan 2004 memilih PKB, maka pada pemilu 1999 pada mengalihkan pilihan politiknya. Berdasarkan hasil analisis dokumen pemilu Malang Raya, umumnya daerah-daerah yang dulu menjadi pendukung kuat PKB menjadi pendukungnya Partai Demokrat.

311 Hasil analisis dokumen pemilu 1999 dan 2004, menunjukkan bahwa PDIP, PKB, PAN dan Golkar memperoleh suara cukup signifikan. Keempat Partai tersebut, khususnya PDIP, PKB, dan Golkar pada pemilu 1999 merupakan partai yang paling dominan dalam perolehan kursi di DPRD baik Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.

312 Sistem kaderisasi yang secara alami terjadi dalam masyarakat yang berperan dalam menumbuhkan identifikasi terhadap partai bisa dilihat dari kehidupan sosial masyarakat. Pola kehidupan sosial rutin yang mewarnai aktivitas masyarakat pedesaan, seperti yang terjadi di kalangan Santri Tradisional tidak lepas dari aktivitas ritual keagamaan seperti pengajian, tahlilan, khajatan, yasinan dan lain-lain. Sementara bagi sebagian kelompok Abangan khajatan menjadi ciri khas mereka, ditambah dengan berbagai aktivitas kesenian yang merupakan ciri khas Abangan seperti jaranan (kuda lumping) dan Bantengan. Semua ini telah menumbuhkan identitas kelompok masing-masing, dan pada akhirnya berpengaruh pada identifikasi politik mereka.

PKS. Konsistensi pemilih terhadap partai politik yang punya program serta sistem kaderisasi yang jelas masih terbukti, terutama pada pemilu 1999 dan 2004. Salah satu partai yang masih punya sistem kaderisasi adalah Golkar, dan pada setiap pemilu masih punya dukungan pemilih yang stabil, walau tetap mengalami penurunan.

Partai politik berusaha menguatkan ideologi partai dari mulai tingkat kader, simpatisan, sampai partisan. Pada tingkatan kader partai politik melakukannya dengan program kaderisasi, pada tingkatan partisan dilakukan dengan pelatihan, dan pada tingkat simpatisan dilakukan dengan sosialisasi.

## 2. Segmen Pemilih yang Dibidik

Strategi yang dikembangkan partai politik dengan menekankan pada ideologi telah melahirkan pola hubungan yang bersumber pada basis massa masing-masing, Partai Islam menjalin hubungan dengan Kelompok Santri dan Partai Nasionalis berhubungan dengan Kelompok Abangan.

Dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan dukungan terhadap partai, banyak cara yang dilakukan baik yang dilakukan oleh Partai Nasionalis maupun Partai Islam. Partai Islam, dalam rangka memperkuat dukungan pemilihnya, cara yang sering dilakukan adalah dengan menanamkan doktrin-doktrin partai yang berasal dari ayat-ayat suci.<sup>313</sup> Bahkan dalam kampanyenya pun, partai Islam seperti PKB, PPP, maupun yang lain di setting seperti acara pengajian. Para pendukung yang datang pun banyak berasal dari kalangan yang secara sosiologis sama, artinya kalau yang melakukan kampanye PKB atau PPP, maka partisipan kampanye yang datang adalah mereka yang berasal dari kelompok santri Tradisional atau NU.

Salah satu bukti bahwa tingkat fanatisme dari pemilih Santri Tradisional tinggi adalah kerelaan mereka untuk mengikuti setiap acara

---

313 Para tokoh politik dari partai Islam seperti PKB, PPP, PNU yang merupakan partai politik berbasis pemilih Santri Tradisional, umumnya berasal dari tokoh agama. Oleh karena itu dalam kampanya, lebih banyak di setting seperti pengajian, dengan demikian tidak bisa dibedakan antara pengajian dan kampanye politik. Tapi pada initynya, mencari pembenar untuk memilih partai, dengan agama (ayat) sebagai alat legitimasi. Hasil wawancara dengan Muslimin, sebagai simpatisan PKB, menyebutkan bahwa PKB dilahirkan oleh NU, maka apabila membela PKB maka membela NU, dan membela NU sama dengan membela agama. Dengan demikian, menurut dia, untuk membela PKB apapun diberikan karena sama dengan membela agama. Hasil wawancara dengan Muslimin, di Dusun Caru Pendem pada bulan Februari 2008.

kampanye yang dilakukan oleh partai yang punya hubungan historis dan sosiologis dengan NU, terutama PKB.<sup>314</sup> Biasanya pemilih tradisional PKB bersedia datang ke tempat kampanye dengan biaya sendiri, salah satu alasan mengapa dia mau datang adalah untuk mendengarkan ceramah agama. Dalam tradisi di kalangan partai yang berbasis pemilih Santri Tradisional, kampanye biasanya di seting sesuai dengan kultur mereka.<sup>315</sup>

Di sisi lain, bagi Partai Nasionalis, kampanye yang dilakukan pada pemilu 1999 banyak melakukan kampanye terbuka dengan mendatangkan juru kampanye yang punya ikatan keluarga dengan mantan Presiden Soekarno.<sup>316</sup> Lepas dari banyaknya partai yang mengatasnamakan pelanjut dari ideologi marhaen yang jadi ikon ideologis dari Partai Nasionalis, PDIP menjadi satu-satunya partai yang paling banyak mendapatkan saham politik dari PNI<sup>317</sup> (parpol peserta pemilu 1955). Megawati yang merupakan anak sulung dari Soekarno, dan menjadi Ketua Umum PDIP, tidak bisa dipungkiri telah menjadi

---

314 Pemilu pasca reformasi di Malang Raya, partai politik yang menjadi pilihan masyarakat selain PDIP adalah PKB. Di lingkungan-lingkungan yang banyak pesantrennya, menunjukkan fakta bahwa PKB mendapat dukungan mayoritas pemilih. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari hasil pemilu 1999, 2004. Namun pada pemilu 2009, PKB mengalami kemunduran, dan bahkan di Kota Batu PKB tidak mendapatkan wakilnya, justru yang dapat adalah PKNU.

315 Acara pengajian, Istighosah, tahlilan, maupun kegiatan ritual keagamaan kadang dijadikan sebagai media kampanye. Khusus pada acara kampanye akbar biasanya mendatangkan juru kampanye dari tingkat Nasional, dan Gus Dur menjadi "ikon" sekaligus daya tarik bagi jamaah NU. Kedatangan Gus Dur menjadi ajang dari pertemuan para pengikut setia dari kelompok Nahdilyin. Kedatangan mereka ke acara kampanye juga biasanya atas instruksi dari kyai lokal yang membina kehidupan sosial-religi yang sangat instens di lakukan.

316 Partai-partai nasionalis seperti PDIP, Partai Pelopor, dalam kampanye terbuka sering melibatkan tokoh-tokoh yang berasal dari keluarga Soekarno. Hasil observasi penulis selama penelitian ini dilaksanakan, di Malang Raya pada saat acara kampanye pemilu.

317 PNI didirikan di Bandung Tahun 1927 oleh para tokoh nasional seperti Dr. Tjipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr Iskaq Tjokrohadisuryo dan Mr Sunaryo. Selain itu para pelajar yang tergabung dalam Algemeene Studie Club yang diketuai oleh Ir. Soekarno turut pula bergabung dengan partai ini. Pada tahun 1928 berganti nama dari Perserikatan Nasional Indonesia menjadi Partai Nasional Indonesia. 1929-PNI dianggap membahayakan Belanda karena menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan sehingga Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan perintah penangkapan pada tanggal 24 Desember 1929. Penangkapan baru dilakukan pada tanggal 29 Desember 1929 terhadap tokoh-tokoh PNI di Yogyakarta seperti Soekarno, Gatot Mangkupraja, Soepriadinata dan Maskun Sumadiredja. Pengadilan para tokoh yang ditangkap ini dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1930. Setelah diadili di pengadilan Belanda maka para tokoh ini dimasukkan dalam penjara Sukamiskin, Bandung. Dalam masa pengadilan ini Ir. Soekarno menulis pidato "Indonesia Menggugat" dan membacakannya di depan pengadilan sebagai gugatannya. Pimpinan PNI, Ir. Soekarno diganti oleh Mr. Sartono. Mr. Sartono kemudian membubarkan PNI dan membentuk Partindo pada tanggal 25 April 1931. Moh. Hatta yang tidak setuju pembentukan Partindo akhirnya

representasi dari PDIP sebagai penerus ideologi marhaen yang banyak mendapat dukungan dari kalangan *wong cilik*.<sup>318</sup>

Dengan mengemas ideologi dalam strategi pemenangan pemilu pada pemilu 1999, telah menempatkan PDIP sebagai partai yang paling besar mendapatkan simpati dari pemilih. Di Malang Raya, PDIP mendominasi perolehan suara dengan jumlah 162.818 suara (41,22 persen) di Kota Malang, 510.450 suara (38,47 %) di Kabupaten Malang. Partai Golkar yang pada saat Orde Baru selalu menjadi pilihan politik pemilih hanya mampu meraup suara sekitar 16,04 % di Kota Malang dan 18,32 % di Kabupaten Malang. Dengan perolehan suara tersebut, PDIP menempatkan diri sebagai peringkat pertama di Malang Raya.<sup>319</sup>

**Tabel 5.2. Tujuh Partai Politik Pemilu 1999 yang Memperoleh Suara Cukup Signifikan di Kabupaten dan Kota Malang**

No.	Nama Partai	Kota Malang		Kabupaten Malang	
		Perolehan suara	Prosentase	Perolehan suara	Prosentase
1	PDI-P	162.818	41,22%	510.450	38,47%
2	PKB	77.429	19,60%	392.472	29,57%
3	P. Golkar	63.362	16,04%	243.110	18,32%
4	PPP	3157	0,78	45.939	3,46%
5	PAN	41.582	10,53%	38.891	2,93%
6	PDS	11.080	2,80%	1.179	0,086
7	PBB	9.518	2,41%	9.875	0,74%

Sumber: KPUD Malang Raya yang telah diolah penulis.

Keterangan: Pada pemilu 1999 Kota Batu masih berstatus Kota Administratif yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Malang.

Di sisi lain, Partai Kebangkitan Bangsa yang merupakan partai yang berbasis pemilih Santri menempati urutan kedua terbesar setelah PDIP

---

membentuk PNI Baru. Ir. Soekarno bergabung dengan Partindo. Ir. Soekarno ditangkap dan dibuang ke Ende, Flores sampai dengan 1942. Pada tahun 1934 Moh. Hatta dan Syahrir dibuang ke Bandaneira sampai dengan 1942, dan pada tahun 1955 - PNI memenangkan Pemilihan Umum 1955. [www.google.co.id](http://www.google.co.id).

318 Dalam rangka mempertegas akan keberpihakan pada wong cilik, PDIP selalu mencitrakan diri sebagai pembela wong cilik, terutama pada massa Orde Baru. Sebagai konsekuensi dari keberpihakannya pada wong cilik ini, PDI massa Orde Baru, dalam kepemimpinan selalu menjadi target pemerintah untuk dilemahkan. Oleh karena itu, kejatuhan pemerintahan Orde Baru menjadi momentum baru bagi PDIP sebagai partai yang mengatasmakan diri sebagai partainya wong cilik dalam rangka meneguhkan jati dirinya sebagai partai Nasionalis.

319 Hasil analisis dokumen pemilu di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.

yaitu 19,60 % untuk Kota Malang dan 29,57 % untuk Kabupaten Malang, padahal secara nasional jumlah pemilih yang memberikan suaranya ke PKB ini pada tahun 1999 hanya 12,62 %. Hal ini bisa dipahami karena wilayah Jawa Timur, khususnya Malang Raya merupakan basis dari Partai NU yang pada pemilu 1955 merupakan pemenang kedua setelah Masyumi. Sementara dukungan pemilih pada partai Islam lainnya tidaklah signifikan, kecuali untuk PAN yang punya basis pemilih golongan Islam Modernis mendapat 10,53 % di Kota Malang.

Masyarakat Abangan di Malang Raya yang cukup besar menunjukkan identitas dirinya dengan memilih partai PDIP, begitupun mereka yang Santri menunjukkan identitas ke-Santrian dengan memilih partai Islam. Jika dibandingkan antara golongan pemilih Abangan dengan pemilih Santri, secara kuantitatif pemilih Abangan lebih besar, walaupun Malang ini terkenal juga dengan masyarakat Islami.<sup>320</sup>

Walaupun pada pemilu 1999, PPP, PBB, PKS, sangat getol menyuarakan syariat Islam dalam rangka meraih simpati pemilih, namun hasilnya tidak memuaskan. Berbeda dengan PKB yang tidak secara formal mencantumkan Islam sebagai asas partai, hasilnya bagi PKB cukup memuaskan karena menjadi terbanyak kedua setelah PDIP, dan yang ketiga dipegang Golkar. Artinya dalam pemilu 1999, di Malang Raya pilihan partai bukan persoalan ideologi saja, namun lebih terkait dengan persoalan identifikasi diri terhadap partai yang punya figur kharismatis dan sikap positif terhadap kinerja partai. Kalau dikaitkan dengan logika politik aliran, maka hasil pemilu 1999 masih mencerminkan politik aliran seperti yang dikemukakan Geertz (1960).<sup>321</sup>

Dengan demikian, akibat dalam pemilu 1999 lebih menekankan pada ideologi, maka pilihan basis massa masing-masing sejalan dengan

---

320 Karena besarnya masyarakat Abangan ini, maka PDI-P Malang Raya memiliki pendukung cukup banyak yang dibuktikan dengan pilihan politik pemilih pada PDIP ketika pemilu 1999. Kemenangan PDIP di Malang Raya hampir merata di setiap daerah (Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu).

321 Salah satu kelemahan muncul dari penjelasan konsep aliran itu sendiri, dimana Geertz tidak konsisten memberikan definisi pada konsep yang ditemukannya itu. Dalam konteks ini Geertz di satu pihak melihat aliran sebagai sesuatu yang abstrak dengan apa yang disebut "*cultural paradigm*" yaitu sebuah struktur symbol yang merupakan sitem gagasan dan tingkah laku public. Namun pada saat lainnya, aliran disebutnya sebagai suatu yang bersifat riil. Lihat Joes S. Khan, *Ideology and Social Structure in Indonesia*, dalam Ben Anderson and Audrey Kahin, *Interpreting Indonesian politics: Thirteen Contributions to Debates*, (Ithaca, New York: Cornell Modern Indonesia Project, South Asia Program, Cornell University, 1982), hlm. 96.



politik aliran. Partai Nasionalis, seperti PDIP, menggarap pemilih Abangan, dan Golkar menggarap pemilih Priyayi.<sup>322</sup> Sementara Partai Islam, atau yang punya hubungan sosiologis dan historis dengan pemilih Islam menggarap pemilih Santri. PKB, PPP menggarap pemilih Santri Tradisional, dan PAN, PBB menggarap Santri Modernis.<sup>323</sup>

Memasuki pemilu 2004, sedikit terjadi perubahan dalam peta basis masa pemilih.<sup>324</sup> Pengalaman pemilu 1999 dijadikan sebagai barometer dalam membangun strategi bagi kemenangan pemilu 2004. Pemilih Santri yang pada pemilu 1999 cenderung fanatik dengan Partai Kebangkitan Bangsa, mulai mengalihkan pilihan politik ke partai lain pada pemilu 2004. Begitu juga dengan pemilih PDIP. Salah satu barometer yang bisa dijadikan indikator adalah menurunnya perolehan suara pada pemilu 2004 yang cukup besar di Malang Raya, khususnya yang dialami oleh PDIP dan PKB. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk menjaring pemilih yang lebih luas spektrumnya, walau mereka tidak serta merta keluar dari basis tradisionalnya.

Dalam pemilu 2004 walaupun pola hubungan partai dan pemilih masih diwarnai politik aliran, namun sudah mengalami pergeseran perolehan suara yang tampak dari penurunan suara PDIP, PKB, PAN maupun Golkar. Munculnya partai papan tengah baru seperti PKS dan

---

322 Priyayi sebenarnya merupakan varian dari abangan, namun karena punya karakter berbeda dengan adanya "etiket" Priyayi seolah menjadi varian sendiri dalam aliran politik. Padahal Geertz, melakukan dasar analisisnya pada pola perilaku keberagaman bukan pada hubungan sosial, dengan demikian kalau Geertz menjadikan Priyayi sebagai varian tersendiri di luar Abangan dan Santri itu tidak tepat. Pengukuhan kelompok Priyayi dalam konstelasi politik kepartaian muncul ketika rezim Orde baru. Masuknya pemilih Pegawai Negeri sebagai pendukung utama Golkar diasumsikan sebagai bagian dari konsekuensi dari afiliasi politik Priyayi. Orde Baru seolah menjadi legitimasi bagi kelompok Priyayi ini, dimana Golkar dijadikan sebagai penghubung bagi kelompok Priyayi untuk menjustifikasi mereka yang mengatakan bahwa aliran ini tercermin dalam kehidupan sosial maupun politik. Padahal ketika Geertz melakukan penelitiannya di Mojokuto, Pare, Kota Kediri, pada saat itu yang dimaksud dengan Priyayi adalah mereka yang punya trah kerajaan (bangsawan) dan bekerja untuk pemerintah Belanda. Jelasnya mereka bukan birokrat atau pegawai negeri seperti sekarang yang diangkat dan dipilih berdasarkan rekrutmen profesional untuk kepentingan menjalankan birokrasi pemerintahan. Di samping itu konstelasi politik pada saat itu jauh berbeda dengan sekarang.

323 Hasil observasi yang dilakukan terhadap partai Amanat Nasional di Kota Malang dan Kota Batu. Hasil pemilu 1999 dan 2004, kedua daerah ini, PAN, mendapatkan suara yang cukup signifikan karena mengoptimalkan hubungan baik dengan konstituen yang berlatarbelakangan santri modernis Muhammadiyah.

324 Pada pemilu 2004, peta politik berubah seiring dengan adanya peningkatan perolehan suara dari Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. PDIP dan PKB di Malang Raya tidak lagi mendominasi perolehan suara seperti pada pemilu 1999.

Partai Demokrat menjadi indikasi adanya kecenderungan sebagian pemilih sudah meninggalkan identifikasi dirinya berdasarkan pada partai.

Gejala semakin ditinggalkannya partai oleh pemilih, lebih terang dalam pemilu 2009.<sup>325</sup> Oleh karena itu, partai lebih mengedepankan pendekatan ekonomi daripada ideologis ketika memutuskan untuk meraih simpati pemilih. Partai lebih berpikir praktis pragmatis dalam membangun strateginya, dimana program jangka pendek yang bersifat karikatif dan berbiaya tinggi lebih menonjol ketimbang pendekatan yang bersifat ideologis. Oleh karena itu, basis massa yang digarap menjadi lebih lebar karena tidak ada hambatan ideologis. Program karikatif seperti batuan sosial seperti kesehatan, pembangunan sarana ibadah, dan lingkungan, dianggap bisa diterima oleh semua kalangan. Oleh karena itu, PKS yang merupakan partai Islam modernis, segmen massa yang di bidik pada pemilu 2009 tidak melulu kelompok massa Santri Modernis namun juga melebar ke segmen pemilih Satri Tradisional dan Abangan dengan lewat berbagai program sosialnya. Dan hasilnya pada pemilu 2009 PKS mengalami kenaikan signifikan dibanding dengan partai-partai Islam lainnya.

### C. Strategi Berhadapan dengan Partai Lain

Banyaknya partai pada setiap pemilu membawa dampak tidak baik pada perilaku partai politik. Karena partai baru belum mempunyai basis pemilih yang jelas, maka untuk bersaing dengan partai mapan, partai baru berusaha dengan segala cara untuk mendapatkan simpati dari pemilih, termasuk dengan cara praktis pragmatis berupa pembelian suara.<sup>326</sup> Kondisi ini mendorong partai mapan untuk mengimbangi cara yang dilakukan partai baru agar konstituennya tidak lari ke partai lain. Perilaku praktis pragmatis tidak hanya ketika pemilu, juga terjadi pasca pemilu, terutama dalam memperebutkan kekuasaan.

Kuskrido Ambardhi ketika mengungkap politik kartel menemukan bahwa perilaku partai berbeda dari satu arena ke arena lain. Jelasnya

---

325 Partai politik pada pemilu 2009, tidak lagi focus pada basis pemilih tradisionalnya, mereka sudah berusaha melebarkan ruang gerak dalam menggapai dukungan pemilih. Sebagai contoh PAN tidak lagi berusaha mendulang suara dari pemilih modernis Islam, namun sudah menggarap pemilih santri tradisionalis, bahkan abangan.

326 Pembelian suara yang paling menonjol terjadi pada pemilu 2009, hampir semua partai politik terlibat dalam proses ini baik dalam skala kecil maupun besar. Hasil observasi di wilayah pedesaan, seperti Desa Pendem Kota Batu, Desa Ampel Dento Kabupaten Malang, Desa Karang Ploso Kabupaten Malang, menjelang pemilu 2009 dilaksanakan.

perilaku partai di arena electoral tidak linier dengan arena legislatif maupun pemerintah, yang seharusnya terjadi dalam kaca mata Sartori sebagai penerus kepentingan adalah linier, diakibatkan oleh perilaku dinamik elit. Setelah setelah selesai pertarungan di arena electoral, partai politik berusaha untuk berkompromi satu sama lain dalam upaya untuk meraup keuntungan ekonomi yang dibutuhkan untuk menghidupi kebutuhan politik partai.

### 1. Mengembangkan Politik Kartel

Secara sederhana, politik kartel bisa dikatakan sebagai kolusi antara dua atau lebih partai untuk mempertahankan diri. Hal ini dilakukan agar partai-partai lain yang berada diluar kelompok mereka tidak bisa mendapatkan akses pada kekuasaan atau mendapat resources yang berasal dari negara. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa ciri utama dari politik kartel adalah "kolusi" untuk mendapatkan privilege dari negara atau pemerintah baik itu beru jabatan atau uang.

Andrew Knapp,<sup>327</sup> yang mengkaji bagaimana partai-partai di Perancis menjadi partai kartel. Ada beberapa petunjuk untuk melihat apakah parta-partai mengembangkan politik kartel, antara lain: partai menunjukkan adanya pelemahan dalam hal orientasi mereka kepada ideology, lebih mengutamakan pencarian dana, bekerja mereka lebih professional, lebih bergantung pada sumberdaya dari pemerintah.

#### a. Kasus-kasus Korupsi sebagai Dampak dari Politik Kartel

- Kelebihan Dana Parpol

Pencairan dana parpol seharusnya mengacu kepada UU nomor 31 tahun 2002 tentang partai politik. Setiap bantuan harus proporsional berdasarkan perolehan kursi di DPRD. Untuk setiap kursi di DPR RI maksimal RP. 21 juta, sedangkan untuk DPRD dana bantuan tidak boleh melebihi jumlah tersebut.

Sebagaimana diketahui, pada tanggal 18 Maret 2004, sekitar 14 ketua dan sekretaris dari tujuh dan 18 partai baru di Kota Malang mendatangi Kantor badan Kesatuan Bangsa (BKD) Pemerintah Daerah setempat untuk meminta bantuan dana kampanye. Keempat belas orang itu masing-masing mewakili Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSO), Partai Merdeka, Partai Nasionalis Banteng

327 Dalam Kuskridho Ambardhi, *Mengungkap Politik Kartel*, Jakarta: PT Gramedia, 2009.

Kemerdekaan (PNBK), Partai Demokrat, Partai Sarikat Indonesia (PSI), Partai Persatuan Daerah (PPD), dan Partai Pelopor.

Kasus lain yang mencuat dan menarik perhatian publik terjadi di Kota Batu terkait kelebihan jumlah penerimaan dana bantuan partai politik senilai 185 juta. Hampir semua partai politik mendapatkan kelebihan dana bantuan ini. Hausnya parpol kepada dana yang berasal dari negara tidak lepas dari tidak diperbolehkannya parpol membangun unit usaha. Oleh karena itu, parpol mengandalkan sumbangan anggota dan pihak lainnya untuk membiayai partai, termasuk dari pemerintah. Namun dana bantuan parpol ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena banyak parpol yang mempergunakan bantuan tidak sesuai dengan peruntukan. Dalam kasus bantuan parpol ini, Heriani, mantan Kabag Kesra Kota Batu, menjadi tersangka.<sup>328</sup>

Di Kabupaten, setiap kursi di Dewan yang berjumlah 45 buah, mendapat jatah Rp 20 Juta, namun penggunaan uangnya tidak jelas. Di Kabupaten Malang, penyalahgunaan Bantuan Keuangan oleh Partai Politik misalnya penggunaan Bantuan yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yaitu pembelian sepeda motor sebesar Rp 260 Juta, Partai Kebangkitan Bangsa untuk pembelian sepeda motor sebesar Rp 150.8 Juta dan bantuan transport serta bingkisan lebaran sebesar Rp 49 Juta. Tak hanya PDIP dan PKB, dinilai tidak tepat dalam penggunaan dana. Masalah tersebut muncul disebabkan kurang pahamiannya Bendahara dan Ketua DPC masing-masing partai dalam menggunakan bantuan keuangan sesuai ketentuan.<sup>329</sup>

Terkait dengan pendanaan Partai Politik, Ahmad Djuanda menyatakan bahwa pendanaan partai di Indonesia amburadul. Partai politik hari ini berorientasi kepada membangun kekuasaan politik melalui uang sehingga partai sangat tergantung dengan sumbangan dari pihak-pihak yang memiliki modal. Akibatnya peran-peran partai tidak secara konsisten mengawal demokratisasi namun hanya untuk kekuasaan dan uang. Menurut Djuanda, seharusnya partai

---

328 Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hamik, Zuhairi, SH., di Pengadilan Negeri (PN) Malang, saksi Edi Murtono menyatakan bahwa pencairan banpol tersebut didasarkan atas pengajuan proposal yang sudah mendapat persetujuan dari Wali Kota batu Imam Kabul (Alamarhum). Banantuan tersebut berasal dari pos bantuan sosial, ormas dan parpol, yang telah dianggarkan dalam APBD. [www.surya.co.id/2009](http://www.surya.co.id/2009).

329 <http://malangraya.web.id/>.

politik harus mampu mandiri dalam mendanai kiprahnya yang salah satunya dikuatkan melalui iuran anggota. Lebih jauh dia menyampaikan bahwa Partai Politik dalam urusan keuangan juga memiliki kelemahan dalam hal akuntabilitas dan transparansi sehingga partai tidak memiliki data tentang aset-aset partai dan pola penggunaannya. Hal ini diperparah dengan keberadaan peraturan pendanaan partai politik belum komprehensif dan konsisten.<sup>330</sup> Dalam konteks inilah, keberadaan UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang baru digulirkan menemukan momentumnya sebagai titik pijak bagi reformasi partai politik di Indonesia.

- **Korupsi Anggota Dewan**

Sudah sangat dipahami bahwa untuk menjadi anggota dewan bukanlah tanpa biaya. Para caleg yang akan memperebutkan kursi di Kota maupun Kabupaten kisaran biaya yang mereka keluarkan antara 100 juta sampai 500 juta bahkan bisa lebih.<sup>331</sup> Untuk tingkat pusat, sebagaimana yang dikemukakan Mahfud M.D., "Saya melihat di salah satu televisi swasta ada seorang anggota DPR yang secara terbuka membeberkan fakta bahwa pada pemilu tahun 2004 dia mengeluarkan dana Rp 2 miliar untuk menjadi anggota DPR. Untuk tahun 2009, dia menyiapkan Rp 4 miliar untuk dana kampanye. Jadi, memang banyak pos-pos yang harus dilalui. *High cost procedure* ini menjadi pintu awal praktik korupsi".<sup>332</sup>

Padahal setelah menjadi anggota Dewan, penghasil yang diterima tidak bisa secara utuh dibawa ke rumah karena harus ada pengeluaran yang diperuntukan untuk partai masing-masing. Selain itu, pendapatan anggota dewan juga "digerogoti" dengan uang komisi, iuran setiap kegiatan partai, pemilihan kepala daerah dan lain-lainnya. Satu yang tak bisa dihindarkan, anggota dewan mau

---

330 Partai politik, dengan merujuk UU no. 2 tahun 2008 dilarang untuk menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sumbangan partai harus memiliki identitas yang jelas. Parpol dilarang untuk meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya. Selain itu parpol juga tidak diperbolehkan menggunakan fraksi di MPR, DPRD, maupun DPRD sebagai sumber pendanaan parpol. Parpol juga dilarang mendirikan badan usaha dan/ atau memiliki saham suatu badan usaha. <http://www.simpuldemokrasi.com>.

331 Hasil wawancara dengan Rofiq caleg dari PAN Kota Malang, dapil Lowokwaru serta beberapa tim sukses seperti dari Hanura, PAN Kota Batu Serta pembuktian di lapangan pada saat pemilu mau dilaksanakan.

332 <http://hukum-kriminal.infogoe.com>.

tak mau juga mengalokasikan anggaran untuk konstituennya yang jumlahnya kadang tak tentu. Kondisi tersebut mendorong anggota dewan untuk mencari celah yang bisa dipakai untuk menutupi pengeluaran yang besar tersebut baik secara legal maupun illegal. Secara legal dilakukan lewat pembuatan peraturan yang memungkinkan dapat tambahan dari dana APBD.

Salah satu kasus yang terkait penyelewengan dana APBD oleh Anggota Dewan terjadi di DPRD Kota Malang Pada tahun 2001 sebesar 2,1 miliar. Kejaksaan Negeri Kota Malang mengumumkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini yang dianggap bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran. Pertama kejaksaan telah menetapkan Sri Rahayu, bekas Ketua Panitia Anggaran dan Ketua DPRD Kota Malang, sebagai tersangka. Setelah itu ditetapkan lagi tiga tersangka lainnya sehingga menjadi empat orang.<sup>333</sup>

Kasus lain yang terjadi di Kota Malang, terkait dengan pemerian tunjangan purnabakti bagi anggota dewan yang sudah menjabat. Padahal Pemberian uang tunjangan anggota DPRD Kota Malang periode 1999-2004 ini tidak diperbolehkan karena dianggap sebagai pemborosan dan melanggar prinsip keefektifan anggaran.<sup>334</sup> Tidak hanya di Kota Malang, di Kabupaten Malang kasus yang melibatkan Anggota Dewan terkait tunjangan (penghasilan) anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) periode 1999-2004 dan 2004-2009. Tunjangan ini dianggap tidak sesuai dengan prosedur dan merugikan negara hingga miliaran rupiah. Menurut Koordinator Badan Pekerja Malang "*Corruption Watch*" (MCW), Zia Ul Haq, "pemberian tambahan penghasilan para anggota DPRD Kabupaten Malang periode 1999-2004 yang tidak sesuai ketentuan itu mencapai Rp1,157 miliar. Tambahan penghasilan dan tunjangan tersebut, katanya, menyalahi peraturan pemerintah (PP) Nomor 110 Tahun 2000 yang masih berlaku hingga sekarang."<sup>335</sup> Banyaknya kasus yang melibatkan Anggota Dewan, salah satunya juga diakibatkan karena kuatnya kewenangan DPR di bidang budgeting. Kewenangan yang kuat ini membuka peluang korupsi dan kolusi.<sup>336</sup>

333 Hal ini seperti yang disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang, Soroso. <http://www.antikorupsi.org>.

334 Larangan ini diatur dalam PP Nomer 110 tahun 2001 dan Kepmendagri nomor 29 tahun 2001.

335 <http://www.antikorupsi.org>.

336 Mahfud M.D. <http://hukum-kriminal.infogoe.com>.

Data Malang Corruption Watch (MCW) menyebutkan bahwa sampai Juni 2009 masih ada tujuh kasus korupsi di Malang Raya yang penanganannya tidak jelas. Ketujuh kasus tersebut antara lain dugaan korupsi tunjangan komunikasi intensif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang sebesar Rp. 3,7 Milyar, tunjangan komunikasi DPRD Kota Batu sebesar Rp. 500 juta, korupsi di pemerintah Kota Batu sebesar 12 Milyar, korupsi jasa pungut di Pemerintah Kabupaten Malang sebesar Rp. 4,62 Milyar, korupsi pengadaan pot bunga di Pemerintah Kabupaten Malang sebesar Rp. 33,5 juta, dan korupsi di Badan Meteorologi. Sementara kasus lain yang tidak diproses, walaupun menurut koordinator Badan Pekerja MCW, Zia Ul Haq, sudah ada bukti yang menunjukkan kasus korupsi sangat kuat. Kasus tersebut semuanya ada di Kabupaten Malang antara lain, dugaan korupsi di DPRD sebesar Rp. 415 juta, korupsi bantuan partai sebesar 83, 5 juta, pengadaan notebook di dinas pendidikan sebesar, 19,2 juta, dan tunjangan komunikasi intensif DPRD sebesar 3,7 milyar.<sup>337</sup>

## 2. Membangun Partai *Catch-All*

Dengan banyaknya partai politik yang bersaing, baik dalam pemilu 1999 (48 papol), pemilu 2004 (24 parpol), maupun pemilu 2009 (38 parpol)<sup>338</sup> partai politik kesulitan untuk mendapatkan suara yang hanya mengandalkan segmen massa politik yang terbatas. Banyak partai politik pada pemilu 1999 harus gulung tikar akibat kurangnya dukungan untuk memenuhi *electoral threshold*. Begitupun nasib partai politik yang lulus *electoral threshold*, dengan segmen pemilih yang sempit, mengalami penurunan jumlah dukungan pemilih akibat ketidakmampuannya dalam meraih dan mempertahankan simpati pemilih. Kondisi ini telah mendorong partai-partai untuk memperluas segmen massa pemilihnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Demi memperoleh suara yang lebih besar dalam pemilu, ada kecenderungan partai-partai

337 Sumber Koran Tempo, Selasa, 23 Juni 2009

338 Proses politik yang terjadi di DPR hasil pemilu 2004, pada penghujung masa jabatannya para anggota Dewan, khususnya dari partai kecil, berupaya mendesak agar partainya tidak diferifikasi ulang. Untuk itu mereka mengajukan perubahan sistem *threshold*, dari *electoral* menjadi *parliamentary threshold*. Hasil verifikasi awal, KPU meloloskan sebanyak 34 partai politik baik yang lolos *threshold* maupun verifikasi administrative. Namun keputusan ini dianggap tidak adil dan dianggap melanggar perundang-undangan, oleh karena itu, sebagian partai peserta pemilu 2004 yang tidak lolos mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Konstitusi. MK memutuskan bahwa empat partai politik berhak ikut dalam pemilu 2009.

melakukan pencairan basis ideologi mereka, dengan cara merubah sifat organisasi yang eksklusif menjadi inklusif.<sup>339</sup>

Partai Nasionalis maupun Partai Islam, menurut I Ketut Putra Erawan (2008), terus berusaha melakukan pembenahan agar dapat tetap survive. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membenahi platform ideologisnya mereka masing-masing. PDIP sangat relevan sebagai partai massa karena banyak pendukung setia (Marhaenis, Soekarno, Nasionalis, dan mungkin kelompok populis), dan secara teoritik sudah berada pada jalur partai massa sejak berdirinya. Namun kenyataan pemilu 2004 telah mendorong elit-elit partai PDIP untuk mengaburkan partai massa.<sup>340</sup>

Dengan demikian, demi memperoleh suara yang lebih besar dalam pemilu, ada kecenderungan partai-partai melakukan pencairan basis ideologi mereka, dengan cara merubah sifat organisasi yang eksklusif menjadi inklusif. Perubahan ini membuka kemungkinan bagi partai untuk melakukan reposisi dan redefinisi fungsi mereka yang semakin jelas dan efektif dalam dinamika politik (Katz and Mair, 1955). Partai tidak sekedar berfungsi sebagai pencari legitimasi (perspektif partai elit) atau menyalurkan aspirasi massa (perspektif partai massa). Perubahan ini terjadi karena masuknya perspektif perilaku rasional kedalam wacana perdebatan ilmiah mengenai peran dan fungsi partai politik (Downs, 1957).

---

339 Setelah pemilu 1999, partai politik yang merasa tidak cukup kuat untuk meraih dukungan pemilih dari basis pemilih tradisionalnya, maka mereka berusaha untuk mengembangkan segmen pemilihnya. Salah satu kita agar bisa meraih dukungan pemilih dari luar basis tradisional, partai Islam melakukan pembenahan dalam membangun isu politiknya dengan tidak menonjolkan syariat Islam secara fulgar walaupun tetap tidak merubah jati dirinya sebagai partai Islam. Begitupun partai Nasionalis berusaha untuk menggaet pemilih diluar basis tradisionalnya, dengan cara membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh Islam.

340 Di sisi lain, kelompok Islam Tradisionalis melakukan sopistikasi dalam pendekatan dengan kelompok Abangan. Partai-partai yang semula dikenal "hijau" mulai mencoba untuk menampilkan wajah Nasionalis dengan mereduksi isu-isu penegakan Syariat Islam dan Negara Islam dalam kampanyenya, sebagaimana dilakukan oleh PPP dan PKS. Ketika masih bernama Partai Keadilan (PK), dengan mengusung isu Islam partai ini tidak mendapatkan suara yang signifikan dalam pemilu 1999, di Parlemen hanya memperoleh 7 kursi. Namun setelah melakukan pembenahan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di mana isu yang diluncurkan lebih riil dan menjadi dambaan masyarakat, seperti penegakan keadilan dan pemberantasan korupsi dengan semboyan "bersih dan peduli", PKS yang pada pemilu 1999 hanya mendapat 7 kursi, pada pemilu 2004 menjadi 45 kursi. Namun sebaliknya dengan PPP, meskipun sudah memperbaharui isu syariat Islam dan Negara Islam dan menggantinya dengan "mendukung" Pancasila, tetap saja stagnan dengan 58 kursi. PBB yang tetap ngotot dengan Syariat Islam juga melorot, dari 13 kursi dalam pemilu 1999 menjadi 11 kursi dalam pemilu 2004. PDI-P yang unggul dengan 153 kursi dalam pemilu 1999, juga melorot hanya memperoleh 109 kursi di pemilu 2004.



Kenyataan tersebut di atas dipengaruhi oleh adanya perkembangan aspirasi politik masyarakat yang membangun kesadaran dari para pelaku politik untuk berpikir bagaimana bisa merangkul berbagai kepentingan yang ada. Apalagi hal ini didukung oleh keyakinan LaPalombara dan Weiner (1966), bahwa kegagalan partai politik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berkembang merupakan penyebab utama matinya sebuah partai politik. Dengan demikian banyak partai yang aktif dalam menjaring aspirasi yang berkembang, dan hal ini telah melahirkan format baru dalam partai politik yang dikenal dengan *catch-all party*.

Perubahan ini menurut Riswanda Imawan (2004), membuka kemungkinan bagi partai untuk melakukan reposisi dan redefinisi fungsi mereka yang semakin jelas dan efektif dalam dinamika politik. Partai tidak sekedar berfungsi sebagai pencari legitimasi (perspektif partai elit) atau menyalurkan aspirasi massa (perspektif partai massa). Perubahan ini terjadi karena masuknya perspektif perilaku rasional ke dalam wacana perdebatan ilmiah mengenai peran dan fungsi partai politik.

Murni Ideologi:	Murni Kepentingan:
Berbagai Isme—	Kekuasaan, Keamanan,
Komunisme,	Pendapatan,
Lebiralisme,	Kehormatan,
Sosialisme	dan lain-lain.



**Gambar 5.1. Rangkaian Kesatuan Motivasi Partai Politik**

Sumber: Mark N. Hagovian, *Regimes, Movements, and Ideologies, A Comparative Introduction To Political Science*, New York and London, Logman Inc., 1978.

Dalam pandangan Riswanda, terbentuknya *catchall party* di era multipartai, merupakan kelanjutan politik era Orde Baru yang menolak ideologi kiri-kanan, sehingga kedua spektrum ideologi harus hilang. Hilangnya ideologi ini menurutnya justru akan menghancurkan negara seperti yang terjadi di negara-negara sosialis. Untuk melukiskan kondisi tersebut, Riswanda mengutip pernyataan Bell, 'bahwa bangkrutnya negara-negara sosialis adalah akibat kosongnya makna dikotomi "kiri-

kanan” dalam perspektif ideologi politik. Ia berpendapat bahwa bila kubu tengah terbentuk karena penolakan terhadap kubu “kiri atau kanan”, maka format *catch-all party* itu sendiri merupakan refleksi dari kehadiran satu ideologi baru.<sup>341</sup>

Tanpa ideologi terbuka kemungkinan politik mengarah kepada pragmatisme dan oportuniste yang sangat akut.<sup>342</sup> Logika produsen-konsumen yang merupakan pondasi pasar ekonomi menjadi dasar dalam kebijakan partai, yang menurut Riswanda logika ini mengandaikan bahwa segala pergulatan politik bergantung pada kreatifitas elit dalam mengiring massa politik untuk larut ke dalam jualan politik yang ditawarkan. Selanjutnya ia mengatakan bahwa bila kalkulasi elitis ini terjadi dalam sitem politik di mana personifikasi institusi masih berlaku, maka format *catch-all party* berpotensi melahirkan oligarki dalam tubuh partai itu sendiri. Dan ini bertentangan dengan jati diri dari partai politik sebagai pilar demokrasi.<sup>343</sup>

Kenyataan tersebut di atas dipengaruhi oleh adanya perkembangan aspirasi politik masyarakat yang membangun kesadaran dari para pelaku politik untuk berpikir bagaimana bisa merangkul berbagai

---

341 Untuk lebih jelasnya lihat, Riswanda Imawan, *Partai Politik Di Indonesia: Pergulatan Setengah Hati Mencari Jati Diri*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 4 September 2004.

342 Hingga saat ini, apa yang dimaksud dengan partai Islam masih ditemukan pemahaman yang beragam. Hal ini sejalan dengan pandangan yang berkembang di kalangan umat Islam, khususnya di Indonesia tentang hubungan antara Islam dan negara yang juga mendapat tanggapan yang beragam. Bagi kalangan akademisi, keragaman pandangan ini tidak terlalu sulit untuk dipahami. Akan tetapi, bagi kalangan awam keragaman ini masih relatif sulit dipahami dan tidak jarang menimbulkan gesekan-gesekan yang berpotensi memicu konflik. Untuk itulah, dalam kajian ini penting dikemukakan tentang apa yang dimaksud dengan partai Islam dan yang terkait dengan hal ini berikut argumentasi-argumentasi yang melandasinya, agar keragaman pandangan tentang apa yang dimaksud dengan partai Islam mendapat apresiasi yang proporsional. Pembahasan ini menjadi terasa penting bila dikaitkan dengan posisi umat Islam Indonesia yang menempati jumlah terbanyak di dunia, sekaligus yang memiliki jumlah partai Islam terbanyak pula. Sebagian kalangan berpendapat bahwa yang dimaksud dengan partai Islam adalah partai-partai yang menggunakan nama atau simbol simbol Keislaman. Sebagian yang lain menyatakan bahwa yang dimaksud dengan partai Islam adalah partai yang menjadikan Islam sebagai azasnya. Sebagian kalangan lagi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan partai Islam adalah partai yang bertujuan memperjuangkan kepentingan-kepentingan umat Islam, meskipun tidak menggunakan simbol atau atribut Islam, dan masih banyak lagi pendapat tentang hal ini. Dari berbagai pendapat yang berkembang tentang apa yang dimaksud dengan partai Islam tersebut, paling tidak dapat ditemukan suatu rumusan dengan kriteria-kriteria sebagai berikut. *Pertama*, yang dimaksud dengan partai Islam adalah partai yang menggunakan nama, azas, tanda gambar, yang terkait dengan Islam. *Kedua*, yang dimaksud dengan partai Islam adalah partai yang konstituen utamanya adalah umat Islam. *Ketiga*, yang dimaksud dengan partai Islam adalah

kepentingan yang ada. Apalagi hal ini didukung oleh kenyataan bahwa kegagalan partai politik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berkembang merupakan penyebab utama matinya sebuah partai politik.

Dengan demikian banyak partai yang aktif dalam menjangking aspirasi yang berkembang, dan hal ini telah melahirkan format baru dalam partai politik yang dikenal dengan *catch-all party*.<sup>344</sup> Posisinya berada di antara kutub dikotomi partai elit dan partai massa. Menurut Riswanda, format ini mengagungkan pragmatisme dan rasionalitas sebagai pilar penyangga sistem politik yang demokratis. Dengan prinsip pragmatisme dan rasionalitas ini dimungkinkan bagi masyarakat untuk berpikir tentang “politik tanpa alur” (*politics without cliches*), tidak menjadi tawanan ideologi, sehingga masyarakat mampu menyikapi berbagai masalah tanpa prakonsepsi, tanpa distorsi idologis, dan tanpa kekakuan bersikap partisan.

Dalam rangka merealisasikan ambisi parpol membangun partai *catchall*,<sup>345</sup> beragam cara dilakukan, tidak hanya oleh partai yang punya

---

partai yang program dan tujuannya memperjuangkan kepentingan-kepentingan semua warga negara, tetapi konstituennya adalah umat Islam. Jadi, yang dimaksud dengan partai Islam adalah partai yang di dalamnya mengandung ketiga unsur di atas. Lebih jelas mengenai karakteristik partai, khususnya partai politik peserta pemilu 1999, lihat *Partai-Partai Politik Indonesia, Ideologi dan Program, 2004-2009*, PT. Kompas Media Nusantara, 2004.

- 343 Untuk lebih jelasnya lihat, Riswanda Imawan, *Partai Politik Di Indonesia: Pergulatan Setengah Hati Mencari Jati Diri*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 4 September 2004.
- 344 Dasar pertimbangan utama kenapa partai politik tergoda untuk membangun *catchall party* adalah keinginan untuk memenangkan pemilu. Baik *catchall party* yang berbasis partai massa maupun partai kader sama-sama punya pandangan bahwa untuk memenangkan pemilu harus menangkap semua atau berbagai kelompok kepentingan. Hal ini dilakukan dengan cara memperlunak ideologi mereka agar dapat masuk ke dalam berbagai kelompok. Semua *catchall party* menjanjikan kondisi yang lebih baik bagi pengusaha, upah dan jaminan sosial yang lebih baik bagi pekerja, harga terjangkau dan dukungan pada petani, jaminan hari tua, bantuan terhadap pengusaha kecil, pendidikan dan lapangan kerja yang lebih baik bagi pemuda, dan sebagainya. Lebih jelasnya, lihat Mark N. Hagopian, *Regimes, Movements, and Ideologies, A Comparative Introduction to Political Science*, New York and London, Logman Inc., 1978.
- 345 Partai jenis ini di permukaan hampir serupa dengan Partai Massa. Namun, berbeda dengan partai massa yang mendasarkan diri pada kelas sosial tertentu, Partai *Catchall* mulai berpikir bahwa dirinya mewakili kepentingan bangsa secara keseluruhan. Partai jenis ini berorientasi pada pemenangan Pemilu sehingga fleksibel untuk berganti-ganti isu di setiap kampanye. Partai *Catchall* juga sering disebut sebagai Partai *Electoral-Professional* atau Partai *Rational-Efficient*. Namun bergesernya posisi ideologis partai politik akan mengakibatkan hilangnya identitas masing-masing partai politik, bisa jadi setiap partai politik punya isu dan bahkan program yang sama sehingga tidak ada preferensi yang akan dijadikan dasar dalam menentukan pilihan politik.

segmentasi pemilih Santri (Islam) namun juga partai yang punya segmentasi pemilih Abangan (Nasionalis). Untuk merambah massa berideologi berbeda, beberapa partai Islam dan Nasionalis mencoba mengubah citra diri. PDI-P membentuk Baitul Muslimin untuk merebut simpati generasi muda Islam. PAN kian bergeser ke arah Nasionalis, sementara PBR mengawinkan Islam dan sosialisme. Begitu pun PPP dan PKS berupaya melunakan isu syariat Islam-nya, dan hanya PBB yang secara konsisten mengampanyekan Syariat Islam. Semua pergeseran itu akan membawa konsekuensi politik para pendukung Tradisionalnya. Segmentasi pemilih pada pemilu 2009 sudah mengalami perluasan, karena hampir semua partai telah keluar dari basis tradisionalnya baik secara terang-terangan maupun tersembunyi.

### **3. Program Karikatif: Sebuah Upaya Memperluas Segmen Pemilih**

#### **a. Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dan Ekonomi**

Ketiadaan partai yang programatik telah membuat partai politik “kebingungan” merubah orientasi atau perluasan segmen pemilih dengan mekampanyekan program-program partai. Dampak dari itu semua, strategi partai politik dalam memperluas basis segmen pemilih, dilakukan dengacara membuat program partai yang bersifat karikatif dan bahkan pembelian suara (*votes buying*).

Aspek kemasyarakatan menjadi bagian terpenting dalam komunitas masyarakat di pedesaan.<sup>346</sup> Tidak hanya dalam kehidupan keseharian dalam berkomunikasi dan berinteraksi antara sesama mereka, namun juga menjadi indikator serta tolak ukur bagi kehidupan politik. Walaupun dalam masyarakat di Malang Raya kerukunan, kebersamaan masih menjadi bagian dari tata nilai yang mereka anggap baik, namun dalam prakteknya aspek ekonomi sedikit demi sedikit telah mengikisnya. Dalam acara-acara ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, khususnya tentang kegiatan pembangunan di lingkungan yang membutuhkan kerja bersama (gotong royong), tidak semuanya sadar untuk ikut karena dianggap tidak ada uangnya. Akan tetapi kalau ada

---

346 Hasil observasi langsung pada masyarakat pedesaan di wilayah Malang Raya, khususnya masyarakat di Dusun Caru Desa Pendem Kota Batu yang pada umumnya masyarakatnya berada dalam starta ekonomi menengah ke bawah. Aspek kemasyarakatan sangat menonjol di wilayah ini, sebagai contoh dalam acara-acara sosial, seperti pernikahan, kematian, maupun acara-acara adat seperti bersih desa maupun memperingati hari besar keagamaan dan hari besar nasional menunjukkan adanya keterlibatan yang masif dari seluruh masyarakat.

kegiatan yang sifatnya mendapatkan imbalan, masyarakat banyak yang rebutan dan bahkan menjadi bahan pertentangan di antara mereka.<sup>347</sup>

Sementara dalam kalangan Santri, aktivitas yang mereka lakukan sering berkaitan dengan Mesjid atau Langgar. Kelompok Santri ini, apabila sudah menjadi bagian dari komunitas yang bergelut dalam bidang keagamaan, seperti pengajian rutin, maupun acara-acara lain seperti mendoa'kan arwah leluhur yang sering dibacakan setiap kamis dan jum'at pagi, menunjukkan ada keengganan untuk terjun ke dalam kegiatan yang terkait dengan lingkungan seperti kerja bakti.<sup>348</sup> Kondisi tersebut berimplikasi pada aktivitas di luar yaitu politik.<sup>349</sup>

Setiap kegiatan yang akan melibatkan warga, maka jangan harap akan berhasil atau didukung apabila tidak ada nilai ekonominya. Baik itu kegiatan kampanye maupun pemilu, masyarakat memandang tidak ada gunanya jika tidak ada *reward* ekonomi bagi mereka. Lebih jauh, jangan harap ada calon yang akan dipilih apabila calon itu tidak dikenal secara dekat oleh masyarakat walaupun calon itu punya kapabilitas dan kredibilitas baik tanpa adanya pendekatan sosial dan ekonomi kepada masyarakat. Di samping itu, jangan harap ada calon yang dipilih oleh kelompok yang secara ideologis berbeda. Bagi masyarakat Abangan

---

347 Dampak dari berbagai kebijakan pemerintah yang bersifat karikatif maupun pelantrofi sedikit banyak telah melunturkan aspek sosial masyarakat, khususnya tanggung jawab terhadap pembangunan lingkungan. Dari hasil pengamatan langsung, ketika melaksanakan kegiatan pembangunan plesengan yang ada di kampung Jengglong, Dusun Caru, Desa Pendem, Kota Batu, banyak warga yang enggan untuk turut serta dalam kegiatan tersebut karena dianggap ada bantuan dana. Oleh karena itu, mereka tidak mau ikut gotong royong kalau tidak ada bayarannya.

348 Aktivitas keagamaan yang mereka lakukan, juga tidak lepas dari aspek-aspek ekonomi. Dalam acara pengajian rutin yang dilaksanakan setiap jum'at, warga sekitar Mesjid atau Langgar selalu memberikan makanan dan minuman "jajanan" untuk mereka yang mengaji. Dan acara mendoa'kan arwah leluhur, ternyata setiap keluarga yang akan minta dibacakan ditarik sejumlah uang. Untuk satu orang yang telah meninggal dipungut dua ribu rupiah dan selebihnya seribu rupiah. Artinya, apa yang dilakukan oleh masyarakat sebenarnya baik sosial maupun agama selalu ada motif ekonomi dibalik apa yang mereka kerjakan. Hasil pengamatan, *ibid.*

349 Anggota masyarakat yang suka tahlilan, yasinan dan kegiatan keagamaan lain banyak yang memilih PKB, akan tetapi kalau PDI-P dan Golkar berupaya untuk meraih simpati dengan cara memberi bantuan sumbangan bisa saja mereka memilih Golkar atau PDI, kecuali PAN. Para pemilih Santri Tradisional agak sulit memilih PAN karena PAN dianggap identik dengan Muhammadiyah. Di tingkat grassroot, Muhammadiyah dianggap sebagai agama baru, atau Islam murni yang secara praktik keagamaan banyak yang tidak bisa diterima oleh warga NU di tingkat grassroot, sebagai contoh orang NU sering melakukan tahlilan, kajatan dan berbagai ritual lain yang umumnya melibatkan tokoh agama lokal yaitu kyai. Sementara orang Muhammadiyah tidak mengenal tahlilan, yasinan, dan berbagai kajatan lainnya,

sangat sulit untuk menerima seorang Santri menjadi calon dari partai Abangan. Begitupun bagi kalangan Santri sangat sulit menerima calon dari kelompok Abangan untuk menjadi calon dari partai Islam.

Kenyataan pada pemilu 1999 dan 2004 masih adanya calon yang punya kapabilitas dan kredibilitas baik dan secara kultur berbeda dengan kultur partainya, tidak lain karena masih dipakainya nomor urut dalam sistem pemilu. Masyarakat tidak melihat orang yang akan duduk di parlemen atau calon anggota legislatifnya, namun hanya melihat pada partai yang akan mereka coblos. Pada pemilu 1999 dan 2004 banyak calon yang sebenarnya tidak jelas asal-usul serta *treck record*-nya namun karena euporia masyarakat akan perubahan, lantas masih adanya keyakinan bahwa pemilu itu diwajibkan seperti jaman Orde baru, maka partisipasi masyarakat dalam pemilu cukup tinggi. Namun sekarang ini, apabila partai politik tidak melakukan pendekatan khusus berupa penguatan ideologis, maupun pendekatan bersifat sosial ekonomi jangan harap partai tersebut akan mendapatkan suara yang signifikan. Begitupun partisipasi pemilih, apabila partai tidak mampu meyakinkan konstituennya, walaupun mereka tetap mengidentifikasi dirinya sebagai partai tersebut, tapi dukungan yang mereka berikan belum tentu menjadi suara karena bisa saja mereka akan menghanguskan suaranya dengan cara tidak mendatangi bilik suara.

Menyikapi realitas sosial kemasyarakatan yang terjadi, para elit politik berusaha untuk bisa menyesuaikan dengan kenyataan tersebut untuk dapat meraih simpati dalam memenangkan pemilu. Aktivitas yang dilakukan oleh elit politik, dalam menyikapi realitas sosial kemasyarakatan tersebut, dilakukan dengan cara membangun silaturahmi kepada masyarakat. Hubungan yang dibangun tidak lepas dari kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang berhubungan langsung dengan hajat masyarakat. Disamping melakukan silaturahmi dan kegiatan sosial kemasyarakatan, para elit juga berusaha melakukan pendekatan ke lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi kelompok masyarakat. Kunjungan ke lembaga-lembaga ini, ditunjukkan dengan melakukan silaturahmi ke tokoh-tokoh agama yaitu kyai, ustad yang

---

padahal dalam konteks masyarakat NU kegiatan-kegiatan itu tidak melulu urusan keagamaan tetapi juga sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial, dimana kyai sebagai pemimpinnya. Dan umumnya para kyai yang menjadi tokoh agama di tingkat grassroot adalah mereka yang mempunyai kedekatan dengan tokoh-tokoh PKB atau sekaligus mereka juga menjadi pengurus PKB.

dianggap punya basis massa besar. Ukuran besar kecilnya massa yang dimiliki tokoh agama bisa dilihat dari besar kecilnya pesantren dan santri yang ada serta sudah berapa lama pesantren tersebut berdiri.

Partai-partai yang sukses meraih suara signifikan tidak lepas dari konsekuensi ideologis, sosial kemasyarakatan dan ekonomi. Walaupun ada hal lain yang keluar dari alur itu berkenaan dengan partai yang memperoleh suara karena figur, seperti Partai Demokrat dengan figur Soesilo Bambang Yudhoyono yang sekarang jadi Presiden.<sup>350</sup> Walaupun sebenarnya di antara masing-masing partai yang besar selalu ada figurnya seperti Gus Dur di PKB, Amin Rais di PAN, Megawati di PDIP, namun itu semua berkaitan dengan simbol personal ideologis yang diusung dan masyarakat menjadikannya dia sebagai representasi/symbolisasi dari ideologi atau kelompok mereka.

Partai Keadilan Sejahtera yang pada pemilu 2004 telah mengejutkan kontelasi politik nasional, ternyata keberhasilan mereka tidak lepas dari dijalankannya kedua hal tersebut yaitu penguatan ideologis dan pendekatan sosial ekonomi. PKS yang didukung kalangan intelektual muda di kampus-kampus, khususnya di kampus negeri seperti Unibrau, Universitas Negeri Malang, STAIN Malang tidak putus melakukan kaderisasi dengan Tarbiyah-nya sebagai dasar penguatan ideologi. Disamping itu, kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya sosial dan ekonomi juga mereka jalankan. Banyak kader-kader PKS turun ke desa-desa hanya untuk memberikan bantuan berupa pengobatan gratis ataupun bantuan sembako. Banyak masyarakat yang terkesan kepada PKS karena aktivitas sosialnya yang dilakukan oleh kader-kadernya. Tidak jarang, jika terjadi bencana di suatu desa, para kader PKS menjadi kelompok yang pertama dalam memberikan bantuan tanpa memakai atribut partai. Ketika mereka tahu bahwa yang melakukan pengobatan gratis, yang melakukan bantuan sembako adalah kader-kader dari PKS, warga yang dibantu serta merta dalam pemilu memberikan dukungannya kepada PKS.

Bagi yang memilih Golkar, banyak di antara mereka yang telah menikmati keuntungan dari Golkar seperti pembangunan infrastruktur

---

350 Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan figur dari kalangan militer, pada pemilu 2004 membidani lahirnya Partai Demokrat. Dengan popularitas yang dimilikinya, Partai Demokrat dapat meraih suara 7,2% yang sekaligus menghantarkannya menjadi Presiden pertama yang dipilih secara langsung.

jalan, listrik, air minum, koperasi dan lain lain.<sup>351</sup> Oleh karena itu, untuk wilayah-wilayah yang secara ekonomi berkembang seperti di daerah Pujon yang mempunyai koperasi untuk petani, khususnya koperasi susu sapi sangat fanatik mendukung Golkar. Di samping itu memang para anggota dewan dan petinggi partai di Golkar mempunyai kelebihan sumber daya manusianya. Hal ini telah menjadi kelebihan dari Golkar untuk mendapatkan suara cukup signifikan dalam setiap pemilu. Di sisi lain, akibat monopolitisasi partai politik yang mengharuskan PNS memilih Golkar juga telah berdampak pada dukungan pemilih pasca Orde baru. Sebagian pemilih yang bekerja sebagai PNS, dalam setiap pemilu pasca reformasi memberikan pilihan politiknya pada Golkar. Dengan strategi sekasur, sedapur, sesumur sangat efektif menggalang massa di akar rumput untuk kesuksesan Golkar dalam memenangkan pemilu. Di samping itu, elit politik Partai Golkar juga terus melakukan berbagai pendekatan sosial ekonomi sebagai wujud dari kepedulian mereka kepada masyarakat kalangan bawah, dengan cara pengobatan gratis, sembako murah, sekolah gratis, bedah rumah, pemasangan paving di jalan warga, perbaikan jalan, pembangunan pos kamling.

Kemenangan Golkar pada pemilu 2004 tidak hanya disebabkan oleh warisan Golkar pada masa Orde baru, akan tetapi juga dikarenakan Golkar melakukan berbagai langkah agar partai berlambang pohon beringin ini tetap eksis dalam masyarakat. Di samping melakukan kaderisasi rutin dalam rangka penguatan ideologi partai bagi para kadernya, juga melakukan pendekatan sosial dan ekonomi pada masyarakat. Kegiatan ini menurut salah seorang mantan ketua DPD Golkar yang sekarang ini menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu, Mashuri, dilakukan secara rutin oleh setiap anggota dewan di masing-masing daerah pemilihannya. Dalam melakukan kegiatan sosial tersebut didanai oleh individu-individu anggota dewan dari dapil masing-masing, termasuk dia sendiri melakukan hal tersebut untuk dapilnya yang ada di Bumiaji.

Berbeda dengan kasus PKS dan Golkar, PKB pada pemilu 2004 mengalami penurunan jumlah suara yang cukup besar. Di samping PKB

---

351 Hasil observasi penulis ke daerah Pujon Kabupaten Malang. Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa tingkat perekonomian masyarakat di Daerah Pujon cukup baik, banyak petani dan peternak yang sukses. Peternakan yang menonjol adalah sapi perah, dimana sistem penjualan susu yang dihasilkan sudah diatur mekanismenya oleh koperasi yang dikembangkan pada masa Orde Baru.



yang sering dilanda konflik, menurunnya suara PKB diakibatkan oleh perilaku elit partai yang hanya mengutamakan pendekatan keagamaan, sementara lalai dalam memberikan kontribusi sosial ekonomi pada konstituennya. PKB lebih sering berhubungan dengan tokoh agama secara langsung ketimbang turun kepada masyarakat. Para tokoh agama seperti kyai, Ulama, maupun ustadz banyak yang menjadi mediator antara tokoh politik dengan masyarakat, atau menjadi juru kampanye bagi PKB.<sup>352</sup> Tampaknya sudah menjadi kewajiban moral bagi sebagian tokoh agama untuk mendukung PKB, walau ada juga nilai ekonomi yang didapatkan dari para tokoh politik atau partai.<sup>353</sup>

Dengan demikian, para tokoh politik yang ingin berhubungan dengan masyarakat, khususnya kalangan Santri Tradisional, selalu melalui kyai-nya. Dan apabila tokoh politik itu tidak dapat memberikan kontribusi yang bersifat ekonomi, walaupun kedatangan mereka diterima, namun tidak menjadi dukungan riil dalam pemilu. Sementara di sisi lain masyarakat tidak pernah merasakan kebaikan yang diberikan oleh para anggota dewan dari PKB, dan di sisi lain mereka tahu bahwa para tokoh agama itu mendapatkan sesuatu dari para calon, maka pada akhirnya sedikit demi sedikit banyak dari pemilih kalangan Santri itu melakukan perlawanan dengan tidak datang ke bilik suara atau memilih banyak partai, dan paling ekstrim mereka mengalihkan pilihan politiknya ke partai lain.<sup>354</sup> Tidak sedikit dari kalangan Santri Tradisional ini dalam pemilu 2004 memilih partai Islam selain PKB, yaitu ke Partai Demokrat, Golkar, atau bahkan PKS.

Hal yang paling sulit bagi kalangan Santri Tradisional untuk mengalihkan pilihan politiknya ke PAN. Alasan utama sulitnya pemilih

---

352 Hasil observasi pada saat kampanye pemilu baik pemilu tahun 2004 maupun 2009 di Malang Raya.

353 Umumnya para tokoh politik datang ke pondok pesantren untuk bersilaturahmi dengan pimpinan pondok, mereka datang tidak dengan tangan hampa. Biasanya tokoh partai politik datang minimum memberikan amplop kepada kyai dengan alasan untuk membantu aktivitas pondok. Akan tetapi tidak jarang juga berbagai pondok ataupun madrasah yang umumnya dipunyai oleh kyai, ulama atau ustadz mendapatkan bantuan pembangunan dari APBD karena perjuangan dari anggota dewan yang didukungnya.

354 Kesadaran pemilih bahwa mereka sering kali hanya dijadikan objek oleh elit (baik itu elit politik maupun elit agama) sudah tumbuh di era pasca reformasi. Oleh karena itu, banyak kasus dari tindakan masyarakat pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, atau melakukan transaksi dengan partai atau calon berupa imbalan secara ekonomi. Hasil wawancara dengan Mulimin, aktifis NU pada bulan Februari 2008, dan sony simpatisan PDIP pada bulan April 2008 di Dusun Caru Pendem Kota Batu.

Santri Tradisional mendukung PAN adalah dikotomisasi kelompok keagamaan antara NU dan Muhammadiyah, disamping secara sosial dan kultural berbeda dalam kehidupan keseharian di masyarakat.<sup>355</sup> Dalam masyarakat di Malang Raya, eksistensi ritual keagamaan ini telah melembaga dan sekaligus menjadi indikator sosial bagi masyarakat untuk menentukan status sosial ekonomi. Banyak dari masyarakat tidak mampu untuk melakukan khajatan dalam memperingati hari kematian keluarganya, terpaksa mereka mengada-ada dengan cara pinjam tetangga karena takut dikatakan tidak mampu. Mereka sebenarnya tidak mengerti betul bahwa apa yang dilakukan oleh mereka adalah bagian dari kewajiban Islam.

Bagi PDIP yang pada pemilu 2004 mengaloi penurunan suara yang sangat tajam, pada dasarnya hampir sama aktivitasnya dalam melakukan pendekatan sosial ekonomi kepada masyarakat. Bahkan PDIP dalam setiap pemilu cukup royal dalam “menjamu” pemilihnya dalam setiap kesempatan kampanye. Berbagai bantuan kepada warga juga diberikan, termasuk untuk kepentingan-kepentingan sosial seperti bantuan perbaikan jalan, jembatan, gorong-gorong seperti yang ada di dusun caru Kota Batu.

Sementara kegagalan PDIP mempertahankan hasil pemilu 1999, akibat dari kebijakan Megawati yang ketika menjabat sebagai presiden tidak memperhatikan wong cilik.<sup>356</sup> Pada akhirnya, sebagian pemilih yang mencoblos PDIP pada Pemilu 1999 mengalihkan suaranya ke partai lain, terutama partai baru yang menurut mereka punya harapan untuk perubahan.<sup>357</sup>

Walaupun demikian, sebenarnya suara PDIP menurut banyak pemerhati politik, suara pada pemilu 2004 itu merupakan suara rill

---

355 Pertentangan antara NU dan Muhammadiyah di tingkat grass root juga dipelihara oleh elit Santri Tradisional untuk memperkokoh solidaritas dan kekompakan kelompok. Pengaruh yang datang dari kelompok Santri Modernis dianggap akan mengancam eksistensi tokoh agama khususnya kyai di masyarakat. Selama ini, tetap berdirinya wibawa kyai di mata masyarakat karena masih adanya ritual keagamaan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, dan akan selalu melibatkan kyai. Dengan demikian, mau tidak mau, masyarakat akan membutuhkan kyai dari mulai kelahiran, perkawinan, sampai kematian.

356 Pada saat Megawati menjadi Presiden, di kota-kota, khususnya di Jakarta pada saat Gubernur Sutiyoso yang didukung PDIP, banyak terjadi penggusuran lahan maupun penertiban pedagang kaki lima yang nota bene adalah kebanyakan pendukung PDIP.

357 Hasil penelitian di Malang Raya yang pernah dilakukan penulis sebelum tulisan ini dibuat, pemilih dari PDIP banyak mengalihkan suaranya ke Partai Demokrat dan sebagian lagi ke partai lain.

dari PDIP. Sementara suara pada pemilu 1999 merupakan suara yang datang dari pemilih yang melakukan Swing Votes. Dan pada pemilu 2004 pemilih Swing Votes PDIP itu kembali lagi ke partainya semula atau mengalihkan pilihan politiknya ke partai lain.<sup>358</sup>

Kalau dilihat dari data yang ada, pada saat ini konstituen PDIP masih yang terbanyak. Pada pemilu 2004, Kabupaten Malang dan Kota Malang tetap masih dikuasi oleh PDIP. Sementara Kota Batu, selisih suara antara Golkar yang memenangkan pemilu tidak jauh selisihnya dengan PDIP.<sup>359</sup> Keberhasilan PDIP mendominasi suara pada setiap pemilu di Malang Raya tidak lepas dari kuatnya kelompok Abangan di Malang Raya. Walaupun Malang Raya terkenal dengan masyarakat religius,<sup>360</sup> karena banyaknya pesantren dan pendidikan agama, namun sebenarnya sebagian besar masyarakatnya punya kedekatan secara historis dengan Abangan. Oleh karena itu, sebagian masyarakat Malang Raya walaupun mereka ikut aktivitas ritual keagamaan yang sering dilakukan oleh kelompok Santri Tradisional, namun pilihan politiknya tetap pada partai politik Abangan yaitu PDIP. Tidak mengherankan apabila di Jawa Timur banyak Kepala Daerah yang (Bupati/Walikota) yang berasal dari partai PDIP.<sup>361</sup>

---

358 Pada Tahun 1955 dan pemilu Tahun 1999 ada perbedaan komposisi partai politik, dimana pada pemilu 1955 ada partai "kiri" yang mapan seperti PKI dan PSI, sementara pada pemilu 1999, partai 'kiri' yang mapan boleh dibilang absen sama sekali, setelah dihancurkannya Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965 dan juga dengan ditemukannya Partai Sosialis Indonesia (PSI) oleh Sukarno dan juga Suharto. Lantas kemanakah larinya suara dari partai yang berhaluan "kiri" ini? Kalau dilihat dari hasil perolehan suara, jelas bahwa larinya suara dari partai yang berhaluan kiri ini sebagian besar ke PDIP dan sebagian lagi ke Golkar dan partai lainnya. PDIP yang merupakan kelanjutan sejarah PNI pada pemilu 1955, dimana PNI dalam pemilu 1955 memperoleh suara 22,32 %. Kalau melihat hasil perolehan suara PNI pada pemilu 1955, maka sejatinya perolehan suara PDIP itu berada pada kisaran 20 %. Artinya dalam PDIP ada limpahan suara yang oleh Riwanda (2004) dikatan sebagai Swing Votes, dengan demikian suara PDIP dalam pemilu 1999 bukan merupakan suara riil.

359 Hasil perolehan suara partai politik peserta pemilu 2004 di Malang Raya, bisa dilihat dari hasil rekapitulasi akhir KPUD Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu).

360 Walaupun demikian, ada ciri khas yang secara garis besar membedakan setiap wilayah yang ada di Malang Raya antara satu daerah dengan daerah lainnya. Sebagai contoh Kecamatan Lawang, Singosari dan Pakis. Lawang mayoritas masyarakatnya mempunyai rasa Nasionalisme yang tinggi, dan pendidikan mereka cukup. Singosari, masyarakatnya religius, umat Muslimnya sangat besar, jadi untuk wilayah ini banyak pondok-pondok pesantren, sekolah atau madrasah Islam dan kegiatannya pun banyak terkait dengan keagamaan seperti pengajian. Sedangkan untuk Pakis, masyarakatnya religius dan Nasionalis, namun masyarakatnya mudah terpecah belah. Hasil observasi pada bulan Agustus 2008.

361 Semua Kepala Daerah di Malang Raya diusung oleh PDIP. Bupati Kabupaten Malang, Sujid Pribadi terpilih pada tahun 2005; Wali Kota Malang, Peni Suparto terpilih 2008; Wali Kota Batu, Edi Rumpoko terpilih 2008.

Di luar alur identifikasi kepartaian dari kelompok Abangan terhadap PDIP, keberhasilan PDIP mendominasi suara dalam Pemilu, juga karena dilakukannya pendekatan pada masyarakat. Salah seorang tokoh PDIP, yang juga mantan Ketua DPRD Kota Malang menyebutkan bahwa PDIP punya *concern* yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Walaupun demikian ia mengakui bahwa tidak semua program kepada masyarakat itu dapat direalisasikan dengan baik.

#### **b. Bantuan Pembangunan Lingkungan**

Dalam rangka membina dan menjaga konstituennya agar tidak lari ke partai lain, para kader partai selalu berusaha melakukan pendekatan-pendekatan yang *continue* dengan konstituen mereka. Termasuk memberikan sumbangan untuk kepentingan warga dan lingkungan dimana basis partai itu berada. Oleh karena itu, banyak partai yang berusaha membantu kebutuhan warga, baik bantuan untuk pembangunan maupun untuk kegiatan. Setiap bantuan ke warga selalu diberikan lewat kader yang sudah punya hubungan dengan anggota dewan dari partai tersebut.

Selain memberi bantuan langsung bagi kepentingan warga, banyak para wakil di wilayah Lowokwaru ini memperjuangkan kepentingan warganya dengan cara menyalurkannya lewat APBD. Bahkan sepertinya para anggota Dewan bersaing agar mereka mendapatkan tempat di hati masyarakat dengan cara memperjuangkan berbagai program pembangunan yang ada di masyarakat agar bisa mendapat simpati dari warga yang diperjuangkan.

Kenyataan tersebut di atas, secara tidak sadar merubah pandangan subyektif dari warga terhadap partai. Partai yang sering memberi bantuan dianggap partai yang baik, sementara partai yang jarang memberi bantuan dianggap partai yang jelek. Partai selalu dimaknai dengan sumber bantuan untuk pembangunan, dan hal ini sangat terasa dalam kehidupan politik sekarang, khususnya yang terjadi di akar rumput. Agar para pemilih tetap memilih partai tersebut, maka partai dan pemilih itu harus ada ikatan bathin. Ikatan batin itu diwujudkan dalam bentuk bantuan kongkrit kepada masyarakat seperti pembangunan Mushola, Gorong-gorong, saluran air agar masyarakat tahu dan ingat bahwa partai ini telah menyumbang ini dan itu pada lingkungan.

## D. Ringkasan

Terjadinya perubahan electoral yang ditandai dengan terjadinya perubahan perolehan suara partai politik dari pemilu ke pemilu (*electoral volatility*) telah mendorong partai politik untuk melakukan perubahan strategi baik ke dalam (internal partai) maupun ke luar (eksternal partai). Perubahan ke dalam dilakukan dengan cara pembenahan dalam pembagian otoritas atau kewenangan partai dari yang awalnya sangat sentralistis menjadi lebih terdesentralistis. Sebagai contoh perubahan kewenangan dalam hal rekrutmen (penentuan caleg atau calon Bupati atau Wali Kota) yang lebih memperhatikan aspirasi dari bawah. Selain itu proses rekrutmen, walaupun kader partai menjadi prioritas, namun dalam rangka survival dilakukan rekrutmen terhadap calon dari luar partai yang dianggap punya basis massa yang lebih jelas atau karena dianggap lebih populer sehingga diharapkan dapat menambah tingkat electabilitas partai dalam pemilu.

Respon partai terhadap perubahan electoral, juga dilakukan terhadap pemilih. Partai politik berusaha untuk melakukan perubahan pendekatan baru pada pemilih, tidak hanya dengan cara merubah desain ideologisnya, namun juga melakukan ekspansi kepada segmen pemilih yang lebih heterogen. Hal ini diupayakan untuk dapat merangkul semua segmen pemilih (*catch-all*) agar bisa tetap survive. Kondisi ini mendorong partai politik untuk melakukan strategi yang lebih pragmatis dalam arti partai politik tidak lagi hanya mengandalkan program partai dengan janji-janji manis, namun juga dengan menjalankan program karikatif dan berbiaya tinggi berupa kegiatan-kegiatan sosial yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Banyak aktivitas yang berbau sosial dilakukan oleh partai politik terutama menjelang pemilu dilaksanakan baik itu berupa batuan kesehatan gratis yang dilaksanakan di lokasi masyarakat, maupun berupa bantuan kepada masyarakat untuk pembangunan lingkungan.

Lebih jauh bantuan yang mereka berikan tidak hanya dalam bentuk barang, namun juga dalam bentuk uang. Ketika pelaksanaan pemilu, terutama pemilu 2009, dimana peran caleg lebih aktif karena adanya persaingan yang diakibatkan oleh sistem penentuan calon terpilih lewat suara terbanyak, maka caleg berusaha semaksimal mungkin mendekati pemilih secara dor to dor. Dampak dari pilihan langsung pada calon ini, persaingan tidak hanya terjadi pada caleg antara partai politik namun

juga yang lebih sengit terjadi persaingan antara caleg diinternal partai sendiri. Berdasarkan hasil obeservasi menunjukkan bahwa masing-masing caleg di tingkat Kota Dan Kabupaten dapat menghabiskan uang antara 50 juta sampai 400 juta.

Sementara respon partai politik terhadap eksternal partai dilakukan dengan cara melakukan kartelisasi politik. Kartelisasi politik lebih jelas untuk kasus di tingkat lokal yaitu pada masa pilkada dilaksanakan. Banyak partai politik yang tidak lagi mempertimbangkan ideologi mereka untuk berkoalisi, karena pertimbangan utama lebih pada aspek bagaimana memenangkan persaingan. Tidak jarang partai yang pada pemilu legislatif bertarung dengan keras, namun pada saat pilkada mereka berkoalisi. Di Malang Raya, misal untuk Kota Malang PDIP bergandengan dengan Partai Golkar yang jelas pada pemilu legislatif terjadi kompetisi yang cukup sengit karena memang secara historis antara kedua partai ini tidak harmonis. Begitu pula di Kabupaten Malang partai politik yang saat ini berkuasa merupakan gabungan antara PDIP dan Partai Golkar.

Fenomena berkembangnya partai politik yang berperilaku praktis pragmatis serta mengaburkan identitas ideologis untuk mengambil spektrum pemilih yang lebih heterogen (*catch all party*), dalam jangka panjang justru akan merugikan partai itu sendiri. Hal yang penting bagi partai politik sebenarnya bukan merekayasa identitas ideologis ke arah abu-abu, melainkan kejelasan platform partai yang ditrasformasikan ke dalam bentuk program-program partai yang lebih jelas dan kongkrit. Kenyataan yang terjadi sekarang ini adalah inskonsistensi partai politik dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Partai politik yang bernuansa ideologis, tidak harus kehilangan kemampuannya dalam membangun partai yang bersifat programatik.

Lebih jauh, partai politik yang berfungsi sebagai agregasi dan artikulasi kepentingan, tidak lagi menawarkan platform dan program partai yang penuh kualitas sebagai produk politik yang akan dijual. Sebaliknya, partai politik lebih banyak terjebak pada kepentingan jangka pendek saat pemilu, berbagai program yang ditawarkan hanya bersifat karikatif dan tidak mendidik. Kalau dilihat dari perspektif rasional sebenarnya masyarakat akan berusaha untuk mencari produk partai politik yang akan meningkatkan keuntungan yang sebesar-besarnya kepada mereka. Akan tetapi karena rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat pada partai

politik, masyarakat lebih cenderung mengabaikan produk politik partai yang sifatnya substantif, berupa tawaran program yang berkualitas, dan lebih memilih produk partai yang sifatnya karikatif.

Pola hubungan partai dengan konstituen sudah terjebak pada pola transaksional, sehingga untuk mendapatkan suara dalam pemilu, parpol membeli konstituen lewat uang, sembako, kaos, pembangunan Mesjid, pembangunan jalan dan lain-lain. Hal ini dilestarikan oleh hubungan anggota dewan dengan konstituennya, yang terhanyut dalam pola politik sejenis pasca Pemilu. Anggota dewan terjebak untuk memberikan bantuan dan sumbangan yang bersifat karitatif dan berbiaya tinggi. Hal ini ditenggarai juga sebagai sebuah ketakutan dari pimpinan partai politik akan kehilangan dukungan konstituennya.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)



## **Tujuan Intruksional Bab 6**

Dalam bab ini penulis membahas politik kepartaian yang berkembang pada pemilu pasca Orde Baru di tingkat lokal. Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan dapat memiliki kompetensi sebagai berikut:

1. Mahasiswa dapat memahami dan mengerti perubahan sistem kepartaian dan implikasinya pada perilaku politik.
2. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang peran figur kharismatik dalam masyarakat dalam menstrukturkan perilaku pemilih masyarakat.
3. Mahasiswa dapat mengidentifikasi perilaku politik partai di parlemen apakah partai-partai berfungsi atau tidak.
4. Mahasiswa dapat mengidentifikasi perubahan politik yang terjadi berdasarkan teori yang sudah dipahami.
5. Mahasiswa mampu melakukan generalisasi terhadap fakta, gejala yang terjadi terkait dengan peristiwa-peristiwa politik yang ditemui di lapangan.





# 6

## POLITIK KEPARTAIAN

Masyarakat dari sisi sosio-religi secara garis besar terbagi ke dalam dua kelompok besar yaitu kelompok masyarakat yang tingkat keberagamaannya yang minimal (Abangan), dan masyarakat dengan tingkat keberagamaan yang taat (Santri). Kelompok masyarakat Santri terbagi lagi ke dalam dua kelompok yaitu Santri Modernis dan Santri Tradisional. Santri Modernis biasanya diidentikkan dengan Muhammadiyah, sementara Santri Tradisional diidentikkan dengan NU.

Simbolisasi dari kehidupan Masyarakat Islam Santri Tradisional, dicirikan dengan memiliki banyak pondok pesantren, mulai dari yang tradisional sampai pesantren modern. Pesantren tidak hanya tempat untuk melakukan transfer ilmu keagamaan, namun juga sekaligus mewariskan kultur kepada Santri dan masyarakat di lingkungan pesantren itu. Dalam kultur pesantren, kyai merupakan tokoh sentral sekaligus *figure* kharismatik yang segala perkataan dan perbuatan menjadi contoh dan panutan masyarakat. Legitimasi religius yang dimiliki oleh sosok kyai, secara sosial sangat penting dalam menjamin ketertiban masyarakat, namun karena sifat kepemimpinannya yang *patron-client* sangat sulit untuk menumbuhkan kehidupan demokratik yang menjamin adanya independensi dari pemilih.

Walaupun kultur masyarakat Santri sangat menonjol, namun kehidupan kelompok Abangan juga bisa hidup berdampingan secara damai. Kelompok Abangan ini, mayoritas mengidentifikasikan dirinya dengan partai Nasionalis, khususnya PDIP dalam pemilu 1999 maupun

2004. Di sisi lain kelompok Santri, khususnya Santri Tradisional umumnya mengidentifikasi dirinya dengan partai-partai yang punya kedekatan secara sosiologis maupun historis dengan organisasi Islam Tradisional yaitu NU seperti PKB, PPP, PKNU, dan beberapa partai Islam lain. Sementara kelompok Santri Modernis umumnya mengidentifikasi dirinya dengan Partai Masyumi, PAN, PKS, PBB.

### **A. Pemilu 2009: Perubahan Partai Politik Dominan**

Identifikasi dan keterikatan pemilih kepada partai tertentu mengalami pasang surut. Pada satu pemilu identifikasi dan keterikatan pemilih sangat tinggi terhadap partai pada partai tertentu, tapi pada pemilu berikutnya identifikasi dan keterikatan pemilih kepada partai berada pada titik terendah. Pangkal utama rendahnya identifikasi dan keterikatan pemilih ini dikarenakan lemahnya pemahaman ideologi partai dan ketidakmampuan partai untuk mengemban aspirasi dan kepentingan masyarakat (*constituency*). Keadaan ini mendorong masyarakat bersikap pragmatis atau apathy dalam setiap pemilu yang ditunjukkan dengan perilaku transaksional atau tidak ikutnya mencoblos/mencontreng (*passive citizen*). Dengan demikian, perilaku voting masyarakat menunjukkan gejala adanya *non-voting*, *swing votes*, *split voting* yang mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan elektoral (*electoral volatility*).

Berdasar pada realitas politik yang terjadi di tingkat lokal, maka bisa disimpulkan bahwa aliran politik yang dikemukakan Geertz (1960) yaitu Santri dan Abangan, dalam kehidupan politik, ditransformasikan menjadi ideologi partai berhaluan Islam dan Nasionalis. Santri yang dikonsepsikan Geertz sebagai kelompok masyarakat yang taat dalam menjalankan ajaran Islam terbagi ke dalam dua varian yaitu kelompok santri modernis dan kelompok santri tradisional (Jackson, 1984). Kedua varian santri ini, terutama santri yang mempunyai identifikasi kesiantrian yang kuat (Afan Gaffar, 1992), pilihan politik terhadap partai sangat kental dengan nuansa ideologis, mereka cenderung akan memilih partai Islam. Walaupun demikian, karena ada perbedaan pemahaman serta kultur keagamaan dari kedua varian santri ini telah melahirkan perilaku politik yang berbeda walaupun dasarnya sama yaitu ideologi Islam. Begitupun mereka yang Abangan, dasar pertimbangan ideologis dalam memilih partai politik cukup kental. Pemilih abangan

umumnya memilih partai yang berhaluan Nasionalis, yang juga sering dikonsepsikan sebagai partai Sekuler.

Dalam tataran praksis, kosep aliran pada pemilu pasca reformasi masih menunjukkan relevansinya, khususnya Jawa Timur. Kecenderungan pilihan politik kelompok Santri ke partai Islam dan Abangan ke Partai Nasionalis berjalan sebagaimana terlihat dari hasil pemilu baik 1999. Fakta ini dapat dijelaskan dengan konsep identifikasi diri, yang merupakan hasil dari proses panjang sosialisasi dari mulai keluarga, kelompok, maupun lingkungan (Hyman, 1959). Persoalan yang terjadi pada pemilu pasca 1999, dimana partai-partai yang memperoleh suara cukup besar dalam pemilu 1999 mengalami penurunan suara pada pemilu 2004 dan 2009, hal ini dikarenakan adanya penurunan identifikasi diri pemilih terhadap partai dan diikuti dengan meningkatnya kinerja partai politik dalam meraih simpati. Kondisi ini melahirkan perilaku pragmatis yang berakibat pada larinya sebagian pemilih dari partai tertentu ke partai lain.

Melemahnya identifikasi kepartaian banyak dipengaruhi oleh lemahnya komitmen ideologis partai yang tersurat dalam platform partai dan sekaligus menjadi agenda politik partai untuk diperjuangkan. Lemahnya pemahaman ideologi dalam partai berdampak pada model solusi persoalan bangsa yang relatif seragam dan tidak ada korelasinya dengan ideologi yang diperjuangkan. Program penyelesaian terhadap persoalan bangsa, hampir tidak menunjukkan adanya perbedaan yang substansial antara partai satu dengan yang lainnya. Ketika ideologi menjadi suatu sistem nilai partai, cara berpikir dan bertindak dalam menyelesaikan persoalan menjadi ciri khas dari parpol yang membedakannya dengan partai lain. Sebagai mana yang dikemukakan oleh Anthony Downs (1957), bahwa ideologi politik merupakan himpunan ide dan prinsip yang menjelaskan bagaimana seharusnya masyarakat bekerja, dan menawarkan ketertiban (order) masyarakat tertentu termasuk menawarkan bagaimana mengatur kekuasaan dan bagaimana seharusnya dilaksanakan.

Lemahnya ideologi partai berkorelasi pada perilaku politik partai yang cenderung praktis-pragmatis dalam mensikapi semua persoalan bangsa. Ideologi sebagai *the right of conduct* dan juga berperan untuk mengkritisi ide, gagasan serta program dari partai yang berlainan ideologi menjadi mandul. Tidak mengherankan bahwa akhirnya

konstituen menjadi lebih pragmatis juga dan punya kecenderungan memilih figur, kedekatan, atau yang banyak uang dan sumbangannya. Hal ini merupakan ciri dari fenomena yang oleh Nugent (2003) disebut sebagai defisit demokrasi, karena para pemilih lebih suka figur dari pada kemampuan kandidat yang berfokus pada muatan politik.

Perilaku pragmatis tersebut bisa dimaknai sebagai ketidakpercayaan pada partai politik. Hal itu mendorong masyarakat untuk berperilaku nonpartisan, di samping mendorong terjadinya *swing voters*, yaitu berpindahnya pilihan partai politik dari satu partai dalam pemilu ke partai lain dalam pemilu berikutnya. Apabila hal ini berlangsung terus, maka identifikasi diri pemilih terhadap partai akan mengalami kehancuran. Secara teoritik, kondisi ini dijelaskan oleh Harrop sebagai proses *dealignment*, yaitu suatu proses memudarnya identifikasi kepartaian dari seseorang kepada partai yang telah lama diikutinya atau sebagai "*the wakening of party loyalties*."

Memudarnya dukungan terhadap partai akan berarti hilangnya suarapartaiyangbersangkutan.Haltersebutakanmendorongtumbuhnya partai baru, atau meningkatnya kekuatan partai baru sebagai akibat dari bergesernya identifikasi diri partai dari pemilih. Di dalam negara-negara demokrasi liberal, termasuk Indonesia, penomena memudarnya dukungan atau menurunnya identifikasi partai akan menyebabkan berpindahnya pemilih ke partai lain atau/dan terbentuknya partai baru sebagai wadah baru untuk menyampaikan aspirasinya. Sebagaimana yang terjadi pada pemilu 1999 dan 2004, dimana sebagian massa PDIP, PKB, PAN harus hilang dan memunculkan partai politik baru yaitu Partai Demokrat, sementara PKS pada pemilu 2004, Partai Gerindra dan Partai Hanura pada pemilu 2009.

Walaupun adanya pergeseran politik dan munculnya partai baru bukan berarti politik aliran sudah hilang. Pergeseran politik yang terjadi lebih banyak pada lingkup ideologis yang sama, dan kalaupun ada pemilih yang menyebrang ke partai lain ideologi sifatnya hanya sementara. Hal ini berarti bahwa politik aliran masih merupakan penjelas dari perilaku politik pasca reformasi. Dengan demikian, konsep aliran politik ini akan tetap menjadi kekuatan yang mewarnai perpolitikan di negara kita.

Pemilu pertama pasca reformasi, tampak jelas bagaimana ideologi menjadi benang merah pola hubungan pemilih dan partai politik.

Memasuki pemilu 2004, akibat adanya perubahan dalam sistem pemilu, pola hubungan yang berbasis ideologi mengalami perubahan. Oleh karena itu, pemilu 1999 bisa dikatakan sangat kental dengan nuansa ideologis, pemilu 2004 nuansa ideologis agak berubah, karena sudah muncul pola hubungan yang bersifat transaksional walaupun dalam lingkup yang terbatas. Pada pemilu 2009, sistem pemilu dengan daftar terbuka murni lebih mendorong partai untuk melupakan label ideologis karena peran caleg lebih dominan dalam upaya meraih suara. Oleh karena itu, pola hubungan yang terbangun dalam pemilu 2009 menjadi bersifat pragmatis.

## **B. Sistem Kepartaian Semakin Terpolarisasi**

Menonjolnya kehidupan politik yang berbasis aliran berdampak pada sistem kepartaian yang semakin terpolarisasi dari pemilu ke pemilu. Partai politik di Malang Raya baik, kalau dilihat dari jumlah partai politik yang memperoleh kursi di parlemen pada pemilu 1999 ada enam partai (PDIP, P. Golkar, PKB, PPP, PAN, PBB), pada pemilu 2004 ada tujuh partai (P. Golkar, PDIP, PKB, PPP, PAN, PKS, dan P. Demokrat), dan pada pemilu 2009 ada sembilan partai (P. Demokrat, P. Golkar, PDIP, PKB, PPP, PAN, PKS, P. Gerindra, dan P. Hanura). Kalau kita gunakan model sistem kepartaiannya Sartori, maka apabila dilihat dari sisi jumlah partai yang memperoleh kursi di parlemen, sistem kepartaiannya tergolong ke dalam jenis *pluralisme terpolarisasi*. Akan tetapi karena ideologi di antara mereka hampir tidak jauh berbeda yaitu berkisar diantara ideologi Islam dan Nasionalis, maka tipe sistem kepartaian bisa dikatakan lebih menyerupai pluralisme Moderat.

Pada pemilu 1999 ada tiga partai yang cukup besar seperti PDI Perjuangan, PKB, Golkar, dan tiga partai lainnya seperti PAN, PPP, dan PK yang termasuk menengah. Dari keenam partai tersebut sebenarnya kalau dipilah-pilah ternyata masih memiliki visi yang hampir tidak jauh berbeda. Golkar dan PDI Perjuangan, walaupun di tingkat *grassroot* sering terjadi gesekan, namun sesungguhnya kedua partai tersebut dalam hal *platform* memiliki banyak persamaan. Begitu juga dengan PKB, PAN, PPP, PK, walau jurang pemisah selalu ada terutama antara partai berbasis pemilih Islam Modernis dengan partai berbasis pemilih Islam Tradisional. Namun karena sama-sama mempunyai dukungan pemilih berbasiskan Islam, partai-partai tersebut sebenarnya relatif masih bisa saling bekerja sama.

Pada pemilu 2004, partai-partai relatif besar seperti Golkar, PDI Perjuangan, PKB, dan PAN ditambah Partai Demokrat dan PKS masih menguasai kursi yang cukup besar di parlemen. Hasil pemilu 2009, partai politik yang mendapatkan kursi yang signifikan relatif lebih banyak ketimbang pada pemilu 1999 dan 2004. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa dari pemilu ke pemilu perolehan kursi di Dewan terus mengalami perubahan, hal ini disebabkan oleh tidak stabilnya perolehan suara partai. Tidak stabilnya perolehan suara partai politik ada kaitannya rendahnya kinerja partai. Cara kerja partai politik yang belum banyak beranjak dari fungsi praktis jangka pendek sebagai alat meraih kekuasaan, begitupun partai sering menjadi alat negosiasi dengan penguasa untuk mencapai kompensasi politik ketimbang benar-benar memperjuangkan aspirasi konstituen.

### C. Figur Kharismatis Menjadi Simbolalisasi Ideologis Partai

Proses pembentukan identifikasi politik di kalangan pemilih Santri sangat dipengaruhi proses sosioalisasi di dalam kelompoknya, khususnya masyarakat yang tergabung dalam organisasi keagamaan NU. Disisi lain, proses pembentukan identifikasi politik masyarakat Abangan banyak terbentuk dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, khususnya dari kalangan masyarakat yang menamakan dirinya sebagai "*wong cilik*". Proses sosialisasi yang terjadi melahirkan sebuah identitas kelompok yang juga identifikasi politik dari kelompok tersebut. Dilihat dari proses sosialisasi yang berjalan di Malang Raya, maka kehidupan masyarakatnya masih kental dengan pola aliran yaitu pola kehidupan Santri dan pola kehidupan Abangan.

Walaupun pola aliran ini masih berjalan, namun dalam tataran politik praktis, pola aliran semakin menunjukkan kekaburan akibat adanya perubahan simbolisasi ideologis partai bagi pemilih serta adanya kekecewaan pemilih pada kinerja partai. Simbolisasi ideologis partai tidak lagi melekat pada formalisme partai seperti yang ada dalam platform partai, namun sudah berubah menjadi figur yang ada dalam partai politik. Oleh karena itu, walaupun partai tidak secara formal mengatas namakan diri sebagai partai Islam atau pun Nasionalis apabila dalam partai tersebut ada tokoh yang dianggap mewakili kelompoknya, maka partai tersebut menjadi bagian dari identifikasi kelompok tersebut. Lebih jauh, akibat tidak berjalannya fungsi dasar sebuah parpol sebagai



sarana artikulasi, agregasi, maupun sarana pendidikan politik telah berdampak pada kekecewaan pemilih terhadap partai. Kekewaan pemilih ini berujung pada perubahan perilaku yang awalnya masih kuat terikat dengan pola aliran menjadi lebih pragmatis.

Memudarnya pola hubungan yang berbasis ideologis berimplikasi pada perubahan perolehan suara antar partai politik, sehingga ada partai yang mendapat limpahan suara dan juga sebaliknya ada yang kehilangan suara. Di wilayah Kabupaten, pada pemilu 2004 dan 2009, yang paling besar kehilangan suaranya adalah Partai Golkar dan PDIP. Sementara partai politik yang paling banyak mendapatkan penambahan suara adalah Partai Demokrat dan PKS. Sementara dari sisi kluster partai (Islam, Nasionalis, dan Kristen), pergeseran antar kluster partai tidak terlalu signifikan, hal ini dikarenakan banyak pemilih dari satu partai pindah ke partai lain dalam satu payung ideologis. Perubahan yang cukup signifikan terjadi pada partai Kristen, khususnya yang terjadi di Kota Malang. Partai berhaluan Kristen yang pada pemilu 1999 hanya mendapatkan 0,25%, pada pemilu 2004 meningkat menjadi 4,20%, dan pada pemilu 2009 mendapatkan suara 5,24%.

Pergeseran politik yang terjadi disebabkan karena beberapa hal: *pertama*, lemahnya ideologi partai. Hal ini berimplikasi pada hilangnya perbedaan substansial antara partai satu dengan partai lainnya dalam membangun *platform* dan program partai. Padahal ketika ideologi menjadi suatu sistem nilai, seharusnya punya dampak pada *platform* dan program dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Efek dari lemahnya ideologi ini membuat pemilih sulit untuk mengidentifikasi dirinya dengan partai tertentu. Oleh karena pemilih cenderung menjadi suka memilih partai yang ada figur kharismatis di dalamnya, sebagai bagian dari simbolisasi ideologi partai.

*Kedua*, adanya sistem threshold pada partai, dan sistem majority dalam menentukan calon yang akan duduk di parlemen telah mendorong partai dan caleg berperilaku pragmatis, pola hubungan partai dengan pemilih terjebak pada pola hubungan jual-beli/transaksional. Untuk mendapatkan suara dalam pemilu, parpol/caleg membeli suara pemilih lewat uang, sembako, kaos, pembangunan mesjid, pembangunan jalan dan lain-lain. Hal ini dilestarikan oleh hubungan anggota dewan dengan konstituennya, yang terhanyut dalam pola politik sejenis pasca Pemilu. Kondisi ini berakibat pada hilang atau rendahnya keterikatan pemilih

pada partai politik tertentu, walaupun mereka tetap secara ideologi mengidentifikasi dirinya sesuai dengan kerangka politik aliran.

#### D. Berkembangnya Partai *Catch-All*

Dengan banyaknya partai politik yang bersaing, baik dalam pemilu 1999 (48 parpol), pemilu 2004 (24 parpol), maupun pemilu 2009 (38 parpol) partai politik kesulitan untuk mendapatkan suara yang hanya mengandalkan segmen massa politik yang terbatas. Banyak partai politik pada pemilu 1999 harus gulung tikar akibat kurangnya dukungan untuk memenuhi *electoral threshold*. Begitupun nasib partai politik yang lulus *electoral threshold*, dengan segmen pemilih yang sempit, mengalami penurunan jumlah dukungan pemilih akibat ketidakmampuannya dalam meraih dan mempertahankan simpati pemilih. Kondisi ini telah mendorong partai-partai untuk memperluas segmen massa pemilihnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Demi memperoleh suara yang lebih besar dalam pemilu, ada kecenderungan partai-partai melakukan pencairan basis ideologi mereka, dengan cara merubah sifat organisasi yang eksklusif menjadi inklusif.<sup>362</sup>

Partai Nasionalis maupun Partai Islam, menurut I Ketut Putra Erawan (2008), terus berusaha melakukan pembenahan agar dapat tetap survive. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membenahi platform ideologisnya mereka masing-masing. PDIP sangat relevan sebagai partai massa karena banyak pendukung setia (Marhaenis, Soekarno, Nasionalis, dan mungkin kelompok populis), dan secara teoritik sudah berada pada jalur partai massa sejak berdirinya. Namun kenyataan pemilu 2004 telah mendorong elit-elit partai PDIP untuk mengaburkan partai massa.<sup>363</sup>

---

362 Setelah pemilu 1999, partai politik yang merasa tidak cukup kuat untuk meraih dukungan pemilih dari basis pemilih tradisionalnya, maka mereka berusaha untuk mengembangkan segmen pemilihnya. Salah satu cara agar bisa meraih dukungan pemilih dari luar basis tradisional, partai Islam melakukan pembenahan dalam membangun isu politiknya dengan tidak menonjolkan syariat Islam secara fulgar walaupun tetap tidak merubah jati dirinya sebagai partai Islam. Begitupun partai Nasionalis berusaha untuk menggaet pemilih diluar basis tradisionalnya, dengan cara membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh Islam.

363 Di sisi lain, kelompok Islam Tradisionalis melakukan sohpistikasi dalam pendekatan dengan kelompok Abangan. Partai-partai yang semula dikenal "hijau" mulai mencoba untuk menampilkan wajah Nasionalis dengan mereduksi isu-isu penegakan Syariat Islam dan Negara Islam dalam kampanyenya, sebagaimana dilakukan oleh PPP dan PKS. Ketika masih bernama Partai Keadilan (PK), dengan mengusung isu Islam partai ini tidak mendapatkan suara yang signifikan dalam pemilu 1999, di Parlemen hanya memperoleh 7

Perubahan ini menurut Riswanda Imawan (2004), membuka kemungkinan bagi partai untuk melakukan reposisi dan redefinisi fungsi mereka yang semakin jelas dan efektif dalam dinamika politik. Partai tidak sekedar berfungsi sebagai pencari legitimasi (perspektif partai elit) atau menyalurkan aspirasi massa (perspektif partai massa). Perubahan ini terjadi karena masuknya perspektif perilaku rasional ke dalam wacana perdebatan ilmiah mengenai peran dan fungsi partai politik.

Dalam pandangan Riswanda, terbentuknya *catchall party* di era multipartai, merupakan kelanjutan politik era Orde Baru yang menolak ideologi kiri-kanan, sehingga kedua spektrum ideologi harus hilang. Hilangnya ideologi ini menurut-nya justru akan menghancurkan negara seperti yang terjadi di negara-negara sosialis. Untuk melukiskan kondisi tersebut, Riswanda mengutip pernyataan Bell, 'bahwa bangkrutnya negara-negara sosialis adalah akibat kosongnya makna dikotomi "kiri-kanan" dalam perspektif ideologi politik. Ia berpendapat bahwa bila kubu tengah terbentuk karena penolakan terhadap kubu "kiri atau kanan", maka format *catch-all party* itu sendiri merupakan refleksi dari kehadiran satu ideologi baru.

Tanpa ideologi terbuka kemungkinan politik mengarah kepada pragmatisme dan oportunisme yang sangat akut. Logika produsen-konsumen yang merupakan pondasi pasar ekonomi menjadi dasar dalam kebijakan partai, yang menurut Riswanda (2004) logika ini mengandaikan bahwa segala pergulatan politik bergantung pada kreatifitas elit dalam mengiring massa politik untuk larut ke dalam jualan politik yang ditawarkan. Selanjutnya ia mengatakan bahwa bila kalkulasi elitis ini terjadi dalam sistem politik di mana personifikasi institusi masih berlaku, maka format *catch-all party* berpotensi melahirkan oligarki dalam tubuh partai itu sendiri. Dan ini bertentangan dengan jati diri dari partai politik sebagai pilar demokrasi.

---

kursi. Namun setelah melakukan pembenahan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di mana isu yang diluncurkan lebih riil dan menjadi dambaan masyarakat, seperti penegakan keadilan dan pemberantasan korupsi dengan semboyan "bersih dan peduli", PKS yang pada pemilu 1999 hanya mendapat 7 kursi, pada pemilu 2004 menjadi 45 kursi. Namun sebaliknya dengan PPP, meskipun sudah memperbaharui isu syariat Islam dan Negara Islam dan menggantinya dengan "mendukung" Pancasila, tetap saja stagnan dengan 58 kursi. PBB yang tetap ngotot dengan Syariat Islam juga melorot, dari 13 kursi dalam pemilu 1999 menjadi 11 kursi dalam pemilu 2004. PDI-P yang unggul dengan 153 kursi dalam pemilu 1999, juga melorot hanya memperoleh 109 kursi di pemilu 2004.

Kenyataan tersebut di atas dipengaruhi oleh adanya perkembangan aspirasi politik masyarakat yang membangun kesadaran dari para pelaku politik untuk berpikir bagaimana bisa merangkul berbagai kepentingan yang ada. Apalagi hal ini didukung oleh kenyataan bahwa kegagalan partai politik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berkembang merupakan penyebab utama matinya sebuah partai politik.

Dengan demikian banyak partai yang aktif dalam menjaring aspirasi yang berkembang, dan hal ini telah melahirkan format baru dalam partai politik yang dikenal dengan *catch-all party*.<sup>364</sup> Posisinya berada di antara kutub dikotomi partai elit dan partai massa. Format ini mengagungkan pragmatisme dan rasionalitas sebagai pilar penyangga sistem politik yang demokratis. Dengan prinsip pragmatisme dan rasionalitas ini dimungkinkan bagi masyarakat untuk berpikir tentang “politik tanpa alur” (*politics without cliches*), tidak menjadi tawanan ideologi, sehingga masyarakat mampu menyikapi berbagai masalah tanpa prakonsepsi, tanpa distorsi ideologis, dan tanpa kekakuan bersikap partisan.

Dalam rangka merealisasikan ambisi parpol membangun partai *catch-all*,<sup>365</sup> beragam cara dilakukan, tidak hanya oleh partai yang punya segmentasi pemilih Santri (Islam) namun juga partai yang punya segmentasi pemilih Abangan (Nasionalis). Untuk merambah massa berideologi berbeda, beberapa partai Islam dan Nasionalis mencoba

---

364 Dasar pertimbangan utama kenapa partai politik tergoda untuk membangun *catchall party* adalah keinginan untuk memenangkan pemilu. Baik *catchall party* yang berbasis partai massa maupun partai kader sama-sama punya pandangan bahwa untuk memenangkan pemilu harus menangkap semua atau berbagai kelompok kepentingan. Hal ini dilakukan dengan cara memperlunak ideologi mereka agar dapat masuk ke dalam berbagai kelompok. Semua *catchall party* menjanjikan kondisi yang lebih baik bagi pengusaha, upah dan jaminan sosial yang lebih baik bagi pekerja, harga terjangkau dan dukungan pada petani, jaminan hari tua, bantuan terhadap pengusaha kecil, pendidikan dan lapangan kerja yang lebih baik bagi pemuda, dan sebagainya. Lebih jelasnya, lihat Mark N. Hagopian, *Regimes, Movements, and Ideologies, A Comparative Introduction to Political Science*, New York and London, Logman Inc., 1978.

365 Partai jenis ini di permukaan hampir serupa dengan Partai Massa. Namun, berbeda dengan partai massa yang mendasarkan diri pada kelas sosial tertentu, Partai *Catchall* mulai berpikir bahwa dirinya mewakili kepentingan bangsa secara keseluruhan. Partai jenis ini berorientasi pada pemenangan Pemilu sehingga fleksibel untuk berganti-ganti isu di setiap kampanye. Partai *Catchall* juga sering disebut sebagai *Partai Electoral-Professional* atau *Partai Rational-Efficient*. Namun bergesernya posisi ideologis partai politik akan mengakibatkan hilangnya identitas masing-masing partai politik, bisa jadi setiap partai politik punya isu dan bahkan program yang sama sehingga tidak ada preferensi yang akan dijadikan dasar dalam menentukan pilihan politik.

mengubah citra diri. PDI-P membentuk Baitul Muslimin untuk merebut simpati generasi muda Islam. PAN kian bergeser ke arah Nasionalis, sementara PBR mengawinkan Islam dan sosialisme. Begitu pun PPP dan PKS berupaya melunakan isu syariat Islam-nya, dan hanya PBB yang secara konsisten mengampanyekan Syariat Islam. Semua pergeseran itu akan membawa konsekuensi politik para pendukung Tradisionalnya. Segmentasi pemilih pada pemilu 2009 sudah mengalami perluasan, karena hampir semua partai telah keluar dari basis tradisionalnya baik secara terang-terangan maupun tersembunyi.

Dengan demikian, lemahnya pemahaman ideologis partai dan adanya tuntutan untuk memenuhi *electoral threshold* (1999) atau *parliamentary threshod* (2004) serta keinginan kuat dari caleg untuk dapat memenangkan persaingan dalam pemilu menjadi penyebab utama partai politik berperilaku praktis-pragmatis. Di sisi lain pemilih, walaupun tetap pilihan politiknya berpegang pada ideologis, namun tidak mendikotomi partai Islam vs partai Nasionalis dalam tataran formal. Simbolisasi partai Islam atau Nasionalis lebih banyak ditentukan oleh tokoh yang ada di partai tersebut, Ideologi Islam atau Nasionalis dari partai politik tidak lagi ditentukan lewat acuan formal, namun dari figur yang ada di partai tersebut.

Fenomena berkembangnya partai politik yang berperilaku praktis pragmatis serta mengaburkan identitas ideologis untuk mengambil spektrum pemilih yang lebih heterogen (*catch all party*), dalam kenyataannya justru merugikan partai itu sendiri. Pemilih semakin jauh dari partai karena identifikasinya kepada partai semakin terkikis. Akibat dari perilaku pragmatis, pemilih dari pemilu ke pemilu semakin tinggiuntutannya pada partai atau caleg untuk memenuhi permintaan yang bersifat materi. Lebih jauh partai politik semakin terjebak untuk merekayasa identitas ideologis ke arah abu-abu, serta menjauhkan diri dari program-program partai yang jelas dan kongkrit.

Partai politik yang berfungsi sebagai agregasi dan artikulasi kepentingan, tidak lagi menawarkan *platform* dan program partai yang penuh kualitas sebagai produk politik yang akan dijual. Sebaliknya, partai politik lebih banyak terjebak pada kepentingan jangka pendek saat pemilu, berbagai program yang ditawarkan hanya bersifat karikatif dan tidak mendidik. Kalau dilihat dari perspektif rasional sebenarnya masyarakat akan berusaha untuk mencari produk partai

politik yang akan meningkatkan keuntungan yang sebesar-besarnya kepada mereka. Akan tetapi karena rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat pada partai politik, masyarakat lebih cenderung mengabaikan produk politik partai yang sifatnya substantif, berupa tawaran program yang berkualitas, dan lebih memilih produk partai yang sifatnya karikatif. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa sekarang ini sedang terjadi inskonsistensi partai politik dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.

Pola hubungan partai dengan konstituen sudah terjebak pada pola transaksional dilestarikan oleh hubungan anggota dewan dengan konstituennya, yang terhanyut dalam pola politik sejenis pasca Pemilu. Anggota dewan terjebak untuk memberikan bantuan dan sumbangan yang bersifat karitatif dan berbiaya tinggi. Hal ini ditenggarai juga sebagai sebuah ketakutan dari pimpinan partai politik akan kehilangan dukungan konstituennya sebagaimana yang dikemukakan Feith (1974), *"...party leaders were afraid that their members would desert them if not given sufficient reward..."*.

Hasil sebuah penelitian yang berbentuk disertasi diharapkan dapat memberi sumbangan akademik dengan menemukan suatu teori yang baru, mengembangkan atau merevisi teori terdahulu. Studi ini secara relatif tidak memberikan sumbangan teori baru terhadap pola hubungan partai dan pemilih di Indonesia, karena pola aliran telah terlebih dahulu dikemukakan oleh Geertz pada tahun 1960 an yang merupakan hasil penelitian di daerah Mojokuto, Pare, Jawa Timur.

Geertz menyimpulkan bahwa Santri adalah kelompok Muslim yang taat dalam menjalankan perintah agama. Bagi Santri pada tahun 1950-an, taat terhadap agama berarti mengupayakan agar Islam menjadi landasan atau asas bagi pengelompokan politik, seperti parpol dan negara. Karena itu, mereka mendirikan parpol berasas Islam, dan pada tahun 1950-an mereka juga mengupayakan agar Indonesia berasaskan Islam. Sebaliknya, Abangan adalah kelompok Muslim yang tidak taat menjalankan kewajiban agama Islam, apalagi memperjuangkan agar negara berasaskan Islam. Bagi Kelompok Abangan, Islam tidak penting dalam kehidupan sosial-politik. Sementara Priyayi adalah kelompok Muslim yang secara kultural dekat dengan Abangan, namun yang membedakan mereka adalah dari cara berperilaku yang lebih halus dan datang dari pegawai pemerintah.

Pola politik aliran yang berkembang pada pemilu 1955, begitu juga dengan pengelompokan politik yang dilakukan pemerintah Orde Baru. Pada pemilu multipartai era reformasi khususnya pemilu 2004 dan 2009, politik aliran mendapatkan gugatan akibat terjadinya pergeseran politik yang signifikan. Pergeseran politik ini telah menyebabkan perubahan kekuatan politik di antara partai-partai yang oleh Mair *et. al.*<sup>366</sup> dinamakan sebagai gejala *electoral market change* atau perubahan pasar pemilu. Perubahan dalam *electoral* mempunyai beragam bentuk dan melibatkan sejumlah parameter yang berbeda. Perubahan *electoral market* ini bisa dilihat dari beberapa hal seperti perubahan *struktur social, structural dealignment*, penurunan dalam identifikasi kepartaian, perubahan dalam orientasi nilai, kompetisi isu, dan krisis partai.

Perubahan struktur sosial yang dimaksudkan oleh Mair *et. al.* adalah perubahan berbasis struktur sosial ekonomi, padahal dalam kasus di Indonesia kelas ekonomi tidak punya dampak signifikan dalam perilaku politik di Indonesia sebagaimana dibuktikan dari hasil penelitiannya Afan Gaffar.<sup>367</sup> Struktur sosial yang berbasis primordial (agama) justru lebih menonjol dalam mempengaruhi perilaku politik di Indonesia. Hal yang menarik dari Mair *et. al.* ini adalah krisis partai, dimana partai politik kehilangan kepercayaan dari pemilih. Pada pemilu 2004 dan 2009 di Indonesia terjadi pergeseran politik yang signifikan dan telah menyebabkan sistem kepartai terpolarisasi akibat munculnya kekecewaan pemilih pada partai politik akibat rendahnya kinerja partai.

Kemunculan partai politik baru bukan diakibatkan oleh munculnya kelas sosial ekonomi baru, karena secara ideologis partai baru seperti Partai Demokrat tidak lah berbeda dengan partai Nasionalis yang lain. Namun ada hal yang baru yaitu sosok dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam partai yang mampu menjadi simbolisasi ideologi partai. Sebagaimana halnya partai-partai lain yang memperoleh suara signifikan seperti PKB dengan Gus Dur, PAN dengan Amin Rais, PDIP dengan Megawati yang merupakan simbolisasi ideologi dari partai masing-masing. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa pola aliran yang dikemukakan oleh Geert tersebut dalam derajat tertentu sebenarnya

---

366 Peter Mair, Wolfgang C. Muller, dan Printz Plasser, *Political Party and Electoral Change*, London: SAGE Publications Ltd. 2004

367 Afan Gaffar, *Javanese Voters, A Case Study of Election Under Party a Hegemonic Party System*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.

masih berjalan, apalagi kalau dilihat dari pertumbuhan suara PKS yang merupakan representasi dari kelompok Islam.

Dengan demikian pergeseran politik yang terjadi pasca reformasi bukanlah akibat dari perubahan *electoral market* yang dalam hal ini perubahan politik aliran, namun akibat berkembangnya kekecewaan pemilih pada partai sebagai dampak dari rendahnya kinerja partai. Lebih jauh, penemuan yang menarik untuk dikemukakan bahwa partai politik dalam merespon pergeseran politik (*electoral volatility*) ini lebih banyak dari sisi pragmatis ketimbang ideologis. Program karikatif yang berbiaya tinggi dipakai sebagai jembatan untuk menggapai pemilih diluar basis tradisional yang merupakan jalan untuk membangun partai *catch-all*. Sementara biaya politik yang besar ditopang dengan mengembangkan politik cartel yang telah berdampak pada banyaknya kasus korupsi yang melibatkan anggota Dewan.

### E. Pragmatisme Politik

Kekecewaan pemilih terhadap kinerja partai telah berdampak pada pragmatis politik di Malang Raya. Berbagai kasus yang menyelimuti anggota dewan di Malang Raya seperti kasus pembuatan Mall yang melanggar RUTRW, kasus korupsi yang melibatkan anggota Dewan, kasus kelebihan dana bantuan parpol, dan kasus perburuhan PT Wastra Indah telah menjadi bukti bahwa kinerja partai politik rendah. Pemilih tidak lagi melihat apa program yang akan dijalankan oleh partai, karena mereka sudah tidak mempercayai partai, mereka mau memilih apabila diberi imbalan materi baik berupa uang atau barang, termasuk bantuan untuk pembangunan. Di sisi lain partai politik, akibat persaingan yang ketat antar partai maupun persaingan caleg di internal partai telah mendorong mengembangkan politik pragmatis. Partai politik lebih suka merekrut calon-calon yang sudah populer ketimbang merekrut calon dari internal partai. Untuk meraih simpati pemilih partai politik lebih suka melakukan strategi dengan pendekatan ekonomi yaitu program-program karikatif yang berbiaya tinggi. Program bakti sosial seperti pengobatan gratis, bantuan sembako murah, membantu kegiatan pembangunan lingkungan banyak dilakukan oleh partai politik.

Kenyataan tersebut diatas berdampak pada terjadinya perubahan electoral, banyak partai-partai yang lulus *electoral threshold* seperti PDIP, P. Golkar, PKB, PPP, PAN, dan PBB harus kehilangan suara yang cukup



signifikan pada pemilu 2004. Akan tetapi, perubahan electoral yang terjadi hanya berada dalam satu payung ideologis yaitu baik itu dalam internal partai yang berideologi Islam maupun Nasionalis. Sementara perubahan *electoral* akibat adanya migrasi ideologis secara besar pada pemilu 2004 tidak terjadi. Namun perubahan antar kluster ideologis agak nampak dari pemilu 2004 ke pemilu 2009, hal ini diakibatkan oleh perubahan respon partai politik terhadap perubahan *electoral* yang terjadi pada pemilu 2004. Partai politik banyak yang berusaha mencairkan basis ideologisnya dengan cara lebih bergeser ke tengah (*catch-all party*). Akibat dari perubahan strategi partai politik tersebut, sistem kepartaian lebih terpolarisasi dan bahkan terjadi perubahan partai politik yang dominan

Dengan demikian klaim bahwa politik aliran tidak berubah, walaupun telah terjadi perubahan *electoral*, khususnya pada pemilu 2004 dan 2009 bisa dibuktikan. Pemilih tidak lagi melihat ideologi dalam tataran formal melainkan ada atau tidaknya figur kharismatik yang menjadi simbolisasi ideologis kelompoknya. Dengan demikian *platform* partai tidak lagi berpengaruh terhadap pola hubungan partai dan pemilih dalam konteks ideologi. Hal ini bisa dilihat, bagaimana dukungan dari kelompok Santri Tradisionalis terhadap PKB. Secara formal PKB adalah partai Nasionalis, dan NU sebagai organisasi yang mewakili kalangan Santri Tradisional tidak menyatakan dukungan secara formal terhadap PKB. Namun dukungan pemilih Santri Tradisional terhadap PKB tetap besar karena keberadaan Gus Dur yang merupakan cucu dari pendiri NU yaitu KH. Hasyim As'ari telah menjadi simbolisasi ideologis dari PKB. Tidak hanya PKB, tetapi juga PDIP yang ada Megawati sebagai anak dari mantan tokoh PNI dan Presiden pertama RI yaitu Soekarno, PAN ada Amin Rais yang merupakan mantan ketua Umum PP Muhammadiyah.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)



## DAFTAR PUSTAKA

- Abcarian, Gilbert and John W. Soul (1971) *Social Psychology and Political Behavior: Problem and Prospect*, Columbus, Ohio: A Bell & Howel Company.
- Abdullah, Taufik ed. (1983) *Agama dan Perubahan Sosial*. Jakarta : Rajawali Press.
- Alfian (1989) *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organisation Under Dutch Colonialism*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- , (1973) *Analisa Hasil Pemilihan Umum 1971*, LIPI, Jakarta.
- , dan Nazaruddin Syamsuddin, (1988) *Masa Depan Kehidupan Politik Indonesia*, Rajawali Press: Jakarta.
- , 1990, *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia, Kumpulan Karangan*, Jakarta: PT. Gramedia
- Ali, Fachry (1994) *How State Comes to the People?: the Acehnese and the New Order State*. A Paper presented at the Indonesian Study group, Research School of Pacific and Asian Studies, ANU, Canberra, 8 June 1994.
- (1994) *Keharusan Demokratisasi dalam Islam di Indonesia*. A paper presented at a seminar held in LIPI by Majelis Sinergi Kalam, ICMI, Jakarta.
- , (1996) *Pengaruh Aliran Dalam politik Indonesia*, unpublished paper.
- Alford, Roberth R., (1963) *Party and Society*, Rand McNally and Company, Chicago.

- Almond, Gabriel and Sidney Verba, (1963) *The Civic Culture*. New Jersey: Prenceton Univerity Press,
- (1966) *Comparative Politics, A Developmental Approach*. Boston: Little, Brown and Company.
- Alt, James E. Anf K. Alec Chrystal (1980) *Political Economics, Berkeley and Los Angelos*, California: University of California Press.
- Amal, Ichlasul, Dr., (1988) *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ambardhi, Kuskridho, 2009, *Mengungkap Politik Kartel*, Jakarta: PT Gramedia.
- Amstutz, R., Mark, (1982) *An Intorduction to Political Science, The Management of Conflict*. USA: Foreman and Company.
- Anderson, Benedict R. O'G., (1990) *The Idea of Power in Javanese Power*, dalam Benedict R. O'G. Anderson *Culture and Politics in Indonesia*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- , (1990) *Language and Power, Exploring Political Cultures in Indonesia*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- , & Audrey Kahin, (1982) *Interpretating Indonesian Politics: Thirteen Contribution to Debate*, New York: Cornell Modern Indonesian Project, Southeast Asia Program, Cornell University.
- Andrews, Mac, Collin, dan Mohtar Mas'ud. (1990) "*Perbandingan Sistem Politik*". Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antony Black, (2006) *Pemikiran Politik Islam*, Terj. Abdullah Ali, Cet, I, Jakarta.
- Anderson, B. and Kahin, Andrey (1982) *Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contribution to the Debate*. Ithaca : Cornell Modern Indonesian Project.
- Arifin, Imron (1993) *Kepemimpinan Kyai: Kasus Pondok Pesantren Tebuireng*. Malang : Kalimasahada Press.
- As'ad, M.Z. Widjaja (1991) *Elit Agama dan Massa Pemilih dalam Perspektif Budaya Politik*. Unpublished MA thesis. Yogyakarta: Gadjahmada University.
- Asher, Herbert B. (1988) *Presidential Elections and American Politics*, 4th ed., Homewood, Ill,: Dorsey Press.
- Azra, Azyumardi, (2002) *Reposisi Hubungan Agama dan Negara*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

- , dkk. (2004) *Pergulatan Partai Politik Di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Barnes, Douglas F. (1978) "Charisma and Religious Leadership: An Historical Analysis", *Journal of the Scientific Study of Religion*, 17(1): 1-18.
- Barton, Greg and Fealy, Greg ed. (1996, forthcoming) *Nahdlatul Ulama, Traditional Islam and Modernity in Indonesia*. Centre of Southeast Asian Studies, Monash University.
- Bernard Lewis, (2002) *Islam Liberalisme Demokrasi*, Terj. Mu'im A Sirry, Cit. I. Jakarta: Para Madina,
- Berelson, Bernard R., et.al, (1954) *Voting*, University of Chicago Press, Chicago.
- Binder, Leonard (1959) "Islamic Tradition and Politics: The Kyai and the Alim", *Comparative Study in Society and History*, (2): 250-256.
- , et al. (1971) *Crises and Sequences in Political Development*, New Jersey: Princeton University Press.
- Bibby, John F., *Politics, Parties, and Elections in America*, Chicago: Nelson-Hall Publishers, 1992.
- Boboy, Max, SH., (1994) *DPR RI Dalam Perspektif Sejarah dan Tata Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
- Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor, (1992) *Pengantar metoda penelitian kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-ilmu Sosial*, (Diterj. Arief Furchan) Surabaya: Usaha Nasional.
- Bone and Ranny, (1980) *Politics and Voters*, Mc. Graw-Hill inc. Illiones.
- Bourchier and Legge John (editor). (1994) *Democracy In Indonesia 1950 and 1990s*. Australia: Aristoc press Pty.
- Bogdan, R.C. And Taylor, (1992) *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to The Social Sciencies*. New York: John Wiley & Sons.
- Brannen, Julia. (1993) *Mixing Methods: Qualitative and Quantitative Research*. USA: Ashgate Publishing Company.
- Bruinessen, Martin van (1994) NU: *Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana baru*, Yogyakarta : LKIS.
- , (1992) *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia*. Bandung : Mizan.

- , (1995) *Kitab Kuning, Pesantren dan tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*, Bandung : Mizan.
- Budiarjo, Miriam, (1992) *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Bulkin, Farchan, (1983) *State and Society: Indonesian Politics Under the New Order (1966-1978)*. Ph.D. Diss. University of Wahsington, Seattle.
- Burn, James Mc Gregor, et.al., 1989, *Government by The People*, New Jersey: Prentice Hall, Engliwood Cliffs.
- Campbell, Angus, (dkk) (1954) *The Voter Decides*, Evanston: Row, Peterson and Co.
- , et al., (1960) *The American Voter*. New York: John Wiley and Sons.
- , et al., (1966) *Election and the Political Order*, John Willey and Sons, New York.
- Clifford Geertz, (1986) *Mojokuto, Dinamika Sosial Sebuah Kota di Jawa*. Jakarta: Pustaka Grafitipers.
- Converse, Phillip E. (1969) *Of Time and Partisan Stability*, Comparative Political Studies, 2.
- Crouch, Harold. 1978. *Patrimonialism and Military Rule In Indonesia*. World Politics Vol. 31, No. 4, USA.
- , (1994) *Democratic Prospects in Indonesia*, in David Bourchier & John Legge (eds.) *Democracy in Indonesia, 1950s and 1990s*, Clayton, Victoria: Center of Southeast Asian Studies, Monash University, (Monash Papers on Southeast Asia No. 31).
- Cumming, Milton, (1956) *Congressmen and the Electorate*, The Free Press.
- Czudnowski, Moshe, M. (1976) *Comparing Political Behavior*, London: Sage Publication Inc, New York.
- Dahl, Robert, (1956) *A Preface to Democracy Theory*. Chicago: University of Chicago Press.
- Dalton, Russell J., Scott C. Flanagan, and Paul Alan Beck, 1984, *Electoral Change in Advance Industrial Democracies, Realignment or Dealignment?* Prencinton, NJ: Prencinton University Press, 1984.
- Dhofier, Zamakhsyari, (1980) *The Pesantren Tradition: A Study of the Role of the Kyai in the Maintenance of the Traditional Ideology of Islam in Java*. Ph.D. Thesis, ANU, Canberra.

- Dhofier, Zamakhsyari, (1982) *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta : LP3ES.
- Dankwart, A., Rustow, *Transition to Democracy*. To Ward To Dynamic Model, Comparative Politics Vol. 2. No. 3: 337-363.
- Deutch, Karl, W. (1961) "*Social Mobilization and Political Development*". American: Science Review, LV.
- Dhakidae, Daniel, (1999) "*Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi, Strategi dan Program*". Dalam Tim Penelitian Litbang Kompas (editor). Edisi Pemilihan Umum. Jakarta: Litbang Kompas.
- Diamond, Larry, (2003) *Developing Democracy, Toward Consolidation*, terjemahan. Yogyakarta: IRE Press.
- , (1966) *Political Opposition in Western Democracies*. New Haven: Yale University Press.
- Dalton, Russel J., (1988) *Citizen Politics in Western Democracies: Public Opinion and Political Parties in the United States*. Great Britain, Chatam House, West Germany, and France, Chatam, NJ.
- Denver, David, (1989) *Election and Voting Behavior in Britain*. London: Philip Allan Published.
- Dhakidae, Daniel (1981) *Partai Politik Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia*, Dalam Prisma 12 Des., LP3S.
- Dreyer, C., Edward and Rosenbaum, A., Walter, (1976) *Political Opinion and behavior, Essay and Studies (Third Edition)*, Wadsworth Publishing Company, Inc. California.
- Down, Anthony, (1957) *An Economic Theory of Democracy*, Harver and Brothers.
- Drijarkara, N., (1978) *Percikan Filsafat*, Jakarta: Pembangunan Jaya.
- Easton, David, (1953) *The Political System*. Yew York: Alfred A Knopt
- Echols, J.M. and Shadily, Hassan (1975) *An English Indonesian Dictionary*. Ithaca, London : Cornell University Press.
- Effendy, Bahtiar (1998) *Islam dan Negara: Tranformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina.
- Emerson, D.K., (1978) *The Bureaucracy in Political Context: Weakness in Strength*. In Jackson, Karl D and Pye, Lucian ed., *Political Power and Communication in Indonesia*. Los Angeles : University California Press.

- , (1976) *Indonesia's Elite: Political Cultural and Cultural Politics*, Ithaca: Cornell University Press.
- Eriyanto, (1999) *Metodologi Polling, Memberdayakan Suara Rakyat*, Bandung, PT Rosdakarya Offset Bandung.
- Eulau, Heinz, (1965) *The Behavior Persuation in Politics*, New York: Random House, New York.
- Evan, Geoferey dan Pipi Noris (editor),(1999) *Critical Election, British Parties and Voters in Long-Term Perspective*, London: Sage Publication Ltd.
- Fajar, Mukti, (2008) *Partai Politik Dalam Perkembangan Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Malang: In-TRANS Publishing.
- Farrel, M. David, *Comparing Electoral System*, London: MacMillan Press Ltd., 1997.
- Farganis, James, (2000) *Reading In Social Theory, The Clasic Tradition to Post-Modernism*, USA: The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Fathoni, Khoerul and Zen, Muhammad (1992) *NU Pasca Khittah: Prospek Ukhurwah dengan Muhammadiyah*. Yogyakarta: Media Widya Mandala.
- Fealy, Greg (2003) *Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967*, Yogyakarta: LP3ES.
- Feith, H., (1970) "Introduction". In Feith and Castle, Lance ed. *Indonesian Political Thinking, 1945-1965*. Ithaca : Cornell University Press.
- , (1978) *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Ithaca and London: Cornell University Press.
- , (1957) *Indonesian Elections of 1955, Modern Indonesia Project Southeast Asia Program*, Ithaca, New York: Cornell University.
- Fisher, Michael M.J., (1980) *Iran: From Religious Dispute to Revolution*. Cambridge : Harvard University Press.
- Flaniagan, H. W., (1968) *Political Behavior of the American Electorate*, Boston: Allyn and Bacon.
- Fox, James J., (1991) "Ziarah Visits to the Tombs of the Wali, the Founders of Islam on Java". In Ricklefs, M.C. *Islam in the Indonesian Context*. Clayton, Victoria: Centre for Southeast Asian Studies, Monash Univ.
- Fox, James J. and Dirjosanjoto, P., (1989) "The Memories of Village Santri from Jombang in East Java". In May, R.J. and O'Mallay, William J. ed. *Observing Change in Asia*. Bathurst : Crawford House Press.



- Friedrich, Carl J. (1961) "Political Leadership and the Problem of the Charismatic Power", *The Journal of Politics*, No. 1 February: 3–24.
- Finer, E., S. (1970) *Comparative Government, An Introduction to the Study of Politics*. New York: Allen Lane The Penguin Press.
- , (1985) *Comparative Government*. New Zealand: Penguin Books.
- Finkle L., Jason and Rachard W. Gable, (1971) *Political Development and Social Change (second edition)*, John Wiley & Sons, Inc. Canada.
- Flanagan, Scoot, C. et.al., (1991) *The Japanese Voters*. New York: Yale University Press.
- Free, Lioyd A. and Hadley Cantril, (1968) *The Political Beliefs of Americans*. New York: Simon and Schuster.
- Gaffar, Afan, (1992) *Javanese Voters, A Case Study of Election Under Party a Hegemonic Party System*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Geertz, Clifford, (1960) *The Religion of Java*. Glencoe : The Free Press.
- , Clifford, (1959) "The Javanese Kyai: The Changing Role of a Cultural Broker", *Comparative Studies in Society and History*, (2): 250–256.
- , Clifford, (1965) *The Social History of an Indonesian Town*. Cambridge, Massachusets : MIT Press.
- , Clifford, (1981) *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Jaya
- Gellner, Ernest, (1969) *Saints of the Atlas*. London : Weidenfeld and Nicolson.
- Gilsenen, Michael, (1973) *Saint and Sufi in Modern Egypt: An Essay in the Sociology of Religion*. Oxford Monograph on Social Anthropology.
- Graze, Sebastian De (1948) *Political Community, A Study of Anomy*, Chicago, Illiones: The University of Chicago Press.
- Greenstein, Fred J., (1969) *Personality and Politics*. Chicago: Markham Publishing.
- , (1965) *Children and Politics*, New Haven, Conn: Yale University Press.
- Haidar, M Ali (1994) *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

- Hagopian, N., Mark (1978) *Regime, Movements and Ideologies*, New York and London: The University of Chicago Press.
- Hammond, J.L., (1979) *The Politics of Benevolence: Revival Religion and American Voting Behaviour*. Norwood : Ablex Publishing Corporation.
- Haryanto, (1984) *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*. Yogyakarta: Liberty.
- Harrop, Martin (dkk) (1992) *Political Science, A comparative Introduction*. Great Britain: The Macmillan Press LTD.
- , Martin (dkk) (1987) *Election and Voters*, London: The McMillan Press.
- Hefner, Robert W., (1987) "Islamizing Java?: Religion and Politics in Rural East Java", *The Journal of Asian Studies*, 46(3): 533–553.
- Heijer, Johannes den, (1992) *A Guide to Arabic Transliteration: Comparative Transliteration Tables and a List of Selected Arabic Terms Related to Islamic Studies*. Jakarta : INIS.
- Heywood, Adrew, (2000) *Key Concepts In Politics*. London, MacMillan Press LTD
- Hill, Michael, (1973) *A Sociology of Religion*. Hampshire : Avebury.
- Hidayat, Komarudin dan Yudhie Latif, (2004) *Manuver Politik Ulama*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Holt, Robert T. And John E. Turner (1968) *Political Party in Action, The Battle of Barons Court*, New York: The Free Press.
- Huntington, Samuel P., (1983) *Tertib Politik di Negara Yang Sedang Berkembang*. Cetakan I dan II, Jakarta: CV. Rajawali.
- \_\_\_\_\_, (1991) *The Third Wave, Democratization in The Late Twentieth Century*. Norman and London: University of Oklahoma Press.
- \_\_\_\_\_, (1995) "Gelombang Demokratisasi Ketiga". terjemahan, Jakarta: PT. Intermasa.
- Husserl, Edmund, (1965) *Phenomenology and the Crisis of Philosophy*, New York: Harper & Row, Publishers, Inc.
- , (1970) *The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology (Translated by: David Carr)*, Evanston: Northwestern University Press.
- , (1976) *Ideas, General Introduction to Pure Phenomenology, (translated by: W.R. Boyce Gibson)*, London: Routledge & Kegan Paul.

- Hyman, Herbert H., (1969) *Political Socialization*. Yogyakarta: Collier Mcamillan Canada, Ltd.
- Imawan, Risranda, (2004) *Partai Politik Di Indonesia: Pergulatan Hati Mencari Jati Diri*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Yogyakarta, UGM
- Jackson, Karl D., (1973) *Traditional Authority, Islam and Rebellion*. Berkeley: University of California Press.
- , dan Lucian, W. Pye, (1978) *Political Power and Communication in Indonesia*, London, University of California Press.
- Jenkins, D., (1984) *Suharto and His General: Indonesian Military Politics 1975–1983*. Cornell Modern Indonesian Project.
- , (1978) *Political Power and Communication in Indonesia*. London: University of California Press.
- , (1980) *Traditional Authority, Islam and Rebellion*. Berkeley: University of California Press.
- Jaros, Dean (1974) *Explaining the Political Behavior of Individual: Group or Social Factors*, Dean jaros, *Political Behavior, Choices and Perspective*, St Martin's Press, New York.
- Jenning, M. Kent and L. Harmon Zeigler, eds., (1966) *The Electoral Proses*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J.
- J.C Wahlke, dkk, *The Legislative System*, New York, (1962) dalam Prof. Dr. A. Dalam Hoogerwerf, *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Erlangga, 1983.
- Karim, M. Rusli (1992) *Islam dan Konflik Politik Era Orde Baru*, Yogyakarta: Media Widya Mandala.
- Kartodirdjo, Sartono, (1973) *Protest Movement in Rural Java: A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and Early Twentieth Century*, Kuala Lumpur : Oxford University Press.
- Kazhim, M. dan Alfian Hamzah, (1999) *Lima Partai Dalam Timbangan*, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Key, Jr., V.O., (1958) *Politics, Parties, and Pressure Groups*, New York: Vail-Ballou Press.
- , (1966) *The Responsible Electorate*, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Mass.
- King, Dwight Y., (2003) *Half-Hearted Reform, Electoral Institution And The Struggle For Democracy In Indonesia*, USA: Praeger Publisher.

- Kompas, (2004) *Partai-Partai Politik Indonesia, Ideologi dan Program*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Kristiadi, Joseph, (1994) *Pemilihan Umum dan Pemilih*, Desertasi Doktor Di Universitas Gadjah Mada.
- Lane, Robert E., (1959) *Political Life*, The Free Press, New York.
- Langton, Kenneth P., (1969) *Political Socialization*. New York: Oxford University Press.
- Lazarsfeld, Paul, Berbard Berelso, and Hazel Gaudet, (1944) *The People Choice*. New York: Columbia University Press.
- , (1962) *Political Ideology*. New York: The Free Press.
- , (1969) *Political Thinking and Consciousness*. Chicago: Markham Publishing.
- Lev, S. D., (1966) *The Transition to Guide Democracy: Indonesian Politcs, 1957-1959*, Monograph Series, Modern Indonesian Project, New York: Cornell University.
- Liddle, W.R., (1978) *Participation and the Political Parties*. In Jackson, Karl D and Pye, Lucian ed. *Political Power and Communication in Indonesia*. Berkeley : University of California Press.
- , (1978) *The 1977 Indonesia Election anf New Orde Legitimasy*, Southeast Asian Affair (Singapura: Institute for Southeast Asia Affair Asia Studies, 1978.a)
- , (1974) *"Power, Participation and The Political Party in Indonesia"*, Center for International Studies, MIT.
- , 1992. *Sungai Budaya*. Tempo. 12 April.
- Lipset, Saymore M., (1960) *Political Man, Garden City, N.Y.: Doubleday and Company*,
- and Stein Rokkan, (1967) *Party System and Voter Alignments: Cross National Perspectives*. New York: The Free Press.
- Liddle, William, R., (1994) *Soeharto's Indonesia: Personal Rule and Political Institutions*. Leirissa, RZ.. PRRI Permesta. Jakarta: Grafiti .Pers.
- Mackenzie, W J M, (1978) *Political Indentity*. New York: As. Martin's Press.
- Mackie, J.A.C., (1990) *"Property and power in Indonesia"*, dalam Richard Tanter dan Kenneth Young, *The Politics of Middle Calss Indonesia*, Clayton: Center of Southeast Asian Studies, Monash University.

- Mair, Peter., et.al. (2004) *Political Party and Electoral Change*, London: SAGE Publications Ltd.
- , Cleavages, dalam Ricard S Katz and William Crotty , (edt), 2006, *Hand Books of Party Politics*, California: SAGE Publication.
- Majid, Nurcholis (1996) *Ketegangan Kultur Pesisir dan Kultur Pedalaman (Menelusuri Kultur Politik Orde Baru)*, Jakarta: Yayasan Lintas Informasi.
- Mancini, Paolo, 1999, *New Frontiers in Political Professionalism*, Political Communication, 16.
- Mas'ood, Mohtar, (1989) *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*. Jakarta: LP3ES.
- Mintadireja, S., M., (1971) *Masyarakat Islam dan Politik Indonesia*, Djakarta: Permata Djakarta.
- Mochtar, Hilmy, (1989) *Dinamika Nahdlatul Ulama: Suatu Study tentang Elite Kekuatan Politik Islam di Jombang Jawa Timur*. Unpublished MA thesis, Gadjahmada University, Yogyakarta .
- Moelang, Lexy, J. (1991) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin, Yahya, dan Andrews, Mac Colin. (1985) *Masalah-Masalah Pembangunan Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mujani, Saeful, (2007) *Muslim Demokrat, Islam, Budaya Demokrasi, Dan Partisipasi Politik Indonesia Pasca Demokrasi*, Jakarta: PT Gramdia Pustaka Utama.
- Mulkan, M. A. (1988) *Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Ummat Islam, Dalam Prespektif Sosiologis*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Neill Nugent, (2003) *The government and Politics of the European Union, Edisi ke-5*, Hampshire: Palgrave MacMillan
- Nimo, Dan (1970) *The Political Persuades*, Tokyo: Prentice-Hall.
- Noer, Deliar (1980) *Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900-1942*, Jakarta: LP3ES.
- , (2006) *Partai Islam di Pentas Nasional, Cet. I*, Bandung: Mizan.
- Nurjaman, Asep, (1998) *Kepolitikan Orde Baru Dalam Prespektif Struktural Dan Kultural*, Malang: UMM Press.
- O'Donnel, Gulilermo, (1978) *Reflection on the Paterns of Change in the Bureaucratic Autnoritarian State*, Latin American Research Review, 8.

- Palma, Di., (1990) *To Craft Democracies, An Essay on Democratic Transitions Berkeley*. Los Angelo
- Palmer, Monte (1989) *Dilemmas of Political Development*, Ithaca, Illiones: F.E. Peacock Publisher, Inc.
- Pomper, Gerald, (1966) *Politics: Essay and Reading*, USA: Rinehart and Winston, Inc.
- , (1975) *Voter's Choice: Varieties of American Electoral Behavior*. New York: Dodd, Med Company.
- Pool, Ithiel de Sola, Robert Abelson, and Samuel Popkin, (1964) *Candidates, Issues, and Strategies*. Cambrige: The M.I.T. Press..
- Ramage, E. Douglas, (1995) *Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance*. London and New York: Routledge.
- Ranney, Austin, (1962) *Essay on the Behavioral Studi of Politics*. Urbana: University of Illiois Press.
- Ricklefs, M. C., (1981) *A History of Modern Indonesia*. London: Macmillan.
- Ritzer, George, (1985) *Sosiologi, Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Saduran*. Alimandan. Jakarta: CV. Raja Wali.
- Rose, Ricard dan Ian Mc. Allister, (1990) *The Loyalties of Voters: A Life Time Learning Model*, Sage, London and Newburry Park, CA.
- Rush, M. And Phillip A., (1986) *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Samuel, And Joan M. Nelson, (1976) *No Easy Choice: Political Participation In Developing Countries*, Harvad University Press, USA.
- Samson, Allan A. (1978) *Conception of Politics, Power, and Ideology in Contemporary Indonesian Islam*. In Jackson, Karl D and Pye, Lucian ed. *Political Power and Communication in Indonesia*. Berkeley : University of California Press.
- Sartori, Geovanni, (1959) *Parties and Party System, A Framework for Analysis*. New York: Cambridge University Press.
- Schwarz, Adam (1994) *Nation in Waiting*, Austalia: Allen & Unwin Pty Ltd.
- Smith, D.E. (1971) *Religion, Politics, and Social Change in the Third World*. New York: Free Press.

- Suhardjo, Achmad (1991) *Kemerosotan Perolehan Suara PPP Pada Pemilu 1987*, Studi Kasus di Kabupaten Jombang. Unpublished MA Thesis, Gadjahmada University, Yogyakarta .
- Sukamto, (1992) *Kepemimpinan Kiai dan Kelembagaan Pondok Pesantren*. Unpublished MA Thesis, Gadjahmada University, Yogyakarta.
- Sundhaussen, (1978) "*The Military: Structure, Procedures and Effects on Indonesian Society*". In Jackson, Karl D. and Pye, Lucian ed., *Political Power and Communication in Indonesia*. Berkeley : University of California Press.
- Sherman, Arnold, K. dan Aliza Kolker, (1987) *The Social Bases of Politics*. California: Division of Worswath.
- Shin, Hwan, Yoon. (1989) *Desmitisfying the Capitalist State: Political Patronage, Bureaucratic Interests, and Capitalists-In-Formation in Soeharto's Indonesia*. A Dissertation.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, (1989) *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Silalahi, Harry Tjan, (1977) *The 1977 General Election: The Result and The Role of Traditional Authority Relations in Modern Indonesian Society*, Indonesian Quarterly, Vol. V, No. 3.
- Siregar, A. (penyunting), (1985) *Pemikiran Politik dan Perubahan Sosial, Seri Pemikiran Politik 1*, Jakarta: CV. Akademi Pressindo.
- Strom, Kaare and Swindel, Stephen M., (2002) *Strategic Parliamentary Dissolution*, American Political Science Review 96.
- Surakhmad, Winarno, (1989) *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik*. Bandung: TARSITO.
- Surbakti, Ramlan, (1992) *Memahami Ilmu Politik*. Indonesia: Gramedia Widya Sarana.
- Sulistyo, Hermawan, (2000) *Palu Arit Di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan (1965-1966)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Syamsuddin, D. (editor). (1990) *Muhammadiyah Kini dan Esok*, Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Thohari, Hajriyanto Y., (2002) *Kepemimpinan Nasinal, Antara Primodialisme dan Akuntabilitas, dalam Maruto MD dan Anwari WMK, (editor), Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat, Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.

- Thomson, John B., (1981) *Critical Hermeneutics, A Study in the thought of Paul Ricoeur and Jurgen Habermas*, New York: Cambridge University Press.
- Thum, Garold W. And Edwar G. Janosik (1967) *Parties and The Governmental System, A Book of Reading*, New Jersey: Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs.
- Tilley, R. (2003) Party Identification in Britain: Does Length of Time in the Electorate Affect Strength of Partisanship?, *Journal of Political Science*, Vol. 33 part 2.
- Uhlen, Under (1995) *Democracy and Diffusion, Transitional Lesson Drawing Among Pro-Democracy Actors*, Sweden: Team Offset.
- Vassalo, Francesca and Clyde Wilcox, Party As A Carrier of Ideas, Ricard S Katz and William Crotty , (edt), 2006, *Hand Books of Party Politics*. Calipornia: SAGE Publication.
- Viorina, Morris F. (1978) *Retrospective Voting in American National Election*. Edward Brother Inc.
- Waltzer, Herbert (dkk) (1971) *Ideologies And Modern Politics*, Toronto USA: Dodd, Mead & Company.
- Ward, K.E. (1974) *The 1971 Election in Indonesia: An East Java Case Study*. Monash Paper on Southeast Asia No. 2. Melbourne : Centre of Southeast Asian Studies, Monash University.
- Weber, Max, (1976) *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. London : Allen & Uhwin.
- Wilson, Bryan, (1983) *Religion in Sociological Perspective*. New York : Oxford University Press.
- Willner, Ann Ruth, (1984) *The Spellbinders: Charismatics Political leadership*. Yale: Yale university Press.
- Woshinsky, A., Oliver H., (1995). *Culture and Politics, Introduction to Mass and Elite Political behavior*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.

### Sumber Lain:

- KPUD Kabupaten Malang, Rekapitulasi Hasil pemilu 1999 dan 2004.
- KPUD Kota Malang, Rekapitulasi Hasil pemilu 1999 dan 2004.
- KPUD Kota Batu, Rekapitulasi Hasil pemilu 1999 dan 2004.



---

Jawa Pos 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

Kompas, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

Malang Pos 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

Republika 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik

Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD.

Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan  
Wakil Presiden

WWW.KPU.GO.ID

(Halaman ini sengaja dikosongkan)



# GLOSSARIUM

DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
GOLKAR	: Golongan Karya
HANKAM	: Departemen Pertahanan dan Keamanan
HMI	: Himpunan Mahasiswa Indonesia
ICMI	: Ikatan Cendekiawan Indonesia
KAMMI	: Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia
KASAD	: Kepala Staf Angkatan Darat
KASSOSPOL	: Kepala Staf Sosial Politik
KEPPRES	: Keputusan Presiden
KKN	: Korupsi Kolusi dan Nepotisme
KNIL	: Konin Klijck Netherlans Indische Leger
KNPI	: Komite Nasional Pemuda Indonesia
KODAM	: Komando Daerah Militer
KODIM	: Komando Distrik Militer
KORAMIL	: Komando Rayon Militer
KOREM	: Komando Resort Militer
KOSGORO	: Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong royong
KPK	: Komisi Pemeberantasan Korupsi
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
LEMHANAS	: Lembaga Ketahanan Nasional

LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
MALARI	: Malapetaka 15 Januari
MARA	: Majelis Amanat Rakyat
MASYUMI	: Madjelis Syuro Muslimin Indonesia
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NGO	: Non-Governmental Organisation
NU	: Nahdlatul Ulama
PAN	: Partai Amanat Nasional
Pansus	: Panitia Khusus
Parindra	: Partai Indonesia Raya
Parkindo	: Partai Kristen Indonesia
Parmusi	: Persaudaraan Muslimin Indonesia
PBB	: Partai Bulan Bintang
PBN	: Partai Buruh Nasional
PD	: Partai Demokrat
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PDS	: Partai Damai Sejahtera
Persis	: Persatuan Islam
Perti	: Pergerakan Tarbiyah Islamiyah
PETA	: Pembela Tanah Air
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
Pilpres	: Pemilihan Presiden
PK	: Partai Keadilan
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PKP	: Partai Karya Pembangunan
PKPI	: Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
PKU	: Partai Kesatuan Umat
PNBK	: Partai Nasionalis Banteng Kemerdekaan
PNI	: Partai Nasionalis Indonesia

---

PNU	: Partai Kesatuan Umat
PPP	: Partai Persatuan Indonesia
PRD	: Partai Rakyat Demokratik
PSI	: Partai Sosialis Indonesia
PSB	: Partai Solidaritas Buruh
PSBSI	: Partai Solidaritas Buruh Seluruh Indonesia
PSI	: Partai Sosialis Indonesia
PSII	: Partai Syarikat Islam Indonesia
SARA	: Suku, Agama, Ras, Antar Golongan
SBSI	: Serikat Buruh Seluruh Indonesia
SMID	: Solidaritas Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi
SOKSI	: Sentral Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UMM	: Universitas Muhammadiyah Malang
UI	: Universitas Indonesia
SUNI	: Solidaritas Uni Nasional Indonesia

(Halaman ini sengaja dikosongkan)



# INDEKS

## A

Abangan : 16, 35, 36, 37, 52, 56,  
59, 72, 77, 82, 86, 92, 98, 100,  
105, 122, 173, 179, 190, 197,  
205, 210, 214, 216.

Aliran : 33, 35, 51, 52, 59, 62, 73,  
77, 82, 84, 88, 90, 99, 105,  
109, 111, 129, 132, 156, 162,  
178, 206, 210, 216, 219.

Amin Rais : 86, 135, 149, 156, 193,  
217, 219.

## B

Bantuan : 83, 102, 127, 151, 155,  
181, 185, 193, 196, 198, 199,  
201, 216, 218.

Basis : 8, 13, 21, 33, 66, 86, 89, 91,  
93, 102, 106, 130, 138, 143,  
147, 149, 152, 161, 166, 175,  
178, 180, 190, 193, 198, 199,  
209, 212, 215, 218, 219.

Batu : 60, 84, 94, 102, 129, 139, 143,  
151, 157, 166, 172, 182, 185,  
194.

## C

Constituency : 70.

Converse : 28, 29.

## E

Electoral : 13, 16, 19, 21, 22, 32, 47,  
55, 63, 79, 81, 84, 88, 90, 105,  
161, 181, 185, 199, 206, 212,  
215, 217, 218, 219.

Elite : 138, 145, 147, 153.

## D

Dapil : 69, 84, 88, 163, 167, 170,  
194.

Da'wah : 56.

Demokrasi : 1, 4, 6, 9, 16, 29, 31,  
32, 48, 51, 54, 78, 80, 93, 94,  
111, 138, 145, 149, 182, 188,  
208, 213.

DPR : 67, 70, 92, 126, 134, 170, 181,  
184.

DPRD : 58, 64, 65, 69, 70, 95, 96,  
99, 141, 143, 181, 184, 185,  
198.

**F**

Fanatik : 100, 120, 179, 194.

Feith : 216.

Fenomena : 14, 35, 79, 80, 85, 100, 105, 117, 131, 157, 200, 208, 215.

**G**

Geertz : 35, 38, 41, 85, 88, 128, 156, 162, 174, 17, 206, 216.

Golkar : 52, 58, 60, 62, 66, 69, 73, 79, 82, 87, 90, 94, 96, 99, 122, 127, 133, 141, 145, 162, 174, 178, 193, 200, 209, 210, 218.

Golput : 151.

Gus Dur : 56, 86, 114, 119, 121, 136, 149, 193, 217, 219.

**H**

Hasyim As'ari : 219.

**I**

Ideologi : 8, 10, 13, 20, 36, 41, 47, 51, 59, 65, 72, 92, 102, 105, 121, 135, 138, 146, 153, 167, 171, 175, 186, 189, 193, 200, 206, 211, 217.

Identifikasi : 15, 17, 22, 27, 30, 78, 83, 88, 93, 99, 100, 109, 115, 121, 128, 143, 152, 163, 163, 168, 180, 192, 198, 206, 217.

Islam : 13, 16, 17, 36, 38, 48, 55, 66, 73, 82, 88, 94, 103, 113, 121, 132, 143, 155, 169, 172, 178, 180, 186, 190, 192, 195, 196, 205, 207, 209, 211, 215, 216, 218, 219.

**J**

Jackson : 35, 37, 38, 39, 40, 41, 118, 206.

Jawa : 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 86, 91, 112, 116, 117, 124, 136, 174, 197, 207, 216.

**K**

Komisi : 80, 140, 183.

Konservatif : 9, 38, 172.

KPU : 69, 70, 81, 148.

KPUD : 60, 66, 82, 84, 99, 120, 162, 177, 197.

Kyai : 37, 38, 43, 91, 102, 117, 118, 119, 120, 134, 156, 192, 195, 205.

Kristen : 16, 77, 85, 131, 211.

**L**

Lokal : 41, 42, 43, 67, 63, 82, 90, 109, 112, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 166, 166, 170, 200, 206.

**M**

Malang : 57, 59, 60, 61, 69, 72, 83, 85, 87, 90, 94, 99, 103, 105, 112, 114, 117, 120, 129, 130, 135, 139, 146, 57, 164, 167, 170, 178, 181, 190, 197, 200, 210, 218.

MASYUMI : 37, 50, 51, 52, 55, 80, 90, 91, 121, 132, 156, 170, 206.

Modernis : 37, 38, 56, 60, 72, 83, 92, 115, 136, 171, 205, 209.



Muhammadiyah : 37, 56, 86, 89,  
109, 116, 121, 132, 135, 156,  
172, 196, 205, 219.

## N

Nasionalis : 16, 17, 38, 48, 53, 59,  
63, 78, 80, 87, 94, 105, 123,  
131, 143, 161, 175, 181, 186,  
190, 207, 209, 210, 214, 219.

NU : 53, 54, 86, 90.

## O

Organisasi : 5, 6, 12, 15, 23, 27, 33,  
49, 54, 55, 85, 90, 97, 109,  
110, 115, 130, 135, 146, 149,  
156, 186, 192, 206, 210, 212,  
219.

Ormas : 86, 121, 130, 132, 156.

## P

PAN : 56, 58, 59, 62, 66, 71, 76, 83,  
87, 90, 92, 95, 99, 100, 116,  
121, 122, 133, 135, 149, 153,  
156, 163, 166, 172, 178, 190,  
193, 196, 206, 208, 209, 210,  
215, 217, 218, 219.

PBB : 55, 66, 79, 86, 87, 90, 95, 99,  
121, 136, 170, 172, 178, 190,  
206, 209, 215, 218.

Partai Demokrat : 61, 62, 66, 72,  
79, 81, 83, 84, 87, 96, 99, 10,  
103, 106, 129, 137, 149, 162,  
166, 180, 182, 193, 195, 203,  
210, 211, 217.

PDIP : 59, 60, 61, 64, 71, 79, 83, 86,  
87, 90, 94, 96, 98, 102, 122,  
149, 169, 173, 193, 205, 212,  
217, 218, 219.

PKB : 56, 59, 61, 66, 73, 84, 88, 94,  
100, 113, 120, 134, 149, 162,  
173, 193, 206, 217, 218, 219.

PKS : 55, 62, 69, 79, 85, 95, 135,  
149, 170, 175, 180, 193, 206,  
208, 209, 210, 211, 215, 218.

PPP : 54, 58, 66, 72, 83, 90, 94, 99,  
106, 113, 121, 134, 174, 179,  
190, 206, 209, 215, 218.

## R

Rasional : 22, 27, 32, 40, 93, 144,  
154, 186, 200, 213, 215.

Reformasi : 21, 47, 48, 55, 63, 69,  
77, 82, 93, 95, 101, 134, 154,  
157, 183, 194, 207, 217, 218.

Religius : 8, 65, 66, 83, 87, 197, 205.

Representasi : 1, 4, 54, 81, 86, 92,  
93, 177, 193, 218.

## S

Santri : 16, 35, 36, 37, 38, 51, 52,  
56, 77, 82, 86, 87, 92, 95, 100,  
105, 106, 109, 111, 115, 118,  
120, 123, 128, 130, 155, 171,  
175, 179, 190, 195, 197, 205,  
210, 214, 216, 219.

Sartori : 8, 11, 47, 48, 57, 181, 209.

Sosialis : 13, 16, 187, 213.

Sosiologis : 22, 23, 47, 59, 66, 73,  
86, 94, 103, 133, 136, 147,  
156, 165, 175, 179, 206.

Swing Votes : 60, 79, 82, 99, 105,  
157, 197, 206.

## T

Tahlilan : 112, 115, 120, 144, 156.

Tradisional : 16, 20, 36, 38, 39, 40,  
58, 72, 83, 86, 88, 92, 106,  
112, 119, 131, 155, 175, 180,  
195, 205, 209, 218, 219.

Threshold : 55, 80, 81, 88, 90, 105,  
157, 185, 211, 212, 215, 218.

### U

Uang : 97, 98, 102, 127, 149, 151,  
152, 164, 182, 184, 199, 200,  
201, 208, 211, 218.

Ustad : 192, 195.

### V

Voting : 4, 21, 25, 29, 31, 79, 109,  
139, 141, 157, 206.

Votes : 60, 79, 83, 105, 57, 190, 197,  
206.

### Y

Yasinan : 112, 115, 116, 156.

### Z

Ziarah : 115.

## BIODATA PENULIS



**Asep Nurjaman**, merupakan dosen tetap Universitas Muhammadiyah Malang sejak tahun 1993. Riwayat pendidikan formal di sekolah dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah Garut; SMPN 2 Garut; SMAN 1 Garut, sementara pendidikan perguruan tinggi dimulai dengan menyelesaikan S1 pada jurusan Ilmu Pemerintahan UNPAD Bandung pada tahun 1992; pada tahun 1998 bertepatan dengan reformasi politik di Indonesia menyelesaikan S2 pada Program Studi Ilmu Politik UGM Yogyakarta; dan pada tahun 2012 di almamater yang sama (UGM) menyelesaikan program Doktorat (S3) dalam bidang Ilmu Politik dengan judul Desertasi "*Electoral Volatility Nasional dan Lokal: Studi Tentang Ketidakstabilan Sistem Kepartaian Indonesia*".

Selain menulis buku, Dr. Asep Nurjaman, M.Si yang kelahiran Garut 17 April 1968, juga sering mengisi acara *talk-show* politik di radio dan rajin menulis makalah pada jurnal nasional maupun internasional. Jabatan yang pernah di sandang mulai dari Pembantu Dekan sampai Dekan di FISIP-UMM. Pada saat ini menjabat sebagai Direktur *Center for Election and Political Party (CEPP) uni-link* Universitas Muhammadiyah Malang.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)